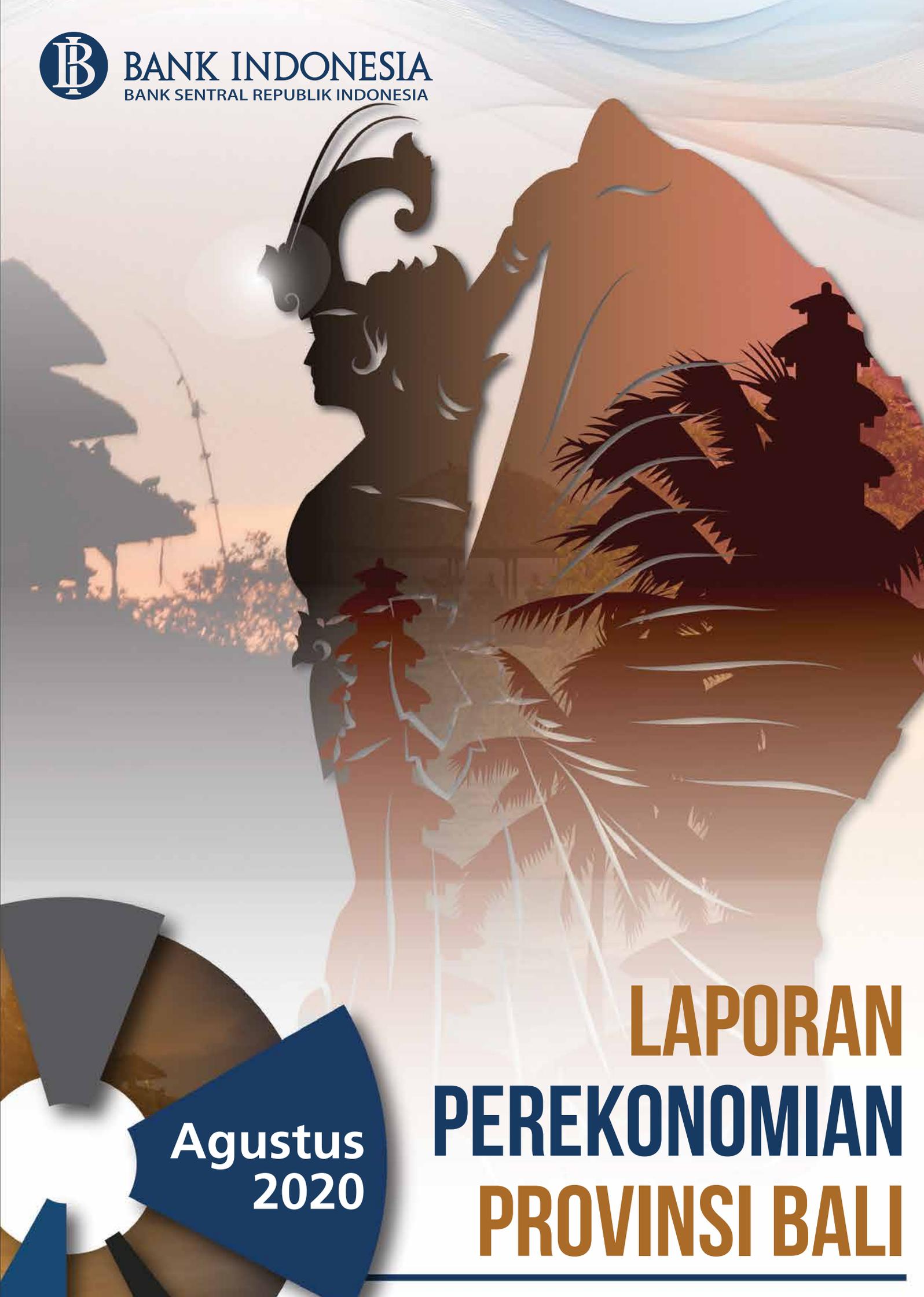




BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



**Agustus
2020**

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI BALI

VISI BANK INDONESIA

"Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia maju."

MISI BANK INDONESIA

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran Kebijakan Bank Indonesia;
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan;
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah;
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif.

NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA

"Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan integritas (*trust and integrity*); (ii) profesionalisme (*professionalism*); (iii) keunggulan (*excellence*); (iv) mengutamakan kepentingan umum (*public interest*); dan (v) koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi)"

VISI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

"Menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan berkontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional"

MISI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

"Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan"

... Memberikan saran kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan ekonomi daerah, yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil kajian yang akurat. . .

(Salah satu dari lima tugas pokok Kantor Perwakilan Bank Indonesia)



BI BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

BI BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali
Jl. Letda Yantular No. 4, Denpasar - 80234
Telp : 62-361-248982, Fax : 62-361-248993 - 222988
Website : http://www.bi.go.id

Agustus
2020

**LAPORAN
PEREKONOMIAN
PROVINSI BALI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Perekonomian Provinsi Bali Agustus 2020 ini tepat pada waktunya. Laporan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* internal maupun eksternal Bank Indonesia mengenai informasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, keuangan, dan sistem pembayaran di Provinsi Bali.

Bank Indonesia berpandangan bahwa perekonomian daerah khususnya Provinsi Bali mempunyai posisi dan peran yang strategis terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dalam upaya menjaga kestabilan nilai Rupiah. Hal ini didasari oleh fakta bahwa pembangunan nasional merupakan agregasi dari pembangunan daerah dan semakin meningkatnya proporsi inflasi daerah dalam menyumbang inflasi nasional. Oleh sebab itu Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, menaruh perhatian yang besar terhadap upaya-upaya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah guna semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional termasuk dalam upaya pengendalian inflasi daerah guna mencapai target inflasi nasional.

Berbagai kajian dilakukan Bank Indonesia sebagai wujud kepedulian terhadap dinamika perekonomian daerah. Diseminasi hasil kajian juga terus dilakukan kepada seluruh *stakeholders* terkait guna mendorong kemajuan perekonomian daerah.

Laporan Perekonomian Provinsi Bali, kajian Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, disusun untuk memaparkan berbagai data dan informasi mengenai perekonomian daerah Bali kepada seluruh pihak terkait. *Stakeholders* dapat memanfaatkan informasi dari Laporan Perekonomian Provinsi Bali ini sesuai dengan kepentingan masing-masing dalam upaya perbaikan kinerja ekonomi Provinsi Bali di masa depan. Kami berharap akan munculnya ide-ide kreatif dan konstruktif yang dapat memberikan nilai tambah serta menjadi stimulus upaya-upaya pengembangan ekonomi daerah melalui kebijakan maupun kajian - kajian lebih lanjut.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang kami perlukan antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya. Kami menyadari bahwa cakupan dan analisis dalam Laporan Perekonomian Provinsi Bali ini masih jauh dari sempurna. Berbagai saran, kritik dan dukungan informasi/data dari Bapak/Ibu sekalian sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas dari kajian ini. Akhir kata, kami berharap semoga Laporan Perekonomian Provinsi Bali ini bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia.

Denpasar, 7 September 2020

KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI BALI

TTD

Trisno Nugroho
Direktur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR TABEL	xii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xvi
TABEL INDIKATOR TERPILIH	xx

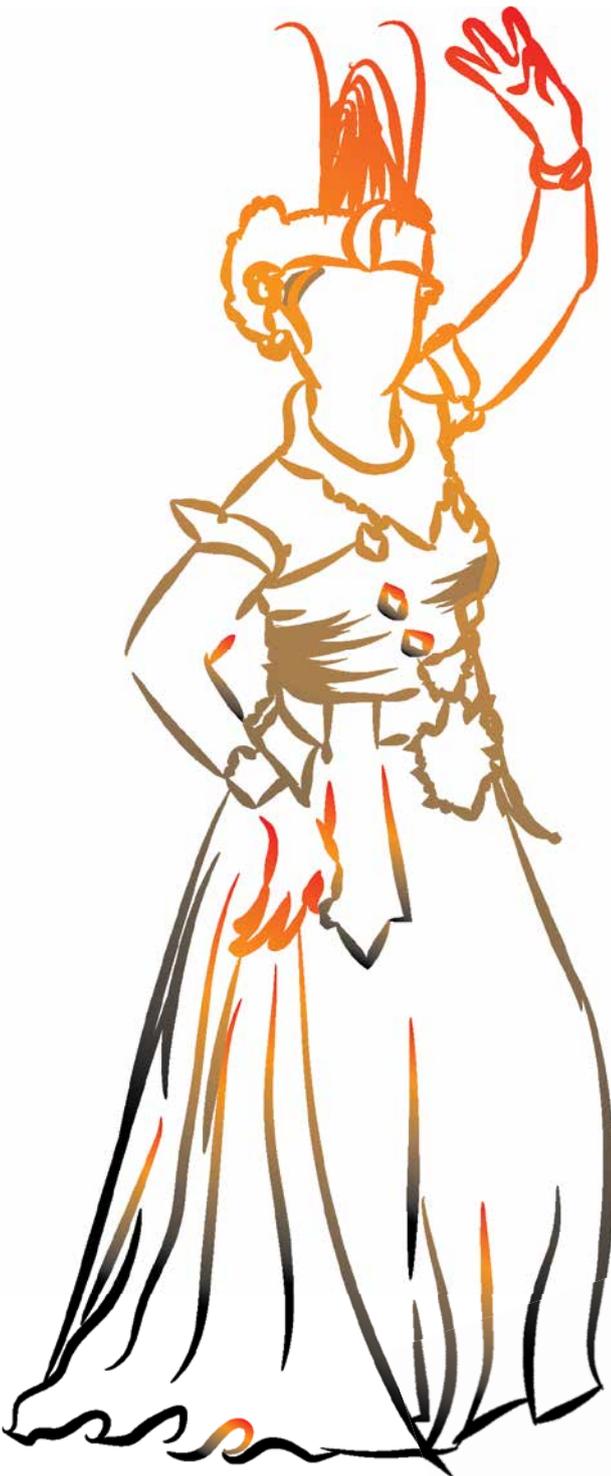
01

BAB I

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

KONDISI UMUM

1.1. KINERJA PEREKONOMIAN BALI	2
1.2. PERTUMBUHAN EKONOMI BALI	
SISI PERMINTAAN	3
1.2.1. Konsumsi	3
1.2.2. Investasi	5
1.2.3. Ekspor Barang dan Jasa	6
1.2.4. Impor Barang dan Jasa	8
1.3. SISI PENAWARAN	9
1.3.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan & Minum	9
1.3.2. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11
1.3.3. Lapangan Usaha Konstruksi	12
1.3.4. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	13
1.3.5. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan	14



02

BAB II

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 23

KONDISI UMUM 24

2.1. PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN

PEMERINTAH WILAYAH BALI 24

2.2. APBD PROVINSI BALI 25

2.2.1. Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Bali 25

2.2.2. Anggaran Dan Realisasi Belanja Dan Transfer Di Provinsi Bali 27

2.3. GABUNGAN ANGGARAN KABUPATEN/KOTA DI BALI 29

2.3.1. Target Anggaran Pendapatan Daerah Gabungan Kabupaten/Kota 29

2.3.2. Target Anggaran Belanja Daerah Gabungan Kabupaten/Kota 29

2.3.3. Realisasi Pendapatan Daerah Gabungan Kabupaten/Kota 29

2.3.4. Realisasi Belanja Gabungan Kabupaten/Kota 31

2.4. APBN PROVINSI BALI 32

03

BAB III

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH 35

KONDISI UMUM 36

3.1 PERKEMBANGAN INFLASI 36

3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI 38

3.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa 38

3.2.2. Inflasi Menurut Kota 42

3.3. INFLASI PERDESAAN 43

3.4. KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI 44



BAB V**PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN
UANG RUPIAH****63****KONDISI UMUM****64****5.1. PERKEMBANGAN SISTEM****PEMBAYARAN DI BALI****64**

5.1.1. Transaksi Sistem Pembayaran Tunai 64

5.1.2. Transaksi Sistem Pembayaran Nontunai 64

5.1.2.1. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank
Indonesia (SKNBI) 64

5.1.2.2. Perkembangan Tolakan Transaksi Cek/BG 65

5.2. UPAYA MENJAGA KELANCARAN SISTEM**PEMBAYARAN****66**5.2.1. Perkembangan Kegiatan Usaha Penukaran
Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di
Provinsi Bali 665.2.2. Perkembangan Inklusi Keuangan
Provinsi Bali 675.2.3. Pengembangan Layanan Keuangan
Nontunai dan Elektronifikasi 69**04****BAB IV****STABILITAS KEUANGAN DAERAH
PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN
DAN UMKM****49****KONDISI UMUM****50****4.1. KINERJA INTERMEDIASI PERBANKAN****50**

4.1.1. Dana Pihak Ketiga 50

4.1.2. Penyaluran Kredit 50

4.2. KINERJA KEUANGAN KORPORASI**52**

4.2.1. Sumber Kerentanan Korporasi 52

4.2.2. Kondisi Rentabilitas dan Likuiditas Korporasi 52

4.2.3. Penyaluran Kredit Korporasi 53

4.3. KINERJA KEUANGAN RUMAH TANGGA**53**

4.3.1. Sumber Kerentanan Rumah Tangga 53

4.3.2. Kinerja Keuangan Rumah Tangga 53

4.3.3. Penyaluran Kredit Rumah Tangga 54

4.3.3.1. Penyaluran Kredit Kepemilikan Properti
Rumah dan Apartemen (KPR+KPA) 554.3.3.2. Penyaluran Kredit Kepemilikan Kendaraan
Bermotor dan Multiguna 55**4.4. PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN
DAN UMKM****56**

4.4.1. Penyaluran Kredit UMKM 56



06

BAB VI

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

73

KONDISI UMUM

74

6.1. KETENAGAKERJAAN

74

6.1.1. Kondisi Ketenagakerjaan di Bali

74

6.2. KESEJAHTERAAN

78

6.2.1. Perkembangan Angka Kemiskinan Bali

78

6.2.2. Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

79

6.2.3. Ketimpangan Pengeluaran Penduduk

79

6.2.4. Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan

80

6.3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

81

07

BAB VII

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

83

KONDISI UMUM

84

7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI BALI

84

7.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Triwulan

III 2020

84

7.1.2. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi 2020

85

7.1.3. Risiko Pertumbuhan Ekonomi

87

7.2. PROSPEK INFLASI BALI

87

7.2.1. Perkiraan Inflasi Triwulan IV 2020

87

7.2.2. Perkiraan Inflasi 2020

88

DAFTAR ISTILAH

96

BOKS

BOKS 1 POTENSI DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN

KOMODITAS KOPI DI BALI 16

BOKS 2 PERKEMBANGAN RESTRUKTURISASI KREDIT

DEBITUR TERDAMPAK COVID-19 DI BALI 58

BOKS 3 PROSPEK PARIWISATA

BALI DI ERA TATANAN KEHIDUPAN BARU 90



DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1. Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nasional	2	Grafik I.36. Perkembangan Kegiatan Usaha Konstruksi	12
Grafik I.2. Pangsa Ekonomi Bali Terhadap Nasional	2	Grafik I.37. Pergerakan Mobilitas Terkait Kegiatan LU Perdagangan	13
Grafik I.3. Hasil Survei Konsumen	4	Grafik I.38. Perkembangan Penjualan Eceran	13
Grafik I.4. Hasil Survei Penjualan Eceran	4	Grafik I.39. <i>Likert Scale</i> Penjualan Domestik	13
Grafik I.5. Perkembangan Kredit Konsumsi	5	Grafik I.40. Perkembangan Kegiatan Usaha dan Kredit Perdagangan	13
Grafik I.6. Perkembangan Impor Barang Konsumsi	5	Grafik I.41. Perkembangan Penjualan Kendaraan dan KKB	14
Grafik I.7. Perkembangan Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali	5	Grafik I.42. Perkembangan Kedatangan Penumpang Bandara Ngurah Rai	14
Grafik I.8. Perkembangan Realisasi Belanja APBD Kab/ Kota di Bali	5	Grafik I.43. Kedatangan Kargo di Bandara IG Ngurah Rai	14
Grafik I.9. Perkembangan Realisasi PMDN	6	Grafik I.44. Perkembangan Kegiatan Usaha Transportasi	14
Grafik I.10. Perkembangan Realisasi PMA	6	Grafik I.45. Perkembangan Kedatangan Pesawat dan Penumpang Domestik di Bandara IG Ngurah Rai	15
Grafik I.11. Perkembangan Kredit Investasi	6	Grafik I.46. Pergerakan Mobilitas di Pusat Transportasi Umum	15
Grafik I.12. <i>Likert</i> Investasi, Liaison	6	Grafik II.1. Komposisi Realisasi PAD Provinsi Bali 2020	26
Grafik I.13. Perkembangan Kedatangan Penumpang Internasional di Bandara Ngurah Rai	7	Grafik II.2. Komposisi Realisasi Pajak Daerah Provinsi Bali 2020	26
Grafik I.14. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali	7	Grafik II.3. Serapan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Bali Per Triwulan (2015-2020)	28
Grafik I.15. Jumlah Kedatangan Penumpang Pelabuhan Bena dan Celukan Bawang	7	Grafik II.4. Perkembangan Realisasi Belanja dan Transfer Provinsi Bali (2018-2020)	28
Grafik I.16. Perkembangan Ekspor Barang Bali	7	Grafik II.5. Persentase Realisasi Pendapatan Kabupaten/ Kota Tahun 2018-2020	30
Grafik I.17. <i>Likert Scale</i> Penjualan Ekspor	7	Grafik II.6. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020	30
Grafik I.18. Pangsa Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Utama	8	Grafik II.7. Serapan Belanja 9 Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2019-2020	31
Grafik I.19. Pertumbuhan Nilai Ekspor 3 Negara Tujuan Utama	8	Grafik III.1. Inflasi Kota di Bali (%yoy)	36
Grafik I.20. Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama pada Triwulan II 2020	8	Grafik III.2. Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (%yoy)	36
Grafik I.21. Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama	8	Grafik III.3. Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau di Provinsi Bali	38
Grafik I.22. Perkembangan Kedatangan Kargo Internasional di Bandara Ngurah Rai	9	Grafik III.4. Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau di Provinsi Bali	38
Grafik I.23. Perkembangan Impor Barang Konsumsi	9	Grafik III.5. Perkembangan Harga Daging Ayam Ras (Rp/Kg)	38
Grafik I.24. Perkembangan Impor Barang Setengah Jadi	9	Grafik III.6. Perkembangan Harga Cabai Merah Besar (Rp/Kg)	38
Grafik I.25. Perkembangan Impor Barang Modal	9	Grafik III.7. Inflasi Triwulanan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki di Prov. Bali	39
Grafik I.26. Perkembangan Kunjungan Wisman	10	Grafik III.8. Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki di Prov. Bali	39
Grafik I.27. Kedatangan Penumpang di Bandara IG Ngurah Rai	10	Grafik III.9. Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali	39
Grafik I.28. Kedatangan Penumpang di Pelabuhan Bena dan Celukan Bawang	10	Grafik III.10. Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar di Prov. Bali	39
Grafik I.29. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang	11	Grafik III.11. Inflasi Triwulanan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan RT di Provinsi Bali	39
Grafik I.30. Perkembangan Kegiatan Usaha Akmamin	11		
Grafik I.31. Pergerakan Mobilitas Terkait Kegiatan LU Akmamin	11		
Grafik I.32. Perkembangan Harga Jual dan Kinerja PDRB LU Pertanian	11		
Grafik I.33. Nilai Tukar Petani	12		
Grafik I.34. Perkembangan Kegiatan Usaha dan Kredit Pertanian	12		
Grafik I.35. Perkembangan Penjualan Semen	12		

Grafik III.12. Inflasi Tahunan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan RT di Provinsi Bali	39	Tahun 2019	54
Grafik III.13. Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Provinsi Bali	40	Grafik IV.13. Indeks Keyakinan Konsumen	54
Grafik III.14. Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Provinsi Bali	40	Grafik IV.14. Perkembangan Pendapatan Selama COVID-19	54
Grafik III.15. Inflasi Triwulanan Transportasi di Provinsi Bali	40	Grafik IV.15. Respon terhadap Penurunan Pendapatan	54
Grafik III.16. Inflasi Tahunan Kelompok Transportasi di Provinsi Bali	40	Grafik IV.16. Perkembangan Suku Bunga dan Kredit Multiguna	54
Grafik III.17. Inflasi Triwulanan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (% ,qtq)	40	Grafik IV.17. Pertumbuhan Kredit Konsumsi	55
Grafik III.18. Inflasi Tahunan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (% ,yoy)	40	Grafik IV.18. Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga	55
Grafik III.19. Inflasi Triwulanan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya di Provinsi Bali (% ,qtq)	41	Grafik IV.19. Pertumbuhan Kredit UMKM	56
Grafik III.20. Inflasi Tahunan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya di Provinsi Bali (% ,yoy)	41	Grafik V.1. Pergerakan <i>Inflow</i> , <i>Outflow</i> , <i>Netflow</i> , Inflasi dan PDRB	65
Grafik III.21. Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan di Provinsi Bali (% ,qtq)	41	Grafik V.2. Perkembangan Nominal Kliring di Bali	66
Grafik III.22. Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan di Provinsi Bali (% ,yoy)	41	Grafik V.3. Perkembangan Volume Kliring di Bali	66
Grafik III.23. Inflasi Triwulanan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran di Provinsi Bali (% ,qtq)	42	Grafik V.4. Perkembangan Nominal RTGS di Bali	66
Grafik III.24. Inflasi Tahunan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran di Provinsi Bali (% ,yoy)	42	Grafik V.5. Perkembangan Volume RTGS di Bali	66
Grafik III.25. Inflasi Triwulanan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya di Provinsi Bali (% ,qtq)	42	Grafik V.6. Perkembangan Cek dan Bilyet Giro di Bali	67
Grafik III.26. Inflasi Tahunan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya di Provinsi Bali (% ,yoy)	42	Grafik V.7. Perkembangan Transaksi Jual – Beli Valas di Provinsi Bali	67
Grafik III.27. Bobot Tahun Dasar (2018=100) Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar	43	Grafik V.8. Perkembangan Kunjungan Wisman ke Provinsi Bali	67
Grafik III.28. Bobot Tahun Dasar (2018=100) Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja	43	Grafik V.9. Jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali	67
Grafik III.29. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)	45	Grafik VI.1. Perkembangan <i>Job Vacancy Index</i>	74
Grafik III.30. Perkembangan Inflasi Perdesaan (ytd)	45	Grafik VI.2. Jumlah Pekerja Terdampak COVID-19	74
Grafik IV.1. Pertumbuhan DPK dan Komponennya	50	Grafik VI.3. Hasil SKDU Triwulan II 2020	75
Grafik IV.2. Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaanya	50	Grafik VI.4. Hasil Liaison Triwulan II 2020	75
Grafik IV.3. Siklus Pertumbuhan Ekonomi dan Kredit Perbankan Bali	51	Grafik VI.5. Perkembangan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali	75
Grafik IV.4. Perkembangan Kredit Investasi dan Skala <i>Likert</i>	51	Grafik VI.6. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	76
Grafik IV.5. Perkembangan LAR Sektoral	51	Grafik VI.7. Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	76
Grafik IV.6. Perkembangan NPL dan LAR Kredit di Bali	51	Grafik VI.8. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Utama	76
Grafik IV.7. Perkembangan LDR	52	Grafik VI.9. Komposisi Tenaga Kerja Sektor Utama	76
Grafik IV.8. Skala <i>Likert</i> Penjualan Domestik dan Ekspor	52	Grafik VI.10. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Formal & Informal	77
Grafik IV.9. Kondisi Rentabilitas Korporasi	52	Grafik VI.11. Komposisi Tenaga Kerja Formal dan Informal	77
Grafik IV.10. Kondisi Likuiditas Korporasi	52	Grafik VI.12. Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Bali	78
Grafik IV.11. Perkembangan kredit, NPL dan LAR Korporasi	53	Grafik VI.13. Indikator dan Keterkaitan Kemiskinan di Provinsi Bali	78
Grafik IV.12. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha		Grafik VI.14. Hasil Survei Konsumen Triwulan II 2020	79
		Grafik VI.15. Perkembangan Gini Ratio Bali dan Nasional	79
		Grafik VI.16. Distribusi Pendapatan Perkapita Penduduk	79
		Grafik VI.17. NTP Bali, Indeks yang Diterima (IT), dan Indeks yang Dibayar (IB)	80
		Grafik VI.18. Perbandingan NTP Bali dan Nasional	80
		Grafik VI.19. Pertumbuhan NTP Bali	80
		Grafik VI.20. Perbandingan IT dan IB Bali	80
		Grafik VI.21. Perkembangan IPM Provinsi Bali	81
		Grafik VI.22. Perbandingan IPM Bali dan Nasional	81
		Grafik VII.1. Indeks Ekspektasi Konsumen	84

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Perkembangan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bali Sisi Permintaan (% , yoy)	4	Tabel VI.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi Utama yang Ditamatkan	75
Tabel I.2. Struktur dan Perkembangan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bali Sisi Penawaran (% , yoy)	10	Tabel VI.3. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	76
Tabel II.1. Target Anggaran Belanja Perubahan Pemerintah di Bali Tahun 2019-2020	24	Tabel VI.4. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut LU (Ribu Orang)	77
Tabel II.2. Realisasi Belanja Pemerintah di Bali Triwulan I Tahun 2019-2020	25	Tabel VI.5. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (Ribu Orang)	77
Tabel II.3. Target Anggaran Pendapatan Pemerintah di Bali Tahun 2019-2020	25	Tabel VI.6. Perkembangan Indikator Kemiskinan Provinsi Bali 2017 – 2020	78
Tabel II.4. Realisasi Pendapatan Pemerintah di Bali Triwulan II Tahun 2019-2020	25	Tabel VII.1. <i>Outlook</i> Ekonomi Dunia dan Negara Mitra Dagang Utama Bali 2020-2021	86
Tabel II.5. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2019-2020	26		
Tabel II.6. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2019-2020	28		
Tabel II.7. Target Anggaran Pendapatan Daerah 9 Kabupaten/ Kota Tahun 2019-2020	29		
Tabel II.8. Target Anggaran Belanja Daerah 9 Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020	29		
Tabel II.9. Realisasi Pendapatan Daerah Gabungan Kabupaten/ Kota Triwulan II Tahun 2019-2020	30		
Tabel II.10. Realisasi Belanja Daerah 9 Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2019-2020	31		
Tabel II.11. Target dan Realisasi Belanja APBN di Provinsi Bali Tahun 2019-2020	32		
Tabel III.1. Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran	43		
Tabel III.2. <i>Ranking</i> Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/ Deflasi di Kota Denpasar Tw II 2020 (yoy)	43		
Tabel III.3. Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran	44		
Tabel III.4. <i>Ranking</i> Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/ Deflasi di Kota Singaraja Tw II 2020 (yoy)	44		
Tabel III.5. Kegiatan TPID Triwulan II 2020	45		
Tabel IV.1. Perkembangan Kredit KPR+KPA	55		
Tabel IV.2. Perkembangan KKB dan Multiguna	55		
Tabel IV.3. Perkembangan Kredit UMKM Sektoral	56		
Tabel IV.4. Pangsa Kredit UMKM Spasial	57		
Tabel IV.5. Pertumbuhan Kredit UMKM Spasial	57		
Tabel V.1. Perkembangan <i>Inflow - Outflow</i> Provinsi Bali	65		
Tabel V.2. Perkembangan Indikator SKNBI di Wilayah Bali	65		
Tabel V.3. Rasio Jumlah Kantor dan ATM per 100.000 Penduduk	68		
Tabel V.4. Rasio Jumlah Kantor dan ATM per 1000 km ²	69		
Tabel V.5. Indikator <i>Banking Penetration</i>	69		
Tabel VI.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama	74		

Halaman ini sengaja dikosongkan

INDIKATOR PEREKONOMIAN BALI

PERTUMBUHAN EKONOMI

-1,14%
(yoy)

TW I 2020

Pertumbuhan Ekonomi Bali pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi ditengah pandemi COVID-19. Ekonomi Bali tumbuh -10,98% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar -1,14% (yoy)

-10,98%
(yoy)

TW II 2020

PERKEMBANGAN INFLASI

3,04%
(yoy)

TW I 2020

Inflasi Bali pada triwulan II 2020 melandai dibanding triwulan sebelumnya. Inflasi Bali pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 2,18% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 3,04% (yoy)

2,18%
(yoy)

TW II 2020

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Angkatan Kerja (Juta Orang)

Februari 2019	Agustus 2019	Februari 2020
2,54	2,47	2,59

Kemiskinan (%)

Maret 2019	September 2019	Maret 2020
3,79	3,61	3,78

Pengangguran Terbuka (%)

Februari 2019	Agustus 2019	Februari 2020
1,19	1,52	1,21

Gini Ratio

Maret 2019	September 2019	Maret 2020
0,366	0,370	0,369

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

Inflow

5,76 Rp Triliun TW I 2020	3,77 Rp Triliun TW II 2019
--	---

Outflow

4,02 Rp Triliun TW I 2020	2,35 Rp Triliun TW II 2020
--	---

Net Inflow/ (Net Outflow)

1,74 Rp Triliun TW I 2020	1,42 Rp Triliun TW II 2020
--	---

12,15 Rp Triliun TW I 2020	8,20 Rp Triliun TW II 2020
---	---

Nominal Kliring

380 Ribu Lembar TW I 2020	265 Ribu Lembar TW II 2020
--	---

Volume Kliring

KEUANGAN PEMERINTAH

Serapan Realisasi Pendapatan Daerah

APBD Provinsi Bali	Gabungan APBD Kab/ Kota	Total Serapan Realisasi Pendapatan
TW II 2019	TW II 2019	TW II 2019
53,31%	42,80%	45,32%
TW II 2020	TW II 2020	TW II 2020
54,38%	50,61%	51,49%

Serapan Realisasi Belanja Daerah

APBN Wilayah Bali	APBD Provinsi Bali	Gabungan APBD Kab/ Kota	Total Serapan Realisasi Belanja
TW II 2019	TW II 2019	TW II 2019	TW II 2019
25,13%	27,06%	34,33%	30,42%
TW II 2020	TW II 2020	TW II 2020	TW II 2020
22,50%	42,28%	38,05%	33,33%

STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Kredit Rumah Tangga (Pertumbuhan)

TW I 2020 **7,28%** (yoy)
 TW II 2020 **2,83%** (yoy)



Kredit Korporasi (NPL)

TW I 2020 **7,13%** (yoy)
 TW II 2020 **6,17%** (yoy)

Kredit Rumah Tangga (NPL)

TW I 2020 **1,79%**
 TW II 2020 **2,16%**



Kredit UMKM (Pertumbuhan)

TW I 2020 **6,79%** (yoy)
 TW II 2020 **-2,51%** (yoy)

Kredit Korporasi (Pertumbuhan)

TW I 2020 **6,96%** (yoy)
 TW II 2020 **-0,55%** (yoy)



Kredit UMKM (NPL)

TW I 2020 **3,10%**
 TW II 2020 **3,19%**

PROSPEK PEREKONOMIAN BALI

Pertumbuhan Ekonomi

TW III 2020
 Membaik Dibanding Triwulan Sebelumnya

TW IV 2020
 Masih Kontraksi, Membaik Dibanding Triwulan Sebelumnya

Tahun 2020
 Menurun dibandingkan tahun 2019

Inflasi

TW III 2020
3%±1% (yoy)

TW IV 2020
3%±1% (yoy)

Tahun 2020
 Dibawah sasaran nasional
3%+/- 1% (yoy)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja ekonomi Provinsi Bali pada triwulan II 2020 tumbuh sebesar -10,98% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan I 2020 yang sebesar -1,14% (yoy)

Selanjutnya, ekonomi Bali pada triwulan III 2020 diperkirakan akan sedikit membaik dibanding triwulan sebelumnya

Realisasi belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Wilayah Bali pada triwulan II tahun 2020 tercatat sebesar Rp11,43 triliun atau tumbuh -6,61% (yoy). Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi belanja triwulan II tahun 2019 yang sebesar 11,78% (yoy), dengan nominal Rp12,24 triliun

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN II 2020

Ditengah pandemi COVID-19, kinerja ekonomi Bali pada triwulan II 2020 terkontraksi makin dalam. Ekonomi Bali tercatat tumbuh sebesar -10,98% (yoy) pada triwulan II 2020, lebih rendah dibanding triwulan I 2020 yang sebesar -1,14% (yoy). Angka ini juga lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama, sebesar -5,32% (yoy). Dari sisi permintaan, kontraksi kinerja ekonomi Bali bersumber dari seluruh komponen yaitu konsumsi RT, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor luar negeri. Hal ini disebabkan oleh masih berlangsungnya pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan kinerja pariwisata sehingga menekan daya beli, menahan konsumsi pemerintah ditengah pendapatan yang menurun, menyulitkan realisasi investasi ditengah penerapan protokol *physical distancing*, serta menurunkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Selanjutnya, dari sisi penawaran, kontraksi yang makin dalam juga bersumber dari seluruh lapangan usaha (LU). Kinerja LU Akmamin dan LU Transportasi kontraksi karena kunjungan wisatawan yang menurun signifikan ditengah kekhawatiran penyebaran COVID-19. Kinerja LU Perdagangan juga kontraksi makin dalam karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat termasuk pembatasan jam operasional pusat perdagangan. Kinerja LU Kontruksi juga tertahan akibat pengerjaan proyek menjadi sulit ditengah perlunya *physical distancing*. Kinerja LU pertanian juga kontraksi karena melemahnya permintaan

PRAKIRAAN EKONOMI TRIWULAN III 2020

Ekonomi Bali pada triwulan III 2020 diperkirakan akan sedikit membaik dibanding triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pelonggaran kebijakan pariwisata Bali untuk wisatawan domestik seiring dengan dimulainya tatanan kehidupan era baru, didukung dengan kebijakan sertifikasi pelaku usaha pariwisata. Selain itu, pembangunan proyek strategis juga tetap berjalan sesuai jadwal.

PERKEMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH

Realisasi belanja pemerintah (APBD & APBN) di Wilayah Bali pada triwulan II tahun 2020 tercatat sebesar Rp11,43 triliun atau tumbuh -6,61% (yoy). Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi belanja triwulan II tahun 2019 yang tumbuh sebesar 11,78% (yoy), dengan nominal Rp12,24 triliun. Penurunan realisasi belanja tersebut, terutama disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan realisasi belanja di kategori APBN yang mengalami kontraksi 6% dan APBD Kabupaten/Kota yang terkontraksi sebesar 15,34% pada triwulan II 2020. Kondisi ini seiring dengan kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan COVID-19.

Realisasi pendapatan daerah di Bali pada triwulan II tahun 2020 terkontraksi sebesar 12,78% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II 2019 yang tumbuh sebesar 8,44%. Realisasi pendapatan yang menurun tersebut bersumber dari penurunan realisasi APBD Kabupaten/Kota, maupun APBD provinsi. Kondisi ini terutama disebabkan oleh

melambatnya realisasi komponen Dana Perimbangan, sejalan dengan melambatnya realisasi DAK. Sejalan dengan hal tersebut, realisasi komponen retribusi daerah juga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh penurunan kegiatan pariwisata sebagai dampak COVID-19

Realisasi pendapatan daerah di Wilayah Bali pada triwulan II tahun 2020 yang tercatat tumbuh 12,78% (yoy), atau lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan II tahun 2019 yang sebesar 8,44% (yoy).

PERKEMBANGAN INFLASI TRIWULAN II 2020

Realisasi inflasi Provinsi Bali pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 2,18% (yoy), melandai dibandingkan dengan realisasi inflasi triwulan I 2020 yang sebesar 3,04% (yoy). Namun demikian, realisasi inflasi tersebut lebih tinggi dibanding dengan realisasi inflasi Nasional pada periode yang sama (1,96% (yoy)). Melandainya inflasi disebabkan oleh turunnya tekanan harga di sebagian besar kelompok barang.

Realisasi inflasi Provinsi Bali pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 2,18% (yoy), menurun dibandingkan dengan realisasi inflasi triwulan I 2020 yang sebesar 3,04% (yoy).

PRAKIRAAN INFLASI TRIWULAN III 2020

Tekanan inflasi Bali pada triwulan III 2020 diprakirakan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Turunnya tekanan inflasi bersumber dari masih lemahnya permintaan, terutama disebabkan oleh belum pulihnya industri pariwisata. Namun demikian, kondisi cuaca seperti gelombang tinggi dapat berisiko meningkatkan harga ikan laut dan mengganggu distribusi pasokan makanan.

Inflasi Bali pada triwulan III 2020 diprakirakan melambat dibanding dengan triwulan II 2020, dan berada dalam sasaran inflasi Nasional, yaitu 3%±1%(yoy).

PERKEMBANGAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Secara umum, kondisi stabilitas keuangan di Bali pada triwulan II 2020 masih terjaga. DPK dan Kredit pada triwulan II 2020 masih tumbuh positif, meski melambat seiring dengan penurunan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Wilayah Bali pada triwulan II 2020 tercatat tumbuh sebesar 0,91% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 9,44% (yoy). Sementara itu, penyaluran Kredit pada triwulan II 2020 tercatat tumbuh 2,58% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,36% (yoy). Kualitas kredit di Wilayah Bali pada triwulan II 2020 masih terjaga. Hal ini tercermin dari *Non Performing Loan* (NPL) Gross, yang menurun pada triwulan II 2020 menjadi 3,66% dari 3,80% pada triwulan sebelumnya.

Penghimpunan DPK di Wilayah Bali pada triwulan II 2020 tercatat tumbuh sebesar 0,91% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 9,44% (yoy).

Penyaluran kredit korporasi pada triwulan II 2020 berkontraksi sebesar 0,55%(yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,96%(yoy). Dari sisi penggunaan, menurunnya kinerja penyaluran kredit korporasi bersumber dari penyaluran kredit investasi. Berdasarkan jenis LU, menurunnya kredit korporasi terutama bersumber dari melambatnya kredit LU Akmamin dan kontraksi kredit LU Perdagangan. Kualitas kredit korporasi sedikit membaik. Pada triwulan II 2020, NPL kredit korporasi tercatat sebesar 6,17%, lebih rendah dibandingkan dengan NPL triwulan sebelumnya (7,13%).

Penyaluran kredit korporasi pada triwulan II 2020 tumbuh -0,55%(yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,96%(yoy).

Pada triwulan II 2020, kredit rumah tangga tumbuh 2,83%(yoy), melambat dari triwulan lalu yang sebesar 7,28% (yoy). Melambatnya kredit rumah tangga bersumber terutama dari melambatnya kredit multiguna, seiring dengan mulai meningkatnya

Pada triwulan II 2020, kredit rumah tangga tumbuh 2,83%(yoy), menurun dari triwulan lalu yang sebesar 7,28% (yoy).

Pada triwulan II 2020 kredit UMKM tumbuh -2,51%(yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,79% (yoy).

Perkembangan kinerja transaksi tunai pada triwulan II 2020 di Provinsi Bali menunjukkan terjadinya net inflow sebesar Rp1,42 triliun.

Perkembangan nontunai pada triwulan II 2020 menunjukkan perlambatan dibanding triwulan sebelumnya, seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan nominal transaksi KUPVA BB di Provinsi Bali menurun dari 2,66% (yoy) pada triwulan I 2020 menjadi sebesar -87,50% (yoy) pada Triwulan II 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat dari 1,19% pada Februari 2019 menjadi 1,21% pada Februari 2020.

suku bunga kredit tersebut. Risiko kredit RT masih terjaga cukup baik, tercermin dari tingkat NPL yang masih cukup rendah dan berada di bawah 5%. Namun demikian, NPL pada triwulan II 2020 sedikit meningkat (2,16%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (1,79%).

Kredit UMKM berkontraksi pada triwulan II 2020, sejalan dengan penurunan kinerja ekonomi Bali. Kredit UMKM berkontraksi sebesar 2,51% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,79% (yoy). Menurunnya kredit UMKM di Bali terutama bersumber dari kredit UMKM LU Perdagangan (pangsa 55,67%) dan LU Akmamin (pangsa 11,49%). Meskipun kredit UMKM berkontraksi, namun kualitas kredit masih terjaga. NPL kredit UMKM pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 3,19%, sedikit meningkat dibandingkan triwulan lalu (3,10%), namun masih terjaga di bawah 5%.

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

Perkembangan transaksi tunai dan non tunai cenderung melambat. Perkembangan kinerja transaksi tunai pada triwulan II 2020 di Provinsi Bali menunjukkan terjadinya *net inflow* sebesar Rp1,42 triliun. Kondisi tersebut disebabkan oleh kinerja ekonomi Bali yang mengalami kontraksi cukup dalam pada triwulan berjalan.

Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan transaksi nontunai juga menunjukkan perlambatan. Pada triwulan II 2020, volume transaksi melalui SKNBI tercatat sebesar 264,87 ribu lembar atau tumbuh -35,83 (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan I 2020 yang tumbuh sebesar -13,10% (yoy). Nominal transaksi SKNBI tercatat sebesar Rp8,2 triliun atau tumbuh -31,37% (yoy) pada triwulan II 2020. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2020 yang tumbuh sebesar -3,57% (yoy). Transaksi Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) juga mengalami perlambatan. Nominal BI-RTGS tercatat sebesar Rp27,13 triliun atau tumbuh -14,89% (yoy) pada triwulan II 2020, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp31,94 triliun atau tumbuh sebesar 15,65%. Volume transaksi melalui BI-RTGS tercatat sebesar 16,25 ribu lembar atau tumbuh -14,57 (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan I 2020 yang tumbuh sebesar 1,47% (yoy).

Sementara itu, perkembangan nominal transaksi penyelenggara KUPVA BB menurun. Nominal transaksi penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali pada Triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 87,50% (yoy), menurun dibandingkan triwulan I 2020 yang tercatat tumbuh sebesar 2,66 % (yoy).

PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sedikit meningkat. Perkembangan TPT di Bali pada Februari 2020 tercatat menunjukkan peningkatan dari sebesar 1,19% pada Februari 2019 menjadi 1,21% (yoy) pada Februari 2020. Peningkatan angka pengangguran disebabkan oleh peningkatan angkatan kerja yang belum mampu diimbangi oleh peningkatan kesempatan kerja.

Jumlah penduduk miskin di Bali pada Maret 2020 mengalami peningkatan dibandingkan September 2019. Persentase penduduk miskin Bali pada Maret 2020 tercatat sebesar 3,78%, atau sejumlah 165,19 ribu orang, meningkat dibandingkan dengan periode September 2019 yang sebesar 3,61% (156,91 ribu orang). Sejalan dengan itu, rasio gini provinsi Bali meningkat dari 0,366 pada September 2019 menjadi 0,369 pada Maret 2020.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Bali pada periode Maret 2020 menunjukkan peningkatan dibanding September 2019.

PROSPEK EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan IV 2020 diperkirakan membaik dibanding triwulan III 2020 seiring dengan implementasi kebijakan tatanan era kehidupan baru. Dari sisi permintaan, membaiknya perekonomian terutama didorong oleh konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, dan investasi. Sementara itu, pemulihan ekspor luar negeri masih terbatas. Dari sisi penawaran, perbaikan ekonomi bersumber dari peningkatan kinerja lapangan usaha utama Utama. Sementara pertumbuhan ekonomi Bali 2020 akan lebih rendah dibandingkan tahun 2019.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan IV 2020 diperkirakan membaik dibanding triwulan III 2020, sementara 2020 lebih rendah dari 2019.

PROSPEK INFLASI BALI

Sejalan dengan perkiraan membaiknya perekonomian pada triwulan IV 2020, tekanan inflasi diperkirakan sedikit meningkat. Namun, inflasi Bali diperkirakan masih berada dalam sasaran inflasi nasional $3\% \pm 1\%$ (yoy).

Inflasi Bali triwulan IV 2020 diperkirakan akan meningkat dibanding triwulan sebelumnya namun masih akan berada dalam sasaran inflasi nasional $3\% \pm 1\%$ (yoy).

TABEL INDIKATOR TERPILIH

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI BALI

INDIKATOR	2017				2017	2018				2018	2019				2019	2020	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (% yoy)																	
A. Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha:	6,25	5,92	6,16	3,99	5,56	5,55	6,01	6,13	7,59	6,33	6,01	5,69	5,34	5,51	5,63	-1,14	-10,98
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,24	4,65	3,80	-1,43	2,73	5,08	3,96	4,48	6,69	5,06	2,35	7,06	3,64	2,18	3,79	0,05	-2,26
Pertambangan dan Penggalian	2,54	0,39	1,91	-10,49	-1,44	-6,26	-3,12	-4,00	3,44	-2,65	-4,10	-8,12	1,04	6,56	-1,23	3,24	-0,10
Industri Pengolahan	3,58	-0,06	0,46	-0,69	0,80	1,36	5,46	6,73	9,16	5,67	9,60	7,20	4,32	6,30	6,83	-7,95	-7,92
Pengadaan Listrik dan Gas	0,40	-0,16	8,40	13,50	5,48	4,90	6,52	0,50	-3,51	1,94	1,50	1,43	3,09	11,95	4,52	8,07	-21,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,82	4,86	3,05	1,16	2,72	-1,88	2,92	2,14	4,87	2,03	6,04	4,09	6,22	7,30	5,91	6,37	-0,14
Konstruksi	6,27	7,15	8,39	9,52	7,87	9,77	10,36	12,01	9,16	10,33	8,85	8,03	6,56	6,28	7,39	2,92	-2,42
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,48	8,23	9,60	5,11	7,84	4,84	5,44	7,24	12,67	7,57	7,92	10,04	7,89	4,13	7,43	-1,67	-5,90
Transportasi dan Pergudangan	4,89	5,44	6,37	3,28	5,00	6,78	6,07	3,15	8,80	6,15	5,03	3,56	5,16	5,08	4,71	-6,21	-39,48
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,47	9,73	10,59	6,35	9,03	6,35	6,16	4,25	8,43	6,27	4,55	3,07	5,54	6,03	4,81	-9,11	-33,10
Informasi dan Komunikasi	8,14	8,31	7,85	8,09	8,10	8,87	8,47	7,63	6,12	7,74	5,99	6,21	8,23	7,77	7,06	7,41	6,24
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,06	6,34	0,70	-2,01	2,43	1,00	-0,23	3,15	3,84	1,93	6,89	8,97	8,73	10,47	8,78	7,35	-7,20
Real Estate	3,67	4,28	4,50	4,92	4,34	1,43	3,20	5,51	6,78	4,26	8,22	5,61	5,26	2,72	5,39	3,02	1,83
Jasa Perusahaan	8,56	7,66	5,90	5,65	6,91	6,94	8,40	9,00	6,83	7,79	4,10	4,01	5,99	4,33	4,61	0,86	-3,64
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,11	-5,07	-1,34	0,30	-1,60	0,81	5,48	7,36	2,76	4,19	12,10	3,16	-2,31	5,88	4,35	7,13	-0,02
Jasa Pendidikan	7,30	8,11	5,24	7,44	7,00	9,02	8,44	7,98	4,31	7,38	3,23	3,91	5,62	7,06	4,98	-0,27	-0,26
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,00	7,92	7,76	9,06	8,44	9,29	9,44	9,16	6,61	8,59	6,24	6,27	4,82	5,60	5,72	6,26	2,88
Jasa lainnya	9,57	8,26	7,52	6,18	7,85	7,03	8,77	9,08	8,97	8,47	7,39	6,35	8,01	7,49	7,31	-2,82	-7,23
B. Berdasarkan Pengeluaran:	6,25	5,92	6,18	4,01	5,57	5,58	6,05	6,15	7,59	6,35	6,01	5,69	5,34	5,51	5,63	-1,14	-10,98
1. Pengeluaran Konsumsi	6,57	1,74	4,32	3,89	4,22	3,88	5,67	6,95	4,06	4,74	8,56	5,62	4,87	6,58	6,36	2,25	-4,24
1. a. Konsumsi Rumah Tangga	4,78	3,73	4,47	3,22	4,02	3,21	4,55	5,39	6,93	5,00	6,29	4,99	6,35	5,70	5,83	2,90	-3,57
1. b. Konsumsi LNPRT	5,85	0,12	0,14	9,64	3,94	8,27	9,62	9,47	0,35	6,76	22,86	10,98	7,94	6,00	11,73	-4,67	-4,81
1. c. Konsumsi Pemerintah	24,09	-8,36	4,05	5,96	5,28	8,58	11,72	14,78	-6,34	3,08	23,73	8,45	-2,55	10,40	8,50	-0,89	-7,73
2. Investasi	3,08	3,89	3,81	3,42	3,55	7,43	6,23	10,22	11,97	9,01	7,12	6,68	4,79	-2,24	3,94	-1,58	-10,95
2. a. PMTB	3,04	3,82	3,84	3,43	3,54	7,46	6,23	10,25	12,03	9,04	7,12	6,71	4,89	-2,16	3,99	-1,45	-10,93
2. b. Perubahan Inventori	9,50	19,74	-1,84	1,71	6,56	2,59	6,34	3,69	-0,43	3,02	6,71	-0,46	-14,91	-19,15	-6,90	-26,97	-15,48
3. Neraca Perdagangan Bersih	21,93	264,95	62,41	-81,94	71,86	12,10	9,18	-28,16	1855,18	3,58	-22,26	-0,34	18,58	243,41	8,24	-40,67	107,22
3. a. Ekspor Luar Negeri	11,25	11,29	11,45	-5,03	7,09	-3,83	3,35	10,97	14,46	6,11	3,54	-4,93	0,33	-0,35	-0,44	-18,72	-93,02
3. b. Impor Luar Negeri	14,36	32,96	21,98	2,91	17,14	12,98	7,58	27,32	49,09	24,41	9,66	6,04	-32,15	-27,80	-13,48	-40,72	-89,68
3. c. Net Ekspor Antar Daerah	7,77	-5,57	1,49	-8,29	-1,76	-14,00	0,81	13,24	-1,42	-0,10	9,27	-10,00	11,32	5,90	4,01	-3,00	-91,60
C. Ekspor																	
Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)	128,49	121,79	124,75	133,74	508,76	144,11	128,20	135,76	163,38	571,46	150,76	137,73	132,25	147,77	568,51	138,48	80,28
g Nilai Ekspor Nonmigas (% yoy)	5,66	-5,15	17,10	6,18	5,44	12,16	5,27	8,82	22,16	12,32	4,61	7,42	-2,59	-9,55	-0,52	-8,16	-41,71
Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton)	21,46	20,76	21,11	22,04	85,37	21,90	20,79	22,06	27,01	91,77	21,38	18,40	19,27	21,24	80,28	19,62	12,49
g Volume Ekspor Nonmigas (% yoy)	-75,53	-30,82	-0,56	-15,06	-18,03	2,08	0,15	4,49	22,58	-25,21	-2,40	-11,46	-12,68	-21,39	-12,51	-8,20	-32,13
D. Impor																	
Nilai Impor Nonmigas (USD Juta)	18,31	33,80	41,90	43,21	137,22	34,17	47,32	64,35	120,31	266,15	59,82	58,04	75,88	71,30	265,04	46,97	10,50
g Nilai Impor Nonmigas (% yoy)	-60,30	32,39	85,93	10,36	2,91	86,62	39,98	53,57	178,41	93,95	75,06	22,66	17,93	-40,74	-0,42	-21,48	-81,91
Volume Impor Nonmigas (ribu ton)	1,58	2,15	1,42	2,15	7,30	6,17	1,45	2,03	2,05	11,70	2,32	2,38	3,16	10,98	18,84	2,24	0,91
g Volume Impor Nonmigas (% yoy)	-91,22	30,45	-16,27	-27,87	-71,41	291,26	-32,42	42,60	31,91	74,49	-62,38	63,45	56,27	435,50	61,10	-3,32	-61,88
E. Laju Inflasi Provinsi Bali (% yoy)	4,40	4,02	2,69	3,32	3,32	3,10	3,47	3,60	3,13	3,13	1,85	2,14	2,54	2,38	2,38	3,04	2,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PDRB PROVINSI BALI ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB)

INDIKATOR	2017				2017	2018				2018	2019				2019	2020	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
EKONOMI MAKRO REGIONAL (ATAS DASAR HARGA BERLAKU)																	
Produk Domestik Regional Bruto (Rp Miliar)																	
A. Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha:	50.366	52.624	55.138	54.908	213.036	55.464	52.769	60.009	60.744	228.985	60.121	62.160	64.756	65.561	252.598	60.600	54.426
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.116	7.376	7.643	7.647	29.782	7.714	7.887	8.196	8.414	32.211	8.090	8.634	8.706	8.745	34.175	8.282	8.536
Pertambangan dan Penggalian	530	531	535	513	2.109	541	563	564	539	2.207	524	522	576	578	2.200	546	527
Industri Pengolahan	3.224	3.185	3.217	3.276	12.902	3.377	3.462	3.537	3.659	14.036	3.769	3.771	3.746	3.953	15.238	3.530	3.532
Pengadaan Listrik dan Gas	118	127	133	141	518	134	141	138	140	553	139	145	144	160	588	151	115
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	94	98	98	97	387	94	102	101	102	399	100	107	109	111	427	108	108
Konstruksi	4.460	4.629	4.828	5.130	19.047	5.122	5.347	5.686	5.803	21.958	5.792	5.982	6.235	6.314	24.323	6.070	5.933
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.339	4.445	4.642	4.560	17.987	4.700	-	5.086	5.226	15.012	5.141	5.363	5.582	5.543	21.628	5.191	5.171
Transportasi dan Pergudangan	4.685	5.075	5.567	5.220	20.547	5.347	5.631	5.878	5.920	22.777	5.802	5.963	6.373	6.431	24.569	5.489	3.325
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.796	12.425	13.215	12.604	50.040	13.018	13.481	14.021	14.025	54.545	13.923	14.274	15.269	15.281	58.747	13.217	9.399
Informasi dan Komunikasi	2.682	2.753	2.836	2.919	11.190	2.982	3.046	3.128	3.177	12.333	3.225	3.288	3.428	3.458	13.399	3.490	3.512
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.104	2.166	2.169	2.151	8.590	2.197	2.240	2.326	2.308	9.071	2.410	2.502	2.556	2.574	10.042	2.610	2.289
Real Estate	2.051	2.105	2.156	2.188	8.500	2.159	2.229	2.315	2.381	9.084	2.362	2.381	2.465	2.486	9.694	2.485	2.474
Jasa Perusahaan	539	548	562	583	2.233	598	610	623	633	2.465	633	646	673	678	2.629	660	644
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.195	2.574	2.784	2.939	10.493	2.491	2.922	3.091	3.050	11.554	2.846	3.089	3.107	3.349	12.392	3.167	3.203
Jasa Pendidikan	2.542	2.643	2.749	2.882	10.816	2.878	2.937	3.083	3.099	11.997	3.063	3.141	3.361	3.420	12.985	3.168	3.254
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.087	1.120	1.156	1.198	4.561	1.222	1.255	1.292	1.308	5.076	1.329	1.360	1.382	1.414	5.486	1.450	1.443
Jasa lainnya	804	823	848	860	3.335	890	917	943	958	3.708	974	993	1.043	1.065	4.075	985	959
B. Berdasarkan Pengeluaran:	50.366	52.624	55.138	54.908	213.036	55.464	57.575	60.009	60.744	233.792	60.121	62.160	64.756	65.561	252.598	60.600	54.426
1. Pengeluaran Konsumsi	29.093	31.257	32.281	34.706	127.337	31.369	34.376	36.029	37.284	139.058	34.840	37.066	38.536	40.545	150.986	36.836	36.371
1. a. Konsumsi Rumah Tangga	25.043	25.455	25.728	25.926	102.153	26.786	27.735	28.443	28.799	111.762	29.141	29.763	30.984	31.253	121.140	31.171	29.603
1. b. Konsumsi LNPRT	601	616	648	716	2.580	665	680	698	722	2.764	821	770	789	784	3.164	796	740
1. c. Konsumsi Pemerintah	3.449	5.186	5.905	8.063	22.604	3.919	5.962	6.888	7.763	24.531	4.878	6.534	6.763	8.508	26.683	4.869	6.028
2. Investasi	15.362	15.789	16.126	16.667	63.944	16.930	17.380	18.538	19.445	72.293	18.412	18.628	19.439	19.183	75.663	18.679	17.846
2. a. PMTB	15.205	15.633	15.958	16.498	63.293	16.757	17.206	18.361	19.278	71.602	18.235	18.458	19.307	19.073	75.073	18.569	17.733
2. b. Perubahan Inventori	157	157	169	169	651	173	175	177	167	691	178	170	132	110	590	110	113
3. Neraca Perdagangan Bersih	5.899	5.978	7.190	3.910	22.977	7.166	5.819	5.441	4.015	22.441	6.869	6.465	6.780	5.833	25.948	5.085	209
3. a. Ekspor Luar Negeri	21.183	22.431	22.991	20.034	86.639	21.205	24.123	26.794	24.660	96.782	22.579	23.129	27.067	24.484	97.260	20.233	1.629
3. b. Impor Luar Negeri	4.785	5.318	5.331	5.344	20.778	5.537	5.795	6.879	7.993	26.204	6.139	6.212	4.640	5.735	22.725	3.517	615
3. c. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-42.883	-8.502	-	-	-	-48.137	-9.572	-	-	-	-48.586	-	-805

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PDRB PROVINSI BALI ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK)

INDIKATOR	2017				2017	2018				2018	2019				2019	2020	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
A. Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha:	34.941	35.956	37.159	36.878	144.933	36.881	38.117	39.437	39.675	154.110	39.097	40.284	41.542	41.861	162.784	38.650	35.861
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.792	4.938	5.051	5.040	19.822	5.036	5.134	5.277	5.377	20.824	5.154	5.496	5.469	5.495	21.614	5.157	5.372
Pertambangan dan Penggalian	378	380	383	338	1.481	355	368	368	350	1.441	340	339	372	373	1.424	351	338
Industri Pengolahan	2.317	2.274	2.286	2.301	9.178	2.348	2.398	2.440	2.512	9.698	2.574	2.571	2.545	2.670	10.360	2.369	2.367
Pengadaan Listrik dan Gas	75	77	81	85	318	79	82	81	82	324	80	84	83	92	339	86	66
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	77	79	79	78	313	75	82	81	81	319	80	85	86	87	338	85	85
Konstruksi	3.300	3.406	3.530	3.664	13.900	3.623	3.759	3.954	4.000	15.335	3.944	4.061	4.214	4.251	16.469	4.059	3.962
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.241	3.286	3.407	3.320	13.254	3.397	3.465	3.654	3.741	14.257	3.666	3.813	3.942	3.896	15.316	3.605	3.588
Transportasi dan Pergudangan	2.531	2.654	2.824	2.684	10.692	2.702	2.814	2.913	2.920	11.349	2.838	2.915	3.063	3.068	11.884	2.662	1.764
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.069	7.322	7.708	7.320	29.420	7.518	7.773	8.036	7.937	31.264	7.860	8.012	8.481	8.416	32.769	7.143	5.360
Informasi dan Komunikasi	2.441	2.490	2.554	2.620	10.106	2.657	2.701	2.749	2.781	10.888	2.816	2.869	2.976	2.997	11.657	3.025	3.048
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.508	1.547	1.536	1.506	6.097	1.523	1.543	1.584	1.563	6.214	1.628	1.682	1.723	1.727	6.760	1.748	1.561
Real Estate	1.662	1.683	1.707	1.726	6.778	1.686	1.737	1.801	1.843	7.067	1.824	1.835	1.896	1.893	7.448	1.879	1.868
Jasa Perusahaan	394	396	401	414	1.606	422	429	437	443	1.731	439	446	463	462	1.810	443	430
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.844	2.054	2.131	2.196	8.225	1.859	2.167	2.288	2.256	8.570	2.084	2.235	2.235	2.389	8.943	2.232	2.235
Jasa Pendidikan	1.915	1.950	2.023	2.097	7.985	2.088	2.114	2.185	2.187	8.574	2.155	2.197	2.308	2.342	9.002	2.149	2.192
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	824	839	863	890	3.416	901	918	942	949	3.709	957	975	987	1.002	3.922	1.017	1.004
Jasa lainnya	572	579	593	600	2.345	613	630	647	654	2.543	658	670	699	702	2.729	639	622
B. Berdasarkan Pengeluaran:	34.941	35.956	37.159	36.878	144.933	36.881	38.117	39.437	39.675	154.110	39.097	40.284	41.542	41.861	162.784	38.650	35.861
1. Pengeluaran Konsumsi	21.417	22.692	23.354	24.809	92.273	22.249	23.979	24.977	25.816	97.021	24.154	25.327	26.194	27.514	103.189	24.697	24.253
1. a. Konsumsi Rumah Tangga	18.725	19.028	19.232	19.205	76.191	19.327	19.894	20.269	20.535	80.025	20.542	20.886	21.556	21.705	84.689	21.139	20.140
1. b. Konsumsi LNPR	409	418	437	482	1.747	443	458	479	484	1.864	545	508	517	513	2.083	519	484
1. c. Konsumsi Pemerintah	2.283	3.246	3.685	5.122	14.335	2.478	3.627	4.229	4.797	15.131	3.066	3.933	4.122	5.296	16.417	3.039	3.629
2. Investasi	11.308	11.630	11.837	12.087	46.863	12.148	12.355	13.047	13.534	51.084	13.012	13.180	13.672	13.231	53.095	12.807	11.737
2. a. PMTB	11.248	11.572	11.777	12.027	46.623	12.086	12.293	12.984	13.474	50.837	12.947	13.118	13.618	13.183	52.865	12.759	11.684
2. b. Perubahan Inventori	60	58	60	60	239	62	62	63	60	247	66	62	53	49	230	48	52
3. Neraca Perdagangan Bersih	2.216	1.633	1.968	-19	5.798	2.484	1.783	1.414	325	6.005	1.931	1.777	1.676	1.116	6.500	1.145	-128
3. a. Ekspor Luar Negeri	13.965	14.512	14.672	12.875	56.025	13.431	14.998	16.282	14.737	59.448	13.907	14.259	16.336	14.686	59.187	11.304	995
3. b. Impor Luar Negeri	3.121	3.410	3.417	3.369	13.317	3.526	3.669	4.350	5.023	16.568	3.867	3.890	2.952	3.627	14.335	2.292	401
3. c. Net Ekspor Antar Daerah	-8.629	-9.468	-9.288	-9.524	-36.910	-7.421	-9.545	-10.518	-9.389	-36.874	-8.109	-8.591	-11.709	-9.943	-38.352	-7.866	-722

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana (% , yoy)	6,05	6,19	5,96	5,31	5,59	5,56
Tabanan (% , yoy)	6,53	6,19	6,14	5,38	5,72	5,60
Badung (% , yoy)	6,98	6,24	6,81	6,11	6,75	5,83
Gianyar (% , yoy)	6,80	6,30	6,31	5,50	6,01	5,64
Klungkung (% , yoy)	5,98	6,11	6,28	5,34	5,50	5,44
Bangli (% , yoy)	5,83	6,16	6,24	5,35	5,50	5,47
Karangasem (% , yoy)	6,01	6,00	5,92	5,08	5,48	5,50
Buleleng (% , yoy)	6,96	6,07	6,02	5,40	5,62	5,55
Denpasar (% , yoy)	7,00	6,14	6,51	6,05	6,43	5,84

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PDRB KABUPATEN/KOTA ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB)

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	9.020	10.198	11.168	12.116	13.143	14.162
Tabanan	15.066	16.996	18.630	20.377	22.139	23.886
Badung	37.273	42.429	47.208	52.344	57.799	62.795
Gianyar	17.909	20.140	22.113	24.224	26.488	28.581
Klungkung	5.676	6.426	7.112	7.785	8.463	9.120
Bangli	4.382	4.946	5.457	5.977	6.493	6.999
Karangasem	10.785	12.233	13.411	14.598	15.873	17.107
Buleleng	22.355	25.170	27.690	30.319	32.941	35.509
Denpasar	34.210	38.424	42.384	46.836	51.411	55.676

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

PDRB KABUPATEN/KOTA ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK)

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	7.135	7.576	8.028	8.452	8.925	9.421
Tabanan	11.908	12.645	13.421	14.142	14.952	15.789
Badung	27.458	29.170	31.157	33.052	35.279	37.336
Gianyar	14.269	15.169	16.125	17.005	18.030	19.047
Klungkung	4.536	4.813	5.116	5.388	5.684	5.993
Bangli	3.472	3.686	3.916	4.124	4.351	4.589
Karangasem	8.483	8.992	9.524	10.006	10.554	11.135
Buleleng	17.742	18.819	19.951	21.024	22.204	23.437
Denpasar	26.779	28.423	30.273	32.105	34.169	36.165

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diolah

KREDIT RUMAH TANGGA (BANK UMUM - LOKASI PROYEK)

INDIKATOR	2018				2019				2020	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Kredit RT. Total (Rp triliun)	31,95	32,51	33,10	33,75	33,90	34,84	35,14	36,10	36,37	35,82
g Kredit RT. Total (% yoy)	6,40	5,60	5,66	5,76	6,12	7,15	6,17	6,95	7,28	2,83
KPR (Rp triliun)	9,68	9,76	10,10	10,58	10,70	10,98	11,21	11,31	11,31	11,15
RT. KPR sd 21	0,71	0,70	0,72	0,69	0,69	0,69	0,70	0,71	0,70	0,69
RT. KPR sd 70	4,43	4,45	4,69	5,10	5,25	5,50	5,70	5,78	5,86	5,81
RT. KPR 70+	4,55	4,60	4,70	4,79	4,76	4,78	4,80	4,82	4,76	4,64
KPA (Rp triliun)	0,16	0,14	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11
RT. KPA sd 21	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
RT. KPA sd 70	0,09	0,09	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
RT. KPA 70+	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
RT. Ruko (Rp triliun)	0,57	0,58	0,56	0,56	0,56	0,56	0,54	0,52	0,50	0,48
KKB (Rp triliun)	2,38	2,48	2,57	2,63	2,70	2,74	2,76	2,86	2,95	2,68
RT. KKB Roda 4	2,21	2,30	2,39	2,39	2,43	2,39	2,43	2,53	2,55	2,34
RT. KKB Roda 2	0,13	0,14	0,14	0,18	0,21	0,26	0,27	0,27	0,27	0,23
RT. KKB Roda 6	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01
RT. KKB Lainnya	0,02	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,12	0,10
RT. Multiguna (Rp triliun)	16,49	16,52	16,74	16,94	16,98	17,51	17,81	18,36	18,70	18,75
NPL Kredit RT (Gross %)	1,64	1,77	1,80	1,47	1,60	1,62	1,64	1,47	1,79	2,16

Sumber : LBU, Bank Indonesia

KREDIT KORPORASI (BANK UMUM - LOKASI PROYEK)

INDIKATOR	2018				2019				2020	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Kredit Korporasi nonkeuangan (Rp triliun)	27,65	27,13	26,86	29,59	29,02	31,23	31,03	31,29	31,04	31,06
g Kredit Korporasi nonkeuangan(% yoy)	-0,43	-2,27	-2,74	6,59	4,96	15,14	15,51	5,73	6,96	-0,55
Modal Kerja (Rp triliun)	10,13	9,59	9,55	11,16	10,58	10,76	9,86	10,00	9,27	10,26
g Modal Kerja (% yoy)	-3,40	-7,44	-5,72	7,12	4,48	12,15	3,24	-10,41	-12,39	-4,62
Investasi (Rp triliun)	17,46	17,50	17,29	18,39	18,40	20,44	21,14	21,25	21,74	20,79
g Investasi (% yoy)	1,55	1,10	-0,78	6,22	5,36	16,76	22,26	15,53	18,14	1,72
NPL (Gross,%)	6,40	5,29	6,03	7,17	8,05	8,65	9,55	7,26	7,13	6,17

Sumber : LBU, Bank Indonesia

INDIKATOR PERBANKAN - BANK UMUM (LOKASI PROYEK)

INDIKATOR	2017				2018				2019				2020	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Total Asset (Rp Triliun)	95,92	98,06	103,43	103,50	105,32	106,45	109,99	112,41	109,29	113,92	118,67	118,46	119,03	115,16
g Total Asset (% yoy)	4,86	3,91	5,43	3,37	9,80	8,55	6,34	8,61	3,77	7,02	7,89	5,39	8,91	1,09
DPK (Rp Triliun) - DPK KCKCP	81,53	89,97	93,24	86,68	87,27	89,63	94,70	93,49	94,20	97,57	102,18	101,76	103,09	99,14
Giro (Rp Triliun)	14,41	15,18	16,38	13,80	14,28	15,12	16,53	14,23	14,92	15,69	17,03	15,83	15,84	13,57
Tabungan (Rp Triliun)	36,80	42,89	44,02	42,06	41,81	43,85	46,44	47,07	46,28	48,16	50,82	52,49	52,33	49,74
Deposito (Rp Triliun)	30,32	31,90	32,84	30,82	31,18	30,65	31,73	32,19	33,00	33,72	34,33	33,44	34,91	35,82
g DPK (% yoy)	7,87	15,89	17,41	8,95	7,03	-0,38	1,57	7,86	7,94	8,86	7,89	8,84	9,44	1,61
g Giro(% yoy)	3,62	8,33	9,66	4,74	-0,91	-0,38	0,95	3,08	4,53	3,75	3,03	11,25	6,17	-13,48
g Tabungan(% yoy)	8,71	20,59	21,25	9,82	13,61	2,24	5,50	11,91	10,68	9,82	9,43	11,52	13,08	3,28
g Deposito (% yoy)	8,98	13,71	16,57	9,75	2,82	-3,89	-3,38	4,47	5,84	9,99	8,18	3,86	5,80	6,24
Kredit (Rp Triliun) - Lokasi Pro	88,89	90,35	90,89	91,97	92,21	92,51	95,24	97,06	97,14	100,91	101,97	103,46	103,36	103,51
Modal Kerja	31,61	32,21	31,90	32,48	32,55	32,08	33,57	34,76	33,55	34,16	33,53	33,57	33,23	34,20
Investasi	27,13	27,23	27,56	27,52	27,63	27,85	28,50	28,48	29,61	31,84	33,24	33,71	33,71	33,47
Konsumsi	30,15	30,91	31,43	31,98	32,03	32,58	33,17	33,83	33,98	34,91	35,19	36,17	36,42	35,85
g Kredit Umum (% yoy)	7,37	6,23	4,88	3,72	3,74	2,39	4,78	5,53	5,34	9,08	7,06	6,59	6,41	2,58
g Modal Kerja (% yoy)	5,87	2,39	0,49	2,80	2,95	-0,39	5,23	7,02	3,09	6,48	-0,12	-3,41	-0,96	0,11
g Investasi (% yoy)	8,78	8,74	6,67	0,65	1,87	2,27	3,40	3,49	7,16	14,34	16,64	18,40	13,86	5,10
g Konsumsi (% yoy)	7,72	8,25	8,07	7,53	6,25	5,40	5,53	5,78	6,07	7,15	6,10	6,93	7,18	2,70
Loan to Deposit Ratio (%)	109,02	100,43	97,49	106,11	105,67	103,22	100,57	103,82	103,12	103,43	99,79	101,82	101,16	105,14
NPL Gross (%)	3,74	3,67	3,67	3,62	4,12	3,54	3,56	3,74	4,03	4,38	4,52	3,62	3,80	3,66

Sumber : LBU, Bank Indonesia

DANA PERBANKAN BERDASARKAN KCKCP (BANK UMUM)

INDIKATOR	2016				2017				2018				2019				2020	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Total (Rp triliun)	75,57	77,61	79,39	79,53	81,57	83,21	87,61	86,73	87,32	89,69	94,76	93,61	94,32	97,70	102,32	101,76	103,24	98,58
Giro (Rp triliun)	13,90	14,00	14,92	13,16	14,41	15,18	16,38	13,80	14,28	15,12	16,53	14,23	14,93	15,69	17,13	15,83	15,85	13,72
Tabungan (Rp triliun)	33,85	35,57	36,30	38,29	36,83	38,11	40,58	42,09	41,84	43,89	46,48	47,14	46,35	48,24	50,82	52,49	52,42	49,20
Deposito (Rp triliun)	27,82	28,04	28,17	28,07	30,33	29,92	30,65	30,84	31,20	30,68	31,75	32,24	33,04	33,77	34,38	33,44	34,97	35,66

Sumber : LBU, Bank Indonesia

INDIKATOR PERBANKAN KABUPATEN/KOTA - BANK UMUM (LOKASI BANK)

Kabupaten/Kota	Indikator	2017				2018				2019				2020	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Jembrana	Kredit (Rp Triliun)	2,26	2,35	2,10	2,16	2,27	2,31	2,37	2,40	2,46	2,57	2,66	2,69	2,77	2,78
	DPK (Rp Triliun)	1,24	1,31	1,37	1,37	1,46	1,47	1,54	1,42	1,48	1,53	1,66	1,61	1,78	1,82
Tabanan	Kredit (Rp Triliun)	3,38	3,95	3,68	3,73	3,81	3,84	3,93	4,02	4,13	4,30	4,49	4,54	4,66	4,65
	DPK (Rp Triliun)	2,24	2,37	2,52	2,41	2,53	2,60	2,79	2,68	2,87	2,95	3,23	3,07	3,25	3,32
Badung	Kredit (Rp Triliun)	8,79	9,03	9,20	9,36	9,30	9,42	9,62	9,68	9,71	10,22	10,70	10,84	10,70	10,43
	DPK (Rp Triliun)	13,12	14,05	15,07	13,93	14,69	15,60	16,54	15,97	15,56	16,16	17,49	17,50	17,54	15,77
Gianyar	Kredit (Rp Triliun)	3,56	3,64	3,13	3,22	3,35	3,41	3,45	3,49	3,58	3,70	3,82	3,87	3,92	3,89
	DPK (Rp Triliun)	2,83	3,04	3,18	3,13	3,24	3,38	3,73	3,74	3,97	4,15	4,52	4,51	4,66	4,46
Klungkung	Kredit (Rp Triliun)	1,63	1,68	1,71	1,73	1,80	1,85	1,89	1,92	1,97	2,04	2,09	2,09	2,12	2,65
	DPK (Rp Triliun)	1,18	1,26	1,35	1,29	1,37	1,42	1,50	1,40	1,48	1,55	1,63	1,55	1,63	1,89
Bangli	Kredit (Rp Triliun)	1,65	1,68	1,70	1,73	1,79	1,82	1,85	1,87	1,91	1,98	2,04	2,03	2,05	2,06
	DPK (Rp Triliun)	0,86	0,98	1,10	1,02	1,12	1,22	1,35	1,12	1,14	1,15	1,36	1,31	1,32	1,33
Karangasem	Kredit (Rp Triliun)	2,80	2,85	3,10	3,03	3,03	3,05	3,09	3,09	3,12	3,23	3,32	3,32	3,35	2,78
	DPK (Rp Triliun)	1,62	1,68	1,80	1,95	2,00	2,07	2,17	2,13	2,25	2,36	2,54	2,45	2,62	2,44
Buleleng	Kredit (Rp Triliun)	5,05	5,23	5,90	5,99	5,98	6,04	6,14	6,10	6,19	6,46	6,66	6,67	6,68	6,59
	DPK (Rp Triliun)	3,33	3,54	3,90	3,90	3,94	4,02	4,32	4,21	4,24	4,42	4,63	4,58	4,76	4,88
Denpasar	Kredit (Rp Triliun)	39,98	40,84	41,35	42,09	41,93	42,19	43,17	44,11	44,17	45,33	45,89	46,28	46,47	46,01
	DPK (Rp Triliun)	55,16	54,98	57,32	57,74	56,98	57,91	60,81	60,94	61,33	63,43	65,27	65,18	65,68	62,68

Sumber : LBU, Bank Indonesia

KREDIT UMKM (LOKASI PROYEK - BANK UMUM)

Kredit UMKM	2017				2018				2019				2020	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Kredit UMKM (Rp Triliun)	31,84	33,13	33,27	34,15	34,60	35,44	35,92	36,47	36,60	38,10	38,95	38,71	39,09	38,32
g Kredit UMKM (%yoy)	14,20	11,18	8,43	7,30	8,66	6,96	7,95	6,81	5,79	7,51	8,46	7,57	6,80	-2,51
Mikro (Triliun)	5,56	5,83	6,12	6,47	6,88	7,20	7,39	7,49	7,73	8,07	8,34	16,18	8,65	8,25
Kecil (Triliun)	12,17	12,64	12,78	13,02	13,19	13,41	13,42	1,33	13,55	14,14	14,76	14,96	15,00	14,73
Menengah (Triliun)	14,11	14,67	14,37	14,66	14,53	14,82	15,11	15,65	15,33	15,89	15,86	15,65	15,44	15,35
NPL (%)	2,38	4,01	3,03	2,82	3,56	3,56	3,89	3,28	3,13	3,25	3,12	2,75	3,10	3,37

Sumber : LBU, Bank Indonesia

SISTEM PEMBAYARAN (TUNAI - NONTUNAI)

INDIKATOR	2017				2018				2019				2020	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Transaksi Tunai														
Inflow (Rp Triliun)	4,50	3,90	4,90	3,58	4,50	5,21	4,65	4,16	6,76	5,57	4,48	4,58	5,76	3,77
Outflow (Rp Triliun)	3,90	5,80	3,60	4,42	3,45	6,56	4,74	5,70	3,51	6,41	4,74	5,84	4,02	2,35
Kliring														
Nom. Kliring (Rp triliun)	16,27	13,37	15,80	15,08	13,64	13,84	15,85	14,60	12,60	11,95	13,51	14,16	12,15	8,20
Vol. Kliring (ribu lembar)	622	540	609	569	538	534	582	510	437	413	444	446	380	265
RTGS														
Nom. RTGS (Rp triliun)	3,11	3,55	3,74	3,27	3,24	4,64	3,62	4,46	3,16	9,52	36,08	34,59	31,94	27,13
Vol. RTGS (lembar)	3.451	3.517	3.914	3.740	3.608	3.763	4.179	3.748	3.971	5.821	22.275	23.034	19.729	16.252
Tolakan Cek/BG														
Nominal Tolakan Cek/BG (Rp miliar)	423	202	187	197	169	175	163	167,45	146	141	122	131,43	126,76	105,94
Volume Tolakan Cek/BG (ribu lembar)	7,90	7,50	6,06	5,63	5,91	5,35	4,72	4,62	4,14	3,85	4,01	4,15	3,86	3,35

Sumber : Bank Indonesia





BAB I

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

- Pada triwulan II 2020, kinerja ekonomi Bali kembali menurun seiring belum pulihnya kinerja pariwisata akibat pandemi COVID-19. Ekonomi Bali dengan *output* riil sebesar Rp35,86 triliun tercatat berkontraksi sebesar 10,98% (yoy) di triwulan II 2020, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -1,14% (yoy).
- Pada triwulan III 2020, penurunan kinerja ekonomi Bali diperkirakan masih akan berlanjut namun sedikit membaik jika dibandingkan dengan triwulan II 2020. Hal ini sejalan dengan penerapan tatanan kehidupan era baru dan dibukanya kembali pariwisata bagi wisatawan nusantara di Bulan Juli 2020.



KONDISI UMUM

Di tengah pandemi COVID-19, kinerja ekonomi Bali pada triwulan II 2020 terkontraksi makin dalam dibanding dengan triwulan sebelumnya. Dari sisi permintaan, kontraksi kinerja ekonomi Bali bersumber dari seluruh komponen yaitu konsumsi RT, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor luar negeri. Hal ini disebabkan oleh masih berlangsungnya pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan kinerja pariwisata sehingga menekan daya beli, menahan konsumsi pemerintah di tengah pendapatan yang menurun, menyulitkan realisasi investasi di tengah penerapan protokol *physical distancing*. Selanjutnya, dari sisi penawaran, kontraksi yang makin dalam juga bersumber dari seluruh lapangan usaha (LU). Kinerja LU Akmamin dan LU Transportasi terkontraksi karena kunjungan wisatawan yang menurun signifikan di tengah kekhawatiran penyebaran COVID-19. Kinerja LU Perdagangan juga terkontraksi makin dalam karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat termasuk pembatasan jam operasional pusat perdagangan. Kinerja LU Konstruksi terkontraksi akibat pengerjaan proyek menjadi sulit di tengah perlunya *physical distancing*. Sementara itu, kinerja LU Pertanian terkontraksi karena melemahnya permintaan.

Ekonomi Bali pada triwulan III 2020 diprakirakan akan sedikit membaik dibanding dengan triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pelonggaran kebijakan pariwisata Bali untuk wisatawan nusantara seiring dengan dimulainya tatanan kehidupan era baru.

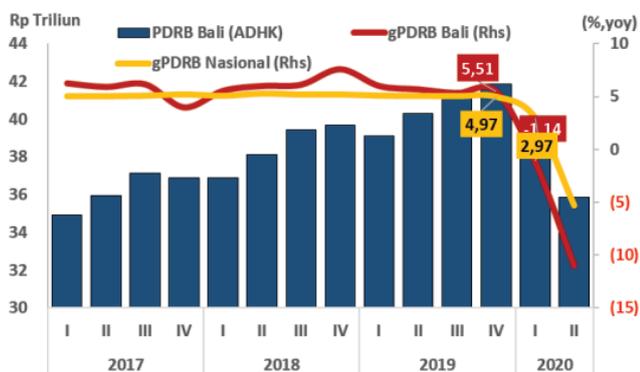
1.1. KINERJA PEREKONOMIAN BALI

Perekonomian Bali pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi di tengah pandemi COVID-19. Ekonomi Bali dengan *output* rill sebesar Rp35,86 triliun tercatat tumbuh sebesar -10,98% (yoy) pada triwulan II 2020, lebih rendah dibanding dengan triwulan I 2020 yang sebesar -1,14% (yoy) dan juga lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional periode yang sama, sebesar -5,32% (yoy). Pangsa ekonomi Bali terhadap nasional di triwulan II 2020 sebesar 1,48%, sedikit lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya (1,54%).

Dari sisi permintaan, kontraksi kinerja ekonomi Bali pada triwulan laporan bersumber dari kontraksi seluruh komponen. Hal ini disebabkan oleh penurunan kinerja pariwisata Bali akibat pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai negara melakukan kebijakan *travel restriction* dalam mencegah

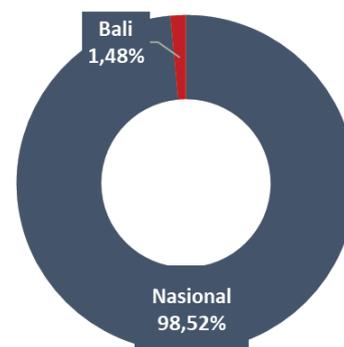
penyebaran COVID-19. Pemerintah Indonesia sudah melakukan larangan sementara bagi warga negara asing untuk masuk maupun transit di wilayah Indonesia sejak 2 April 2020¹. Penurunan kinerja pariwisata kemudian berdampak pada penurunan konsumsi RT seiring dengan tertahannya sumber pendapatan utama rumah tangga. Konsumsi pemerintah juga tertahan seiring dengan penurunan pagu belanja ditengah pendapatan pemerintah yang tertahan akibat menurunnya kinerja pariwisata. Sejumlah proyek investasi juga tertahan ditengah pandemi COVID-19 dengan perlunya penerapan *physical distancing*. Selanjutnya, ekspor luar negeri juga kontraksi akibat penurunan jumlah kunjungan wisman dengan adanya larangan sementara bagi warga negara asing untuk masuk ke Indonesia.

Dari sisi penawaran, kontraksi ekonomi Bali bersumber dari menurunnya kinerja seluruh lapangan usaha utama (LU), yaitu LU Penyediaan



Grafik I.1. Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah



Grafik I.2. Pangsa Ekonomi Bali Terhadap Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Akomodasi Makan dan Minum (Akmamin), LU Pertanian, LU Perdagangan, LU Konstruksi, serta LU Transportasi. LU Akmamin mengalami kontraksi pada triwulan laporan disebabkan oleh kinerja pariwisata yang menurun seiring dengan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dengan adanya *travel restriction*². Hal ini kemudian juga berdampak pada kinerja LU Transportasi pada triwulan laporan. Kinerja LU Pertanian juga kontraksi terutama karena tertahannya permintaan ditengah pandemi COVID-19. Kinerja LU Perdagangan juga terkontraksi seiring dengan pembatasan kegiatan masyarakat dan jam operasional pusat perdagangan untukantisipasi penyebaran COVID-19. Selain itu, kinerja LU Konstruksi juga terkontraksi seiring dengan tertundanya pengerjaan sejumlah proyek dengan adanya protokol kesehatan *social distancing*.

Kinerja ekonomi Bali pada triwulan III 2020 diperkirakan masih terkontraksi, namun sedikit membaik dibandingkan dengan triwulan II 2020. Hal ini seiring dengan berangsur pulihnya kegiatan ekonomi masyarakat sejalan dengan dimulainya tatanan kehidupan era baru³. Hal tersebut ditandai dengan adanya normalisasi jam operasional pusat perdagangan serta pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan domestik.

Dari sisi permintaan, membaiknya kontraksi ekonomi Bali pada triwulan III 2020 bersumber dari perbaikan kinerja konsumsi RT, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor luar negeri. Kinerja konsumsi RT pada triwulan III 2020 meningkat terbatas terutama didorong oleh perbaikan daya beli masyarakat dengan adanya pelonggaran kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat termasuk normalisasi jam operasional pusat perdagangan (*pasar, mall, restaurant*). Selain itu, kebijakan Kementerian Tenaga Kerja berupa pemberian bantuan subsidi upah (BSU) mulai Agustus 2020 bagi pegawai swasta juga diperkirakan berkontribusi pada pemulihan konsumsi RT. Sementara itu, perbaikan kinerja konsumsi pemerintah didorong oleh pencairan program jaring pengaman sosial (pusat dan daerah) dan belanja kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19. Selanjutnya, kinerja investasi membaik didorong oleh pembangunan beberapa proyek strategis seperti pengembangan pelabuhan Benoa,

Bendungan Sidan dan Tamblang yang masih sesuai dengan jadwal. Sementara itu, kinerja ekspor luar negeri juga sedikit membaik terutama didorong oleh perbaikan kinerja ekspor barang.

Dari sisi penawaran, membaiknya kontraksi ekonomi Bali pada triwulan III 2020 bersumber dari melambatnya kinerja hampir seluruh LU utama. Kinerja LU Akmamin diperkirakan akan membaik dibanding dengan triwulan sebelumnya didorong oleh potensi kinerja pariwisata domestik. LU Akmamin juga berpotensi membaik seiring dengan upaya Pemerintah Daerah Bali untuk mendorong implementasi protokol kesehatan pada pelaku usaha pariwisata untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang datang. Hal tersebut dilakukan melalui sertifikasi *Clean, Healthy, Safety, Environment* (CHSE) pada pelaku usaha pariwisata (hotel, daerah tujuan pariwisata, biro perjalanan). Pemerintah Daerah Bali telah membentuk tim verifikasi untuk melakukan sertifikasi tersebut⁴. Kemudian, kinerja LU Perdagangan membaik didorong oleh normalisasi jam operasional pusat perdagangan (*mall, pasar, restaurant*) seiring dengan penerapan tatanan kehidupan era baru Bali. Selain itu, kinerja LU Pertanian juga diperkirakan membaik pada triwulan III 2020 didorong oleh berlangsungnya musim panen tanaman perkebunan seperti kakao dan cengkeh. Disisi lain, kinerja LU Konstruksi diperkirakan mengalami kontraksi yang sedikit lebih dalam dibanding dengan triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pengerjaan beberapa proyek konstruksi yaitu bandara dan hotel yang tertunda.

1.2. PERTUMBUHAN EKONOMI BALI SISI PERMINTAAN

1.2.1. Konsumsi

Komponen konsumsi pada periode laporan tumbuh -4,24% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,25% (yoy). Semua komponen konsumsi tumbuh kontraktif, yaitu konsumsi swasta seiring pelemahan daya beli, maupun konsumsi pemerintah sejalan turunnya pendapatan dari sektor pariwisata dan realokasi/*refocusing* anggaran penanganan COVID-19.

2 Untuk wisatawan domestik, *travel restriction* berupa persyaratan rapid test.

3 Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Surat Edaran No. 3355 tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru di 14 sektor yang mencakup penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, serta usaha sektor jasa dan perdagangan, secara terbatas untuk masyarakat lokal Bali pada 9 Juli 2020. Selanjutnya, pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan domestik per tanggal 31 Juli 2020.

4 Surat Keputusan Gubernur Bali No. 355 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata.

Konsumsi Swasta: Rumah Tangga dan Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPRT)

Pada triwulan II 2020, kinerja konsumsi swasta yaitu konsumsi RT dan konsumsi LNPRT terkontraksi.

Konsumsi RT tumbuh -3,57% (yoy) pada triwulan II 2020, lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,90% (yoy). Sementara itu, kinerja konsumsi LNPRT turun dari -4,67% (yoy) menjadi -4,81% (yoy). Kontraksi kinerja konsumsi RT pada triwulan laporan disebabkan oleh menurunnya daya beli seiring dengan penurunan kinerja pariwisata ditengah pandemi COVID-19.

Kontraksi kinerja konsumsi RT pada triwulan II 2020 terkonfirmasi dari hasil survei konsumen dan survei penjualan eceran (SPE).

Indikator Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi (IKE), dan Indeks Ekspektasi Konsumen dalam survei konsumen pada triwulan II 2020 lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya serta dibawah 100. Hasil SPE juga menunjukkan terjadinya kontraksi total penjualan pada triwulan laporan lebih dalam dibanding dengan triwulan sebelumnya. Seluruh jenis barang menunjukkan kontraksi penjualan yaitu bahan konstruksi, perlengkapan RT, pakaian jadi, peralatan tulis, serta barang kerajinan dan mainan.

Selain itu, kontraksi kinerja konsumsi RT pada triwulan II 2020 juga terkonfirmasi dari kinerja impor barang konsumsi dan kredit konsumsi. Impor barang konsumsi tumbuh sebesar -91,53% (yoy) pada triwulan II 2020, lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya sebesar -24,63% (yoy). Kredit konsumsi juga melambat pada triwulan laporan dari 5,73% (yoy) menjadi 1,88% (yoy) pada triwulan II 2020.

Meskipun masih kontraksi, kinerja komponen konsumsi RT pada triwulan III 2020 diperkirakan sedikit membaik dibanding dengan triwulan sebelumnya.

Hal tersebut didorong oleh perbaikan daya beli masyarakat secara terbatas seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat seiring dengan dimulainya tatanan kehidupan era baru. Daya beli masyarakat diperkirakan juga membaik didorong oleh adanya kebijakan Kementerian Tenaga Kerja berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU)⁵ sebesar Rp600.000 per bulan bagi pekerja yang berpenghasilan dibawah Rp 5 juta per bulan.

Konsumsi Pemerintah

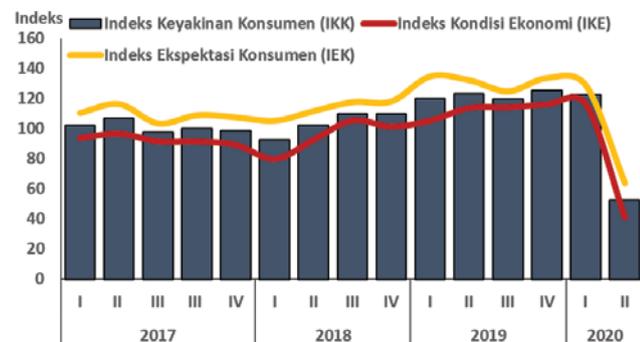
Pada triwulan II 2019, kinerja konsumsi pemerintah terkontraksi sebagaimana pada triwulan sebelumnya.

Konsumsi pemerintah tumbuh sebesar

Tabel I.1. Perkembangan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bali Sisi Permintaan (% ,yoy)

Komponen	2017				2017	2018				2018	2019				2019	2020	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Konsumsi	7,02	1,94	4,22	3,97	4,22	4,50	4,53	6,17	3,77	4,74	8,56	5,62	4,87	6,58	6,36	2,25	(4,24)
Kons.RT	4,77	3,71	4,44	3,19	4,02	3,19	4,52	5,36	6,90	5,00	6,29	4,99	6,35	5,70	5,83	2,90	(3,57)
Kons.LNPRT	5,85	0,12	0,14	9,64	3,94	8,27	9,62	9,47	0,54	6,76	22,86	10,98	7,94	6,00	11,73	(4,67)	(4,81)
Kons. Pemerintah	29,07	(7,01)	3,59	6,47	5,28	14,23	3,94	10,03	(7,57)	3,08	23,73	8,45	(2,55)	10,40	8,50	(0,89)	(7,73)
Investasi	3,08	3,89	3,81	3,42	3,55	7,43	6,23	10,22	11,97	9,01	7,12	6,68	4,79	(2,24)	3,94	(1,58)	(10,95)
PMTB	3,04	3,82	3,84	3,43	3,54	7,46	6,23	10,25	12,03	9,04	7,12	6,71	4,89	(2,16)	3,99	(1,45)	(10,93)
Perubahan Inventori	9,50	19,74	(1,84)	1,71	6,56	2,59	6,34	3,69	(0,43)	3,02	6,71	(0,46)	(14,91)	(19,15)	(6,90)	(26,97)	(15,48)
Ekspor LN	11,25	11,29	11,45	(5,03)	7,09	(3,83)	3,35	11,67	15,15	6,45	3,54	(4,93)	0,33	(0,35)	(0,44)	(21,87)	(93,02)
Impor LN	14,36	32,96	21,98	2,91	17,14	12,98	7,58	27,32	49,09	24,41	9,66	6,04	(32,15)	(27,80)	(13,48)	(38,81)	(89,68)
Net Ekspor antar daerah	16,99	255,01	64,58	(69,37)	68,28	6,66	26,36	(18,36)	(1,321)	10,73	9,27	(10,00)	11,32	5,90	4,01	(9,35)	(91,60)
PDRB	6,25	5,92	6,18	4,01	5,57	5,58	6,05	6,15	7,59	6,35	6,01	5,69	5,34	5,51	5,63	(1,14)	(10,98)

Sumber: BPS, diolah



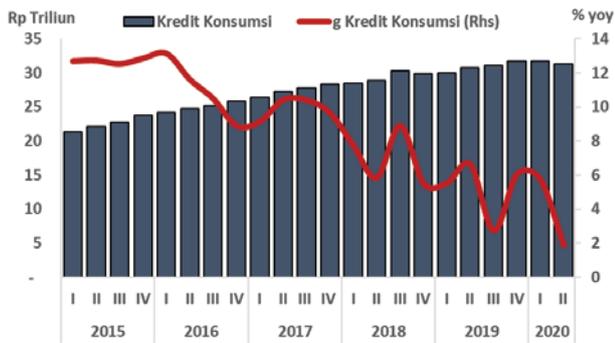
Grafik I.3. Hasil Survei Konsumen

Sumber : Bank Indonesia



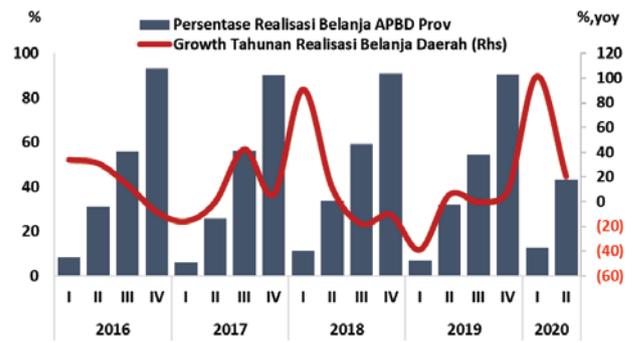
Grafik I.4. Hasil Survei Penjualan Eceran

Sumber : Bank Indonesia



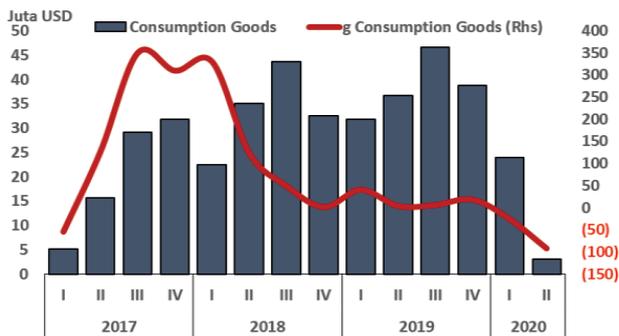
Grafik I.5. Perkembangan Kredit Konsumsi

Sumber : LBU, Bank Indonesia



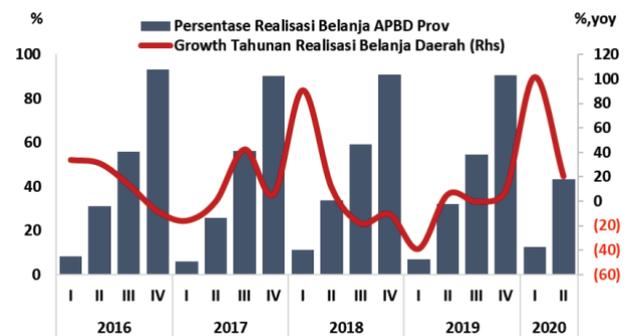
Grafik I.7. Perkembangan Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali

Sumber: DJPb Prov. Bali



Grafik I.6. Perkembangan Impor Barang Konsumsi

Sumber : Bea dan Cukai, diolah



Grafik I.8. Perkembangan Realisasi Belanja APBD Kab/Kota di Bali

Sumber: BPKAD Kab/Kota, Bali

-7,73% (yoy), kontraksi lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar -0,88% (yoy). Kontraksi konsumsi pemerintah tersebut disebabkan oleh penurunan pagu belanja pemerintah di tengah pendapatan pemerintah yang tertahan akibat menurunnya kinerja pariwisata.

Penurunan kinerja konsumsi pemerintah terkonfirmasi dari penurunan belanja APBD Provinsi dan APBD 9 Kabupaten/Kota di Bali. Realisasi APBD Provinsi Bali tumbuh 20,62% (yoy) pada triwulan II 2020, lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 101,81% (yoy). Selain itu, realisasi belanja APBD 9 Kabupaten/Kota tumbuh -13,31% (yoy) pada triwulan II 2020, lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh -11,64% (yoy).

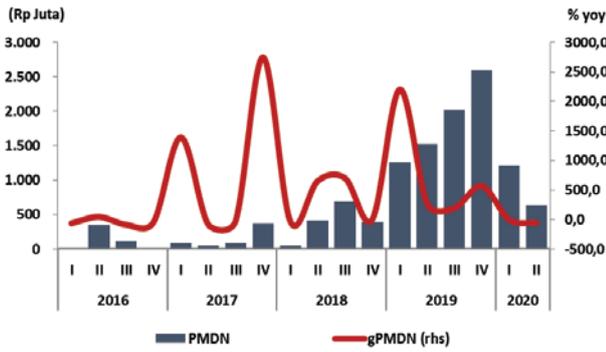
Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan III 2020 diperkirakan mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal itu didorong oleh pencairan program jaring pengaman sosial (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dan belanja kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19. Program JPS pemerintah pusat antara lain Program Keluarga Harapan, Program Sembako, Bantuan Sosial Tunai, dan Program Bantuan Langsung Tunai. Sementara itu, program JPS Pemerintah Provinsi Bali antara lain berupa bantuan

pangan nontunai dan bantuan sosial tunai.

1.2.2. Investasi

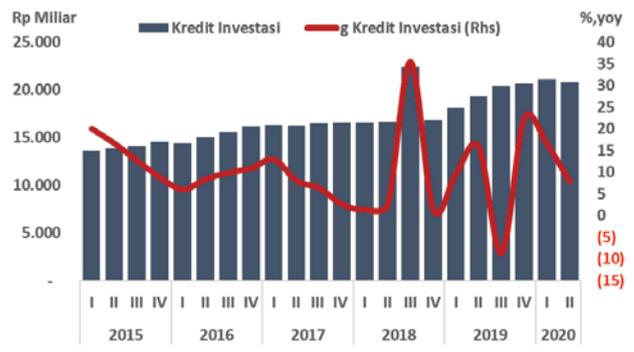
Kinerja komponen investasi pada triwulan II 2020 masih berkontraksi sebagaimana triwulan sebelumnya. Komponen investasi pada triwulan II 2020 tumbuh -10,95% (yoy), lebih dalam dibanding dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh -1,58% (yoy). Kontraksi kinerja investasi sejak triwulan II 2020 disebabkan oleh tertundanya penyelesaian sejumlah proyek karena adanya pandemi COVID-19, antara lain penyelesaian pembangunan beberapa hotel di Kabupaten Badung serta pengembangan Bandara IG Ngurah Rai (apron, gedung parkir)

Kinerja investasi yang masih berkontraksi terkonfirmasi dari realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN), kredit investasi, serta hasil liaison Bank Indonesia. Realisasi PMA dan PMDN pada triwulan II 2020 masing-masing tumbuh sebesar -59,79% (yoy) dan -58,19% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya (-5,70% dan -3,35%). Kredit investasi juga tercatat tumbuh melambat pada triwulan laporan, dari 16,46% (yoy) menjadi 7,88% (yoy). Sejalan dengan itu, hasil liaison Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa likert investasi pada triwulan II 2020 lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya.



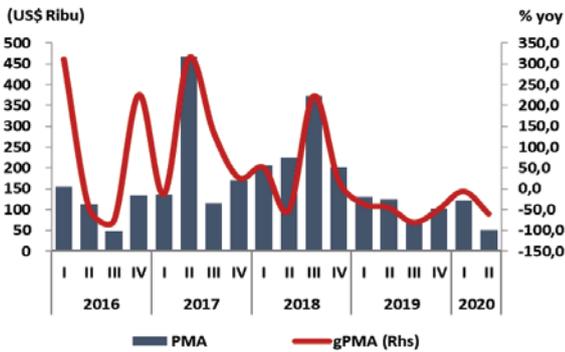
Grafik I.9. Perkembangan Realisasi PMDN

Sumber: BKPM



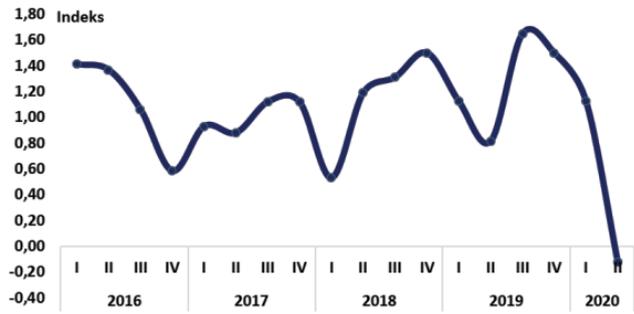
Grafik I.11. Perkembangan Kredit Investasi

Sumber: LBU, Bank Indonesia



Grafik I.10. Perkembangan Realisasi PMA

Sumber: BKPM



Grafik I.12. Likert Investasi, Liaison

Sumber: Liaison, Bank Indonesia

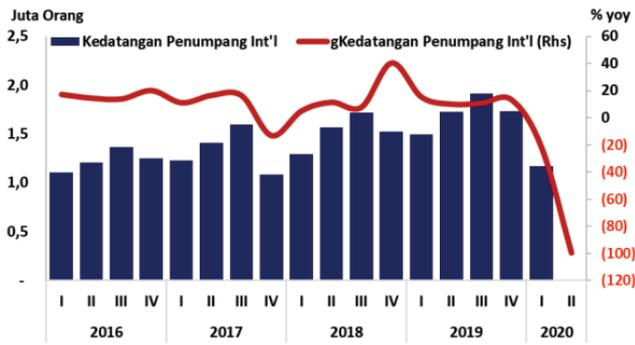
Kinerja investasi pada triwulan III 2020 diperkirakan membaik dibanding dengan triwulan sebelumnya. Kinerja investasi diperkirakan membaik seiring dengan potensi membaiknya investasi swasta. Pembangunan beberapa proyek strategis seperti pengembangan pelabuhan Benoa, Bendungan Sidan dan Tamblang masih sesuai dengan jadwal.

1.2.3. Ekspor Barang dan Jasa

Kinerja ekspor luar negeri Bali terkontraksi makin dalam pada triwulan laporan dibanding dengan triwulan sebelumnya. Ekspor luar negeri Bali tumbuh -93,02% (yoy) pada triwulan II 2020, lebih rendah dibanding dengan triwulan I 2020 yang tumbuh -18,72% (yoy). Menurunnya kinerja ekspor luar negeri Bali pada triwulan laporan terutama disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor jasa seiring dengan menurunnya kinerja pariwisata Bali. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali sudah mulai menurun sejak awal 2020 sebagai dampak mulai merebaknya COVID-19 di dunia sejak akhir tahun 2019. Sejak awal tahun 2020 sejumlah negara melakukan *travel restriction* bahkan *lockdown*. Indonesia juga mengeluarkan kebijakan larangan masuknya warga asing ke Indonesia sejak 2 April 2020. Setelah pandemi

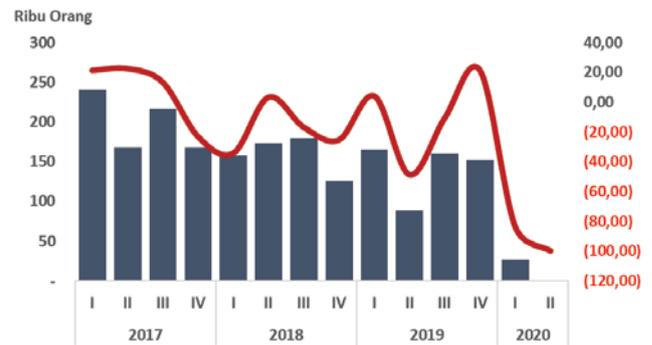
COVID-19 semakin meluas, Pemerintah Daerah Bali juga mengeluarkan aturan pengendalian perjalanan orang melalui pintu masuk bandara dan pelabuhan. Sejak tanggal 28 Mei 2020, pelaku perjalanan harus melampirkan surat keterangan hasil negatif uji *swab* berbasis *Polymerase Chain Reaction* (PCR)⁶.

Kontraksi kinerja ekspor luar negeri pada triwulan laporan terkonfirmasi dari penurunan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali, kedatangan penumpang internasional di Bandara Ngurah Rai, serta kedatangan penumpang melalui kapal pesiar di pelabuhan. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada triwulan II 2020 tumbuh -99,96% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh -21,81%. Penurunan jumlah wisman tersebut sejalan dengan penurunan jumlah kedatangan penumpang internasional di Bandara IG Ngurah Rai yang menurun menjadi -99,50% (yoy), lebih dalam dibanding dengan triwulan sebelumnya (-21,64%). Sementara itu, kedatangan penumpang kapal pesiar di pelabuhan Benoa dan Celukan Bawang juga menurun -100% (yoy) pada triwulan II 2020, lebih dalam dari triwulan sebelumnya (-83,92%).



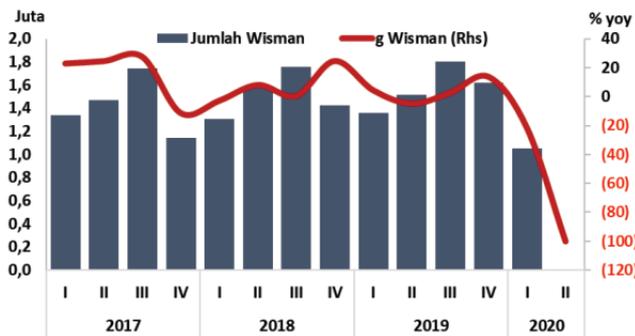
Grafik I.13. Perkembangan Kedatangan Penumpang Internasional di Bandara Ngurah Rai

Sumber: Angkasa Pura I, diolah



Grafik I.15. Jumlah Kedatangan Penumpang Pelabuhan Bena dan Celukan Bawang

Sumber: PT. Pelindo III, diolah



Grafik I.14. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali

Sumber: BPS, diolah

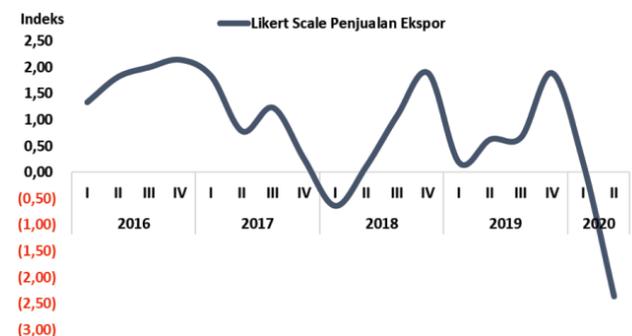


Grafik I.16. Perkembangan Ekspor Barang Bali

Sumber: Bea dan Cukai, diolah

Sementara itu, ekspor barang Bali pada triwulan II 2020 masih terkontraksi sebagaimana triwulan sebelumnya. Ekspor barang Bali tumbuh -41,71 (yoy), kontraksi semakin dalam dibanding dengan triwulan sebelumnya (-8,16%). Kontraksi ekspor barang Bali tersebut bersumber dari beberapa negara mitra dagang utama. Kinerja ekspor barang yang masih kontraksi dipengaruhi oleh terganggunya distribusi perdagangan dunia dan menurunnya permintaan di tengah pandemi COVID-19. Kinerja ekspor barang Bali terkonfirmasi dari hasil liaison oleh Bank Indonesia. *Likert scale* penjualan ekspor hasil liaison pada triwulan II 2020 menunjukkan penurunan dibanding dengan triwulan sebelumnya.

Ekspor barang dari Bali ke AS, Japan, dan Australia masih kontraksi seperti triwulan sebelumnya. Ekspor barang Bali ke AS sebagai pasar ekspor utama Bali (pangsa 34%) tumbuh -33,12% (yoy) pada triwulan II 2020, kontraksi semakin dalam dibanding dengan triwulan sebelumnya (-1,69%). AS menjadi pasar ekspor Bali untuk produk perikanan, olahan kayu, dan tekstil. Selain itu, ekspor barang Bali ke Jepang tumbuh -35,73% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya (12,71%). Jepang menjadi pasar ekspor Bali untuk komoditas perikanan. Sejalan dengan itu, ekspor barang ke Australia tumbuh

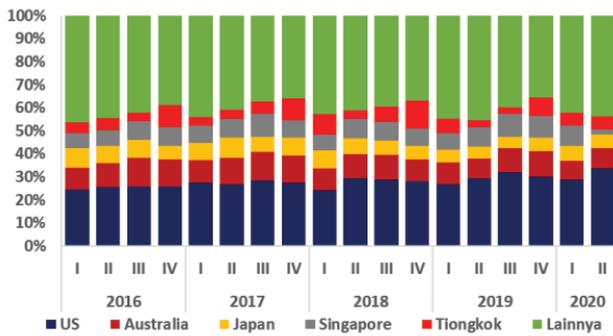


Grafik I.17. Likert Scale Penjualan Ekspor

Sumber: Liaison, Bank Indonesia

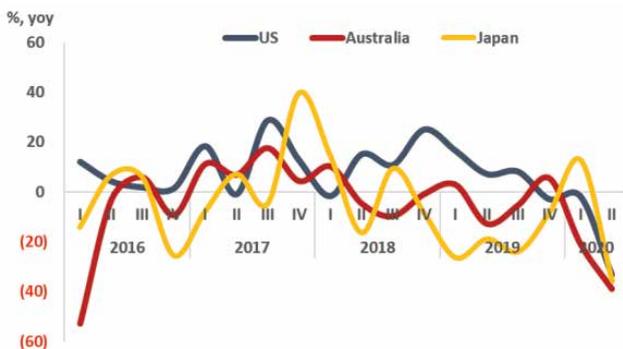
-38,78% (yoy) pada triwulan II 2020 dari sebelumnya -20,87% (yoy).

Ekspor perikanan, pakaian jadi, dan perhiasan sebagai ekspor utama Bali terkontraksi makin dalam dibanding dengan triwulan sebelumnya. Ekspor perikanan (pangsa 22,76%) tumbuh -39,62% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya (-2,61%,yoy). Sejalan dengan itu, ekspor pakaian jadi (pangsa 17,21%) terkontraksi lebih dalam dari -6,58 (yoy) pada triwulan I 2020 menjadi -50,04% (yoy) pada triwulan



Grafik I.18. Pangsa Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Utama

Sumber: Bea dan Cukai



Grafik I.19. Pertumbuhan Nilai Ekspor 3 Negara Tujuan Utama

Sumber: Bea dan Cukai

laporan. Selain itu, ekspor perhiasan (pangsa 17,33%) juga berkontraksi sebesar 39,18% (yoy) pada triwulan II 2020 dari sebelumnya -2,23% (yoy).

Ekspor luar negeri Bali pada triwulan III diprakirakan akan membaik meskipun masih berkontraksi.

Kontraksi tersebut bersumber dari kinerja ekspor jasa yang diprakirakan masih berkontraksi seiring dengan kinerja pariwisata yang masih tertahan. Kinerja pariwisata Bali pada triwulan III diprakirakan masih tertahan disebabkan oleh pertumbuhan negatif kunjungan wisatawan ditengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Namun demikian, perbaikan kinerja ekspor berpotensi didorong oleh perbaikan kinerja ekspor barang. Prakiraan ini seiring dengan mulai dibukanya perekonomian negara mitra dagang utama dan dukungan pemerintah berupa relaksasi aturan ekspor dan pembiayaan ekspor UMKM.

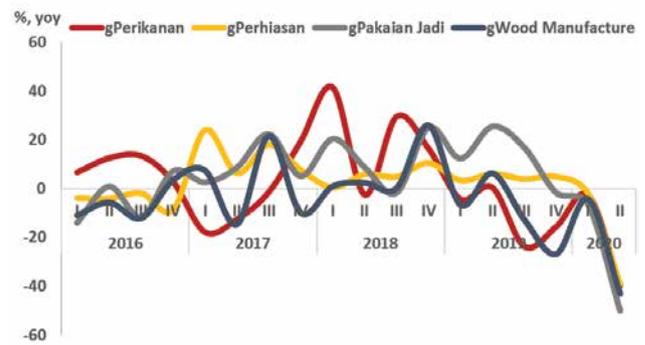
1.2.4. Impor Barang dan Jasa

Impor pada triwulan II 2020 menurun dibanding dengan triwulan sebelumnya. Impor tumbuh -89,68% (yoy) pada triwulan II 2020, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (-40,72%;yoy). Penurunan impor ini sejalan dengan penurunan kinerja pariwisata yang menyebabkan penurunan permintaan kebutuhan



Grafik I.20. Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama pada Triwulan II 2020

Sumber: Bea dan Cukai, diolah



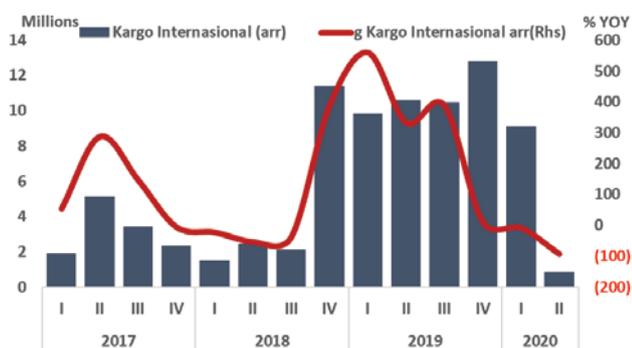
Grafik I.21. Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama

Sumber: Bea dan Cukai, diolah

produk-produk makanan impor untuk hotel dan restoran. Penurunan tekanan impor terkonfirmasi dari kedatangan kargo internasional di Bandara Ngurah Rai yang pada triwulan II 2020 tumbuh -91,72 (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya (-6,92%;yoy).

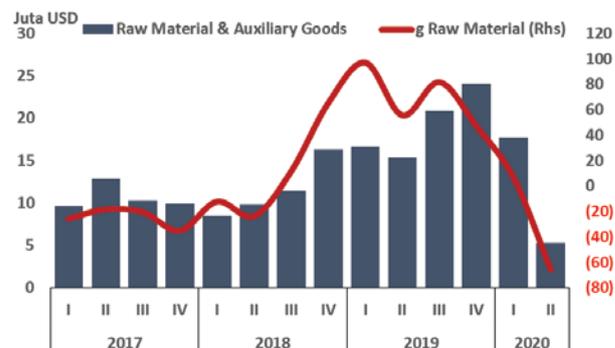
Penurunan impor terjadi baik pada impor barang konsumsi, barang setengah jadi, maupun barang modal. Impor barang konsumsi tumbuh -91,53% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya (-24,63%). Sejalan dengan itu, impor barang setengah jadi tumbuh -65,39% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya (6,52%;yoy). Selain itu, impor barang modal juga tumbuh -65,54% (yoy), memburuk dibanding dengan triwulan sebelumnya -53,96 (yoy).

Impor Bali pada triwulan III 2020 diprakirakan akan sedikit meningkat dibanding dengan triwulan sebelumnya. Kondisi ini didorong oleh potensi membaiknya kinerja pariwisata Bali pada triwulan III 2020 sehingga mendorong permintaan barang impor dari hotel dan restoran untuk barang-barang *food and beverages*. Disamping itu, pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur berpotensi mendorong impor barang modal.



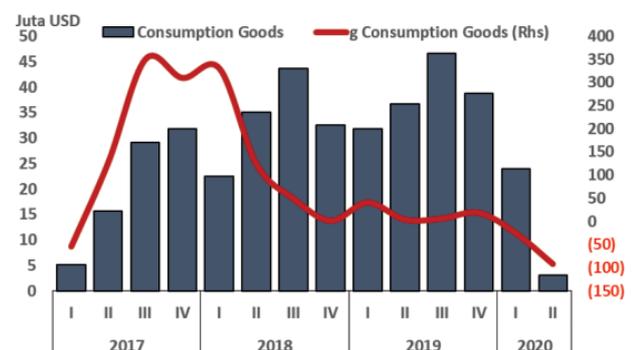
Grafik I.22. Perkembangan Kedatangan Kargo Internasional di Bandara Ngurah Rai

Sumber: PT. AP I, diolah



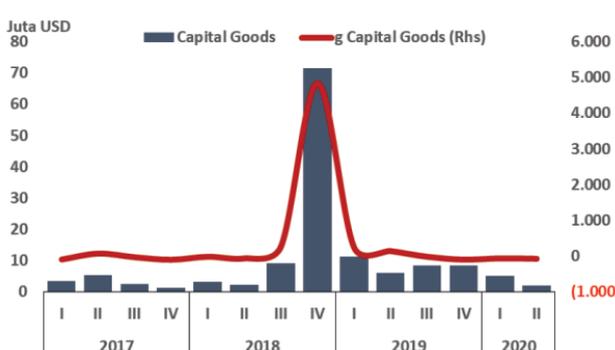
Grafik I.24. Perkembangan Impor Barang Setengah Jadi

Sumber: Bea Cukai



Grafik I.23. Perkembangan Impor Barang Konsumsi

Sumber: Bea Cukai



Grafik I.25. Perkembangan Impor Barang Modal

Sumber: Bea Cukai, diolah

1.3. SISI PENAWARAN

Dari sisi penawaran, kontraksi ekonomi Bali pada triwulan II 2020 bersumber hampir dari seluruh komponen. Besarnya ketergantungan Bali pada sektor pariwisata menyebabkan penurunan kinerja pariwisata akibat COVID-19 berdampak luas ke seluruh Lapangan Usaha (LU) di Bali. LU yang sangat berhubungan dengan pariwisata yaitu LU Akmamin, LU Transportasi, LU Perdagangan, dan LU Industri Pengolahan terdampak cukup besar dari penurunan kinerja pariwisata akibat COVID-19. Selain itu, adanya kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 turut memperbesar dampak COVID-19 terhadap penurunan ekonomi di Bali. Sementara itu, kontraksi kinerja LU Pertanian pada triwulan II 2020 terjadi sejalan dengan penurunan harga jual produk pertanian di tengah menurunnya daya beli masyarakat. Perkembangan struktur ekonomi Bali pada triwulan II 2020 masih didominasi 5 komponen lapangan usaha utama yaitu: 1) penyediaan akomodasi makan dan minum (pangsa 17,27%); 2) pertanian, kehutanan, dan perikanan (pangsa 15,68%); 3) konstruksi (pangsa 10,90%); 4) perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor (pangsa 9,50%), dan 5) transportasi (pangsa

6,11%); Kondisi ini berbeda dibanding dengan triwulan sebelumnya dimana transportasi memiliki pangsa yang lebih besar dibandingkan dengan perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor.

1.3.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan & Minum

Pada triwulan II 2020, kinerja LU Akmamin berkontraksi lebih dalam dibanding dengan triwulan sebelumnya. LU Akmamin pada triwulan laporan berkontraksi sebesar 33,10% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 9,11% (yoy). Semakin dalamnya kontraksi dipengaruhi oleh semakin menurunnya kinerja pariwisata. Pandemi COVID-19 yang masih belum menunjukkan perbaikan pada triwulan II 2020, menyebabkan penerapan kebijakan *travel restriction* dari negara asal wisatawan mancanegara (wisman) dan negara lainnya masih terus dilakukan. Hal ini berdampak pada kontraksi kunjungan wisman yang sangat dalam di sepanjang triwulan II 2020. Selain itu, pembatasan lalu lintas penduduk antar wilayah juga turut menahan kunjungan wisatawan nusantara (wisnus).

Kontraksi LU Akmamin yang semakin dalam terkonfirmasi oleh kontraksi kunjungan wisman.

Tabel I.2. Struktur dan Perkembangan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Bali Sisi Penawaran (% yoy)

Komponen	Pangsa TW II 2020	2018				2018	2019				2019	2020	
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,68	5,08	3,96	4,48	6,69	5,06	2,35	7,06	3,64	2,18	3,79	0,05	(2,26)
Pertambangan dan Penggalian	0,97	(6,26)	(3,12)	(4,00)	3,44	(2,65)	(4,10)	(8,12)	1,04	6,56	(1,23)	3,24	(0,10)
Industri Pengolahan	6,49	1,36	5,46	6,73	9,16	5,67	9,60	7,20	4,32	6,30	6,83	(7,95)	(7,92)
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	0,21	4,90	6,52	0,50	(3,51)	1,94	1,50	1,43	3,09	11,95	4,52	8,07	(21,04)
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,20	(1,88)	2,92	2,14	4,87	2,03	6,04	4,09	6,22	7,30	5,91	6,37	(0,14)
Konstruksi	10,90	9,77	10,36	12,01	9,16	10,33	8,85	8,03	6,56	6,28	7,39	2,92	(2,42)
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,50	4,84	5,44	7,24	12,67	7,57	7,92	10,04	7,89	4,13	7,43	(1,67)	(5,90)
Transportasi dan Pergudangan	6,11	6,78	6,07	3,15	8,80	6,15	5,03	3,56	5,16	5,08	4,71	(6,21)	(39,48)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17,27	6,35	6,16	4,25	8,43	6,27	4,55	3,07	5,54	6,03	4,81	(9,11)	(33,10)
Informasi dan Komunikasi	6,45	8,87	8,47	7,63	6,12	7,74	5,99	6,21	8,23	7,77	7,06	7,41	6,24
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,21	1,00	(0,23)	3,15	3,84	1,93	6,89	8,97	8,73	10,47	8,78	7,35	(7,20)
Real Estate	4,55	1,43	3,20	5,51	6,78	4,26	8,22	5,61	5,26	2,72	5,39	3,02	1,83
Jasa Perusahaan	1,18	6,94	8,40	9,00	6,83	7,79	4,10	4,01	5,99	4,33	4,61	0,86	(3,64)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,88	0,81	5,48	7,36	2,76	4,19	12,10	3,16	(2,31)	5,88	4,35	7,13	(0,02)
Jasa Pendidikan	5,98	9,02	8,44	7,98	4,31	7,38	3,23	3,91	5,62	7,06	4,98	(0,27)	(0,26)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,65	9,29	9,44	9,16	6,61	8,59	6,24	6,27	4,82	5,60	5,72	6,26	2,88
Jasa lainnya	1,76	7,03	8,77	9,08	8,97	8,47	7,39	6,35	8,01	7,49	7,31	(2,82)	(7,23)
PDRB	100	5,55	6,01	6,13	7,59	6,33	6,01	5,69	5,34	5,51	5,63	(1,14)	(10,98)

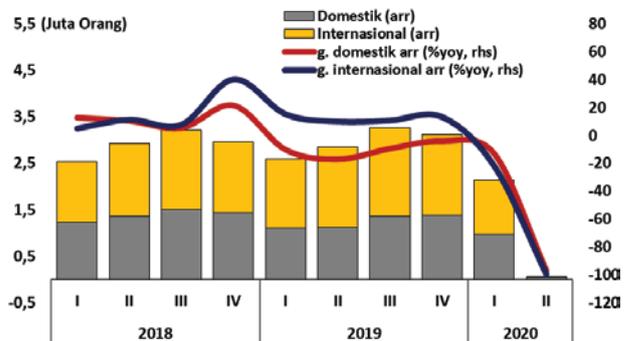
Sumber: BPS, diolah

Kunjungan wisman pada triwulan II 2020 terkontraksi sebesar 99,96% (yoy) pada triwulan II 2020, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 21,82% (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan oleh berlanjutnya penerapan kebijakan *travel restriction* dari negara asal wisman utama dan negara lainnya. Selain itu, menurunnya jumlah kunjungan wisman juga tercermin dari kontraksi jumlah kedatangan internasional di Bandara IG Ngurah Rai Bali (Grafik I.27) dan arus penumpang asing di Pelabuhan Benoa serta Pelabuhan Celukan Bawang (Grafik I.28).

Kontraksi LU Akmamin pada triwulan II 2020 juga disebabkan oleh penurunan kunjungan wisnus. Dalam rangka mencegah penularan COVID-19, pemerintah menerapkan pembatasan mobilitas masyarakat termasuk keluar masuk antar wilayah. Hal ini berimplikasi terhadap kinerja pariwisata untuk pasar wisnus di Bali. Penurunan wisnus ini tercermin antara lain dari kontraksi kedatangan penumpang domestik pada bandara IG Ngurah Rai di triwulan II (-96,91%, yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 12,99% (yoy) (Grafik I.27). Selain itu, kedatangan dalam negeri

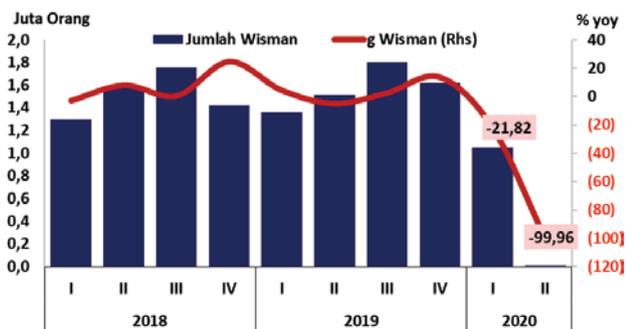
penumpang kapal pesiar di Pelabuhan Benoa dan Celukan Bawang juga menunjukkan penurunan, dari -51,73% (yoy) pada triwulan I 2020 menjadi -97,04% (yoy) di triwulan II 2020.

Penurunan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) turut mengonfirmasi penurunan kinerja LU Akmamin. TPK hotel bintang di Bali pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 2,45%, menurun dibanding dengan triwulan



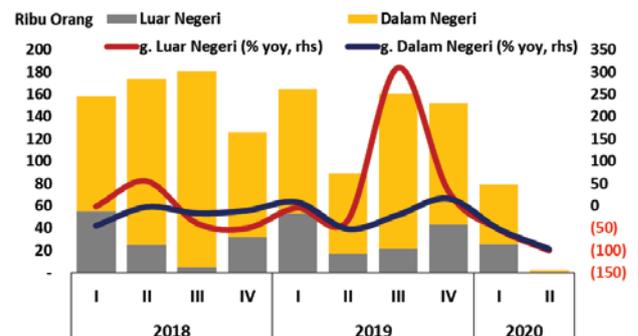
Grafik I.27. Kedatangan Penumpang di Bandara IG Ngurah Rai

Sumber: PT. AP I, diolah



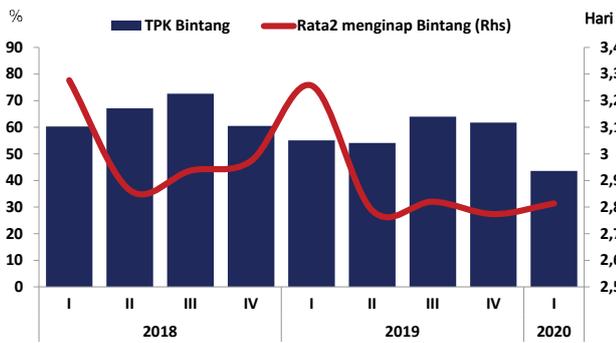
Grafik I.26. Perkembangan Kunjungan Wisman

Sumber: BPS, diolah



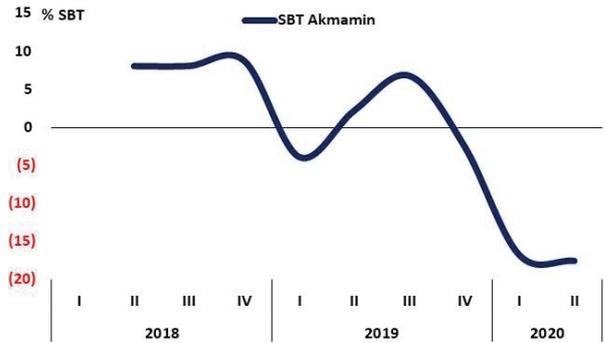
Grafik I.28. Kedatangan Penumpang di Pelabuhan Benoa dan Celukan Bawang

Sumber: PT. Pelindo III, diolah



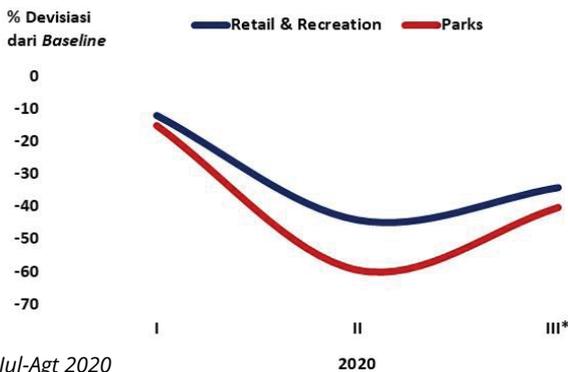
Grafik I.29. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang

Sumber : BPS, diolah



Grafik I.30. Perkembangan Kegiatan Usaha Akmamin

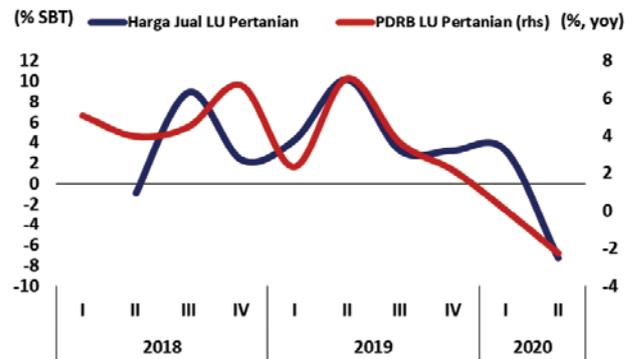
Sumber : SKDU Bank Indonesia



*) Jul-Agt 2020

Grafik I.31. Pergerakan Mobilitas Terkait Kegiatan LU Akmamin

Sumber : Google Community Mobility Reports, diolah



Grafik I.32. Perkembangan Harga Jual dan Kinerja PDRB LU Pertanian

Sumber : SKDU Bank Indonesia, BPS, diolah

sebelumnya yang sebesar 43,56% (Grafik I.29). Selain itu, realisasi perkembangan kegiatan usaha LU Akmamin menurut hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)⁷ juga menunjukkan penurunan dari -16,77% di triwulan I 2020 menjadi -17,55%, di triwulan II 2020.

Memasuki triwulan III 2020, kinerja LU Akmamin diperkirakan sedikit membaik. Perbaikan kinerja LU Akmamin ini terutama didorong oleh membaiknya kinerja pariwisata lokal seiring dengan dimulainya tatanan kehidupan era baru pada 9 Juli 2020 serta pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan nusantara sejak 31 Juli 2020. Indikasi perbaikan LU Akmamin ini tercermin dari hasil Saldo Bersih Tertimbang (SBT) ekspektasi pelaku usaha di triwulan III 2020 pada SKDU yang sebesar -9,10%, lebih tinggi dari realisasi triwulan II 2020 (-17,55%). Selain itu, perbaikan kinerja LU Akmamin juga terkonfirmasi dari meningkatnya mobilitas di tempat yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata (Grafik I.31) pada *google mobility index*.

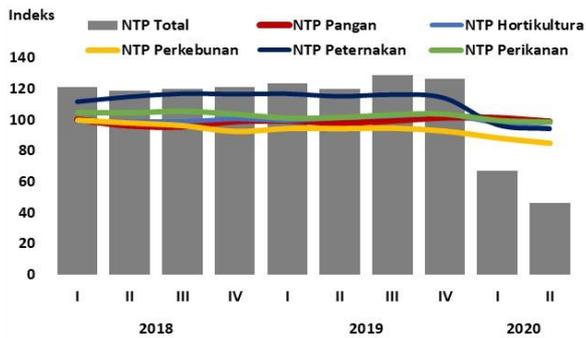
1.3.2. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan⁸

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, Perikanan menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Lapangan usaha pertanian berkontraksi sebesar 2,26% (yoy) pada triwulan II 2020, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,05% (yoy). Penurunan kinerja LU Pertanian disebabkan oleh menurunnya harga jual produk pertanian seiring dengan menurunnya daya beli masyarakat. Penurunan harga jual produk pertanian tercermin dari penurunan SBT harga jual LU Pertanian dari hasil SKDU (Grafik I.32).

Kinerja LU Pertanian pada triwulan II 2020 yang menurun terkonfirmasi dari Nilai Tukar Petani (NTP) dan hasil SKDU. NTP pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 93,96, menurun dari Triwulan I 2020 yang sebesar 96,67. Penurunan ini sejalan dengan penurunan harga jual produk pertanian. Penurunan NTP terjadi pada seluruh sub sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan (Grafik

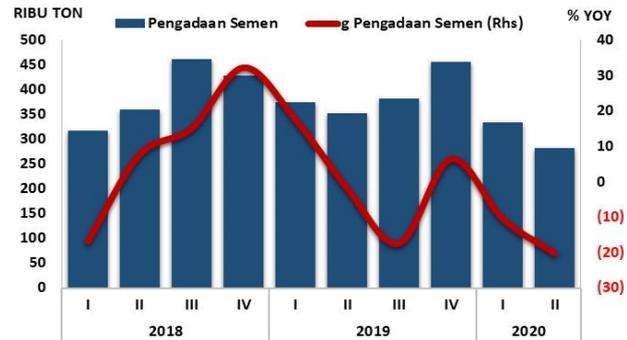
7 SKDU merupakan survei yang bertujuan untuk mendapatkan indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran secara triwulanan.

8 Selanjutnya disingkat sebagai LU Pertanian.



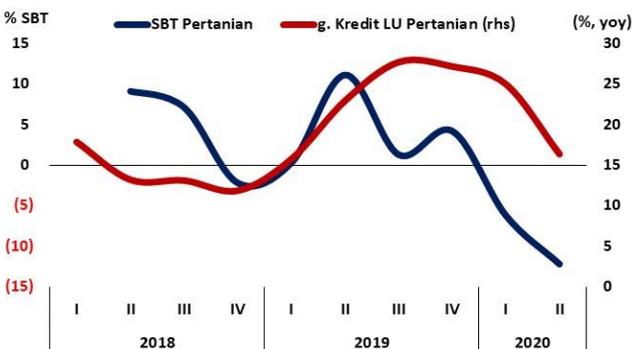
Grafik I.33. Nilai Tukar Petani

Sumber : BPS



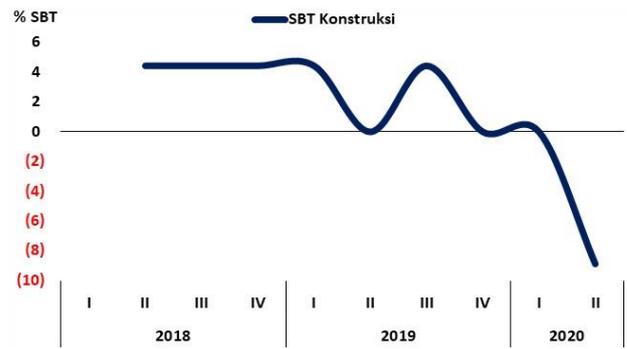
Grafik I.35. Perkembangan Penjualan Semen

Sumber : PT. Semen Indonesia, diolah



Grafik I.34. Perkembangan Kegiatan Usaha dan Kredit Pertanian

Sumber: LBU dan SKDU Bank Indonesia, diolah



Grafik I.36. Perkembangan Kegiatan Usaha Konstruksi

Sumber : SKDU Bank Indonesia

I.33). Penurunan tersebut sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha LU Pertanian pada SKDU yang menunjukkan penurunan dari -6,27% pada triwulan I 2020 menjadi -12,18% pada triwulan laporan (Grafik I.34). Selain itu, menurunnya kinerja pertanian juga tercermin dari pertumbuhan kredit LU Pertanian pada triwulan II 2020 (16,35%; yoy) yang melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (24,99%;yoy).

Kinerja LU Pertanian pada triwulan III 2020 diperkirakan terakselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja LU Pertanian pada triwulan III 2020 diperkirakan terutama bersumber dari kinerja tanaman pangan. Hal ini disebabkan musim kemarau tahun ini yang cenderung lebih basah dibandingkan dengan tahun lalu sehingga berpotensi meningkatkan luas lahan padi.

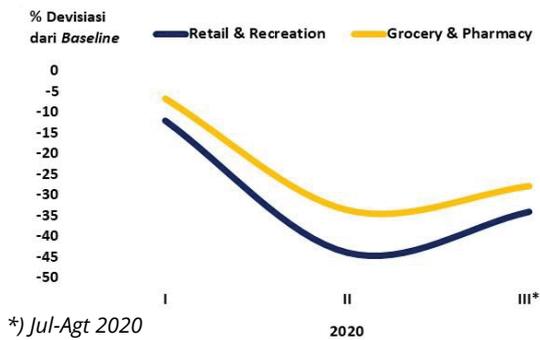
1.3.3. Lapangan Usaha Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi pada triwulan laporan menunjukkan penurunan dibanding dengan triwulan sebelumnya. LU Konstruksi pada triwulan laporan tercatat berkontraksi 2,42% (yoy), menurun dibanding dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,92% (yoy). Perlambatan kinerja LU ini seiring dengan

tertundanya penyelesaian pengerjaan sejumlah proyek akibat pandemi COVID-19, seperti proyek pembangunan hotel di Kabupaten Badung, perluasan terminal pelabuhan Benoa dan pengembangan bandara IG Ngurah Rai. Tertundanya proyek merupakan dampak dari kebijakan kesehatan *social distancing* serta adanya realokasi belanja modal pemerintah untuk bantuan COVID-19.

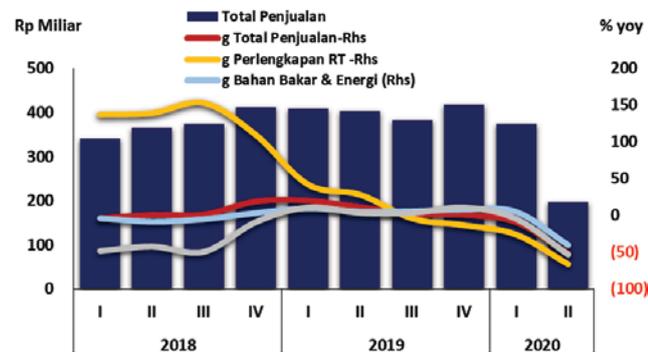
Kinerja LU Konstruksi yang melambat pada triwulan II 2020 terkonfirmasi dari pertumbuhan penjualan semen dan hasil SKDU. Penjualan semen pada triwulan II 2020 tumbuh -10,41% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,37% (yoy). Selain itu, perkembangan kegiatan usaha LU konstruksi hasil SKDU pada triwulan II 2020 juga menunjukkan penurunan (Grafik I. 36).

Kinerja LU Konstruksi pada triwulan III 2020 diperkirakan akan menurun dibanding dengan triwulan laporan. Kontraksi kinerja LU konstruksi pada triwulan III 2020 diperkirakan berlanjut dan sedikit lebih dalam dibandingkan dengan triwulan II 2020. Hal ini disebabkan oleh masih tertundanya sejumlah pengerjaan beberapa proyek konstruksi seperti proyek pengembangan Bandara IG Ngurah Rai.



Grafik I.37. Pergerakan Mobilitas Terkait Kegiatan LU Perdagangan

Sumber : Google Community Mobility Reports, diolah



Grafik I.38. Perkembangan Penjualan Eceran

Sumber SPE Bank Indonesia, diolah

1.3.4. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor

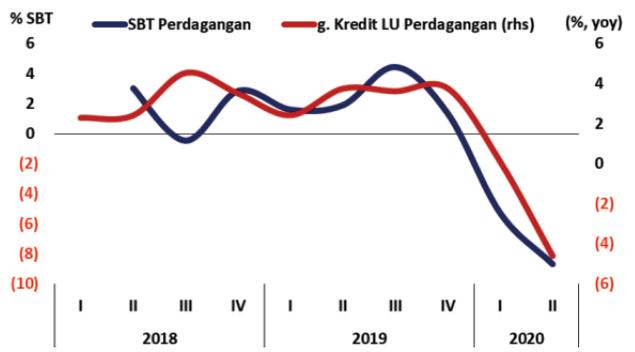
LU perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada triwulan laporan terkontraksi lebih dalam dibandingkan dengan sebelumnya. LU Perdagangan pada triwulan II 2020 terkontraksi -5,90% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya -1,67% (yoy). Kontraksi ini disebabkan oleh menurunnya kinerja pariwisata Bali seiring dengan menurunnya kunjungan wisatawan akibat COVID-19. Menurunnya kinerja pariwisata Bali berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat Bali sehingga menahan kinerja konsumsi RT. Selain itu, kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat serta pembatasan jam operasional pertokoan dan pasar turut menyebabkan aktivitas ekonomi pada LU perdagangan menurun. Menurunnya aktivitas di tempat yang berhubungan dengan aktivitas LU perdagangan juga tercermin dari penurunan *google mobility index* ke tujuan *grocery & pharmacy* serta *retail & recreation* (grafik I.37).

Kontraksi kinerja LU Perdagangan terkonfirmasi dengan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE), hasil Liaison, hasil SKDU dan kinerja kredit LU Perdagangan. Hasil SPE mencatat total penjualan terkontraksi sebesar 51,14% (yoy) pada triwulan laporan, menurun



Grafik I.39. Likert Scale Penjualan Domestik

Sumber: Liaison Bank Indonesia, diolah



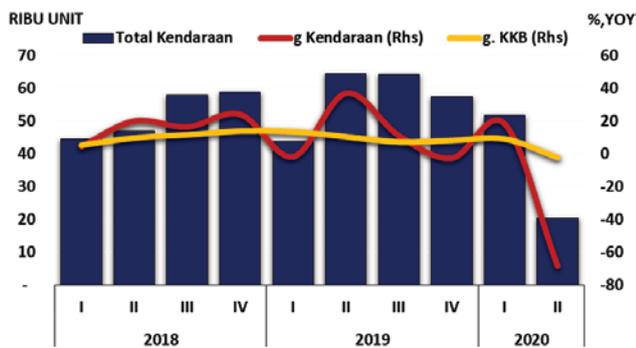
Grafik I.40. Perkembangan Kegiatan Usaha dan Kredit Perdagangan

Sumber: LBU dan SKDU Bank Indonesia, diolah

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 8,77% (yoy). Kontraksi penjualan tersebut terutama bersumber dari kontraksi penjualan perlengkapan RT, bahan bakar dan energi, serta makanan, minuman dan tembakau (Grafik I.38). Hasil liaison Bank Indonesia juga menunjukkan *likert scale* penjualan domestik yang menurun dari 1,14 pada triwulan I 2020 menjadi -1,50 pada triwulan laporan (Grafik I.39). Selain itu, hasil perkembangan kegiatan usaha dalam hasil SKDU dan kinerja kredit LU Perdagangan juga menunjukkan penurunan masing-masing dari -5,30% dan 0,11% (yoy) pada triwulan I 2020 menjadi -8,70% dan -4,60% pada triwulan laporan (Grafik I.40).

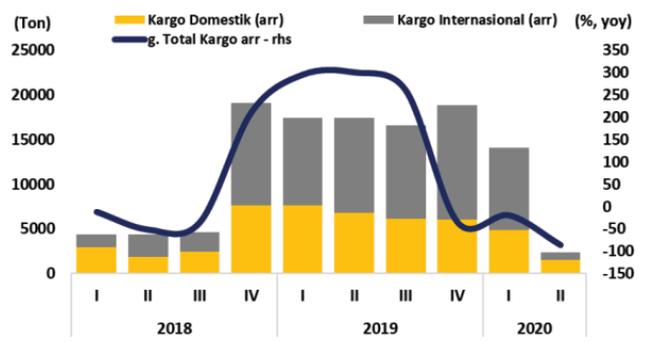
Penurunan Kinerja LU Perdagangan besar dan eceran juga tercermin dari penurunan penjualan kendaraan.

Pada triwulan II 2020, penjualan kendaraan terkontraksi sebesar 68,15% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,19% (yoy). Menurunnya daya beli masyarakat akibat penurunan kinerja pariwisata serta adanya pembatasan mobilitas masyarakat diperkirakan menyebabkan terjadinya penurunan penjualan kendaraan. Penurunan penjualan kendaraan bersumber dari penjualan kendaraan roda dua dan roda empat. Sejalan dengan penurunan penjualan kendaraan, kinerja Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) di triwulan II 2020 yang



Grafik I.41. Perkembangan Penjualan Kendaraan dan KKB

Sumber: LBU Bank Indonesia dan Badan Pendapatan Daerah, diolah



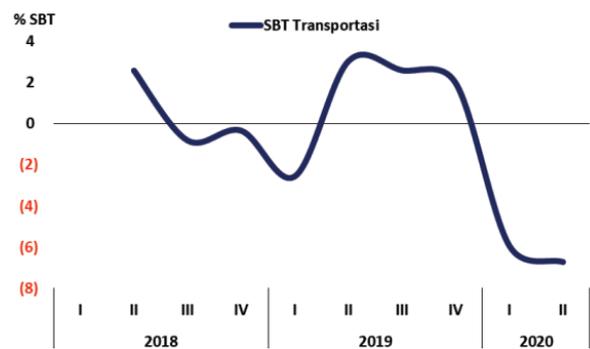
Grafik I.43. Kedatangan Kargo di Bandara IG Ngurah Rai

Sumber : PT AP I, diolah



Grafik I.42. Perkembangan Kedatangan Penumpang Bandara Ngurah Rai

Sumber : PT AP I, diolah



Grafik I.44. Perkembangan Kegiatan Usaha Transportasi

Sumber: SKDU Bank Indonesia, diolah

terkontraksi, menurun dari triwulan sebelumnya (Grafik I.41).

Kinerja LU Perdagangan besar dan eceran pada triwulan III 2020 diperkirakan akan sedikit membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini seiring dengan penerapan tatanan kehidupan era baru yang memberikan pelonggaran terhadap aktivitas masyarakat serta membuka kembali kegiatan pariwisata untuk wisnus. Peningkatan aktivitas masyarakat pada pusat pertokoan dan perbelanjaan di triwulan III 2020 juga mulai terlihat dari perkembangan *google mobility index* (grafik I.37). Selain itu, peningkatan LU perdagangan juga diperkirakan didorong oleh persiapan kampanye pemilukada serentak.

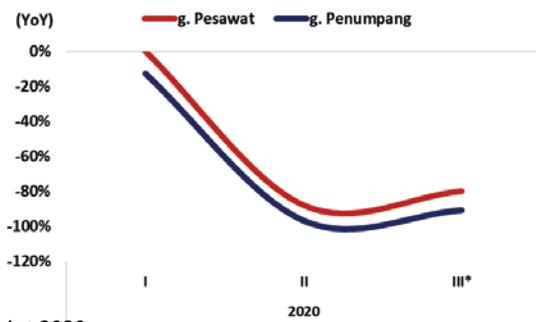
1.3.5. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

Kinerja LU Transportasi menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. LU Transportasi terkontraksi sebesar 39,48% (yoy) pada triwulan II 2020, menurun dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 6,21% (yoy). Menurunnya kinerja LU Transportasi sejalan dengan masih diterapkannya kebijakan *travel restriction* di negara asal wisman serta pembatasan

mobilitas orang di Indonesia. Hal tersebut juga yang membuat kinerja pariwisata menurun di triwulan laporan.

Penurunan kinerja LU Transportasi pada triwulan laporan terkonfirmasi oleh kedatangan penumpang di Bandara IG Ngurah Rai, kedatangan kargo, serta hasil SKDU. Total kedatangan penumpang (domestik dan internasional) di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada triwulan II 2020 terkontraksi sebesar 98,23% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 17,95% (yoy) (Grafik.I.42). Selain itu, kedatangan kargo di Bandara Ngurah Rai pada triwulan II 2020 terkontraksi sebesar 86,14% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya (-19,59%;yoy) (Grafik I.43). Sejalan dengan itu, perkembangan kegiatan usaha transportasi hasil SKDU menunjukkan penurunan dari -5,94% menjadi -6,73% pada triwulan laporan (Grafik I.44).

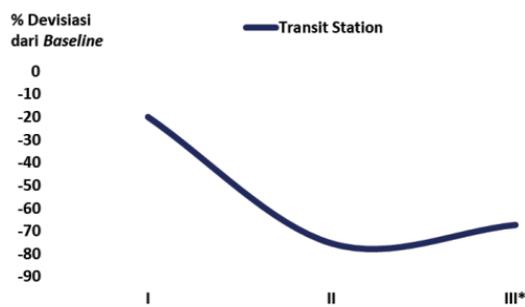
Kinerja LU Transportasi pada triwulan III 2020 diperkirakan sedikit membaik. Perbaikan pada LU Transportasi seiring dengan mulai dibukanya pariwisata untuk wisnus pada 31 Juli 2020. Sejak pariwisata kembali dibuka, aktivitas di Bandara IG Ngurah Rai mulai menunjukkan peningkatan terutama pada terminal



*) Jul-Agt 2020

Grafik I. 45. Perkembangan Kedatangan Pesawat dan Penumpang Domestik di Bandara IG Ngurah Rai

Sumber : PT AP I, diolah



*) Jul-Agt 2020

Grafik I. 46. Pergerakan Mobilitas di Pusat Transportasi Umum

Sumber : Google Community Mobility Reports, diolah

domestik (Grafik I.45). Selain itu, aktivitas masyarakat di pusat area transportasi umum seperti terminal juga sudah mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini tercermin dari perkembangan mobilitas di area *transit station* pada *google mobility index* (Grafik I.46).

BOKS 1

POTENSI DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN KOMODITAS KOPI DI BALI



Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan pertanian Bali. Hal tersebut terkonfirmasi dengan penetapan Bali menjadi salah satu daerah sentra hilirisasi pertanian untuk komoditas kopi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. Hal ini sejalan dengan Bali sebagai salah satu daerah utama penghasil kopi di Indonesia. Menurut data Kementerian Pertanian tahun 2019, Bali memproduksi kopi sebanyak 15.306 ton (Gambar Boks I.1). Produksi ini berasal dari lahan seluas 35.023 Ha. Secara Nasional, tingkat produksi kopi Bali berada di peringkat 13 besar di tahun 2019.

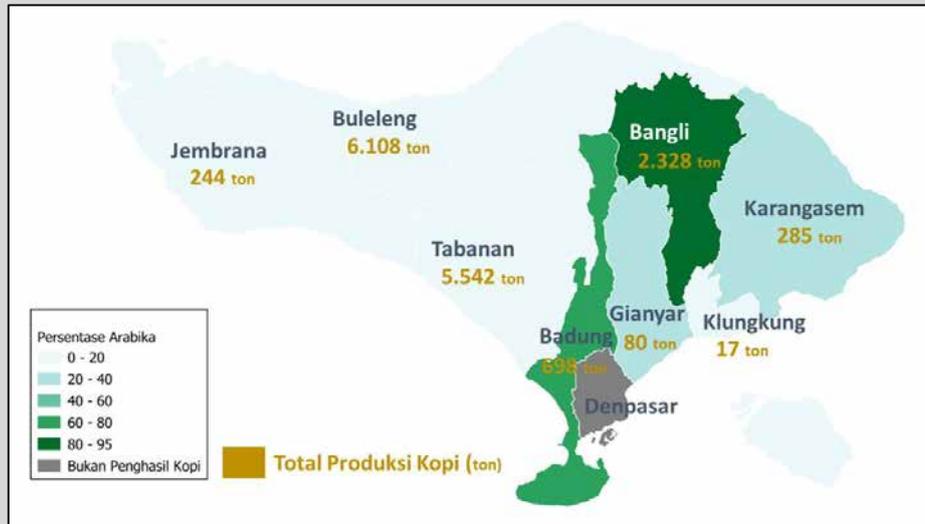
Secara spasial, kabupaten penghasil utama kopi di Bali adalah Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, serta Kabupaten Bangli. Ketiga kabupaten tersebut masing-masing menghasilkan kopi sebesar 6.108 ton, 5.542 ton, serta 2.328 ton pada tahun 2019. Sementara itu, menurut jenis kopinya, kabupaten/kota di Bali utamanya menghasilkan kopi robusta (73%). Sementara itu, untuk kopi arabika, Kabupaten Bangli menjadi daerah penghasil utama jenis kopi tersebut di Bali. Pada tahun 2019, Kabupaten Bangli menghasilkan 2.247 ton kopi arabika, 54% dari total kopi arabika yg dihasilkan Bali. (Gambar Boks I.2).

Gambar Boks I.1. Produksi Kopi Menurut Provinsi (Ton), 2019



Sumber : Kementan, diolah

Gambar Boks I.2. Produksi Kopi Arabika Versus Robusta Bali, 2019



Sumber : BPS Bali, diolah

Tabel Boks I.1. Luas Perkebunan Kopi Menurut Provinsi dan Status Lahan, 2019

Provinsi	Perkebunan Rakyat	Perkebunan Negara	Perkebunan Swasta
Sumatera Selatan	251.027	-	-
Lampung	156.862	-	-
Sumatera Utara	97.546	-	-
Aceh	125.259	-	-
Jawa Timur	72.736	18.038	19.451
Bengkulu	86.475	-	464
Sulawesi Selatan	69.657	-	1.752
Jawa Tengah	43.777	1.145	553
Nusa Tenggara Timur	73.250	-	14
Jawa Barat	43.384	530	204
Sumatera Barat	29.631	-	-
Jambi	28.096	-	-
Bali	35.011	12	-
Nusa Tenggara Barat	13.770	332	-
Sulawesi Barat	15.438	-	-
INDONESIA	1.215.539	20.056	22.437

Sumber : Kementerian Pertanian

Sebagian besar (99%) perkebunan kopi di Bali diusahakan oleh petani kecil (perkebunan rakyat).

Sementara itu, perkebunan negara maupun perkebunan swasta masih sangat minim. Karakteristik seperti ini juga terjadi secara umum di Indonesia, termasuk di provinsi-provinsi utama lain penghasil kopi. Secara nasional, 96,62% perkebunan kopi adalah perkebunan rakyat. Sementara itu, pangsa perkebunan negara dan perkebunan swasta masih kecil, dibawah 2%. (Tabel Boks I.1)

Potensi : Kualitas Biji Kopi Bali

Potensi kopi Bali bisa dilihat dari mutu biji kopi Bali baik dari segi fisik biji kopi maupun dari segi karakteristik cita rasa kopi. Dari segi fisik biji kopi, kualitas biji kopi yang baik adalah biji kopi yang ukurannya

homogen karena akan menghasilkan kopi sangrai (*roasted*) yang lebih seragam. Secara umum, kualitas biji kopi Bali cukup baik bahkan unggul dibandingkan dengan biji kopi Lampung sebagai daerah utama penghasil kopi di Indonesia.

Secara umum, berbagai jenis varietas biji kopi Bali memiliki rata-rata kehomogenan ukuran biji lebih tinggi dibanding dengan kopi di Lampung (Tabel Boks I.2). Selain itu, menurut hasil penilaian cita rasa memperlihatkan bahwa kopi Bali lebih baik daripada cita rasa kopi asal Lampung (Tabel Boks I.3). Kopi Bali bisa masuk kategori kopi *specialty* atau disebut *fine* Robusta.

Potensi : Kopi Specialty Bali

Bali juga mempunyai jenis Specialty Coffee¹ yaitu kopi arabika Kintamani. Kopi *special* Kintamani diproduksi oleh petani yang tergabung dalam Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Petani yang tergabung dalam koperasi MPIG Kintamani melakukan budidaya kopi dengan sistem tumpang sari sehingga memberikan cita rasa buah yang kuat (Tabel Boks I.5). Untuk mendukung pengembangan usaha pengolahan dan produksi kopi arabika Kintamani telah dibentuk badan usaha berbadan hukum Koperasi MPIG pada tahun 2013. Melalui koperasi MPIG Kintamani, pemasaran kopi arabika Kintamani dilakukan melalui kontrak tetap dengan berbagai perusahaan pengeksport kopi.

Potensi : Industri Pengolahan Kopi Bubuk

Industri pengolahan kopi bubuk Bali masih didominasi oleh pelaku usaha perorangan dengan kemampuan memproduksi sekitar 2-5 ton per tahun. Secara spasial,

1 Syarat *specialty coffee* : (i) umumnya dikelola dengan cara *organic*; (ii) biji kopi petik merah; (iii) *total defect* <4%; (iv) *cupping test* >80

Tabel Boks I.2. Perbandingan Karakteristik Fisik Biji Kopi Robusta Bali dan Lampung

No	Karakteristik	Nilai (%)					
		Bali			Lampung		
		BP 42	BP 358	BP 308	BP 42	BP 358	BP 308
1	Rendemen Biji	24,59	24,6	27,64	15,64	15,14	16,2
2	Biji Normal	65,88	56,09	39,97	44,79	46,44	56,63
3	Biji Tunggal	24,64	37,73	56,63	4,79	10,18	21,32
4	Biji Cacat	9,75	6,53	3,73	50,81	43,24	22,33
5	Biji Besar	95,9	97,73	97,24	82,86	84,65	75,46
6	Biji Kecil	4,27	2,99	2,98	16,66	14,37	21,7

Sumber : Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar dalam Laporan Pelaksanaan "Rencana Aksi Pengembangan Industri Agro Kopi Di Provinsi Bali Tahun 2016"

Tabel Boks I.3. Perbandingan Karakteristik Fisik Biji Kopi Robusta Bali dan Lampung

No	Karakteristik (%)	Bali			Lampung		
		BP 42	BP 358	BP 308	BP 42	BP 358	BP 308
1	<i>Fragrance</i>	7,63	7,38	7,38	7	6,88	6,38
2	<i>Flavor</i>	7,75	7,66	7,63	7,63	6,75	7,63
3	<i>After Taste</i>	7,75	7,38	7,5	7,38	6,25	7,38
4	<i>Salt/Acid</i>	7,75	7	7,25	7,25	6,88	7,5
5	<i>Bitter/Sweet</i>	7,88	7,38	7,63	7,25	6,75	7,38
6	<i>Mouthfeel/Body</i>	7,75	7,63	7,5	7,75	7	7
7	<i>Uniform Cups</i>	10	10	10	10	10	10
8	<i>Balance</i>	7,88	7,38	7,5	7,25	6,5	7,25
9	<i>Clean Cups</i>	10	10	10	10	0	10
10	<i>Overall</i>	8	7,5	7,63	7,38	6,5	7,25
11	<i>Tanuts-Faults</i>	None	None	None	None	None	None
12	<i>Final Score</i>	83,28	79,25	80	78,88	63,33	77,5

Sumber : Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar dalam Laporan Pelaksanaan "Rencana Aksi Pengembangan Industri Agro Kopi Di Provinsi Bali Tahun 2016"

Tabel Boks I.4. Profil Kopi Kintamani Bali

Karakter Kopi Kintamani	Profil Koperasi MPIG Kintamani
<ul style="list-style-type: none"> Rasa pahit yang rendah Intensitas aroma yang kuat dengan rasa buah khususnya jeruk Memiliki sertifikat Indikasi Geografis sejak tahun 2018 	<ul style="list-style-type: none"> Dibentuk sejak tahun 2013 Beranggotakan 64 subak, 36.000 petani Panen : 2.000 – 3.000 ton kopi/panen

Sumber : Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar dalam Laporan Pelaksanaan "Rencana Aksi Pengembangan Industri Agro Kopi Di Provinsi Bali Tahun 2016"

sebagian besar unit usaha pengolahan kopi bubuk banyak berada di Kabupaten Bangli. Namun demikian, perusahaan kopi bubuk yang memiliki kapasitas produksi yang lebih besar lebih banyak terdapat di Kabupaten Badung (Tabel Boks I.4). Ke depan, usaha industri pengolahan kopi ini sangat potensial untuk terus didorong dengan penerapan teknologi hasil pengolahan.

Untuk terus mendorong daya saing kopi Bali sebagai komoditas unggulan, kopi Bali perlu terus didorong untuk peningkatan nilai tambah. Untuk melakukan akselerasi dalam mendorong peningkatan nilai tambah

kopi Bali, masih terdapat sejumlah tantangan-tantangan. Tantangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu terkait faktor produksi, kelembagaan, dan kerjasama perdagangan.

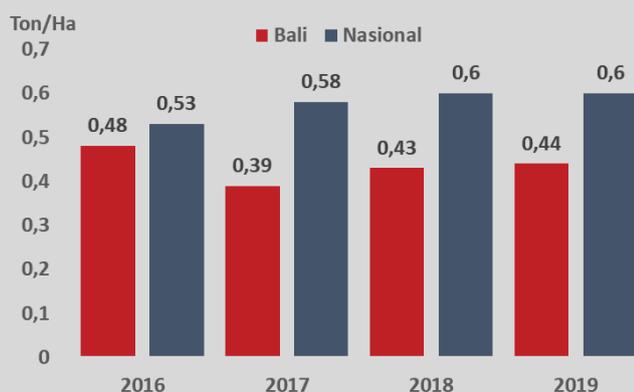
Tantangan Faktor Produksi (P1)

Masih terdapatnya tantangan dari sisi produksi terkonfirmasi dari produktivitas lahan kopi Bali yang belum optimal. Perkembangan produktivitas lahan kopi Bali masih dibawah nasional. Pada tahun 2019, produktivitas lahan kopi Bali sebesar 0,44 ton/ha,

Tabel Boks I.5. Profil IKM Kopi Bubuk Bali

No	Kabupaten	Jumlah Perusahaan	Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp 000)	Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Rp 000)
1	Jembrana	6	15	54.000	43380	647700
2	Tabanan	9	45	700.236	68716	3129060
3	Denpasar	16	175	2.307.066	4222809	15300019
4	Badung	44	224	2.293.106	462600	24868262
5	Gianyar	6	28	3.199.630	2840	3900000
6	Bangli	81	220	875.048	80891	14144857
7	Karangasem	10	49	181.754	233900	177673
8	Klungkung	9	70	165.387	27028	453392
9	Buleleng	54	268	588.470	236840	5214607
TOTAL		235	1.094	10.364.697	5.379.004	67.835.570

Sumber : Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar dalam Laporan Pelaksanaan “Rencana Aksi Pengembangan Industri Agro Kopi Di Provinsi Bali Tahun 2016”



Grafik Boks I.1. Perbandingan Produktivitas Lahan Kopi Bali dan Nasional

Sumber : Kementan, diolah

dibawah Nasional yang sebesar 0,60 ton/ha (Grafik Boks I.1). Belum optimalnya produktivitas lahan kopi Bali salah satunya dipengaruhi oleh minimnya praktek bertani yang baik (*Good Agriculture Practice/GAP*)². Selain itu, adanya tanaman tua juga ikut membuat produktivitas lahan rendah. Secara umum, diperkirakan 50% pohon kopi di Indonesia sudah mencapai usia 50 tahun ke atas³. Sementara itu, menurut data Kementan, jumlah tanaman tidak menghasilkan di perkebunan kopi di Bali mencapai 8%.

Pentingnya penerapan GAP dalam mendorong produktivitas lahan kopi telah dibuktikan di berbagai negara. Organisasi *Non Profit Terchno Serve* melakukan program pelatihan GAP lewat *Farm College Training Program* di berbagai negara di Afrika yaitu Ethiopia, Kenya, Rwanda, dan Tanzania. Program pelatihan tersebut berdampak pada peningkatan jumlah petani yang melakukan praktek

GAP sebesar 56% secara rata-rata di keempat negara tersebut. Dengan peningkatan implementasi praktek GAP tersebut kemudian berdampak pada peningkatan hasil panen sebesar 38%⁴.

Tantangan Kelembagaan (P2)

Sebagaimana di provinsi lain, sebagian besar perkebunan kopi di Bali ada perkebunan rakyat.

Dengan demikian, fungsi kelembagaannya tidak begitu kuat dibanding dengan perkebunan negara atau perkebunan swasta. Namun demikian, fungsi kelembagaan perkebunan rakyat bisa diperkuat dengan pembentukan koperasi. Di Bali sendiri, secara kelembagaan koperasi kelompok tani kopi, sudah terbentuk berbagai koperasi tani kopi seperti Koperasi MPIG Arabika Kintamani. Akan tetapi, peran koperasi tersebut belum optimal, terutama dalam hal kontrol praktek GAP serta dalam hal pemasaran ke luar negeri. Hingga tahun 2020, belum ada koperasi petani kopi di Bali yang memiliki izin langsung untuk melakukan ekspor ke luar negeri⁵. Kelembagaan koperasi tani kopi yang belum kuat juga berdampak pada terbatasnya akses permodalan.

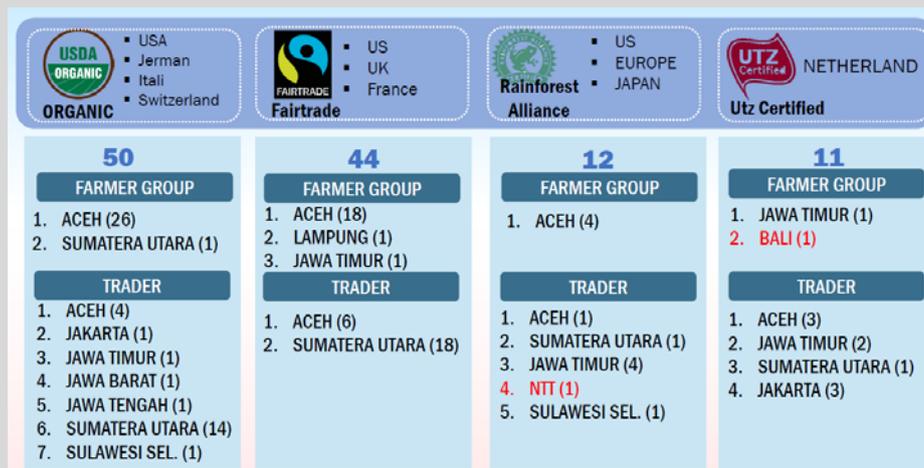
Tantangan Perdagangan Luar Negeri (P3)

Tantangan lainnya dalam pengembangan komoditas kopi di Bali adalah minimnya sertifikasi pasar internasional yang dimiliki oleh petani kopi di Bali.

Di pasar internasional, terdapat empat sertifikasi utama yaitu USDA Organic, Fairtrade, Rainforest Alliance, dan UTZ Certified. Keempat sertifikasi ini memiliki negara pasarnya masing-masing. Misalnya, untuk Fairtrade, banyak diminta oleh pembeli di US, UK, France. Di Bali

2 Minimnya praktek GAP pada perkebunan kopi di Bali juga dikonfirmasi oleh kelompok tani kopi MPIG Kintamani Bali dalam FGD yang dilakukan Bank Indonesia
 3 Perkiraan dari Organisasi Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI)
 4 Technoserve, *Brewing Prosperity in East Africa*. 2016
 5 Hasil FGD dengan kelompok tani koperasi MPIG Arabika Kintamani

Gambar Boks I.3. Jumlah Badan Usaha di Indonesia Dengan Sertifikat Pasar Internasional



Sumber : USDA, Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ.

sendiri, baru ada satu kelompok tani yang memiliki sertifikasi pasar internasional tersebut. Kelompok tani di provinsi lain seperti Aceh sudah cukup banyak yang memiliki berbagai sertifikat pasar internasional (Gambar Boks I.3)

Rekomendasi Kebijakan

Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan diatas, hal utama yang perlu dilakukan adalah penguatan kelembagaan petani kopi. Penguatan kelembagaan petani kopi tersebut dapat dilakukan melalui program korporatisasi petani berbasis koperasi. Melalui korporatisasi kelompok tani, perlu didorong konsolidasi lahan per koperasi untuk mencapai skala ekonomi (minimal 100 Ha per koperasi). Dengan korporatisasi tersebut, juga dapat didorong kepemilikan unit pengolahan dengan kapasitas minimal 50 ton per hari. Selain itu, melalui program korporatisasi petani kopi, juga dapat ditingkatkan permodalan koperasi misalnya melalui alokasi KUR yang lebih tinggi.

Kelembagaan petani kopi yang kuat melalui program korporatisasi, akan meningkatkan efektivitas program penyuluhan praktek GAP dan mempermudah sertifikasi pasar internasional. Hal itu karena dengan kelembagaan petani kopi yang kuat, bisa menjadi mekanisme kontrol untuk praktek GAP apabila sudah dilakukan penyuluhan. Selain itu, kelompok tani juga memiliki kemampuan finansial dan kelembagaan untuk bisa memiliki sertifikasi pasar internasional sehingga kopi Bali semakin bisa terjual di pasar internasional.

Halaman ini sengaja dikosongkan





BAB II

KEUANGAN PEMERINTAH

- Realisasi belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Wilayah Bali pada triwulan II tahun 2020 tercatat sebesar Rp11,43 triliun atau tumbuh -6,61% (yoy). Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi belanja triwulan II tahun 2019 yang sebesar 11,78% (yoy), dengan nominal Rp5,04 triliun.
- Kinerja Pendapatan Daerah juga tertahan. Hal ini tercermin dari realisasi pendapatan daerah di Wilayah Bali pada triwulan II tahun 2020 yang tercatat tumbuh -12,78% (yoy), atau lebih rendah dibanding dengan pertumbuhan triwulan II tahun 2019 yang sebesar 8,44% (yoy).



KONDISI UMUM

Realisasi belanja pemerintah (APBD & APBN) di Bali pada triwulan II tahun 2020 tercatat sebesar Rp11,43 triliun atau tumbuh -6,61% (yoy). Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi belanja triwulan II tahun 2019 yang tumbuh sebesar 11,78% (yoy), dengan nominal Rp12,24 triliun. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya serapan belanja daerah untuk APBN dan APBD Kabupaten/Kota, sementara APBD Provinsi mengalami peningkatan serapan belanja. Demikian pula realisasi pendapatan daerah juga tertahan. Realisasi pendapatan daerah di Bali pada triwulan II tahun 2020 tercatat tumbuh -12,78% (yoy), atau lebih rendah dibanding dengan pertumbuhan triwulan II tahun 2019 yang tumbuh sebesar 8,44% (yoy).

2.1. PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DI WILAYAH BALI

Pagu anggaran perubahan belanja pemerintah di Bali (APBD & APBN) tahun 2020 tercatat sebesar Rp34,30 triliun atau tumbuh -14,76% (yoy). Pertumbuhan tersebut jauh lebih rendah dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,70% (yoy) dengan nominal Rp40,25 triliun. Komposisi pagu anggaran belanja terdiri atas anggaran Kementerian dan Lembaga Vertikal (APBN) sebesar Rp11,99 triliun (pangsa 34,96%), anggaran (APBD-P) Provinsi Bali sebesar Rp5,79 triliun (16,89%) dan anggaran gabungan (APBD-P) kabupaten/kota⁹ sebesar Rp16,52 triliun (48,15%). Perlambatan pagu anggaran belanja pemerintah, sejalan dengan terbatasnya pertumbuhan pagu anggaran pendapatan pemerintah pada periode yang sama.

Realisasi belanja pemerintah (APBD & APBN) di Bali pada triwulan II tahun 2020 tercatat sebesar Rp11,43 triliun atau tumbuh -6,61% (yoy). Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi belanja triwulan II tahun 2019 yang tumbuh sebesar 11,78% (yoy), dengan nominal Rp12,24 triliun. Penurunan realisasi belanja tersebut, terutama disebabkan oleh

kontraksi pertumbuhan realisasi belanja di kategori APBN yang mengalami kontraksi 6,00% (yoy) dan APBD Kabupaten/Kota yang terkontraksi sebesar 15,34% (yoy) pada triwulan II 2020. Kondisi ini seiring dengan kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan COVID-19.

Serapan (persentase realisasi terhadap pagu) belanja pemerintah menunjukkan peningkatan pada triwulan II 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Serapan belanja pemerintah tercatat sebesar 33,33% pada triwulan II 2020, meningkat dibanding dengan triwulan II tahun 2019 (30,42%). Peningkatan ini terutama bersumber dari peningkatan serapan belanja untuk kategori APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Peningkatan serapan anggaran belanja pemerintah pada triwulan II tahun 2020 merupakan dampak dari penyesuaian pagu anggaran belanja akibat adanya pandemi COVID-19.

Pagu anggaran pendapatan daerah di Bali pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp20,78 triliun atau tumbuh -23,22% (yoy). Anggaran tersebut terdiri atas anggaran Provinsi Bali sebesar Rp4,85 triliun (pangsa 23,33%) dan anggaran gabungan kabupaten/kota¹⁰ sebesar Rp15,93 triliun (pangsa 76,77%). Baik pagu pendapatan di kabupaten/kota maupun pagu provinsi mengalami kontraksi.

Tabel II.1. Target Anggaran Belanja Perubahan Pemerintah di Bali Tahun 2019-2020

KATEGORI	PAGU BELANJA (APBD-P & APBN-P) TAHUN 2019 (Rp Miliar)	GROWTH PAGU BELANJA 2019 (%.yoy)	PAGU BELANJA (APBD & APBN) TAHUN 2020 (Rp Miliar)	GROWTH PAGU BELANJA 2020 (%.yoy)
APBN	11.421	9,26	11.993	5,01
APBD Provinsi	7.201	9,18	5.794	(19,54)
APBD Kabupaten/Kota	21.623	(4,00)	16.516	(23,62)
TOTAL	40.245	1,70	34.303	(14,76)

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, untuk APBN bersumber dari DJPb Provinsi Bali

9 Data APBD kabupaten/kota mencakup 9 kabupaten/kota yang ada di Bali. Sumber data BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota

10 Data APBD kabupaten/kota mencakup 9 kabupaten/kota yang ada di Bali.

Tabel II.2. Realisasi Belanja Pemerintah di Bali Triwulan I Tahun 2019-2020

KATEGORI	REALISASI BELANJA (APBD & APBN) TW II 2019 (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI BELANJA (APBD & APBN) TW II 2019 (%)	GROWTH REALISASI BELANJA TW II 2019 (% ,yoy)	REALISASI BELANJA (APBD & APBN) TW II 2020 (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI BELANJA (APBD & APBN) TW II 2020 (%)	GROWTH REALISASI BELANJA TW II 2020 (% ,yoy)
APBN	2.870	25,13	68,86	2.698	22,50	(6,00)
APBD Provinsi	1.948	27,06	(13,13)	2.450	42,28	25,74
APBD Kabupaten/Kota	7.422	34,33	5,77	6.284	38,05	(15,34)
TOTAL	12.241	30,42	11,78	11.432	33,33	(6,61)

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota, untuk APBN bersumber dari DJPb Provinsi Bali

Tabel II.3. Target Anggaran Pendapatan Pemerintah di Bali Tahun 2019-2020

KATEGORI	PAGU PENDAPATAN (APBD) TAHUN 2019 (Rp Miliar)	GROWTH PAGU PENDAPATAN 2019 (% ,yoy)	PAGU PENDAPATAN (APBD) TAHUN 2020 (Rp Miliar)	GROWTH PAGU PENDAPATAN 2020 (% ,yoy)
APBD Provinsi	6.499	4,82	4.850	(25,38)
APBD Kabupaten/Kota	20.571	(0,79)	15.934	(22,54)
TOTAL	27.070	0,51	20.783	(23,22)

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota

Tabel II.4. Realisasi Pendapatan Pemerintah di Bali Triwulan II Tahun 2019-2020

KATEGORI	REALISASI PENDAPATAN (APBD) TW II 2019 (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN (APBD) TW II 2019 (%)	GROWTH REALISASI PENDAPATAN TW II 2019 (% ,yoy)	REALISASI PENDAPATAN (APBD & APBN) TW II 2020 (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN (APBD) TW II 2020 (%)	GROWTH REALISASI PENDAPATAN TW II 2020 (% ,yoy)
APBD Provinsi	3.464	53,31	9,55	2.637	54,38	(23,88)
APBD Kabupaten/Kota	8.805	42,80	8,00	8.064	50,61	(8,42)
TOTAL	12.269	45,32	8,44	10.701	51,49	(12,78)

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota

Di sisi lain, kinerja pendapatan daerah sedikit tertahan. Hal ini tercermin dari realisasi pendapatan daerah di Bali pada triwulan II tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 12,78% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2019 yang tumbuh sebesar 8,44%. Namun demikian, kinerja pendapatan pemerintah dari serapan (realisasi pendapatan terhadap pagu) tercatat meningkat sebesar 51,49% pada triwulan II tahun 2020, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II tahun 2019 yang sebesar 45,32%.

Realisasi pendapatan yang menurun tersebut bersumber dari penurunan realisasi APBD Kabupaten/Kota, maupun APBD Provinsi. Kondisi ini terutama disebabkan oleh melambatnya realisasi komponen Dana Perimbangan, sejalan dengan melambatnya realisasi DAK. Sejalan dengan hal tersebut, realisasi komponen retribusi daerah juga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh penurunan kegiatan pariwisata sebagai dampak COVID-19. Pemerintah Provinsi Bali berupaya untuk memperbaiki realisasi pendapatan melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satunya adalah melalui pelaksanaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan mulai tanggal 21 April 2020 s/d 28 Agustus 2020 pada lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

2.2. APBD PROVINSI BALI

Anggaran pemerintah Provinsi Bali (APBD-P) pada tahun 2020 kembali mengalami defisit, yaitu sebesar Rp755 miliar. Kebijakan defisit anggaran ini mencerminkan strategi kebijakan fiskal pemerintah daerah yang ekspansif untuk mendukung peningkatan investasi dan konsumsi. Kebijakan ini diharapkan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Target pendapatan maupun belanja pemerintah provinsi dalam anggaran perubahan pada tahun 2020 lebih rendah dibanding dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia dan berdampak pada perekonomian Bali.

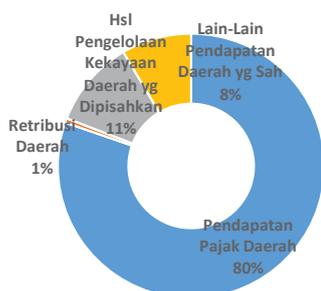
2.2.1. Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Bali.

Anggaran pendapatan APBD Provinsi Bali tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun 2019,

Tabel II.5. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2019-2020

KATEGORI	2019						2020					
	PAGU APBD (Rp Miliar)	PAGU APBD-P (Rp Miliar)	GROWTH PAGU APBD-P (%)	REALISASI APBD TW II (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI TW II (%)	GROWTH REALISASI TW II (%.yoy)	PAGU APBD-P (Rp Miliar)	GROWTH PAGU APBD-P (%)	REALISASI APBD TW II (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI TW II (%)	GROWTH REALISASI TW II (%.yoy)	
PENDAPATAN DAERAH	6.323	6.499	4,82	3.573	54,98	12,99	5.471	(15,81)	2.637	48,20	(26,20)	
PEND. ASLI DAERAH (PAD)	3.588	3.763	5,49	2.046	54,39	15,55	2.848	(24,32)	1.665	58,47	(18,63)	
- Pendapatan Pajak Daerah	3.069	3.235	4,42	1.672	51,69	18,61	2.420	(25,21)	1.338	55,28	(20,02)	
- Retribusi Daerah	50	50	2,83	16	32,03	(20,97)	26	(46,89)	9	34,05	(43,54)	
- Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	171	171	(0,17)	171	100,11	0,00	177	3,84	177	99,87	0,00	
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yg Sah	298	307	23,18	187	60,96	9,38	224	(26,90)	141	63,02	(24,42)	
DANA PERIMBANGAN	2.662	2.662	2,92	1.490	55,97	8,92	2.567	(3,58)	938	36,53	(37,06)	
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	186	186	(13,67)	75	40,15	(13,64)	180	(3,39)	76	42,30	1,77	
- Dana Alokasi Umum (DAU)	1.326	1.326	4,51	773	58,33	5,65	1.211	(8,66)	728	60,11	(5,87)	
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.150	1.150	4,33	642	55,79	16,82	1.176	2,25	134	11,36	(79,17)	
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	74	74	59,60	37	50,04	58,02	57	(23,22)	34	60,08	(7,80)	
- Pendapatan Hibah	5	6	14,60	3	50,47	4,98	5	(3,85)	3	52,97	0,91	
- Dana Penyesuaian & otonomi khusus	68	68	64,90	34	50,00	64,90	51	(24,80)	31	60,83	(8,52)	

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan kabupaten/kota



Grafik II.1. Komposisi Realisasi PAD Provinsi Bali 2020

Sumber: BPKAD Provinsi Bali (diolah)



Grafik II.2. Komposisi Realisasi Pajak Daerah Provinsi Bali 2020

Sumber: BPKAD Provinsi Bali (diolah)

bersumber dari penurunan komponen **Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah**. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan tumbuh -24,32% (yoy) dengan komponen utama bersumber dari pajak daerah. Dana Perimbangan ditargetkan tumbuh -3,58% (yoy) dengan pendorong utama berasal dari peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah ditargetkan tumbuh -24,80% (yoy).

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Bali pada triwulan II tahun 2020 tercatat Rp2,64 triliun atau terkontraksi sebesar 26,20% (yoy). Capaian ini lebih rendah dibanding dengan realisasi triwulan II tahun 2019 yang tumbuh sebesar 12,99% (yoy) dengan nominal Rp3,57 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh rendahnya realisasi komponen pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan komponen lain-lain pendapatan yang sah.

Kondisi ini juga tercermin pada terbatasnya persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pagu (serapan). Persentase serapan pada triwulan II tahun 2020 tercatat sebesar 48,20%, lebih rendah dibandingkan dengan

serapan triwulan II tahun 2019 sebesar 54,98%. Kondisi ini dipengaruhi oleh terhambatnya serapan realisasi Dana Perimbangan, karena terhentinya pengadaan DAK Fisik sampai dengan Juni 2020 akibat realokasi anggaran dalam penanganan COVID-19.

2.2.1.1. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Provinsi Bali pada triwulan II tahun 2020 tercatat sebesar Rp1,67 triliun, atau tumbuh -18,63% (yoy) lebih rendah dibanding dengan realisasi triwulan II tahun 2019 yang tumbuh sebesar 15,55% (yoy). Menurunnya capaian PAD tersebut, terutama bersumber dari penurunan capaian komponen pajak daerah¹¹. Namun demikian, serapan komponen PAD ini meningkat, yaitu 58,47%, lebih tinggi dibanding dengan triwulan II 2019 yang sebesar 54,39%, akibat adanya penyesuaian target pendapatan daerah dampak pandemi COVID-19. Mengacu pada strukturnya, komponen pajak daerah masih tetap mendominasi PAD Provinsi Bali dengan pangsa 80,32%, selanjutnya diikuti oleh pengelolaan kekayaan daerah 10,64%, komponen lain-lain pendapatan yang sah 8,49% dan retribusi daerah 0,54%, selengkapnyanya pada grafik (II.1).

11 Serapan pajak daerah pada triwulan II tahun 2020 tercatat sebesar 55,28%, meningkat dibandingkan dengan triwulan II tahun 2019 yang sebesar 51,69%.

Realisasi pendapatan pajak daerah pada triwulan II tahun 2020 tercatat sebesar Rp1,34 triliun atau dengan serapan 55,28%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan serapan triwulan II tahun 2019 yang sebesar 51,69%. Namun demikian, meningkatnya serapan realisasi pajak daerah tidak sejalan dengan pertumbuhan realisasi pendapatan pajak daerah yang berkontraksi 20,02% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi triwulan II tahun 2019 yang tumbuh sebesar 18,61%. Kondisi ini tidak terlepas dari menurunnya serapan sebagian besar komponen pajak daerah, khususnya yang terkait dengan kendaraan bermotor. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan penjualan kendaraan baru pada triwulan II tahun 2020¹².

Berdasarkan strukturnya, komponen pajak daerah didominasi oleh pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (pangsa 48,3%). Selanjutnya diikuti oleh pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (pangsa 30,9%) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (pangsa 11,9%), selengkapnya pada grafik II.2.

Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak daerah pada triwulan II 2020, terutama dipengaruhi oleh adanya pembatasan sosial dan pembatasan aktivitas masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah, berbagai upaya dan strategi perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah meliputi:

- Pelaksanaan kegiatan samsat keliling secara rutin dan reguler secara berkesinambungan.
- Kebijakan program promosi dan diskon serta diluncurkannya beberapa produk tipe dan varian kendaraan baru, mendorong peningkatan penjualan kendaraan bermotor.
- Kebijakan kerjasama penghimpunan pajak kendaraan dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam rangka meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.
- Kebijakan peningkatan tarif untuk pajak air permukaan yang dipergunakan untuk kegiatan wisata.
- Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk terus mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas dan pencapaian target pengelolaan keuangan daerah, termasuk komponen pendapatan daerah melalui penerapan elektronifikasi penerimaan pajak daerah dan jenis transaksi lainnya melalui kerjasama dengan pihak perbankan.

2.2.1.2. *Komponen Dana Perimbangan*

Realisasi komponen dana perimbangan pada triwulan II tahun 2020 tercatat sebesar Rp0,94 triliun atau terserap 36,53%, lebih rendah dibanding dengan serapan triwulan II tahun 2019 yang sebesar 55,97% dengan nominal sebesar Rp1,49 triliun. Kondisi ini terutama disebabkan oleh rendahnya serapan komponen DAK karena dihentikannya proses pengadaan DAK Fisik oleh pemerintah terkait pandemi COVID-19, tercermin dari realisasi DAK mengalami penurunan pada triwulan II tahun 2020. Kondisi ini juga tidak terlepas dari pengaruh melambatnya pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan II tahun 2020, sehingga berdampak terhadap penurunan setoran Pajak Penghasilan (PPH) badan usaha dan pribadi. Di sisi lain, untuk dana bagi hasil pajak, khususnya dari bagi hasil pajak penghasilan mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya.

Sementara realisasi serapan komponen DAU dapat terserap secara optimal pada triwulan II 2020, meskipun mengalami penurunan realisasi dibandingkan dengan triwulan II 2019. Komposisi dana perimbangan masih didominasi oleh DAU (pangsa 77,64%), yang diikuti oleh DAK (pangsa 14,25%) dan dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (pangsa 8,11%).

2.2.2. *Anggaran Dan Realisasi Belanja Dan Transfer Di Provinsi Bali*

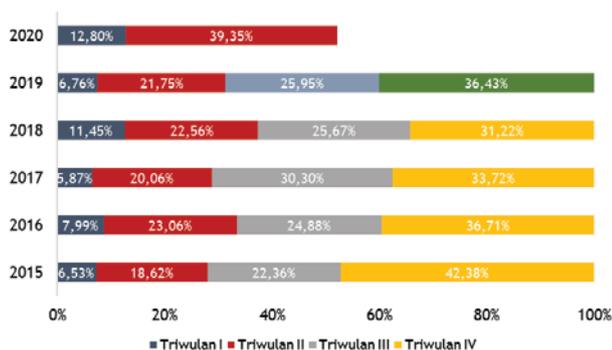
Anggaran Belanja APBD Provinsi Bali tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun 2019, bersumber dari penurunan komponen belanja daerah, belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer. Belanja daerah ditargetkan tumbuh -3,38% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh 6,75% (yoy). Belanja operasi ditargetkan tumbuh -5,63%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh 2,61% (yoy). Belanja modal ditargetkan tumbuh -55,38%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh 38,60% (yoy). Belanja transfer ditargetkan tumbuh -36,67% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh 15,16% (yoy). Penyesuaian target anggaran belanja yang lebih rendah, dilakukan mengingat adanya kebijakan pembatasan sosial yang menyebabkan sulitnya realisasi anggaran belanja serta penurunan anggaran dan realisasi pendapatan daerah. Di sisi lain, Belanja tak terduga ditargetkan tumbuh 4.050,31% (yoy) yang dialokasikan untuk penanggulangan dan penanganan wabah COVID-19.

12 Penjualan kendaraan baru di Bali pada triwulan II tahun 2020 tercatat tumbuh berkontraksi sebesar 68,15% (yoy) dengan jumlah kendaraan mencapai 20.505 unit.

Tabel II.6. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2019-2020

KATEGORI	2019					2020					
	PAGU APBD (Rp Miliar)	PAGU APBD-P (Rp Miliar)	GROWTH PAGU APBD-P (%)	REALISASI APBD TW II (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI TW II (%)	GROWTH REALISASI TW II (%:yoy)	PAGU APBD-P (Rp Miliar)	GROWTH PAGU APBD-P (%)	REALISASI APBD TW II (Rp Miliar)	PERSENTASE REALISASI TW II (%)	GROWTH REALISASI TW II (%:yoy)
BELANJA DAERAH DAN TRANSFER	6.834	7.201	9,18	2.238	31,07	(0,23)	6.227	(13,53)	2.450	39,35	9,49
BELANJA DAERAH	4.854	5.005	6,75	1713	34,23	6,60	4836	(3,38)	1917	39,64	11,88
BELANJA OPERASI	4.057	4.233	2,61	1640	38,75	6,27	3995	(5,63)	1552	38,86	(5,34)
- Belanja Pegawai	1.752	1.700	0,64	799	47,02	21,19	1581	(6,98)	723	45,72	(9,56)
- Belanja Barang dan Jasa	1.328	1.453	21,70	427	29,40	18,08	1496	2,95	804	53,73	88,13
- Belanja Hibah	962	1.066	(12,61)	413	38,75	(20,75)	913	(14,29)	26	2,81	(93,79)
- Belanja Subsidi	10	10	0,00	0	0,00	0,00	0	(100,00)	0	0,00	0,00
- Belanja Bantuan Sosial	4	4	(66,93)	1	18,09	(33,90)	4	(5,21)	0	2,13	(88,87)
BELANJA MODAL	785	760	38,60	73	9,62	14,88	339	(55,38)	172	50,61	134,90
BELANJA TAK TERDUGA	12	12	(19,74)	0	0,63	(59,49)	502	4050,31	193	38,36	0,00
BELANJA TRANSFER	1.981	2.196	15,16	524	23,88	(17,51)	1391	(36,67)	533	38,34	1,69

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali



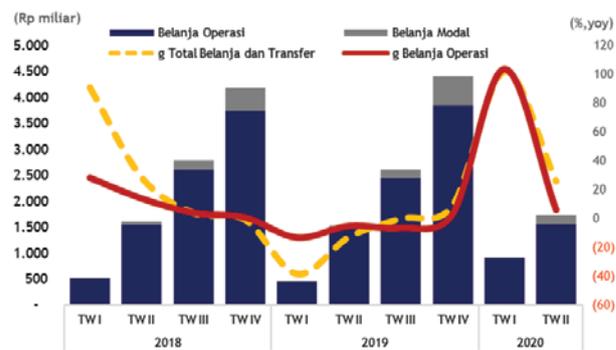
Grafik II.3. Serapan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Bali Per Triwulan (2015-2020)

Sumber : BPKAD Provinsi Bali (diolah)

Realisasi belanja dan transfer di Bali pada triwulan II tahun 2020 tercatat sebesar Rp2,45 triliun dengan serapan 39,35%. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding dengan serapan triwulan II tahun 2019 yang sebesar 31,07% atau dengan nilai nominal Rp2,24 triliun. Bila dianalisis lebih lanjut, komponen dengan serapan realisasi tertinggi di periode laporan adalah komponen belanja modal, yaitu sebesar 50,61%, capaian ini lebih tinggi dibanding dengan triwulan II tahun 2019 (9,62%). Komponen lainnya dengan serapan yang tinggi adalah belanja daerah, yaitu sebesar 39,64%, meningkat dibandingkan dengan serapan triwulan II tahun 2019 yaitu sebesar 34,23%. Sementara itu, serapan belanja operasi tercatat cukup stabil yaitu sebesar 38,86%, dibanding dengan triwulan II 2019 sebesar 38,75%. Rendahnya belanja hibah menjadi salah satu faktor penyebab tertahannya serapan dan realisasi belanja dan transfer daerah. Kondisi ini disebabkan oleh adanya beberapa pekerjaan yang tidak dapat terealisasi pada tahun 2020, sebagai dampak kebijakan pembatasan sosial untuk penanganan COVID-19.

2.2.2.1. Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi pada triwulan II 2020 terkontraksi sebesar 5,34% pada triwulan II, melambat dibandingkan dengan triwulan II 2019 yang tumbuh sebesar 6,27%. Kondisi ini terutama disebabkan



Grafik II.4. Perkembangan Realisasi Belanja dan Transfer Provinsi Bali (2018-2020)

Sumber : BPKAD Provinsi Bali

oleh menurunnya belanja hibah dan belanja pegawai. Namun demikian, serapan belanja operasi pada triwulan II tahun 2020 relatif stabil dibandingkan dengan triwulan II 2020 pasca penyesuaian pagu anggaran tahun 2020.

Serapan belanja barang dan jasa (pangsa 51,78%) di periode laporan tercatat sebesar 53,73%, meningkat dibanding dengan serapan pada triwulan II tahun 2019 yang sebesar 29,40%. Peningkatan ini terutama didukung oleh meningkatnya serapan peningkatan pengadaan jasa komunikasi, pengadaan barang untuk menunjang di dalam bidang pendidikan, serta bidang kesehatan di Bali dalam penanganan pandemi COVID-19.

2.2.2.2. Belanja Modal

Komponen belanja modal pada triwulan II tahun 2020 tercatat sebesar Rp172 miliar atau terserap 50,61%, lebih tinggi dibanding dengan serapan triwulan II tahun 2019 yang sebesar 9,62% atau dengan nominal Rp73 miliar. Capaian realisasi belanja modal tersebut, terutama disebabkan oleh percepatan belanja modal pengadaan tanah jalan dan sarana umum ibadah. Percepatan belanja modal dilakukan untuk mendorong peningkatan peran sisi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan optimalisasi belanja daerah dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19.

2.3. GABUNGAN ANGGARAN KABUPATEN/KOTA DI BALI

2.3.1. Target Anggaran Pendapatan Daerah Gabungan Kabupaten/Kota

Target anggaran perubahan pendapatan gabungan kabupaten/kota pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp17,20 triliun atau terkontraksi 16,39% (yoy). Nilai pagu ini lebih rendah dibanding dengan pagu pendapatan 2019 yang terkontraksi sebesar 0,79% (yoy), dengan nominal Rp20,57 triliun. Penurunan pagu pendapatan daerah tersebut, khususnya komponen PAD dan komponen lain-lain pendapatan yang sah, disebabkan oleh penyesuaian target pendapatan daerah sebagai akibat adanya wabah pandemi COVID-19. Kondisi ini menyebabkan pemda menyusun pagu anggaran pendapatan daerah yang lebih realistis. Sejalan dengan itu, adanya kebijakan Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia yang diberlakukan sejak April 2020 menyebabkan beberapa pemda menyesuaikan target anggaran pendapatan dalam APBD perubahan.

2.3.2. Target Anggaran Belanja Daerah Gabungan Kabupaten/Kota

Target anggaran belanja perubahan gabungan kabupaten/kota di Bali pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp18,57 triliun atau tumbuh -14,11% (yoy). Target ini lebih rendah dibanding dengan target anggaran gabungan tahun 2019 yang terkontraksi sebesar 4,0% (yoy), dengan nominal Rp21,62 triliun. Bila

dianalisis lebih lanjut, penurunan target belanja daerah terutama disebabkan oleh menurunnya target anggaran belanja untuk komponen belanja modal, belanja operasi dan belanja transfer. Penurunan target belanja tersebut juga disebabkan oleh penyesuaian anggaran belanja yang dilakukan oleh beberapa daerah dengan nilai nominal yang lebih rendah (menurun).

2.3.3. Realisasi Pendapatan Daerah Gabungan Kabupaten/Kota

Realisasi gabungan pendapatan kabupaten/kota di Bali pada triwulan II tahun 2020 tercatat sebesar Rp8,06 triliun, tumbuh -8,42% (yoy). Capaian ini lebih rendah dibanding dengan peningkatan pada triwulan II tahun 2019 yang tumbuh sebesar 8,00% (yoy), dengan nominal Rp8,81 triliun. Kondisi ini disebabkan oleh melambatnya realisasi komponen pendapatan daerah terutama pada komponen pendapatan asli daerah dan komponen lain-lain pendapatan yang sah, dampak dari berbagai upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Sementara itu, komponen dana perimbangan mengalami peningkatan capaian pada triwulan II 2020 sebesar 15,17% lebih tinggi dari sebelumnya 3,04% pada triwulan II 2019. Kondisi ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam mendorong optimalisasi pendapatan melalui komponen Dana Alokasi Umum. Realisasi Dana Alokasi Umum dari pemerintah bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Tabel II.7. Target Anggaran Pendapatan Daerah 9 Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020

Daerah Tingkat II	Pagu APBD P 2019 (Rp Miliar)				Growth 2019 (%:yoy)				Pagu APBD P 2020 (Rp Miliar)				Growth 2020 (%:yoy)			
	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan
Kota Denpasar	950	917	321	2.188	11,12	0,92	5,53	5,82	587	826	293	1.706	(38,20)	(9,93)	(8,67)	(22,02)
Kabupaten Tabanan	398	1.092	510	2.000	1,19	1,15	7,16	2,63	450	1.500	164	2.115	13,10	37,40	(67,76)	5,75
Kabupaten Klungkung	226	709	303	1.239	48,27	4,23	15,85	13,14	193	633	195	1.021	(14,72)	(10,78)	(35,49)	(17,54)
Kabupaten Karangasem	221	1.016	409	1.646	(5,64)	6,57	9,27	5,39	156	915	281	1.352	(29,22)	(9,93)	(31,43)	(17,87)
Kabupaten Gianyar	1.031	966	377	2.374	27,98	2,66	23,49	15,70	1.230	954	365	2.549	19,29	(1,25)	(3,11)	7,38
Kabupaten Badung	5.313	610	406	6.329	(20,56)	6,53	31,13	(16,39)	3.435	559	320	4.314	(35,34)	(8,38)	(21,13)	(31,83)
Kabupaten Buleleng	444	1.333	638	2.415	18,00	4,96	24,80	11,94	289	1.159	487	1.935	(34,83)	(13,09)	(23,59)	(19,86)
Kabupaten Bangli	136	749	339	1.224	12,67	6,06	1,41	5,41	165	760	275	1.201	21,37	1,49	(18,87)	(1,93)
Kabupaten Jemberana	135	712	309	1.156	3,60	3,01	3,49	3,20	126	622	257	1.006	(6,25)	(12,61)	(16,66)	(12,95)
Total	8.854	8.105	3.612	20.571	(9,24)	3,86	13,77	(0,79)	6.633	7.928	2.639	17.200	(25,09)	(2,18)	(26,94)	(16,39)

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota

Tabel II.8. Target Anggaran Belanja Daerah 9 Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020

Daerah Tingkat II	Pagu Belanja APBD P 2019 (Rp Miliar)				Growth Tahun 2019 (%: yoy)				Pagu Belanja APBD P 2020 (Rp Miliar)				Growth Tahun 2020 (%: yoy)			
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja
Kota Denpasar	1.932	348	207	2.487	3,84	14,69	2,59	5,13	1.878	103	206	2.187	(2,80)	(70,47)	(0,31)	(12,07)
Kabupaten Tabanan	1.528	420	270	2.218	1,96	(11,06)	10,83	0,16	1.601	294	285	2.180	4,80	(30,11)	5,50	(1,73)
Kabupaten Klungkung	997	138	124	1.259	7,13	(15,78)	6,69	3,98	822	54	186	1.062	(17,56)	(60,90)	50,39	(15,62)
Kabupaten Karangasem	1.343	204	213	1.760	10,01	9,27	11,72	10,13	1.173	50	208	1.431	(12,65)	(75,42)	(2,30)	(18,67)
Kabupaten Gianyar	1.808	275	306	2.389	14,59	(14,62)	16,98	10,53	1.688	977	432	3.096	(6,66)	255,54	41,12	29,61
Kabupaten Badung	4.514	864	1.170	6.548	(10,94)	(47,60)	(18,58)	(19,70)	3.149	418	747	4.314	(30,24)	(51,60)	(36,15)	(34,12)
Kabupaten Buleleng	1.852	342	262	2.456	5,92	43,80	9,65	10,37	1.543	175	293	2.011	(16,68)	(48,83)	11,78	(18,11)
Kabupaten Bangli	852	199	211	1.262	10,60	(9,84)	(22,68)	(0,17)	883	150	201	1.234	3,67	(24,74)	(4,91)	(2,25)
Kabupaten Jemberana	864	241	139	1.244	7,70	(38,70)	2,97	(6,48)	867	37	151	1.056	0,34	(84,62)	9,16	(15,11)
Total	15.691	3.031	2.902	21.623	1,37	(23,24)	(6,32)	(4,00)	13.605	2.257	2.709	18.571	(13,30)	(25,53)	(6,62)	(14,11)

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota

Tabel II.9. Realisasi Pendapatan Daerah Gabungan Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2019-2020

Daerah Tingkat II	Realisasi TW II 2019 (Rp Miliar)				Growth TW II 2019 (% yoy)				Realisasi TW II 2020 (Rp Miliar)				Growth TW II 2020 (% yoy)			
	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan
Kota Denpasar	424	486	77	988	3,81	(1,03)	157,08	6,21	372	532	81	985	(12,31)	9,44	4,93	(0,26)
Kabupaten Tabanan	157	583	162	902	(10,52)	(0,90)	6,57	(1,50)	137	698	51	887	(12,26)	19,73	(68,52)	(1,69)
Kabupaten Klungkung	104	378	99	581	37,78	2,17	3,13	7,31	104	409	40	553	0,11	8,29	(59,85)	(4,81)
Kabupaten Karangasem	111	539	137	787	15,16	2,16	6,65	4,60	115	586	68	770	3,75	8,73	(50,31)	(2,23)
Kabupaten Gianyar	414	498	129	1.042	39,79	(1,20)	57,83	18,04	329	609	53	991	(20,46)	22,15	(59,08)	(4,87)
Kabupaten Badung	2.038	295	69	2.402	14,55	27,71	(46,98)	12,24	1.357	335	53	1.745	(33,42)	13,53	(23,26)	(27,35)
Kabupaten Buleleng	170	670	181	1.022	8,04	(3,53)	9,06	0,32	158	800	76	1.033	(7,33)	19,42	(58,33)	1,16
Kabupaten Bangli	54	382	90	527	103,09	23,53	(0,48)	23,41	48	439	38	525	(11,34)	14,84	(58,24)	(0,38)
Kabupaten Jembrana	63	391	102	555	10,05	2,46	(4,66)	1,86	68	455	52	576	9,02	16,36	(48,39)	3,68
Total	3.536	4.222	1.047	8.805	15,07	3,04	6,61	8,00	2.690	4.863	511	8.064	(23,92)	15,17	(51,15)	(8,42)

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota

Daerah dengan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tertinggi pada triwulan II tahun 2020 adalah Kabupaten Jembrana, yaitu sebesar 3,68% (yoy), dengan nilai nominal Rp576 miliar. Peningkatan capaian ini terutama dikontribusikan oleh peningkatan signifikan komponen PAD dan dana perimbangan. Realisasi PAD tercatat tumbuh sebesar 9,02% (yoy). Kondisi tersebut didorong oleh program dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam melakukan penghimpunan pajak dan retribusi daerah yang meliputi:

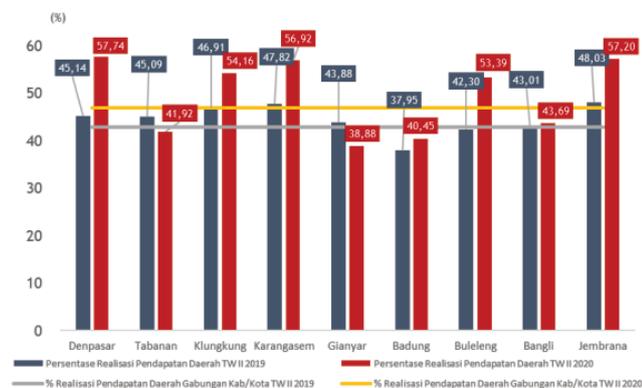
- Mengintensifkan optimalisasi dan penagihan pajak, khususnya untuk wajib pajak yang masih memiliki pajak tertunggak.
- Melakukan update *database* secara berkala.
- Mengintensifkan sosialisasi dengan pelaku usaha hotel dan restoran, dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak agar dapat membayar pajak secara tepat waktu.
- Pendataan wajib pajak baru, baik yang telah berizin maupun belum berizin serta pendataan ulang wajib pajak yang lahannya telah beralih fungsi.
- Perluasan pembayaran pajak melalui sistem *online* dan upaya peningkatan transaksi nontunai dalam penghimpunan pendapatan daerah, bekerjasama dengan lembaga perbankan.

Sejalan dengan itu, meningkatnya realisasi komponen

lain-lain pendapatan yang sah terutama didorong oleh meningkatnya realisasi komponen dana bagi hasil pajak dan dana penyesuaian otonomi khusus.

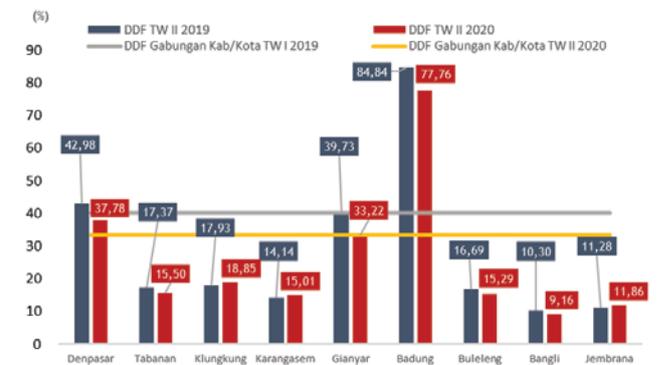
Sementara itu, daerah dengan peningkatan realisasi pendapatan terendah adalah Kabupaten Badung. Kondisi ini disebabkan oleh turunnya realisasi pendapatan pajak dan tertahannya realisasi retribusi daerah. Penurunan realisasi pajak daerah dipengaruhi oleh melambatnya kunjungan wisatawan yang berdampak pada menurunnya setoran pajak dari pelaku usaha hotel dan restoran. Sementara itu, tertahannya realisasi retribusi daerah disebabkan oleh sedang dilakukannya pembangunan pasar Kediri sejak tahun 2019, sehingga selama proses pembangunan tersebut tidak dapat dilakukan pemungutan retribusi daerah. Sejalan dengan itu, tertahannya kunjungan wisatawan berdampak terhadap penurunan penghimpunan retribusi daerah terutama di Wilayah Tanah Lot.

Selanjutnya bila ditinjau dari sisi serapan pendapatan, pada triwulan II tahun 2020 capaiannya tercatat sebesar 46,88%, sedikit meningkat dibanding dengan triwulan II tahun 2019 yang sebesar 42,80%. Peningkatan ini terutama bersumber dari meningkatnya capaian serapan pendapatan daerah di 7 daerah (grafik II.5), terutama peningkatan capaian serapan komponen dana perimbangan dan komponen PAD. Secara spesifik, daerah dengan capaian serapan tertinggi pada triwulan



Grafik II.5. Persentase Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020

Sumber : BPKAD Prov. Bali & 9 Kabupaten/Kota, diolah



Grafik II.6. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020

Sumber : BPKAD Prov. Bali & 9 Kabupaten/Kota, diolah

II tahun 2020 adalah Kota Denpasar (57,74%), meningkat dibanding dengan triwulan II tahun 2019 (45,14%). Capaian ini terutama bersumber dari peningkatan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah juga turut menjadi penyebab peningkatan serapan realisasi. Di samping itu, pemerintah daerah juga terus berupaya untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah dilakukan melalui implementasi program tim intensifikasi pajak daerah secara berkesinambungan, pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai kewajiban wajib pajak secara kontinu dan implementasi dan pengembangan transaksi *online* dalam pembayaran pajak, khususnya pajak hotel dan restoran.

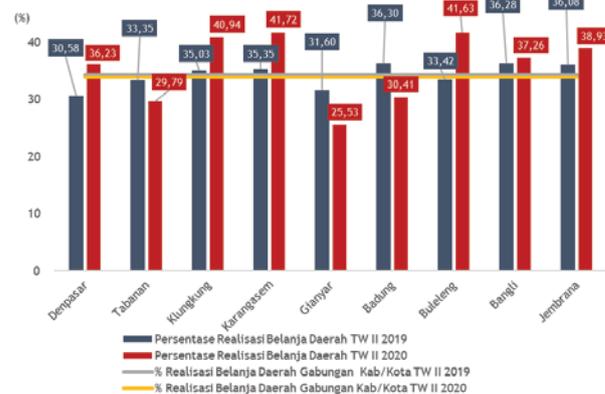
Sementara itu, kabupaten dengan capaian serapan pendapatan terendah di periode laporan (grafik II.5) adalah Kabupaten Gianyar (38,88%), lebih rendah dibanding dengan serapan triwulan II tahun 2019 (43,88%). Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh tertahannya kinerja pariwisata pada triwulan II tahun 2020, sejalan melambatnya kunjungan wisman. Kondisi ini memberikan dampak pada penurunan tingkat penghunian kamar hotel dan lama tinggal wisatawan di hotel berbintang serta turunnya kunjungan wisatawan pada DTW yang ada di Kabupaten Gianyar, sehingga memberikan pengaruh pada tertahannya serapan PAD.

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) gabungan kabupaten/kota di Wilayah Bali pada triwulan II tahun 2020 menurun dibandingkan dengan triwulan II tahun 2019 (grafik II.6). Kondisi tersebut terlihat dari sebagian kabupaten yang juga menunjukkan penurunan rasio kemandirian fiskal di periode laporan. Sementara itu, bila dianalisis lebih lanjut hanya 1 kabupaten yang memiliki nilai DDF lebih dari 50%, yaitu Kabupaten Badung sebesar 77,76%. Kondisi ini menunjukkan berkurangnya ketergantungan fiskal kabupaten Badung di Wilayah Bali terhadap sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, yaitu komponen dana perimbangan. Daerah dengan nilai DDF terendah adalah Kabupaten Bangli (9,16%).

2.3.4. Realisasi Belanja Gabungan Kabupaten/Kota

Realisasi belanja gabungan kabupaten/kota di Wilayah Bali pada triwulan II tahun 2020 tercatat sebesar Rp6,28 triliun, mengalami kontraksi sebesar 15,34% (yoy). Capaian ini lebih rendah dibanding dengan realisasi triwulan II tahun 2019 yang meningkat sebesar 5,77% (yoy), dengan nominal Rp7,42 triliun. Kondisi ini disebabkan oleh tertahannya peningkatan realisasi belanja operasi, belanja modal dan belanja transfer. Penurunan realisasi belanja daerah yang lebih dalam di 4 daerah yakni Kabupaten Tabanan, Klungkung, Karangasem, Badung dan Kabupaten Jembrana menjadi penyebab tertahannya realisasi belanja daerah pada triwulan II tahun 2020.

Serapan belanja gabungan kabupaten/kota pada triwulan II tahun 2020 mencapai 33,84%, mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan II tahun 2019 yang sebesar 34,33%. Penurunan ini terutama didorong oleh menurunnya serapan belanja pada 3 daerah, yakni Kabupaten Tabanan, Badung dan Gianyar yang merupakan daerah dengan pagu anggaran belanja terbesar untuk kabupaten/kota di Bali.



Grafik II.7. Serapan Belanja 9 Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2019-2020

Sumber: BPKAD Provinsi Bali & Kabupaten/Kota, (diolah)

Tabel II.10. Realisasi Belanja Daerah 9 Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2019-2020

Daerah Tingkat II	Realisasi TW II 2019 (Rp Miliar)				Growth TW II 2019 (%.yoy)				Realisasi TW II 2020 (Rp Miliar)				Growth TW II 2020 (%.yoy)			
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer dan Tak Terduga	Total Belanja
Kota Denpasar	663	7	90	761	9,07	(75,62)	(5,29)	3,79	677	11	104	792	2,07	55,80	15,70	4,20
Kabupaten Tabanan	584	8	148	740	(2,76)	(63,99)	9,41	(2,28)	530	9	111	649	(9,33)	12,85	(24,95)	(12,22)
Kabupaten Klungkung	384	6	51	441	15,77	(70,18)	(5,48)	8,62	366	16	53	435	(4,52)	163,11	2,62	(1,38)
Kabupaten Karangasem	506	8	109	622	9,34	(46,64)	18,54	9,41	470	6	121	597	(7,02)	(22,05)	11,28	(4,02)
Kabupaten Gianyar	601	36	118	755	6,66	(44,48)	29,23	4,85	586	59	145	790	(2,43)	61,93	23,65	4,74
Kabupaten Badung	1.624	446	308	2.377	(3,49)	381,70	(33,17)	6,34	1.048	124	140	1.312	(35,46)	(72,17)	(54,52)	(44,81)
Kabupaten Buleleng	662	18	141	821	5,49	(6,27)	34,63	9,26	601	74	162	837	(9,19)	313,23	14,79	2,00
Kabupaten Bangli	316	30	112	458	18,54	35,51	12,53	17,98	339	3	117	460	7,33	0,00	4,77	0,39
Kabupaten Jembrana	324	39	86	449	7,54	(53,48)	15,59	(2,21)	330	14	66	411	1,84	(63,05)	(22,56)	(8,41)
Total	5.664	597	1.162	7.422	4,03	62,41	(3,66)	5,77	4.948	317	1.019	6.284	(12,64)	(47,00)	(12,24)	(15,34)

Sumber: BPKAD Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota

Tabel II.11. Target dan Realisasi Belanja APBN di Provinsi Bali Tahun 2019-2020

Jenis Belanja	Tahun 2019					Tahun 2020				
	Pagu Anggaran Perubahan (Rp Miliar)	Growth Pagu Belanja 2019 (%)	Realisasi Anggaran TW II (Rp Miliar)	Persentase Realisasi Terhadap Pagu (%)	Growth Realisasi (% ,yoy)	Pagu Anggaran Perubahan (Rp Miliar)	Growth Pagu Belanja 2020 (%)	Realisasi Anggaran TW II (Rp Miliar)	Persentase Realisasi Terhadap Pagu (%)	Growth Realisasi (% ,yoy)
Pegawai	4.418	10,20	1.225	27,74	(36,36)	4.450	0,74	1.148	25,80	(6,29)
Barang	4.354	6,22	1.100	25,27	(19,94)	3.747	(13,94)	775	20,69	(29,54)
Modal	2.600	35,64	266	10,23	(31,31)	1.706	(34,37)	162	9,48	(39,19)
Bantuan Sosial	16	33,75	3	20,71	31,54	17	7,97	1	5,30	(72,39)
Transfer	1.310	13,00	275	21,01	(36,84)	2.073	58,22	612	29,52	122,28
Total	12.698	13,41	2.870	22,60	(30,43)	11.993	(5,55)	2.698	22,50	(6,00)

Sumber: DJPb Provinsi Bali

Secara spasial, daerah dengan capaian serapan belanja tertinggi pada tahun triwulan II 2020 adalah Kabupaten Karangasem (41,72%), sementara yang terendah adalah Kabupaten Gianyar (25,53%). Tingginya serapan realisasi belanja Kabupaten Karangasem tersebut bersumber dari tingginya belanja modal dan belanja transfer khususnya bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Tingginya serapan realisasi belanja Kabupaten Karangasem tersebut juga didukung oleh upaya percepatan tahapan dan realisasi belanja yang dilakukan oleh OPD, untuk mendorong peningkatan peran sisi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan optimalisasi belanja daerah. Sejalan dengan itu, kebijakan evaluasi dan *monitoring* yang dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan oleh pemerintah Kabupaten Karangasem terhadap capaian realisasi belanja, juga ikut mendukung tingginya capaian serapan tersebut. Sementara itu, rendahnya capaian serapan realisasi belanja di Kabupaten Gianyar disebabkan oleh masih relatif kecilnya serapan belanja operasi dan belanja modal. Kondisi ini dipengaruhi oleh melambatnya realisasi pendapatan daerah, sehingga menyebabkan Pemkab Gianyar melakukan upaya efisiensi belanja, khususnya yang terkait dengan komponen belanja operasi dan modal.

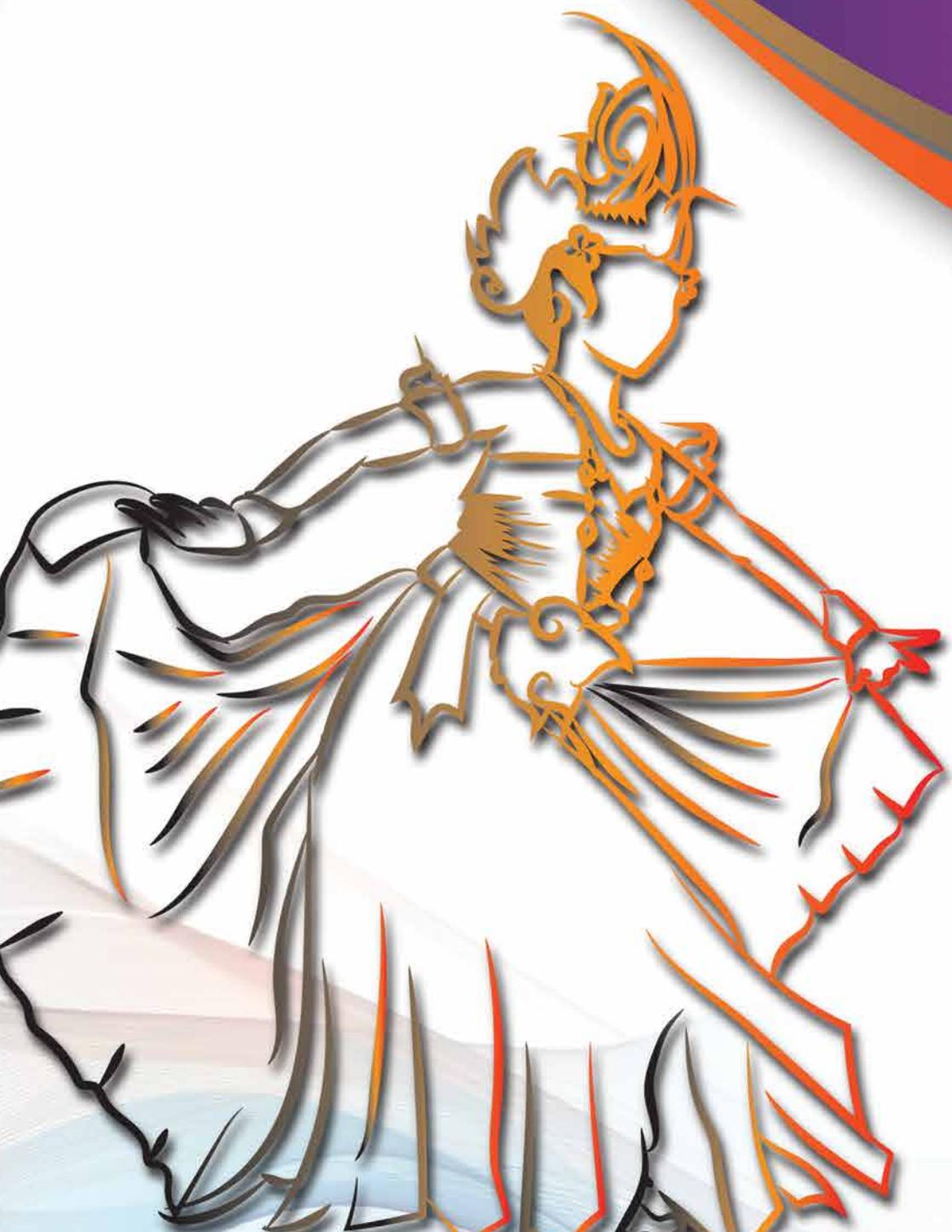
2.4. APBN PROVINSI BALI

Target belanja APBN di Bali pada triwulan II tahun 2020 tercatat sebesar Rp11,99 triliun atau terkontraksi 5,55%. Nilai pagu ini lebih rendah dibanding dengan pagu belanja 2020 yang tumbuh sebesar 13,41%, dengan nominal Rp12,70 triliun. Penurunan pagu belanja tersebut, khususnya pada komponen belanja barang dan belanja modal, disebabkan oleh penyesuaian target belanja untuk pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi COVID-19.

Realisasi belanja APBN di Bali pada triwulan II tahun 2020 tercatat sebesar Rp2,70 triliun atau dengan serapan mencapai 22,50%. Realisasi serapan ini sedikit menurun dibanding dengan serapan belanja APBN pada triwulan II tahun 2019 yang tercatat 22,60%, dengan

nominal Rp2,87 triliun. Belanja APBN tertahan oleh penurunan realisasi komponen belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan juga belanja bantuan sosial. Adanya pembatasan sosial dalam rangka mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan sulitnya realisasi belanja tersebut seperti realisasi perjalanan dinas pegawai, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, dll.

Halaman ini sengaja dikosongkan





BAB III

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

- Realisasi inflasi Provinsi Bali pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 2,18% (yoy), melandai dibandingkan dengan realisasi inflasi triwulan I 2020. Namun demikian, realisasi inflasi tersebut lebih tinggi dibanding dengan realisasi inflasi Nasional pada periode yang sama 1,96% (yoy).
- Inflasi Bali pada triwulan III 2020 diperkirakan melambat dibanding dengan triwulan II 2020. Perlambatan ini diperkirakan disebabkan oleh penurunan permintaan dan pasokan yang memadai.



KONDISI UMUM

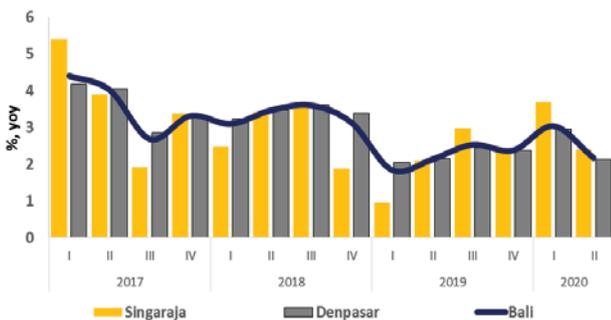
Realisasi inflasi Provinsi Bali pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 2,18% (yoy), melandai dibandingkan dengan realisasi inflasi triwulan I 2020 yang sebesar 3,04% (yoy). Namun demikian, realisasi inflasi tersebut lebih tinggi dibanding dengan realisasi inflasi Nasional pada periode yang sama 1,96% (yoy). Kondisi ini disebabkan oleh turunnya tekanan harga di sebagian besar kelompok barang.

Tekanan inflasi Bali pada triwulan III 2020 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Turunnya tekanan inflasi bersumber dari masih lemahnya permintaan, terutama disebabkan oleh belum pulihnya industri pariwisata. Namun demikian, kondisi cuaca seperti gelombang tinggi dapat berisiko meningkatkan harga ikan laut dan mengganggu distribusi pasokan makanan.

3.1. PERKEMBANGAN INFLASI

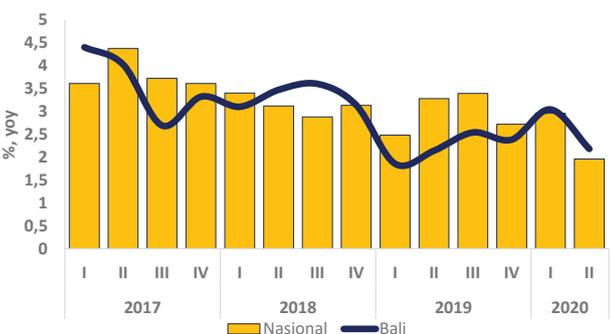
Inflasi Triwulan II 2020

Inflasi Provinsi Bali pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 2,18% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya (3,04%, yoy). Melandainya inflasi terutama disebabkan oleh turunnya tarif angkutan udara, bawang putih, tarif angkutan antar kota, telur ayam ras, dan cabai merah. Secara umum, penurunan harga komoditas disebabkan oleh masih terhentinya industri pariwisata akibat penyebaran COVID-19. Tarif angkutan udara mengalami penurunan yang berkelanjutan seiring dengan terbatasnya pergerakan masyarakat sesuai



Grafik III.1. Inflasi Kota di Bali (%yoy)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah



Grafik III.2. Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (%yoy)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

dengan ketentuan yang tertuang dalam Permenhub No. 18 Tahun 2020 dan Permenhub No. 25 Tahun 2020. Harga komoditas pangan, utamanya hortikultura¹³, turun seiring dengan musim panen yang jatuh pada pertengahan triwulan II 2020. Namun demikian, penurunan tekanan harga tertahan oleh peningkatan harga daging ayam ras, beras, emas perhiasan, canang sari, dan bawang merah. Dari sisi permintaan, penurunan pendapatan dan meningkatnya kehati-hatian masyarakat dalam membelanjakan uang berdampak pada lemahnya permintaan pada triwulan II 2020¹⁴. Namun demikian, pemerintah bersama dengan TPID terus berupaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan penyerapan komoditas petani, baik dengan mendorong petani untuk bergabung dengan *marketplace* dan menyelenggarakan Pasar Gotong Royong.

Berdasarkan kelompok barang, melandainya inflasi Bali pada triwulan II 2020 disebabkan oleh turunnya tekanan harga untuk sebagian besar kelompok komoditas, dengan penurunan tertinggi berada pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi. Hal ini sejalan dengan naiknya pasokan seiring dengan musim panen dan pembatasan pergerakan antar wilayah. Secara spasial, penurunan tekanan inflasi terjadi di semua kota pembentuk inflasi Bali (Denpasar dan Singaraja) dengan nilai inflasi tercatat masing-masing 2,15% (yoy) dan 2,41% (yoy) di triwulan II 2020, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 2,94% (yoy) dan 3,69% (yoy).

Tracking Inflasi Triwulan III 2020

Pada Juli 2020, Provinsi Bali tercatat mengalami deflasi sebesar 0,39% (mtm), lebih dalam dibandingkan dengan Nasional yang mencatat deflasi sebesar 0,10% (mtm). Secara tahunan inflasi Juli tercatat sebesar 1,06% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan Nasional sebesar 1,54% (yoy). Menurunnya tekanan harga disebabkan oleh turunnya tarif angkutan udara, harga canang sari,

13 Cabai Merah, Cabai Rawit, Beras, dan Bawang Merah.

14 PDRB Bali pada triwulan II 2020 tercatat sebesar -10,98% (YoY)

bawang merah, daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah. Penurunan harga daging ayam ras sejalan dengan upaya TPID bersama instansi terkait untuk meningkatkan pasokan daging ayam yang sebelumnya sempat mengalami kelangkaan. Selanjutnya, maskapai udara masih menurunkan tarif penerbangan sebagai upaya untuk meningkatkan *load factor*. Adanya pembatasan kegiatan keagamaan berdampak pada turunnya permintaan terhadap canang sari. Hal ini berdampak pada turunnya harga canang sari bulan Juli 2020. Setelah mengalami kenaikan pasca Lebaran 2020, harga bawang merah mulai menurun, disebabkan oleh upaya pemerintah untuk mempercepat distribusi komoditas tersebut dari distributor ke konsumen. Adapun penurunan harga cabai merah dan cabai rawit masih disebabkan oleh lemahnya permintaan, terutama dari industri pariwisata. Namun demikian, penurunan tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh naiknya biaya sekolah dasar, telur ayam ras, biaya sekolah menengah atas, tarif angkutan antar kota, dan emas perhiasan. Dimulainya tahun ajaran baru menyebabkan peningkatan pada biaya sekolah dasar dan sekolah menengah atas, sesuai dengan pola tahunannya. Selanjutnya, peningkatan harga telur ayam ras pada dasarnya merupakan normalisasi harga setelah sebelumnya mengalami penurunan yang signifikan pada semester I 2020. Peningkatan harga merupakan dampak dari himbuan satgas pangan agar peternak ayam tidak menjual telur yang seharusnya ditetaskan. Mulai dibukanya kembali mobilisasi antar wilayah di Provinsi Bali menyebabkan permintaan terhadap transportasi antar kota mulai meningkat, yang berdampak pada kenaikan tarif. Adapun peningkatan harga emas perhiasan sejalan dengan naiknya harga emas dunia akibat *re-emergence* kasus COVID-19 di beberapa negara.

Inflasi Bali pada triwulan III 2020 diperkirakan melandai dibanding dengan triwulan II 2020 dan sejalan dengan sasaran inflasi Nasional yang sebesar $3\% \pm 1\%$ (yoy). Turunnya tekanan harga ini diperkirakan disebabkan oleh menurunnya permintaan masyarakat. Pemulihan industri pariwisata yang masih tertahan diperkirakan berdampak pada tingkat permintaan masyarakat untuk bahan tahan lama masih belum pulih. Selain itu, harga emas masih memiliki potensi untuk terus meningkat, seiring dengan ketidakpastian perekonomian dunia yang belum stabil. Selanjutnya, distribusi gula pasir yang mulai merata juga berdampak pada harga gula pasir yang terus turun mendekati HET. Namun demikian, dimulainya periode gelombang tinggi dapat mendorong peningkatan harga komoditas laut serta mengganggu kelancaran distribusi pasokan makanan pangan. Selain itu, panen

raya komoditas hortikultura pada tahun 2020 akan jatuh pada bulan Agustus dan September 2020. Hal ini akan menyebabkan pasokan komoditas tersebut kembali meningkat, sehingga berpotensi menurunkan harga secara signifikan. Memitigasi hal tersebut, TPID terus berupaya mengendalikan inflasi dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif dalam rangka menjaga keseimbangan *supply* dan *demand* komoditas. Salah satu langkah yang dilakukan oleh TPID adalah mendorong petani untuk bergabung dalam *marketplace* untuk dapat langsung memasarkan hasil komoditasnya serta menghimbau agar *fresh produce* lokal menjadi salah satu komponen dari bantuan langsung nontunai yang diberikan kepada masyarakat.

Inflasi Bali pada triwulan III 2020 diperkirakan melandai dibanding dengan triwulan II 2020 dan berada di bawah sasaran inflasi Nasional yang sebesar $3\% \pm 1\%$ (yoy). Hal ini terutama disebabkan oleh pemulihan permintaan yang masih terbatas ditengah melimpahnya pasokan. Permintaan bahan pangan diperkirakan masih terbatas seiring dengan tertahannya pemulihan LU Akmamin sebagai dampak belum dibukanya jalur penerbangan internasional. Disisi lain, pasokan bahan pangan melimpah seiring dengan panen raya hortikultura yang jatuh pada Agustus 2020. Kondisi ini berpotensi menurunkan harga secara signifikan. Sejalan dengan hal tersebut, permintaan terhadap barang tahan lama juga berpotensi meningkat seiring dengan sikap kehati-hatian masyarakat dalam membelanjakan uang dan terbatasnya pemulihan pendapatan di masa pandemi. Selanjutnya, distribusi gula pasir yang mulai merata juga berdampak pada harga gula pasir yang terus turun mendekati HET. Laju deflasi tertahan oleh tren peningkatan harga emas seiring dengan ketidakpastian perekonomian dunia. Disamping itu, dimulainya periode gelombang tinggi dapat mendorong peningkatan harga komoditas laut serta mengganggu kelancaran distribusi pasokan makanan pangan.

Mengantisipasi kondisi tersebut, TPID Provinsi Bali bersama-sama dengan *stakeholder* terkait berupaya menjaga kestabilan pasokan dan harga dalam kerangka 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif). Salah satu langkah yang dilakukan oleh TPID adalah mendorong petani untuk bergabung dalam *marketplace* untuk dapat langsung memasarkan hasil komoditasnya serta menghimbau agar *fresh product* lokal menjadi salah satu komponen dari bantuan langsung nontunai yang diberikan kepada masyarakat.

3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI

3.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa

Penurunan tekanan inflasi Bali pada triwulan II 2020 terjadi pada sebagian besar kelompok barang, dengan peningkatan terbesar terjadi pada makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi.

a) Kelompok Bahan Makanan, Minuman, dan Tembakau

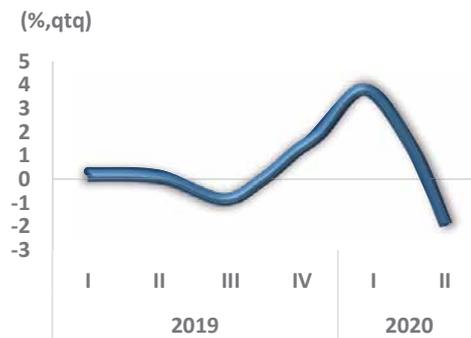
Secara triwulanan, tekanan harga kelompok bahan makanan melandai menjadi 2,54% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,65% (yoy). Penurunan harga utamanya terlihat untuk komoditas bawang putih, tomat, daging babi, telur ayam ras, dan cabai merah. Penurunan harga bawang putih disebabkan oleh pembebasan impor yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga pasokan komoditas ini, terutama setelah terjadinya peningkatan harga akibat keterlambatan pasokan di triwulan I 2020. Penurunan harga daging babi, tomat, dan cabai merah masih terkait dengan rendahnya permintaan, utamanya dari hotel dan restoran yang masih terhenti pada triwulan II 2020. Adapun penurunan harga telur ayam ras diakibatkan oleh peningkatan pasokan telur di pasar. Penambahan pasokan ini bersumber dari telur yang seharusnya ditetaskan oleh peternak ayam. Namun, akibat rendahnya harga daging ayam pada triwulan I 2020, peternak memilih untuk mengurangi jumlah DOC dan menjual telur tersebut.

b) Kelompok Pakaian dan Alas Kaki

Pada triwulan II 2020, tekanan harga kelompok pakaian dan alas kaki tercatat sebesar 0,06% (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,11% (yoy). Perlambatan ini terutama disebabkan oleh turunnya harga pakaian, baik celana maupun baju. Penurunan harga ini disebabkan oleh tertahannya konsumsi masyarakat, terutama untuk kebutuhan sandang. Selain itu, penurunan jumlah wisatawan asing dan domestik juga menyebabkan penurunan penjualan pakaian.

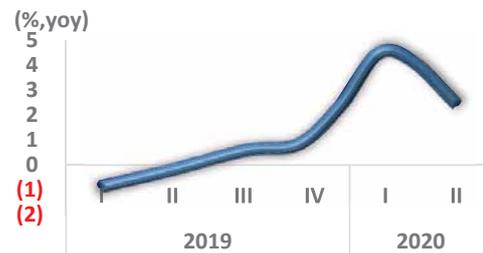
c) Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar

Berdasarkan pergerakan secara tahunan, tekanan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar meningkat dari 2,25% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 2,35% (yoy) pada periode laporan. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya harga



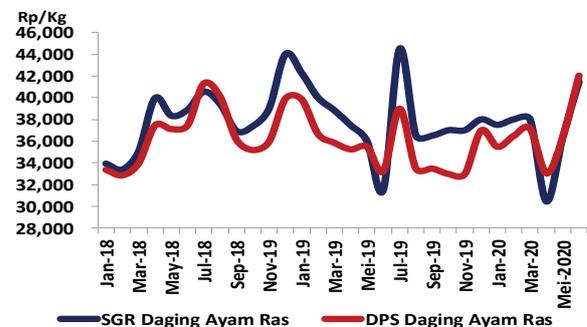
Grafik III.3. Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau di Provinsi Bali

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah



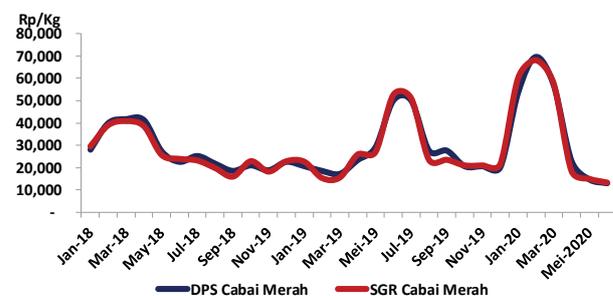
Grafik III.4. Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau di Provinsi Bali

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah



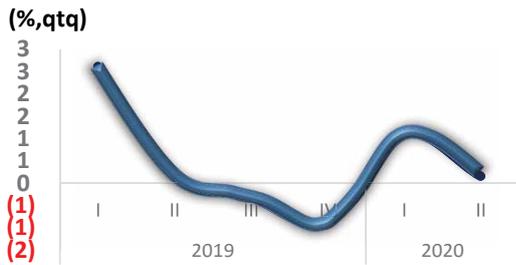
Grafik III.5. Perkembangan Harga Daging Ayam Ras (Rp/Kg)

Sumber : www.Sigapura.org, diolah



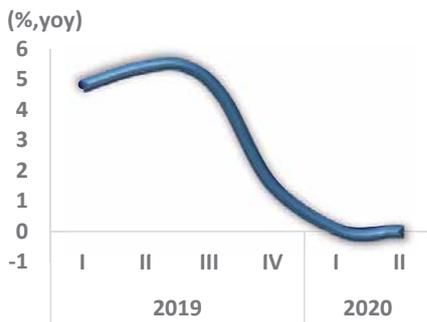
Grafik III.6. Perkembangan Harga Cabai Merah Besar (Rp/Kg)

Sumber : www.Sigapura.org, diolah



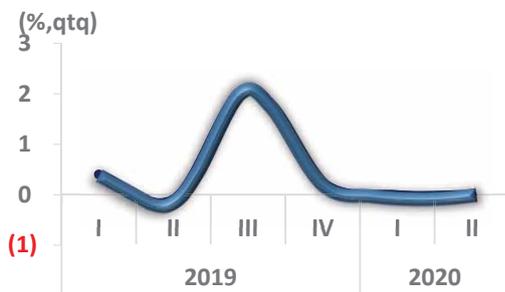
Grafik III.7. Inflasi Triwulanan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki di Prov. Bali

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah



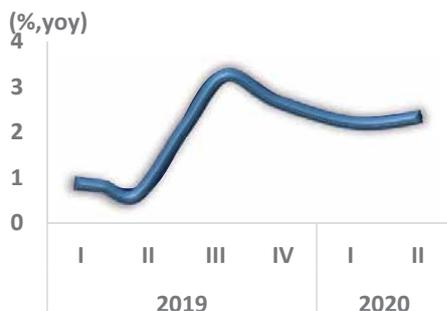
Grafik III.8. Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki di Prov. Bali

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah



Grafik III.9. Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah



Grafik III.10. Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar di Prov. Bali

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

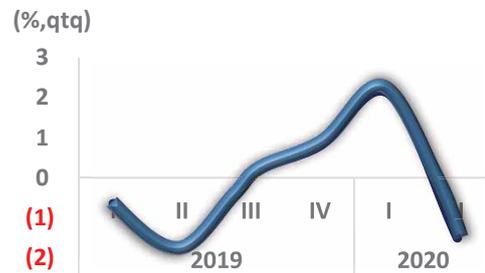
bahan bakar rumah tangga, genteng, dan daun pintu. Peningkatan harga ini didorong oleh naiknya konsumsi rumah tangga selama masa PSBB untuk mencegah penyebaran COVID-19.

d) *Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan RT*

Pada triwulan II 2020, secara tahunan tekanan harga kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan RT meningkat dari 1,15% (yoy) pada triwulan I 2020 menjadi 1,44% (yoy). Meningkatnya tekanan harga kelompok ini disebabkan oleh naiknya tekanan harga canang sari, bola lampu, dan sabun cair/ cuci piring. Peningkatan harga canang sari disebabkan oleh tingginya harga canang sari yang ditetapkan oleh penjual, di antaranya akibat pembatasan jam operasional pasar yang menyebabkan konsumen tidak memiliki pilihan. Mengingat karakteristik canang sari yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat Bali, produsen memiliki kemampuan untuk menentukan harga jual.

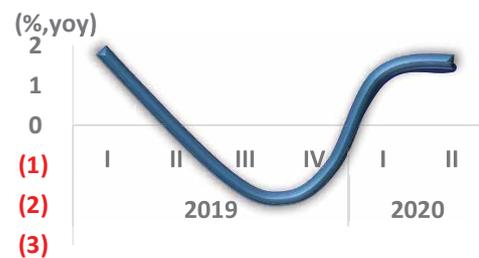
e) *Kelompok Kesehatan*

Pada triwulan II 2020, tekanan harga kelompok kesehatan tercatat sebesar 2,11% (yoy), melandai dibanding dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,84% (yoy). Turunnya harga vitamin, obat dengan resep



Grafik III.11. Inflasi Triwulanan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan RT di Provinsi Bali

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah



Grafik III.12. Inflasi Tahunan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan RT di Provinsi Bali

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

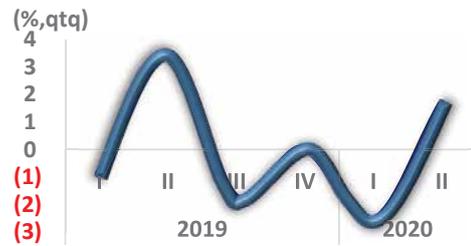
dan obat batuk menjadi penyebab turunnya tekanan harga kelompok ini. Turunnya harga produk kesehatan ini merupakan normalisasi pasca peningkatan akibat antusiasme konsumen di triwulan I 2020. Di sisi lain, biaya dokter umum dan spesialis masih tercatat meningkat.

f) Kelompok Transportasi

Dibandingkan dengan triwulan I 2020, tekanan harga kelompok transportasi pada triwulan II 2020 turun lebih dalam menjadi **-2,72% (yoy)** dari sebelumnya **-1,04% (yoy)**. Turunnya tekanan harga kelompok ini kembali disebabkan oleh turunnya tarif angkutan udara dan angkutan antar kota. Penurunan tarif angkutan udara merupakan salah satu strategi maskapai untuk meningkatkan jumlah penumpang di tengah lemahnya industri pariwisata. Adapun penurunan tarif angkutan antar kota disebabkan oleh terbatasnya pergerakan antar wilayah dalam rangka *containment* penyebaran COVID-19.

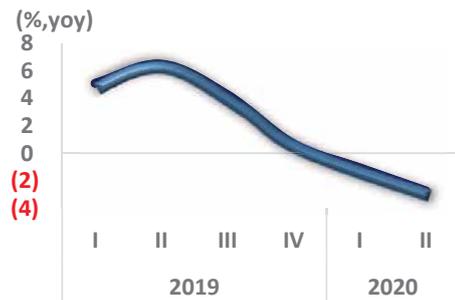
g) Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Tekanan harga kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan secara triwulanan meningkat dari **0,63% (yoy)** menjadi **0,76% (yoy)** pada triwulan II



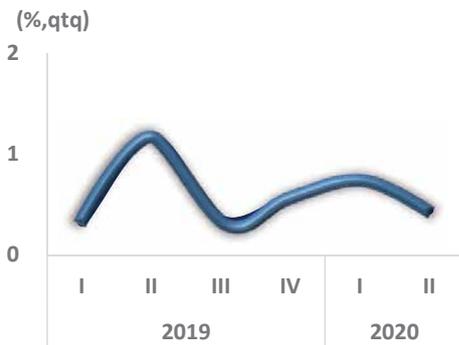
Grafik III.15. Inflasi Triwulanan Transportasi di Provinsi Bali

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah



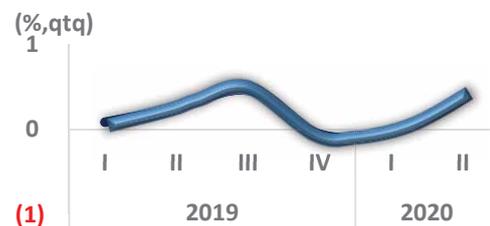
Grafik III.16. Inflasi Tahunan Kelompok Transportasi di Provinsi Bali

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah



Grafik III.13. Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Provinsi Bali

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah



Grafik III.17. Inflasi Triwulanan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (%qtq)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah



Grafik III.14. Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Provinsi Bali

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah



Grafik III.18. Inflasi Tahunan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Provinsi Bali (%yoy)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

2020. Hal ini utamanya disebabkan oleh naiknya harga televisi berwarna dan telepon seluler. Peningkatan harga kedua barang ini didorong oleh implementasi *work from home* dan *virtual learning* yang secara tidak langsung meningkatkan kebutuhan akan telepon selular dan televisi sebagai monitor.

h) Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Tekanan harga kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya secara triwulanan meningkat dari 3,20% (yoy) menjadi 3,28% (yoy) pada triwulan II 2020. Hal ini utamanya disebabkan oleh naiknya tekanan harga buku tulis bergaris dan pulpen. Peningkatan harga kedua komoditas ini sejalan dengan dimulainya tahun ajaran baru, meskipun sekolah sudah menerapkan *virtual learning*.

i) Kelompok Pendidikan

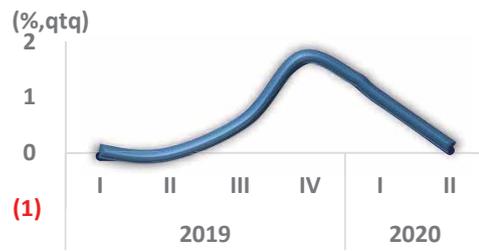
Dibandingkan dengan triwulan I 2020, tekanan harga kelompok pendidikan pada triwulan II 2020 melandai menjadi 7,85% (yoy) dari sebelumnya 8,25% (yoy). Penurunan tekanan harga ini disebabkan oleh turunnya biaya bimbingan belajar. Hal ini diprakirakan sejalan dengan turunnya permintaan terhadap bimbingan belajar, sejalan dengan keterbatasan sarana ajar-mengajar.

j) Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Tekanan harga untuk kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 3,90% (yoy), melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (4,63%, yoy). Turunnya tekanan inflasi disebabkan oleh melandainya tekanan harga sebagian besar komoditas di dalam kelompok ini, seperti bubur kacang hijau, ayam goreng, bubur. Penurunan ini disebabkan oleh pembatasan pergerakan dan terhentinya industri pariwisata akibat penyebaran COVID-19.

k) Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 4,73% (yoy), melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (5,17%, yoy). Turunnya harga pembalut wanita, sabun mandi, dan *diapers* merupakan beberapa penyebab utama penurunan tersebut. Turunnya harga komoditas tersebut pada umumnya merupakan proses normalisasi harga setelah sebelumnya terjadi *panic buying* di masyarakat pada triwulan I.



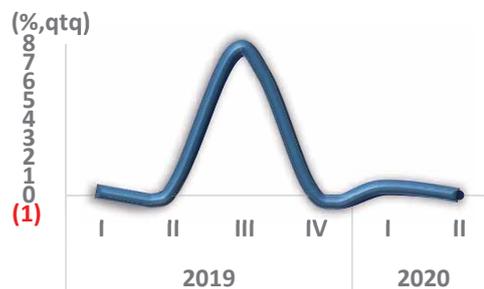
Grafik III.19. Inflasi Triwulanan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya di Provinsi Bali (%qtq)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah



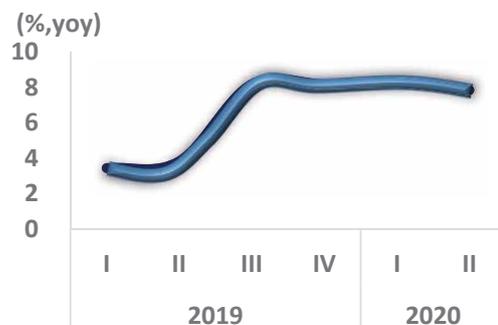
Grafik III.20. Inflasi Tahunan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya di Provinsi Bali (%yoy)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah



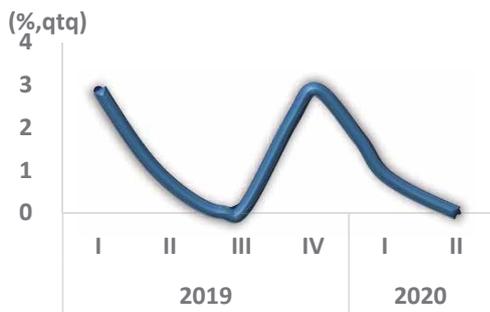
Grafik III.21. Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan di Provinsi Bali (%qtq)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah



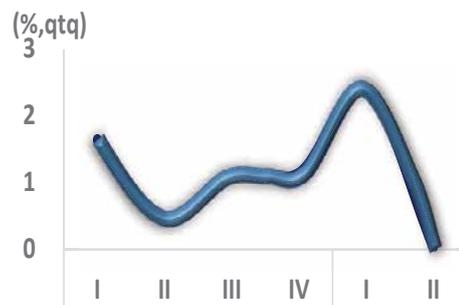
Grafik III.22. Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan di Provinsi Bali (%yoy)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah



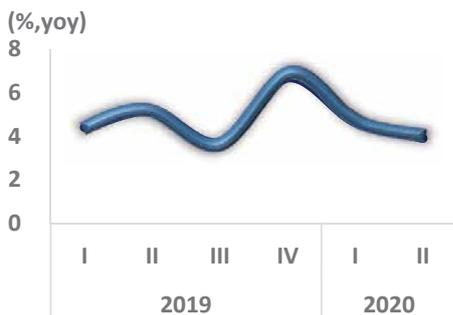
Grafik III.23. Inflasi Triwulanan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran di Provinsi Bali (% ,qtq)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah



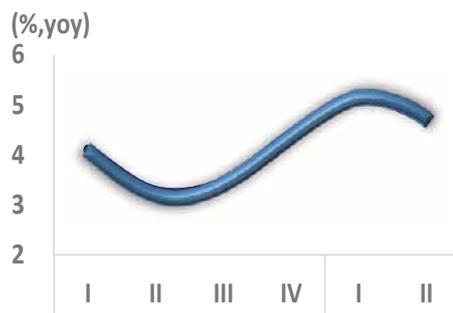
Grafik III.25. Inflasi Triwulanan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya di Provinsi Bali (% ,qtq)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah



Grafik III.24. Inflasi Tahunan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran di Provinsi Bali (% ,yoy)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah



Grafik III.26. Inflasi Tahunan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya di Provinsi Bali (% ,yoy)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

3.2.2. Inflasi Menurut Kota¹⁵

Secara spasial, baik Kota Denpasar maupun Kota Singaraja mengalami tekanan inflasi yang melandai. Jika dilihat berdasarkan kelompok komoditas, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi kelompok dengan penurunan utama, sejalan dengan masih lemahnya permintaan.

a) Kota Denpasar

Berdasarkan tren perkembangan harga Kota Denpasar, inflasi pada triwulan II 2020 melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya secara bulanan, yaitu dari 0,11% (mtm) pada triwulan I menjadi 0,08% (mtm) pada triwulan laporan. Secara tahunan, inflasi Kota Denpasar tercatat juga melandai, yaitu sebesar 2,15% (yoy) dari 2,94% (yoy) pada triwulan I 2020. Turunnya tekanan harga tahunan terjadi di sebagian kelompok komoditas, dengan penurunan terbesar terlihat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Turunnya tekanan harga kelompok ini

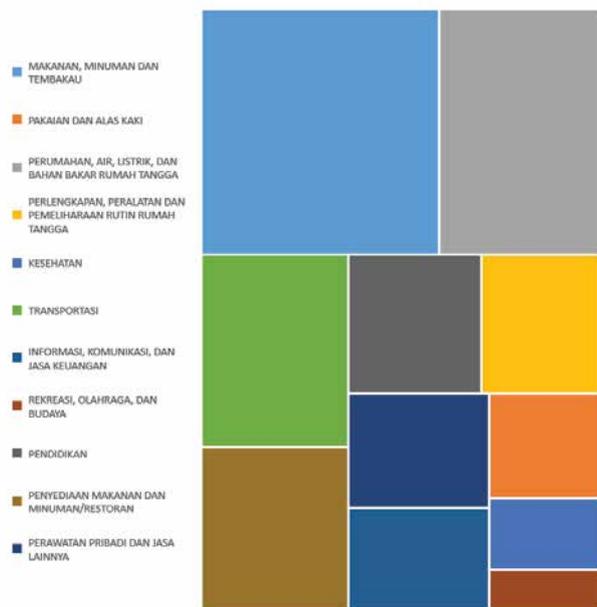
terjadi seiring dengan meningkatnya tekanan harga sub-kelompok makanan serta minuman yang tidak beralkohol.

Di Denpasar, komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi adalah emas perhiasan (andil 0,37%), beras (andil 0,14%), canang sari (andil 0,10%), jeruk (andil 0,09%), bawang merah (andil 0,09%), dan pisang (andil 0,06%). Peningkatan harga beras dan bawang disebabkan oleh adanya Hari Raya Lebaran yang jatuh pada bulan Mei 2020. Selain itu, tingginya permintaan beras untuk disalurkan sebagai bantuan nontunai juga menyebabkan peningkatan harga meskipun setelah panen raya. Di sisi lain, harga emas dunia masih mengalami peningkatan, sejalan dengan pergerakan harga emas dunia yang terus naik.

b) Kota Singaraja

Inflasi di Singaraja tercatat melandai, dari 3,69% (yoy) pada triwulan I 2020 menjadi 2,41% (yoy) pada triwulan II 2020. Melandainya inflasi Singaraja terjadi untuk sebagian besar kelompok komoditas. Penurunan

15 Dimulai pada 1 Januari 2020 terdapat penambahan cakupan komoditas perhitungan inflasi di Bali di 2 (dua) kota sampel inflasi, yaitu Denpasar dan Singaraja. Berdasarkan SBH 2018, karakteristik inflasi Kota Denpasar maupun Singaraja terutama dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar RT sebagaimana tercermin pada dominannya bobot kelompok pengeluaran tersebut dalam keranjang IHK Kota Denpasar maupun Singaraja.



Grafik III.27. Bobot Tahun Dasar (2018=100)
Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah



Grafik III.28. Bobot Tahun Dasar (2018=100)
Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel III.1. Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran

Kelompok Barang	2020					
	TW I			TW II		
	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy
Makanan, Minuman dan Tembakau	(0,20)	3,72	4,60	(0,29)	1,62	2,48
Pakaian dan Alas Kaki	0,68	0,95	(0,65)	0,44	1,14	(0,57)
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT	-	0,00	2,34	(0,04)	(0,05)	2,38
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin RT	1,61	2,15	0,75	0,33	0,67	1,58
Kesehatan	0,01	0,49	1,96	-	1,01	1,42
Transportasi	(0,88)	(2,74)	(1,50)	(0,19)	(0,96)	(3,18)
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,02	0,01	0,80	0,06	0,50	1,02
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	(0,01)	1,00	2,94	0,05	1,05	3,04
Pendidikan	-	0,27	8,54	-	0,27	8,11
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,29	0,96	4,90	-	0,96	4,28
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	1,42	2,58	5,19	1,92	2,48	4,64
UMUM	0,11	0,74	2,94	0,08	0,73	2,15

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

terbesar terlihat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan penurunan terbesar terlihat untuk sub-kelompok makanan serta minuman tidak beralkohol.

Di Singaraja, komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi pada triwulan II 2020 adalah rokok putih (andil 0,26%), emas perhiasan (andil 0,13%), daging ayam ras (andil 0,11%), minyak goreng (andil 0,10%), dan terong (andil 0,15%). Berdasarkan pangsa, komoditas rokok memiliki pangsa yang lebih besar di Singaraja jika dibandingkan dengan pangsa rokok di Denpasar.

3.3. INFLASI PERDESAAN

Sebagaimana IHK yang menunjukkan kenaikan harga secara umum di perkotaan, Inflasi Perdesaan terdiri dari sebelas kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan air, listrik, dan bahan

Tabel III.2. Ranking Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/Deflasi di Kota Denpasar Tw II 2020 (yoy)

No	Komoditas	%	No	Komoditas	%
April					
Inflasi			Deflasi		
1	Emas Perhiasan	0,27	1	Angkutan Udara	-0,35
2	Beras	0,10	2	Daging Ayam Ras	-0,15
3	Mangga	0,11	3	Daging Babi	-0,05
4	Canang Sari	0,10	4	Tomat	-0,03
5	Nasi Dengan Lauk	0,09	5	Baju Kaos Berkerah Pria	-0,02
Mei					
Inflasi			Deflasi		
1	Emas Perhiasan	0,24	1	Angkutan Udara	-0,21
2	Beras	0,12	2	Daging Ayam Ras	-0,07
3	Jeruk	0,11	3	Tongkol Diawetkan	-0,06
4	Bawang Merah	0,08	4	Angkutan Antar Kota	-0,05
5	Cabai Merah	0,08	5	Daging Babi	-0,04
Juni					
Inflasi			Deflasi		
1	Emas Perhiasan	0,37	1	Angkutan Udara	-0,23
2	Beras	0,14	2	Tongkol Diawetkan	-0,06
3	Canang Sari	0,10	3	Bawang Putih	-0,04
4	Jeruk	0,09	4	Tomat	-0,03
5	Rokok Putih	0,09	5	Angkutan Antar Kota	-0,03

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel III.3. Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran

Kelompok Barang	2020					
	TW I			TW II		
	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy
Makanan, Minuman dan Tembakau	(0,24)	3,82	4,91	0,49	3,09	2,79
Pakaian dan Alas Kaki	0,02	1,94	4,46	0,02	1,96	3,63
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT	0,24	(0,01)	1,59	0,24	0,37	2,07
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin RT	0,93	1,87	3,83	0,93	(0,02)	0,56
Kesehatan	0,03	2,10	7,77	0,03	2,17	5,96
Transportasi	-	(1,36)	2,71	-	(1,30)	1,07
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-	(0,27)	(0,66)	-	(0,78)	(1,21)
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-	0,49	5,02	-	0,49	4,96
Pendidikan	(0,06)	0,00	4,47	(0,06)	(0,06)	4,40
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	-	0,25	2,10	-	0,25	0,48
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,71	1,06	5,04	0,71	1,96	5,33
Umum	0,16	1,17	3,69	0,31	1,27	2,41

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel III.4. Ranking Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/Deflasi di Kota Singaraja Tw II 2020 (yoy)

No	Komoditas	%	No	Komoditas	%
April					
Inflasi			Deflasi		
1	Cabai Rawit	0,24	1	Daging Ayam Ras	-0,23
2	Sabun Detergen Bubuk/Cair	0,19	2	Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-Ambu	-0,08
3	Cabai Merah	0,17	3	Daging Babi	-0,08
4	Emas Perhiasan	0,15	4	Canang Sari	-0,06
5	Gula Pasir	0,10	5	Beras	-0,05
Mei					
Inflasi			Deflasi		
1	Rokok Putih	0,26	1	Daging Ayam Ras	-0,24
2	Sabun Detergen Bubuk/Cair	0,13	2	Canang Sari	-0,13
3	Pisang	0,09	3	Telur Ayam Ras	-0,07
4	Mie Kering Instant	0,04	4	Bawang Putih	-0,07
5	Cabai Merah	0,04	5	Bawang Merah	-0,06
Juni					
Inflasi			Deflasi		
1	Rokok Putih	0,26	1	Canang Sari	-0,10
2	Emas Perhiasan	0,13	2	Bawang Putih	-0,09
3	Daging Ayam Ras	0,11	3	Bawang Merah	-0,07
4	Minyak Goreng	0,10	4	Angkutan Antar Kota	-0,06
5	Terong	0,09	5	Telur Ayam Ras	-0,06

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

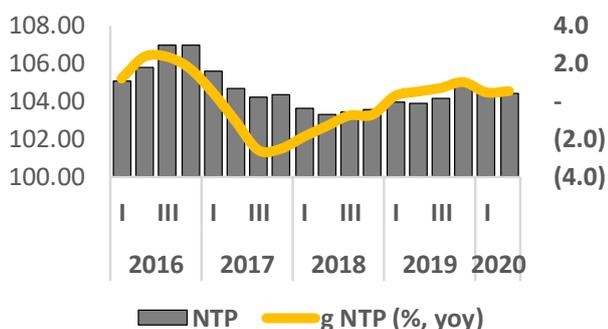
bakar lainnya, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin RT, kelompok kesehatan, kelompok transportasi, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok pendidikan, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Pada triwulan II 2020 deflasi perdesaan Bali tercatat sebesar 0,01% (mtm) lebih rendah dibanding dengan nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,13% (mtm). Penurunan NTP ini sejalan dengan terus menurunnya harga tanaman, utamanya hortikultura, akibat kondisi yang *oversupply*. Berdasarkan sektornya, subsektor hortikultura mencatat penurunan yang paling signifikan, tanaman pangan, dan tanaman perkebunan rakyat.

3.4. KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI

Dalam rangka pengendalian inflasi provinsi Bali, TPID Provinsi Bali dan TPID Kabupaten/Kota terus meningkatkan koordinasi secara intensif, terlebih di masa pandemi COVID-19. Meskipun terdapat pembatasan kegiatan masyarakat yang terjadi selama pandemi COVID-19, TPID tetap rutin memantau harga dan pasokan di masing-masing daerah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, himbauan kepada masyarakat juga masih rutin dilaksanakan, seperti himbauan untuk berbelanja bijak (tidak melakukan *panic buying*) selama masa pandemi dan penerapan *physical distancing* serta pola hidup bersih dan sehat di lingkungan pasar.

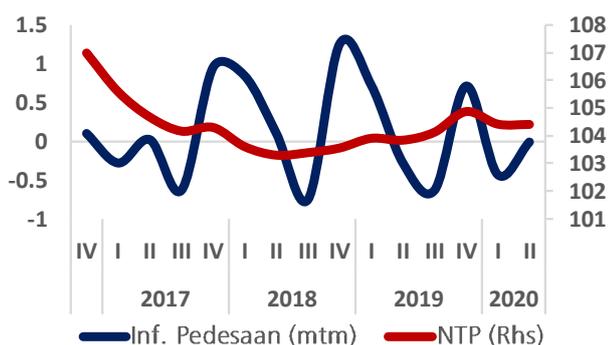
Selain kegiatan pemantauan pasar, rapat koordinasi juga terus dilakukan oleh TPID dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan selama pandemi COVID-19. Rapat koordinasi berupa *High Level Meeting* (HLM) dan *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan secara virtual maupun *offline* dengan penerapan protokol kesehatan (seperti menggunakan masker, peserta rapat tidak lebih dari 25 orang dan mengatur jarak duduk antar peserta). Operasi pasar dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan dan penjagaan yang ketat dari petugas keamanan.

Bali yang biasanya membutuhkan ketersediaan pasokan bagi ±16 juta wisatawan dan 4 juta masyarakat Bali, sehubungan dengan pembatasan perjalanan di berbagai daerah, kini hanya mengelola permintaan penduduk saja (± 4 juta), sehingga penurunan permintaan ini membuat produksi dari daerah produsen tidak terserap oleh pasar. Permintaan penduduk secara umum juga turun, karena larangan berkumpul termasuk saat perayaan Hari Besar



Grafik III.29. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah



Grafik III.30. Perkembangan Inflasi Pedesaan (ytd)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Keagamaan ataupun kegiatan upacara agama lainnya. Selain itu, daya beli masyarakat yang masih menurun karena perekonomian sangat rendah (tingginya angka PHK atau pengurangan pendapatan) membuat permintaan turun dan *oversupply* produk pertanian yang berakibat pada harga produk pertanian turun. Untuk itu, TPID se-Provinsi Bali mengupayakan kestabilan harga produk pertanian melalui penyerapan produk pertanian oleh ASN Pemda setempat serta memfasilitasi *marketplace* untuk petani, seperti Pasar Tani.

Sepanjang triwulan II 2020, TPID di Bali melakukan sejumlah kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi. Beberapa kegiatan tersebut adalah:

Tabel III.5. Kegiatan TPID Triwulan II 2020

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Pemimpin Rapat
1	Rapat Koordinasi HLM TPID Kota Denpasar dalam rangka koordinasi kecukupan stok bahan pangan dalam masa pandemi COVID-19	6-Apr-20	TPID Kota Denpasar	Sekda Kota Denpasar Drs. A.A. Ngurah Rai Iswara, M.Si
2	Rapat Koordinasi HLM TPID Kab. Badung dalam rangka koordinasi kecukupan stok bahan pangan dalam masa pandemi COVID-19	9-Apr-20	TPID Kab. Badung	Wakil Bupati Badung Drs. I Ketut Suiasa, S.H
3	Rapat Koordinasi HLM TPID Kab. Badung dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok di tengah COVID-19, Ramadhan dan Idul Fitri.	13-May-20	TPID Kab. Badung	Wakil Bupati Badung Drs. I Ketut Suiasa, S.H
4	BI Talk dengan tema Bijak Berbelanja menggunakan non tunai di tengah pandemi Covid-19	18-May-20	TPID se-Provinsi Bali	Sekretariat TPID Provinsi Bali
5	FGD TPID Kab. Badung terkait produktivitas cabai dan bawang	15-Jun-20	TPID Kab. Badung	Wakil Bupati Badung Drs. I Ketut Suiasa, S.H

OPERASI PASAR-PASAR MURAH-MONEV				
No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Penyelenggara
1	Pemantauan ketersediaan stok bahan pokok	1-Apr-20	Pasar Amlapura	TPID Kabupaten Karangasem
2	Pemantauan Langsung ke Pasar Umum Gianyar	1-Apr-20	Pasar Umum Gianyar	TPID Kabupaten Gianyar
3	Pemantauan stok bahan pangan dan pemantauan distribusi ke Kepulauan Nusa Penida	3-Apr-20	Penyebrangan Barang Kebutuhan Pokok, Pasar Galiran, dan Nusa Penida	TPID Kabupaten Klungkung
4	Pemantauan harga kebutuhan pokok dan BBM	4-Apr-20	Pasar Umum Gianyar	TPID Kabupaten Gianyar
5	Pemantauan perkembangan harga di Kab. Jembrana	6-Apr-20	Distributor Kabupaten Jembrana	TPID Kabupaten Jembrana
6	Pemantauan persediaan bahan pokok di Bangli	7-Apr-20	Pasar Kidul, Kec. Bangli, Kab. Bangli	TPID Kabupaten Bangli
7	Pemantauan perkembangan harga di Kota Denpasar	17-Apr-20	Distributor Kota Denpasar	TPID Kota Denpasar
8	Pemantauan langsung ke Gudang Bulog Sempidi, khususnya untuk beras, gula pasir dan minyak goreng.	22-Apr-20	Gudang Bulog Sempidi	TPID Kabupaten Badung
9	Pemantauan harga bahan pokok	24-Apr-20	Pasar Amlapura	TPID Kabupaten Karangasem
10	Program strategis Bupati Giri Prasta di tengah Pandemi Covid-19 penyerahan bantuan sembako	26-Apr-20	Desa di Kabupaten Badung	TPID Kabupaten Badung
11	Pemantauan perkembangan harga di Kab. Jembrana	27-Apr-20	Distributor Kabupaten Jembrana	TPID Kabupaten Jembrana
12	Koordinasi ke Gudang GSP Bebalang terkait ketersediaan stok beras	27-Apr-20	Gudang GSP Bebalang Bangli	TPID Kabupaten Bangli
13	Pemantauan perkembangan harga di Kota Denpasar	27-Apr-20	Distributor Kota Denpasar	TPID Kota Denpasar
14	Pemantauan Langsung ke Pasar Umum Gianyar	27-Apr-20	Pasar Umum Gianyar	TPID Kabupaten Gianyar
15	Pemantauan ketersediaan stok bahan pokok	28-Apr-20	Pasar Amlapura	TPID Kabupaten Karangasem
16	Pemantauan persediaan bahan pokok dan ketersediaan pasokan di Gudang GSP Bebalang di Bangli	4-May-20	Pasar Kidul, Kec. Bangli, Kab. Bangli	TPID Kabupaten Bangli
17	Pemantauan perkembangan harga di Kota Denpasar	5-May-20	Distributor Kota Denpasar	TPID Kota Denpasar
18	Pemantauan perkembangan harga di Kab. Jembrana	5-May-20	Distributor Kabupaten Jembrana	TPID Kabupaten Jembrana
19	Pemantauan ketersediaan stok bahan pokok	5-May-20	Pasar Amlapura	TPID Kabupaten Karangasem
20	Pemantauan perkembangan harga di Kab. Tabanan	6-May-20	Kabupaten Tabanan	TPID Kabupaten Tabanan
21	Operasi Pasar TPID Kab. Badung dengan Bulog Divre Bali (dengan memperhatikan protokol kesehatan dan diawasi Kepolisian dan Satpol PP)	12-19 Mei 2020	Kec. Mengwi dan Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung.	TPID Kabupaten Badung
22	Pemantauan ketersediaan stok bahan pokok	15-May-20	Pasar Amlapura	TPID Kabupaten Karangasem
23	Pemantauan perkembangan harga di Kota Denpasar	15-May-20	Distributor Kota Denpasar	TPID Kota Denpasar
24	Pemantauan Langsung ke Pasar Umum Gianyar	15-May-20	Pasar Umum Gianyar	TPID Kabupaten Gianyar
25	Survey harga kebutuhan pokok	18-May-20	Pasar Anyar	TPID Kabupaten Buleleng
26	Pemantauan perkembangan harga di Kota Denpasar	28-May-20	Distributor Kota Denpasar	TPID Kota Denpasar
27	Pemantauan ketersediaan stok bahan pokok	28-May-20	Pasar Amlapura	TPID Kabupaten Karangasem
28	Pemantauan harga kebutuhan pokok	2-Jun-20	Pasar Umum Gianyar	TPID Kabupaten Gianyar
29	Pemantauan harga bahan pokok	8-Jun-20	Pasar Umum Galiran	TPID Kabupaten Klungkung
30	Pemantauan dan pembinaan kepada pedagang dan pengunjung pasar Blahkiuh agar mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid19	15-Jun-20	Pasar Blahkiuh	TPID Kabupaten Badung
31	Pengarahan Bupati Klungkung kpd pedagang dan pengunjung pasar umum Galiran dlm rangka persiapan perpanjangan jam buka pasar umum.	18-Jun-20	Pasar Umum Galiran	TPID Kabupaten Klungkung

Sumber : Bank Indonesia

Halaman ini sengaja dikosongkan





BAB IV

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

- Penyaluran kredit korporasi pada triwulan II 2020 berkontraksi sebesar 0,55% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,96% (yoy).
- Penyaluran kredit RT tumbuh 2,83% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan lalu yang tumbuh sebesar 7,28% (yoy). Melambatnya kredit RT terutama bersumber dari melambatnya kredit multiguna seiring mulai meningkatnya suku bunga kredit tersebut.
- Penyaluran kredit UMKM berkontraksi sebesar 2,51% (yoy), menurun dari triwulan lalu yang tumbuh 6,79% (yoy). Menurunnya kredit UMKM bersumber terutama dari Kredit UMKM LU Perdagangan dan Akmamin seiring dengan penurunan LU tersebut dalam perekonomian Bali.



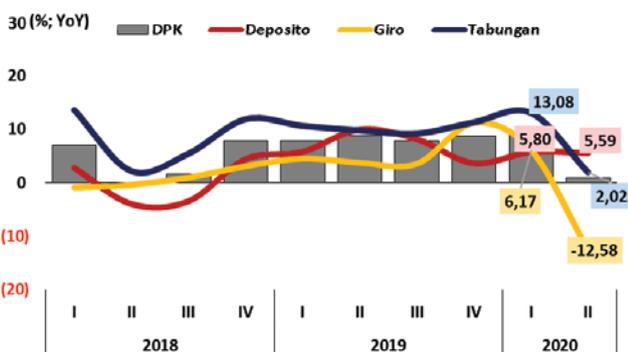
KONDISI UMUM

Secara umum, kondisi stabilitas keuangan di Bali pada triwulan II 2020 masih terjaga. DPK dan Kredit pada triwulan II 2020 masih tumbuh positif, meski melambat seiring dengan penurunan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, program pemerintah dalam rangka penanggulangan dan pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 juga telah mampu memitigasi risiko keuangan yang dapat mengganggu kestabilan sistem keuangan dan makroekonomi. Hal ini tercermin antara lain dari masih terjaganya kualitas kredit UMKM meskipun kinerja UMKM terdampak cukup besar dari pandemi COVID-19. Namun demikian, perkembangan data pada triwulan II 2020 menunjukkan adanya peningkatan tekanan terhadap keuangan korporasi dan rumah tangga, sebagai dampak lanjutan dari pandemi COVID-19. Terkait hal ini, pemerintah telah menyusun kembali sejumlah program baik untuk masyarakat, UMKM maupun korporasi sehingga diharapkan dapat menahan peningkatan risiko terhadap sistem keuangan. Selain itu, dimulainya tatanan kehidupan era baru diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga kondisi keuangan korporasi maupun masyarakat dapat berangsur-angsur pulih.

4.1. KINERJA INTERMEDIASI PERBANKAN MASIH BAIK

4.1.1. Dana Pihak Ketiga

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Wilayah Bali pada triwulan II 2020 tercatat tumbuh sebesar 0,91% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 9,44% (yoy). Melambatnya DPK ini terutama bersumber dari melambatnya pertumbuhan tabungan (pangsa 49,91%) dan kontraksi giro (pangsa 13,93%), sedangkan deposito (pangsa 36,16%) cenderung stabil (Grafik IV.1). Melambatnya tabungan dan kontraksi giro pada triwulan II 2020 diperkirakan merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Kebijakan terkait pencegahan penularan COVID-19 menyebabkan penurunan kinerja pariwisata yang merupakan penopang perekonomian Bali. Hal tersebut mengakibatkan sejumlah masyarakat kehilangan pendapatan sehingga membatasi dana yang tersedia untuk tabungan. Sementara itu, kontraksi DPK dalam bentuk giro¹⁶ diperkirakan terjadi akibat menurunnya transaksi dunia usaha serta tidak



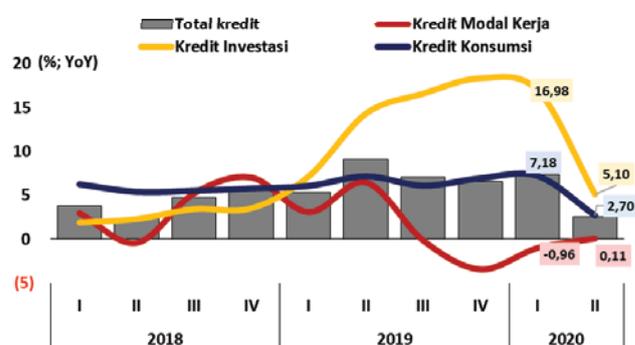
Grafik IV.1. Pertumbuhan DPK dan Komponennya

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

optimalnya penerimaan pajak dunia usaha. Berbeda dengan DPK dalam bentuk tabungan, DPK dalam bentuk deposito cenderung stabil di tengah pandemi COVID-19. Cenderung stabilnya DPK dalam bentuk deposito di tengah pandemi COVID-19 diperkirakan dilatarbelakangi oleh motif berjaga-jaga masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.

4.1.2. Penyaluran Kredit

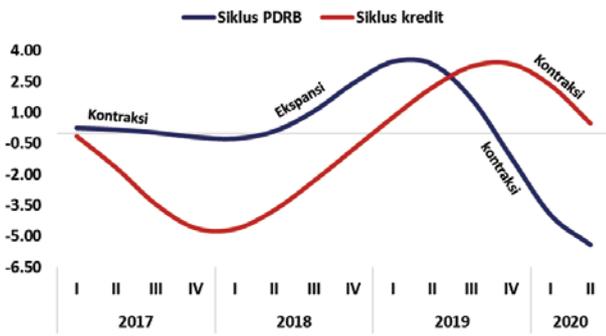
Penyaluran Kredit pada triwulan II 2020 tercatat tumbuh 2,58% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,36% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaannya, melambatnya kredit bersumber dari melambatnya kredit konsumsi (pangsa 36,43%) dan kredit investasi (pangsa 32,33%). Sementara itu, kredit modal kerja atau KMK (pangsa 33,04%) cenderung meningkat (Grafik IV.3). Melambatnya kredit konsumsi dan investasi di tengah menurunnya kinerja ekonomi diperkirakan dilatarbelakangi oleh sifat *procyclical*¹⁷ perbankan (Grafik IV.4). Selain itu, menurunnya kondisi ekonomi juga menyebabkan realisasi



Grafik IV.2. Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaannya

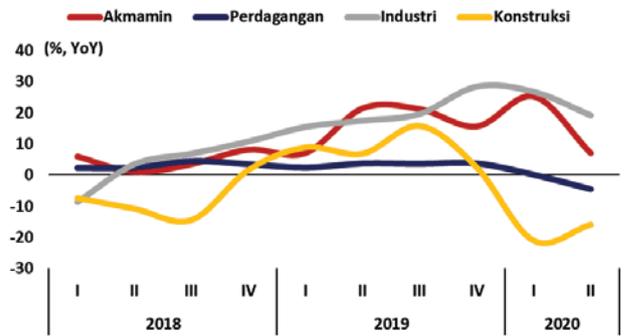
Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

- 16 Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan bilyet giro, cek, dan pemindahbukuan. Umumnya DPK dalam bentuk giro dimiliki oleh pelaku usaha dan pemerintah.
- 17 *Procyclical* disini adalah *procyclical* terkait *leverage* yaitu perbankan cenderung melakukan ekspansi dan kontraksi penyaluran kredit sejalan dengan siklus ekonomi (BIS, 2009).



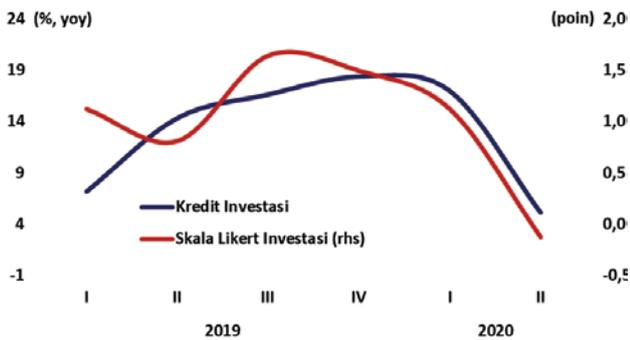
Grafik IV.3. Siklus Pertumbuhan Ekonomi dan Kredit Perbankan Bali

Sumber: Laporan Bank Umum & BPS (diolah), Bank Indonesia



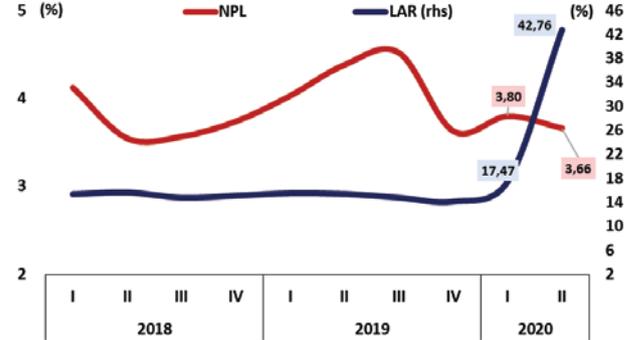
Grafik IV.5. Perkembangan LAR Sektoral

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia



Grafik IV.4. Perkembangan Kredit Investasi dan Skala Likert

Sumber: Laporan Bank Umum & Liaison (diolah), Bank Indonesia



Grafik IV.6. Perkembangan NPL dan LAR Kredit di Bali

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

investasi yang dapat dilakukan perusahaan menurun sehingga permintaan kredit investasi juga diperkirakan menurun (Grafik IV.5). Sementara itu, meningkatnya KMK sejalan dengan program penjaminan KMK yang dirancang pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

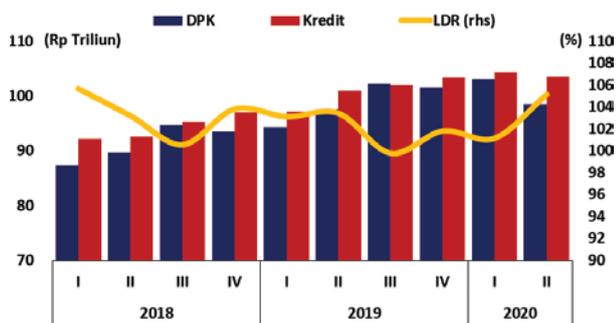
Berdasarkan lapangan usaha (LU), melambatnya kredit terutama bersumber dari penyaluran kredit LU Akmamin dan LU Perdagangan. Melambatnya kredit LU Akmamin (pangsa 19,99%) dan perdagangan (pangsa 24,10%) sejalan dengan penurunan kinerja LU tersebut dalam perekonomian Bali. LU Akmamin dan Perdagangan yang merupakan LU utama di Bali terdampak cukup besar dari pandemi COVID-19. Aktivitas ekonomi pada kedua LU tersebut menurun cukup dalam pada triwulan II 2020, sehingga berimbas kepada penurunan permintaan kredit pada LU tersebut. Sementara itu dari sisi penawaran kredit, perbankan diperkirakan juga cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit di tengah kondisi ekonomi yang sedang menurun.

Kualitas kredit di Wilayah Bali pada triwulan II 2020 masih terjaga. Hal ini tercermin dari *Nonperforming loan (NPL) Gross*, yang menurun pada triwulan II 2020 menjadi

3,66% dari 3,80% pada triwulan sebelumnya (Grafik IV.7). Terjaganya kualitas kredit merupakan dampak dari penerapan kebijakan fasilitas restrukturisasi kredit kepada debitur¹⁸ yang terdampak COVID-19. Hal ini tercermin dari rasio LAR yang cenderung meningkat di tengah penurunan NPL. Fasilitas restrukturisasi yang diberikan kepada debitur terdampak COVID-19 merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang diatur dalam PP No. 23 tahun 2020. Sementara itu, terkait pelaksanaan restrukturisasi diatur dalam POJK nomor 11/2020 untuk perbankan dan POJK nomor 14/2020 untuk perusahaan pembiayaan.

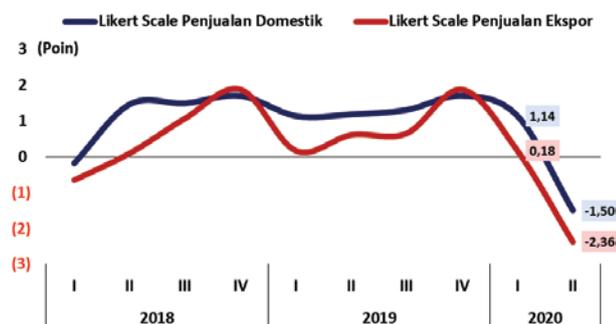
Kinerja intermediasi perbankan di Bali pada triwulan II 2020 masih cukup baik di tengah menurunnya kinerja ekonomi. Hal ini tercermin dari *Loan to Deposit Ratio (LDR)* yang masih cukup tinggi yaitu sebesar 105,14%, meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 101,26%. Tingginya LDR yang melampaui level 100%, menandakan bahwa kredit yang disalurkan di Bali lebih besar dibandingkan dengan dana yang dihimpun di Bali (Grafik IV.8).

18 Debitur disini mencakup UMKM terkait sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan



Grafik IV.7. Perkembangan LDR

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia



Grafik IV.8. Skala Likert Penjualan Domestik dan Ekspor

Sumber: Liaison Bank Indonesia

4.2. KINERJA KEUANGAN KORPORASI

4.2.1. Sumber Kerentanan Korporasi

Secara umum, sumber kerentanan korporasi Bali dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun domestik. Faktor eksternal yang mempengaruhi kerentanan korporasi antara lain adalah kondisi perekonomian negara mitra dagang dan asal wisman utama. Sementara itu, faktor domestik yang mempengaruhi antara lain adalah kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta kondisi *force major* lainnya. Faktor-faktor ini sangat terkait dengan

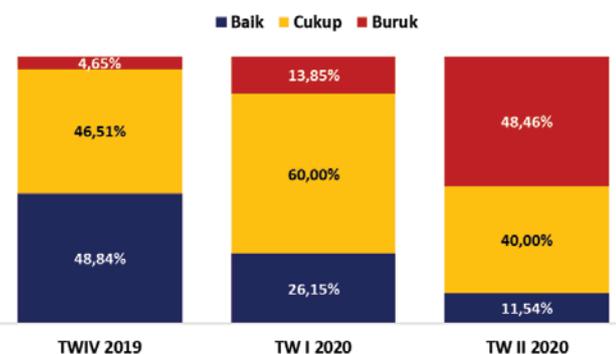
sektor pariwisata, mengingat besarnya ketergantungan perekonomian Bali pada sektor tersebut.

Pada triwulan II 2020, kinerja korporasi Bali menurun seiring menurunnya kinerja perekonomian sebagai dampak lanjutan COVID-19. Dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19, baik Indonesia maupun negara asal wisman serta mitra dagang utama menerapkan kebijakan *travel restriction* yang menahan kinerja pariwisata serta ekspor barang. Hal ini kemudian berdampak langsung kepada kinerja korporasi di Bali, terutama korporasi yang terkait dengan sektor pariwisata. Menurunnya kinerja korporasi juga tercermin dari menurunnya indikator skala *likert* penjualan ekspor dan domestik pada triwulan I 2020 (Grafik IV.9).

4.2.2. Kondisi Rentabilitas dan Likuiditas Korporasi

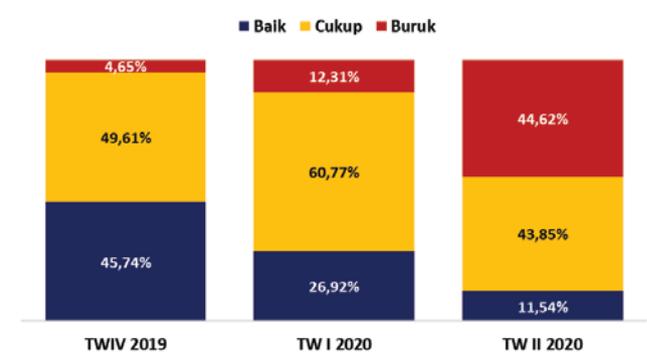
Kondisi rentabilitas (kemampuan menghasilkan laba) korporasi pada triwulan II 2020 menurun seiring dengan menurunnya kinerja ekonomi. Berdasarkan hasil SKDU, pangsa korporasi dengan kondisi rentabilitas baik tercatat sebesar 11,54%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 26,15% (Grafik IV.10.). Menurunnya kondisi rentabilitas ini sejalan dengan penurunan kinerja ekonomi.

Menurunnya rentabilitas korporasi berdampak terhadap menurunnya likuiditas korporasi. Rentabilitas sangat berpengaruh terhadap kinerja likuiditas karena menurunnya rentabilitas berdampak pada penurunan aset lancar korporasi. Pada triwulan II 2020, sejalan dengan penurunan rentabilitas, likuiditas (kemampuan untuk membayar utangnya) korporasi menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan lalu. Kondisi ini tercermin dari menurunnya pangsa korporasi dengan kondisi likuiditas baik di triwulan II 2020 menjadi 11,54%, dari triwulan sebelumnya yang sebesar 26,92% (Grafik IV.11.).



Grafik IV.9. Kondisi Rentabilitas Korporasi

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)



Grafik IV.10. Kondisi Likuiditas Korporasi

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

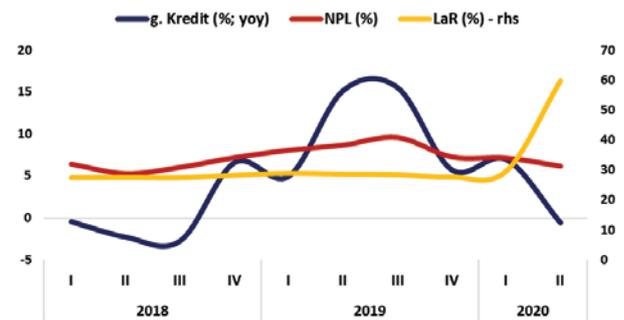
4.2.3. Penyaluran Kredit Korporasi¹⁹

Penyaluran kredit perbankan di Wilayah Bali kepada korporasi cenderung kecil (pangsa 29,58%). Berdasarkan penggunaannya, penyaluran kredit perbankan terhadap korporasi, paling besar diberikan dalam bentuk kredit investasi (pangsa 66,93%). Sementara itu pangsa kredit modal kerja sekitar 33,04%. Secara sektoral, kredit korporasi terkonsentrasi besar pada LU yang berhubungan dengan pariwisata yaitu LU Akmamin (pangsa 55,48%) dan perdagangan (pangsa 15,37%).

Penyaluran kredit korporasi pada triwulan II 2020 berkontraksi sebesar 0,55%(yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,96%(yoy). Dari sisi penggunaan, menurunnya kinerja penyaluran kredit korporasi bersumber dari penyaluran kredit investasi. Kredit investasi korporasi tumbuh 1,72% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya (18,14%; yoy). Sementara itu, kredit modal kerja pada triwulan II 2020 berkontraksi sebesar 4,62%, membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (-12,39%,yoy). Menurunnya kredit investasi pada triwulan II 2020 sejalan dengan menurunnya kinerja ekonomi Bali. Sementara itu, membaiknya kinerja kredit modal kerja merupakan dampak dari kebijakan pemerintah untuk mendukung pelaku dunia usaha termasuk BUMN dan korporasi, yang terdampak COVID-19²⁰.

Berdasarkan jenis LU, menurunnya kredit korporasi terutama bersumber dari melambatnya kredit LU Akmamin dan kontraksi kredit LU Perdagangan. Kredit korporasi LU Akmamin (pangsa 55,48%) tumbuh 3,76% (yoy) pada triwulan II 2020, melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 24,83%(yoy). Melambatnya kredit korporasi LU Akmamin pada triwulan II 2020 sejalan dengan menurunnya kinerja pariwisata di Bali. Sementara itu, kredit korporasi LU Perdagangan berkontraksi sebesar 9,41%(yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 2,11%(yoy). Menurunnya kredit korporasi LU Perdagangan diperkirakan implikasi dari menurunnya kinerja LU tersebut dalam perekonomian Bali akibat kebijakan pencegahan penularan COVID-19 yang membatasi aktivitas masyarakat.

Kualitas kredit korporasi sedikit membaik. Pada triwulan II 2020, NPL kredit korporasi tercatat sebesar



Grafik IV.11. Perkembangan kredit, NPL dan LaR Korporasi

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

6,17%, lebih rendah dibandingkan dengan NPL triwulan sebelumnya (7,13%). Berdasarkan penggunaannya, membaiknya kualitas kredit ini bersumber dari perbaikan seluruh komponen jenis kredit penggunaan. Hal ini tercermin dari rasio NPL kredit investasi dan KMK korporasi pada triwulan II 2020 yang masing-masing sebesar 4,54% dan 9,45%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,62% dan 13,03%. Sementara itu, secara sektoral membaiknya kualitas kredit korporasi terutama bersumber dari membaiknya kualitas kredit LU Perdagangan dan LU Konstruksi. Secara keseluruhan, meskipun kualitas kredit membaik, namun rasio NPL masih berada di atas 5%, dan LAR mengalami peningkatan. Oleh karena itu, risiko kredit korporasi masih perlu mendapat perhatian.

4.3. KINERJA KEUANGAN RUMAH TANGGA (RT)

4.3.1. Sumber Kerentanan RT

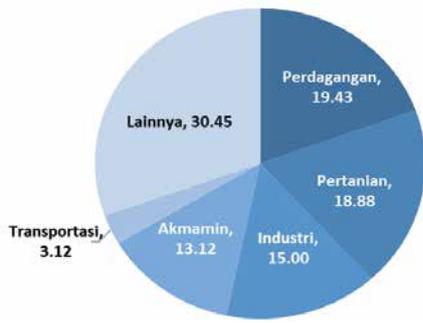
Kerentanan RT dipengaruhi oleh kinerja pariwisata Bali. Besarnya ketergantungan RT kepada kinerja pariwisata, tercermin oleh besarnya proporsi penduduk yang bekerja pada LU Perdagangan, Pertanian, Industri Pengolahan dan Akmamin (Grafik IV.12). Pada triwulan II 2020, sejalan dengan menurunnya kinerja LU tersebut, kinerja konsumsi rumah tangga turut mengalami penurunan.

4.3.2. Kinerja Keuangan RT

Pada triwulan II 2020 tekanan terhadap keuangan RT meningkat. Meningkatnya tekanan terhadap keuangan RT disebabkan oleh menurunnya kinerja pariwisata yang kemudian berimplikasi terhadap penurunan pendapatan

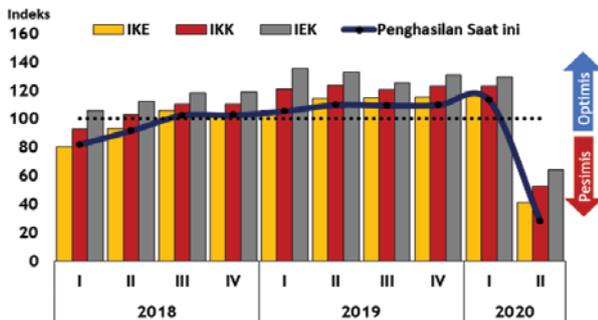
19 Korporasi disini adalah korporasi nonkeuangan.

20 Dalam program pemulihan ekonomi nasional, salah satu upaya penanganan dunia usaha terdampak COVID-19 adalah melalui penjaminan kredit modal kerja.



Grafik IV.12. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019

Sumber: BPS (diolah)



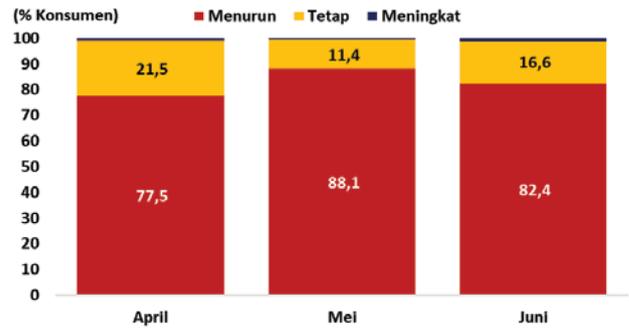
Grafik IV.13. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

RT²¹. Penurunan pendapatan RT ini tercermin dari penurunan indeks penghasilan pada survei konsumen (SK) (Grafik IV.13). Selain itu, survei terkait dampak COVID-19 terhadap pendapatan konsumen juga turut mengonfirmasi terjadinya penurunan pendapatan di sepanjang triwulan II 2020 (Grafik IV.14). Menurunnya pendapatan tersebut membuat rumah tangga terpaksa harus melakukan penyesuaian dengan mengurangi biaya konsumsinya (Grafik IV.15). Hal ini sejalan dengan penurunan kinerja konsumsi RT pada perekonomian Bali di triwulan II 2020. Menurunnya pendapatan RT serta kondisi ekonomi yang belum kembali pulih membuat keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi juga cenderung pesimis (Grafik IV.13).

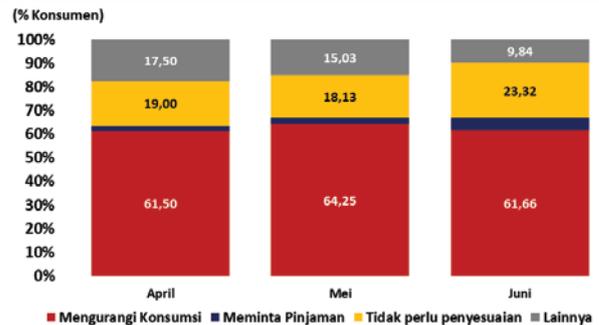
4.3.3. Penyaluran Kredit Rumah Tangga

Penyaluran kredit perseorangan di Bali masih mendominasi (pangsa 66,74%). Sebagian besar kredit perseorangan ini digunakan untuk konsumsi (pangsa 51,85%), sedangkan sisanya digunakan untuk kegiatan produktif yaitu modal kerja (pangsa 30,86%) dan investasi (pangsa 17,28%). Kredit konsumsi perseorangan secara umum dikenal juga sebagai kredit RT. Pada triwulan II 2020, kredit rumah tangga tumbuh 2,83%(yoy),



Grafik IV.14. Perkembangan Pendapatan Selama COVID-19

Sumber: Survei Dampak COVID-19 (diolah), Bank Indonesia



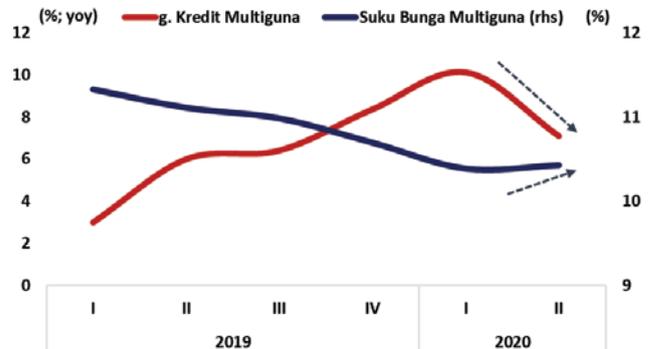
Grafik IV.15. Respon terhadap Penurunan Pendapatan

Sumber: Survei Dampak COVID-19 (diolah), Bank Indonesia

melambat dari triwulan lalu yang sebesar 7,28% (yoy). Melambatnya kredit rumah tangga bersumber terutama dari melambatnya kredit multiguna, seiring dengan mulai meningkatnya suku bunga kredit tersebut (Grafik IV.16). Selain itu, melambatnya kredit kepemilikan rumah dan apartemen (KPR+KPA) serta kontraksi kredit kendaraan bermotor (KKB) turut berkontribusi terhadap perlambatan kredit RT (Grafik IV.17).

Pada triwulan II 2020, risiko kredit RT masih terjaga.

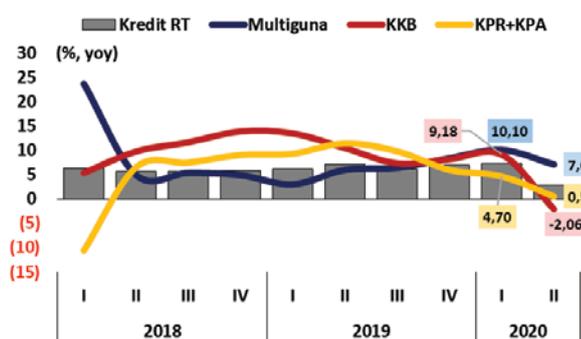
Risiko kredit RT masih terjaga cukup baik, tercermin dari tingkat NPL yang masih cukup rendah dan berada di



Grafik IV.16. Perkembangan Suku Bunga dan Kredit Multiguna

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

21 Besarnya rumah tangga yang bekerja pada LU terkait pariwisata menjadikan rumah tangga rentan terhadap guncangan pada sektor tersebut.



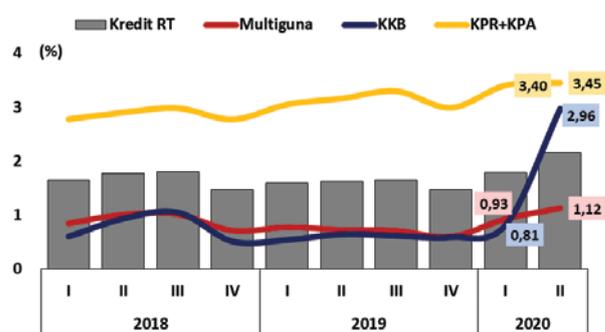
Grafik IV.17. Pertumbuhan Kredit Konsumsi

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

bawah 5%. Namun demikian, NPL pada triwulan II 2020 sedikit meningkat (2,16%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (1,79%). Berdasarkan jenis kreditnya, meningkatnya NPL di triwulan II 2020 bersumber dari meningkatnya NPL pada semua jenis kredit rumah tangga (Grafik IV.18).

4.3.3.1. Penyaluran Kredit Kepemilikan Properti Rumah dan Apartemen (KPR+KPA)

Kinerja perkembangan kredit kepemilikan KPR+KPA di triwulan II 2020 tumbuh 0,58% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan lalu (4,70%; yoy). Dari jenis kreditnya, melambatnya pertumbuhan KPR+KPA disebabkan oleh penurunan hampir seluruh tipe kredit. Hanya KPR tipe besar (70+) yang masih tumbuh positif namun melambat di triwulan II 2020. Sementara itu,



Grafik IV.18. Perkembangan NPL kredit Rumah Tangga

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

pertumbuhan KPA masih terkontraksi pada semua tipe KPA.

Dari sisi risiko, kualitas KPR+KPA cenderung menurun, meskipun masih berada di bawah threshold 5%. Menurunnya kualitas kredit tercermin dari rasio NPL KPR+KPA di triwulan II 2020 (3,45%) yang lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (3,40%). Berdasarkan tipenya, seluruh tipe kredit KPA perlu mendapat perhatian mengingat rasio NPL kredit tersebut jauh melampaui threshold 5%.

4.3.3.2. Penyaluran Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan Multiguna

KKB terkontraksi di triwulan II 2020. KKB terkontraksi sebesar 2,06% (yoy) di triwulan II 2020, menurun dari triwulan sebelumnya (9,18%; yoy). Menurunnya

Tabel IV.1. Perkembangan Kredit KPR+KPA

Jenis Kredit	Pangsa TW II 2020 (%)	g. Kredit (%; yoy)					
		2019				2020	
		I	II	III	IV	I	II
KPR	32,47	8,95	8,23	10,14	6,24	4,93	0,83
RT. KPR sd 21	1,93	(1,43)	(2,88)	(2,02)	1,61	0,83	(0,32)
RT. KPR sd 70	16,23	17,85	17,38	21,69	13,47	11,60	5,69
RT. KPR 70+	12,97	3,42	1,70	2,09	0,78	(0,03)	(2,87)
KPR Ruko/Rukan	1,34	(3,09)	0,60	(3,64)	(7,16)	(10,29)	(13,86)
KPA	0,30	(4,67)	(8,28)	(13,18)	(13,01)	(15,45)	(20,92)
RT. KPA sd 21	0,04	(13,15)	1,15	(4,23)	0,08	(18,05)	(35,64)
RT. KPA sd 70	0,17	(12,46)	(12,93)	(17,65)	(15,07)	(15,52)	(17,76)
RT. KPA 70+	0,08	24,58	(3,49)	(8,49)	(15,96)	(13,87)	(17,94)
KPR+KPA	32,77	9,33	11,46	9,82	6,00	4,70	0,58

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali (diolah)

Tabel IV.2. Perkembangan KKB dan Multiguna

Jenis KKB	Pangsa TW IV 2019 (%)	g. Kredit (%; yoy)					
		2019				2020	
		I	II	III	IV	I	II
KKB	7,49	9,02	6,49	7,37	8,23	9,18	(2,06)
Mobil	6,54	5,55	0,17	1,84	5,28	4,95	(2,15)
Sepeda Motor	0,63	54,42	83,70	94,57	44,61	28,10	(11,35)
Truk	0,03	(22,54)	257,62	(20,84)	8,66	24,85	(68,72)
Lainnya	0,29	86,07	58,34	45,96	14,46	126,50	90,50
RT. Multiguna	52,33	2,83	4,59	6,40	8,36	10,10	7,09

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

pertumbuhan KKB secara umum bersumber dari KKB roda empat (mobil), dua (sepeda motor) dan enam (truk). Menurunnya kredit KKB ini diperkirakan sebagai dampak pemberlakuan pembatasan mobilitas masyarakat sehingga menurunkan kebutuhan untuk membeli kendaraan. Selain itu, menurunnya daya beli masyarakat juga turut menyebabkan penurunan pembelian barang tahan lama seperti kendaraan.

Kualitas kredit KKB sedikit menurun namun masih terjaga di level aman. Pada triwulan II 2020, NPL KKB tercatat sebesar 2,96%, sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya (0,81%), namun masih berada di bawah *threshold* 5%. Meningkatnya NPL KKB pada triwulan II 2020 terutama bersumber dari meningkatnya NPL KKB roda empat dan roda dua. Pada triwulan II 2020, NPL KKB roda empat tercatat sebesar 2,95%, meningkat dibandingkan dengan triwulan lalu (0,71%). Sementara itu, NPL KKB roda dua tercatat sebesar 3,15%, meningkat dari triwulan lalu yang sebesar 1,05%.

Kredit multiguna tumbuh melambat seiring dengan penurunan kinerja ekonomi pada triwulan II 2020. Kredit multiguna tumbuh 7,09% (yoy) pada triwulan II 2020, melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (10,10%). Melambatnya kredit multiguna sejalan dengan penurunan kondisi ekonomi yang cukup dalam pada triwulan II 2020. Secara umum, pengajuan kredit multiguna relatif lebih mudah dibandingkan dengan jenis kredit lainnya. Namun demikian, menurunnya kondisi ekonomi diperkirakan membuat perbankan menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Dari sisi risiko, meskipun NPL sedikit meningkat namun masih terjaga di level yang rendah. NPL kredit multiguna pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 1,12%, meningkat dibandingkan dengan triwulan lalu (0,93%).

4.4. PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

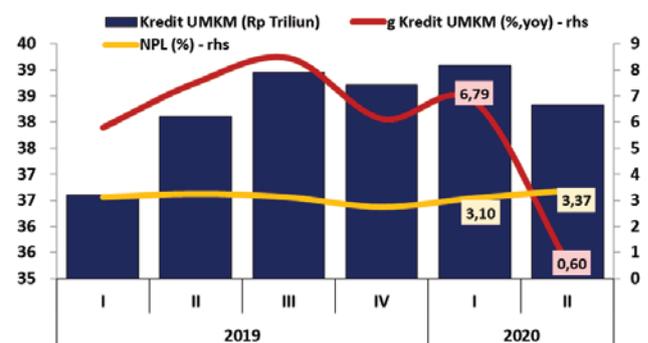
4.4.1. Penyaluran Kredit UMKM

Kredit UMKM berkontraksi pada triwulan II 2020, sejalan dengan penurunan kinerja ekonomi Bali. kredit UMKM berkontraksi sebesar 2,51% (yoy), menurun

dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,79% (yoy). Menurunnya kredit UMKM di Bali terutama bersumber dari kredit UMKM LU Perdagangan (pangsa 55,67%) dan LU Akamamin (pangsa 11,49%), sejalan dengan penurunan LU tersebut dalam perekonomian Bali.

Risiko kredit UMKM pada triwulan II 2020 masih terjaga. Meskipun kredit UMKM tumbuh melambat, namun kualitas kredit masih terjaga. NPL kredit UMKM pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 3,37%, sedikit meningkat dibandingkan dengan triwulan lalu (3,10%), namun masih terjaga di bawah 5%. Terjaganya risiko kredit UMKM di tengah penurunan kinerja UMKM disebabkan oleh kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka penanggulangan dampak sosial dan ekonomi dari COVID-19. Kebijakan tersebut berhasil menahan peningkatan NPL kredit UMKM.

Eksposur perbankan terhadap UMKM pada triwulan II 2020 cukup baik dan stabil. Pada triwulan II 2020, pangsa kredit UMKM terhadap total penyaluran kredit di Bali tercatat sebesar 37,02%, sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (37,48%). Meskipun demikian, rasio penyaluran kredit UMKM di Bali dinilai cukup baik karena telah melebihi kewajiban pemberian kredit/pembiayaan UMKM minimal 20% seperti yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.17/12/PBI/2015.



Grafik IV.19. Pertumbuhan Kredit UMKM

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

Tabel IV.3. Perkembangan Kredit UMKM Sektoral

UMKM Sektoral	Nominal (Triliun)				g. Kredit (%; yoy)							
	2019				2020		2019				2020	
	I	II	III	IV	I	II	I	II	III	IV	I	II
Pertanian	2,18	2,38	2,60	2,66	2,76	2,80	11,20	21,33	27,66	29,41	26,74	17,59
Industri	0,57	0,67	0,83	0,83	1,09	1,06	51,49	63,56	78,62	88,89	91,04	59,44
Perdagangan	20,97	21,51	21,75	21,31	21,05	20,68	4,95	4,51	3,93	1,85	0,37	(3,86)
Akamamin	4,45	4,83	4,98	4,90	5,22	4,27	11,09	16,10	21,68	12,27	17,34	(11,55)

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia

Berdasarkan sebaran wilayahnya, melambatnya kredit UMKM terbesar masih berada di Kota Denpasar (pangsa 31,66%), diikuti Kab. Badung (pangsa 17,21%) dan Kab. Gianyar (12,22%). Dari sisi risiko, secara umum NPL kredit UMKM di seluruh kabupaten/kota terjaga di bawah level 5%. Hanya kabupaten Buleleng yang saat ini memiliki NPL di atas 5% (6,13%). NPL terendah dimiliki oleh Gianyar (1,40%).

Tabel IV.4. Pangsa Kredit UMKM Spasial

Kab./Kota	Nominal (Triliun)		Pangsa (%)	
	2020		2020	
	I	II	I	II
Kota Denpasar	12,38	12,17	31,66	31,76
Kab. Badung	6,73	6,55	17,21	17,10
Kab. Gianyar	4,78	4,66	12,22	12,17
Kab. Buleleng	4,21	4,10	10,76	10,71
Kab. Tabanan	3,68	3,63	9,42	9,48
Kab. Karangasem	2,18	2,14	5,57	5,57
Kab. Jembrana	2,00	1,99	5,12	5,20
Kab. Bangli	1,56	1,54	4,00	4,03
Kab. Klungkung	1,58	1,52	4,05	3,97
Total UMKM	39,09	38,32	37,48	35,88

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

Tabel IV.5. Pertumbuhan Kredit UMKM Spasial

Kab./Kota	g. Kredit (%; YoY)					
	2019				2020	
	I	II	III	IV	I	II
Kota Denpasar	1,73	4,08	2,87	1,40	2,68	(1,77)
Kab. Badung	6,92	7,95	12,90	6,37	4,20	(2,96)
Kab. Gianyar	5,55	8,92	7,62	4,28	6,56	0,21
Kab. Buleleng	1,34	6,53	9,12	6,30	11,74	3,13
Kab. Tabanan	4,78	9,66	13,79	13,44	13,70	6,85
Kab. Karangasem	7,99	12,40	14,95	14,74	12,03	5,20
Kab. Jembrana	4,58	10,43	9,96	11,82	11,14	5,44
Kab. Bangli	7,19	11,58	10,29	10,56	8,69	3,00
Kab. Klungkung	10,07	15,15	13,92	11,90	10,73	1,70
Total UMKM	5,79	7,51	8,46	6,12	6,79	0,60

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

BOKS 2

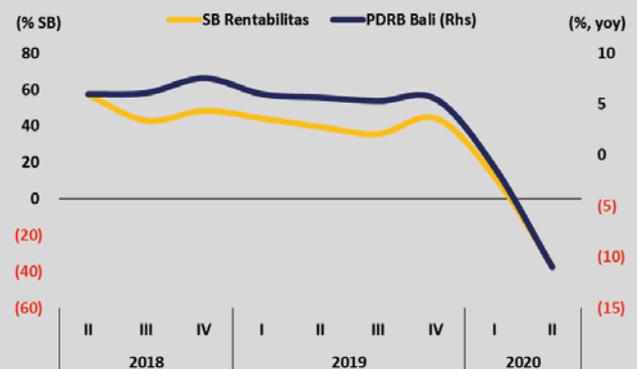
PERKEMBANGAN RESTRUKTURISASI KREDIT DEBITUR TERDAMPAK COVID-19 DI BALI



Besarnya ketergantungan Bali terhadap kinerja pariwisata menyebabkan Bali menjadi provinsi di Indonesia yang terdampak cukup besar dari COVID-19. Sejak triwulan I 2020, ekonomi Bali sudah menunjukkan penurunan, seiring dengan mulai diberlakukannya kebijakan *travel restriction* dan pembatasan aktivitas masyarakat untuk mengurangi penularan COVID-19. Penerapan kebijakan yang terus berlanjut hingga triwulan II 2020 tersebut menyebabkan ekonomi Bali kembali menurun, lebih dalam dibandingkan dengan triwulan I 2020.

Bersamaan dengan penurunan kinerja ekonomi Bali, kinerja keuangan pelaku usaha juga ikut menurun (Grafik Boks II.1). Berkurangnya aktivitas ekonomi pasca penerapan kebijakan COVID-19 menyebabkan kemampuan pelaku usaha untuk menghasilkan profit (rentabilitas) menurun dan kemudian berimbas kepada penurunan pendapatan. Penurunan kondisi rentabilitas ini tercermin dari penurunan nilai Saldo Bersih (SB)¹ rentabilitas perusahaan dari hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU)².

Menurunnya kondisi rentabilitas pelaku usaha dapat berpotensi mengganggu kemampuan mereka untuk membayar kewajibannya terhadap perbankan dan meningkatkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan. Terkait hal ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak COVID-19 yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2020 bersama sejumlah



Grafik Boks II.1. Perkembangan SBT Rentabilitas dan PDRB

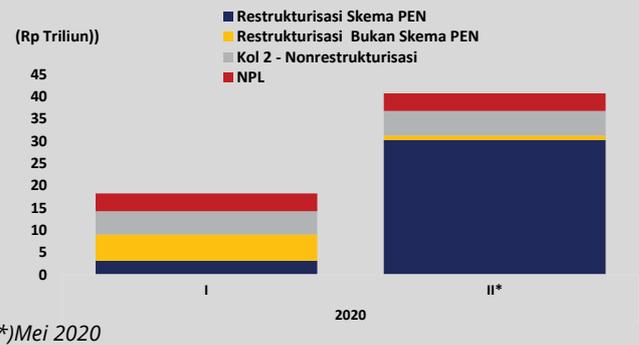
Sumber: SKDU Bank Indonesia & BPS (diolah)

- 1 Saldo bersih adalah selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “meningkat” dengan persentase yang memberikan jawaban “menurun” dan mengabaikan jawaban “sama”.
- 2 Survei triwulanan yang bertujuan untuk mendapatkan indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran secara triwulanan.



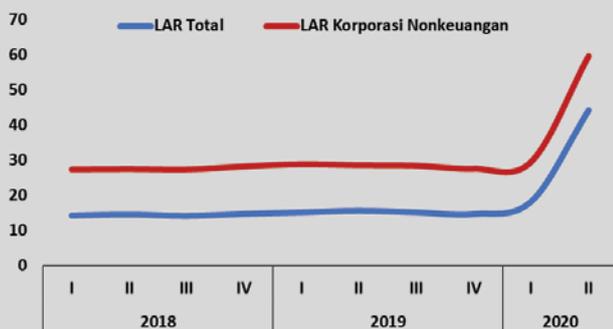
Grafik Boks II.2. Perkembangan NPL Perbankan Bali

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia



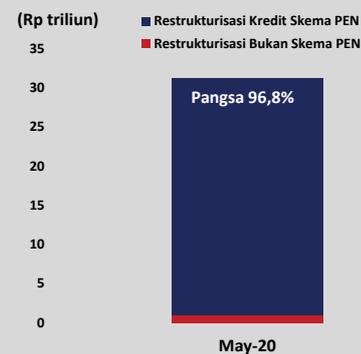
Grafik Boks II.4. LAR berdasarkan Jenis Komponen

Sumber: Sistem Layanan Informasi Keuangan dan Laporan Bank Umum (diolah)



Grafik Boks II.3. Perkembangan LAR Perbankan Bali

Sumber: Laporan Bank Umum (diolah), Bank Indonesia



Grafik Boks II.5. Nilai dan Pangsa Restrukturisasi Kredit Skema PEN

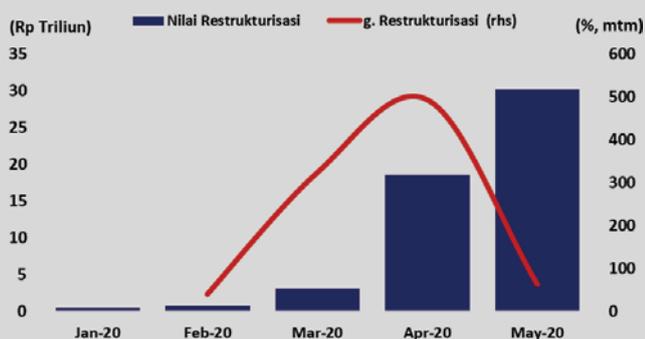
Sumber: Sistem Layanan Informasi Keuangan dan Laporan Bank Umum (diolah)

program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lainnya. Selain untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, PEN juga ditujukan untuk melindungi dan mempertahankan kemampuan ekonomi pelaku usaha. Sumber pembiayaan Program PEN berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, kebijakan restrukturisasi bagi debitur terdampak COVID-19 (selanjutnya disebut Skema PEN) dilakukan dengan menggunakan dana pemerintah bukan dana perbankan. Secara umum, kebijakan restrukturisasi Skema PEN telah berhasil menahan peningkatan risiko kredit perbankan Bali yang ditunjukkan dengan masih terkendalinya tingkat *Nonperforming Loan* (NPL) (Grafik Boks II.2). Namun demikian, membaiknya NPL ini di sisi lain membuat rasio *Loan at Risk* (LAR) perbankan meningkat (Grafik Boks II.3).

Peningkatan LAR kredit perbankan di triwulan II 2020 bersumber terutama dari peningkatan restrukturisasi kredit skema PEN (Grafik Boks II.4). Di triwulan II (Mei) 2020, sekitar 96,8% dari total kredit yang di restrukturisasi

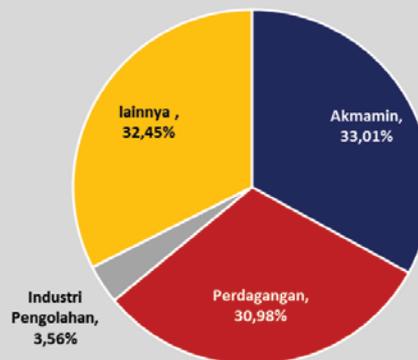
merupakan restrukturisasi kredit skema PEN (Grafik Boks II.5). Restrukturisasi kredit ini mulai meningkat pada bulan Maret 2020 (Grafik Boks II.6), seiring dimulainya kebijakan yang membatasi aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan pariwisata. Sejalan dengan hal ini, Lapangan Usaha (LU) terkait pariwisata yaitu Akmamin dan Perdagangan menjadi LU dengan pangsa restrukturisasi akibat COVID-19 terbesar di Bali (Grafik Boks II.7).

Peranan program restrukturisasi kredit skema PEN di Bali selain bermanfaat bagi pelaku usaha, juga bermanfaat bagi perbankan. Diperkirakan, tanpa program restrukturisasi PEN, rasio kredit bermasalah atau NPL perbankan dapat meningkat tinggi di Mei 2020. NPL yang terlalu tinggi bagi perbankan dapat menimbulkan masalah bagi kelangsungan usaha perbankan. Ketika NPL naik terlalu tinggi, perbankan terpaksa harus memperkuat struktur modalnya melalui penghapusan aktiva produktif. Hal ini akan berimplikasi terhadap kemampuan perbankan untuk dapat menyalurkan kredit baru dan menghasilkan profit, serta menahan upaya pemulihan ekonomi.



Grafik Boks II.6. Perkembangan Restrukturisasi Kredit Debitur Skema PEN

Sumber: Sistem Layanan Informasi Keuangan (diolah)



Grafik Boks II.7. Pangsa Restrukturisasi Kredit Debitur Skema PEN berdasarkan LU (Jan-Mei 2020)

Sumber: Sistem Layanan Informasi Keuangan (diolah)

Kesimpulan

Kebijakan restrukturisasi kredit yang diberikan kepada debitur terdampak COVID-19 merupakan kebijakan yang cukup penting selain untuk menjaga stabilitas sistem keuangan juga dapat mendukung pemulihan bisnis pelaku usaha. Pemberian fasilitas restrukturisasi tersebut akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk dapat fokus menjalankan bisnisnya. Terkait potensi risiko dari program restrukturisasi ini, perbankan diharapkan terus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit baru, sebagai upaya mitigasi risiko kredit.

Halaman ini sengaja dikosongkan





BAB V

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

- Perkembangan kinerja transaksi tunai pada triwulan II 2020 di Provinsi Bali menunjukkan terjadinya *net inflow* sebesar Rp1,42 triliun. Kondisi tersebut disebabkan oleh kinerja ekonomi Bali yang mengalami kontraksi cukup dalam pada triwulan berjalan.
- Perkembangan transaksi melalui SKNBI dan RTGS pada triwulan II 2020 menunjukkan perlambatan dibanding dengan triwulan sebelumnya, baik secara nominal maupun volume.



KONDISI UMUM

Perkembangan kinerja transaksi tunai pada triwulan II 2020 di Provinsi Bali menunjukkan terjadinya net inflow²² sebesar Rp1,42 triliun. Kondisi tersebut disebabkan oleh kinerja ekonomi Bali yang mengalami kontraksi cukup dalam pada triwulan berjalan.

Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan transaksi nontunai juga menunjukkan perlambatan. Pada triwulan II 2020, volume transaksi melalui SKNBI tercatat sebesar 264,87 ribu lembar atau tumbuh -35,83 (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan I 2020 yang tumbuh sebesar -13,10% (yoy). Nominal transaksi SKNBI tercatat sebesar Rp8,2 triliun atau tumbuh -31,37% (yoy) pada triwulan II 2020. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2020 yang tumbuh sebesar -3,57% (yoy). Volume transaksi melalui SKNBI tercatat sebesar 264.869 lembar atau terkontraksi 35,83% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 380.183 lembar atau terkontraksi sebesar 13,10% (yoy).

Transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) juga mengalami perlambatan. Nominal RTGS tercatat sebesar Rp27,13 triliun atau tumbuh -14,89% (yoy) pada triwulan II 2020, melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp31,94 triliun atau tumbuh sebesar 15,65%. Volume transaksi melalui RTGS tercatat sebesar 16,25 ribu lembar atau tumbuh -14,57 (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan I 2020 yang tumbuh sebesar 1,47% (yoy).

Sementara itu, perkembangan nominal transaksi penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali pada Triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 87,50% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan I 2020 yang tercatat tumbuh sebesar 2,66 % (yoy).

5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI BALI

Perkembangan layanan sistem pembayaran di Bali, baik dengan transaksi tunai maupun nontunai pada triwulan II 2020 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Pelaksanaan kegiatan sistem pembayaran tunai dapat memenuhi kebutuhan uang Rupiah kepada masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan dalam kondisi uang Rupiah yang layak edar serta tepat waktu. Sementara itu, sistem pembayaran nontunai telah dapat menyediakan sistem dan infrastruktur yang handal dan aman dalam rangka mendukung aktivitas perekonomian.

5.1.1. Transaksi Sistem Pembayaran Tunai

Transaksi pembayaran tunai di Bank Indonesia dapat diketahui melalui jumlah aliran uang keluar dari Bank Indonesia ke perbankan (*outflow*) dan jumlah aliran uang masuk dari perbankan ke Bank Indonesia (*inflow*).

Perkembangan transaksi tunai pada triwulan II 2020 di Provinsi Bali menunjukkan terjadinya net inflow (aliran uang yang masuk ke Bank Indonesia melalui perbankan lebih besar dibanding dengan uang yang keluar), yaitu sebesar Rp1.417 miliar. Berbeda dengan pola historisnya, siklus peredaran uang biasanya

mengalami *net outflow* akibat tingginya permintaan uang kartal pada saat bulan Ramadhan dan perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri. Kondisi ini terjadi akibat kinerja ekonomi Bali yang mengalami kontraksi cukup dalam pada triwulan berjalan.

Secara triwulanan, nominal inflow pada triwulan II 2020 tercatat sebesar Rp3,77 triliun atau melambat sebesar -32,34% (yoy). Kondisi ini lebih rendah dibanding dengan pertumbuhan *inflow* pada triwulan I 2020 yang terkontraksi sebesar 14,78% (yoy), dengan nilai nominal Rp5,76 triliun. Sementara itu, nilai nominal *outflow* pada triwulan laporan juga tercatat menunjukkan perlambatan, yaitu terkontraksi sebesar 63,32% (yoy), dengan nominal Rp2,35 triliun. Capaian ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,61% (yoy), dengan nominal Rp4,03 triliun. Aliran uang pada triwulan berjalan yang tercatat mengalami *net inflow* ini didorong oleh perlambatan kinerja ekonomi di tengah penurunan kinerja pariwisata Bali²³.

5.1.2. Transaksi Sistem Pembayaran Nontunai

5.1.2.1. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

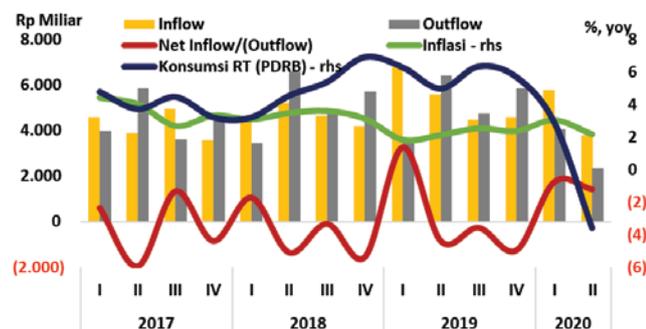
SKNBI merupakan salah satu sarana transfer dana nontunai selain RTGS, namun dengan nilai nominal yang relatif kecil (ritel) dibandingkan dengan RTGS (kategori

22 *Net inflow* merupakan kondisi di mana uang yang masuk ke kas Bank Indonesia lebih besar dibanding uang yang keluar dari kas Bank Indonesia.
23 Jumlah wisman pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 363 orang atau terkontraksi sebesar 99,96% (yoy), jauh melambat dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 21,82% (yoy).

Tabel V.1. Perkembangan *Inflow - Outflow* Provinsi Bali

Indikator	2018				2019				2020	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
<i>Inflow</i> (Rp Miliar)	4.502	5.207	4.654	4.160	6.762	5.569	4.481	4.582	5.762	3.768
<i>Outflow</i> (Rp Miliar)	3.448	6.558	4.745	5.703	3.512	6.409	4.744	5.836	4.025	2.351
<i>Net Inflow/(Outflow)</i> - Rp Miliar	1.054	(1.352)	(91)	(1.543)	3.250	(840)	(263)	(1.254)	1.738	1.417
Penukaran (Rp Miliar)	22,37	22,11	30,61	26,46	30,22	36,07	37,11	90,77	61,16	1,08
Temuan Uang Palsu (Lembar)	1.241	656	775	910	897	788	714	735	233	0
Frekuensi Kas Keliling (Kali) - rhs	17	14	24	25	14	14	16	3	5	0

Sumber : Bank Indonesia



Grafik V.1. Pergerakan *Inflow, Outflow, Netflow, Inflasi dan PDRB*

Sumber: Bank Indonesia

nominal besar). Kegiatan operasional SKNBI dilakukan melalui mekanisme pertukaran warkat debit antarbank yang berjalan melalui skema kliring. Untuk Wilayah Provinsi Bali, koordinator penukaran warkat debit kliring dilaksanakan di KPwBI Provinsi Bali di Kota Denpasar, sedangkan untuk Wilayah Singaraja yang ditunjuk oleh Bank Indonesia adalah Bank Mandiri.

Perkembangan transaksi nontunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) menunjukkan penurunan di periode laporan. Pada triwulan II 2020, volume transaksi melalui SKNBI tercatat sebesar 264.869 lembar atau terkontraksi 35,83% (yoy). Kondisi ini menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 380.183 lembar atau terkontraksi sebesar 13,10%

(yoy). Sejalan dengan itu, nilai nominal transaksi melalui SKNBI pada triwulan II 2020 tercatat sebesar Rp8,20 triliun atau terkontraksi sebesar 31,37% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 3,57% (yoy). Melambatnya transaksi kliring sejalan dengan perlambatan kinerja ekonomi Bali pada triwulan II 2020²⁴.

Sejalan dengan SKNBI, transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) pada triwulan laporan juga mengalami perlambatan. Pada triwulan II 2020, nominal RTGS tercatat sebesar Rp27,13 triliun atau terkontraksi sebesar 14,89% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp31,94 triliun atau tumbuh sebesar 15,65%. Dilihat dari volumenya, transaksi RTGS tercatat sebanyak 16.252 lembar atau terkontraksi sebesar 14,57% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 19.729 lembar atau tumbuh sebesar 1,47%.

5.1.2.2. Perkembangan Tolakan Transaksi Cek/BG

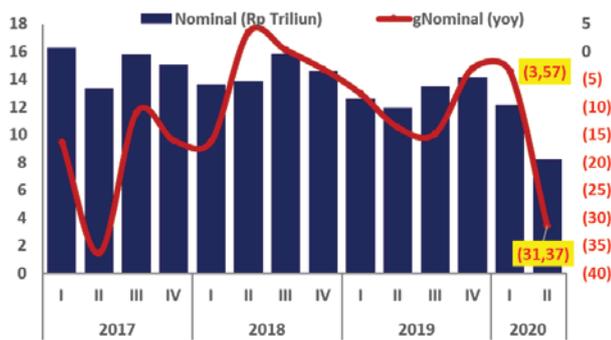
Perkembangan nominal tolakan cek/bilyet giro pada triwulan laporan mengalami penurunan, baik dari sisi volume maupun nilai nominal. Volume tolakan cek/ bilyet giro pada periode laporan tercatat menurun sebesar -12,82 (yoy) atau sejumlah 3,35 ribu lembar. Sementara itu, nominal tolakan cek/bilyet giro pada periode laporan

Tabel V.2. Perkembangan Indikator SKNBI di Wilayah Bali

Indikator	2018				2019				2020	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
PERPUTARAN KLIRING										
Volume Kliring (ribu)	538,490	533,718	582,380	510,114	437,479	412,785	444,077	446,071	380,183	264,869
- Rata-rata lembar per hari (ribu)	8,83	9,88	9,39	8,36	7,41	7,51	6,73	6,76	6,55	4,49
Nominal Kliring (Rp Miliar)	13.635,43	13.842,34	15.845,75	14.602,60	12.603,80	11.948,76	13.505,12	14.164,47	12.153,95	8.200,89
- Rata-rata nominal per hari (Rp Miliar)	223,53	256,34	255,58	239,39	213,62	217,25	204,62	214,61	209,55	139,00
TOLAKAN CEK/BG										
Lembar (ribu)	5,91	5,35	4,72	4,62	4,14	3,85	3,88	4,15	3,86	3,35
Nominal Cek/BG (Rp Miliar)	168,87	174,93	162,94	167,45	146,04	141,32	117,82	131,43	126,76	105,94
PERTUMBUHAN PERPUTARAN KLIRING										
- Lembar (yoy, %)	(13,43)	(1,16)	(4,30)	(10,29)	(18,76)	(22,66)	(23,75)	(12,55)	(13,10)	(35,83)
- Nominal Kliring (yoy, %)	(16,19)	3,53	0,26	(3,15)	(7,57)	(13,68)	(14,77)	(3,00)	(3,57)	(31,37)
PERTUMBUHAN TOLAKAN CEK/BG										
- Lembar (yoy, %)	(25,28)	(28,17)	(21,98)	(17,87)	(29,92)	(28,13)	(17,97)	(10,17)	(6,69)	(12,82)
- Nominal Kliring (yoy, %)	(16,40)	(6,43)	(17,15)	(14,86)	(13,52)	(19,21)	(27,69)	(21,51)	(13,20)	(25,03)

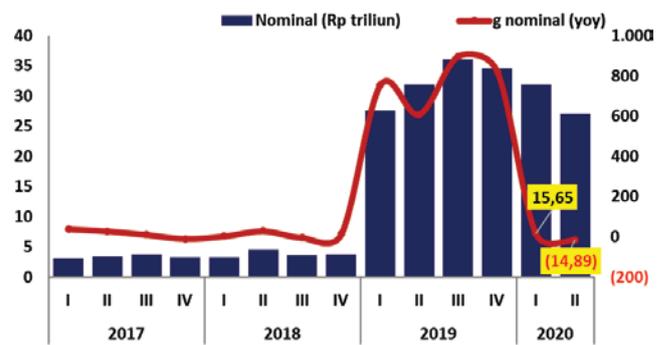
Sumber : Bank Indonesia

24 Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2020 tercatat sebesar -10,98% (yoy), terkontraksi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar -1,14% (yoy).



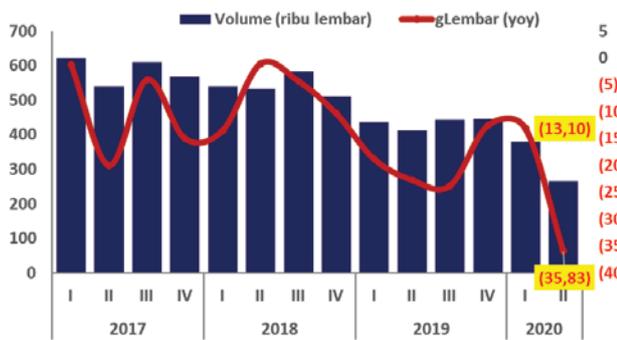
Grafik V.2. Perkembangan Nominal Kliring di Bali

Sumber: Bank Indonesia



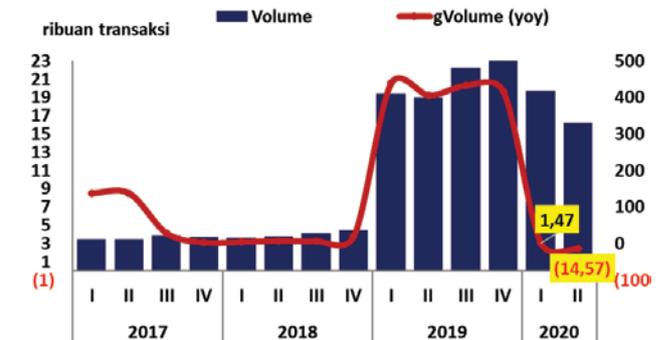
Grafik V.4. Perkembangan Nominal RTGS di Bali

Sumber: Bank Indonesia



Grafik V.3. Perkembangan Volume Kliring di Bali

Sumber: Bank Indonesia



Grafik V.5. Perkembangan Volume RTGS di Bali

Sumber: Bank Indonesia

tercatat sebesar Rp105,94 miliar atau tumbuh -31,37% (yoy). Bank Indonesia terus berupaya untuk mendorong perbankan dalam mematuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.18/41/PBI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Bilyet Giro. Penurunan jumlah tolakan transaksi cek/BG yang terjadi sejak tahun 2017, juga menunjukkan upaya perbankan dalam mensosialisasikan penggunaan bilyet giro kepada nasabahnya telah berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang diharapkan.

5.2. UPAYA MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

5.2.1. Perkembangan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di Provinsi Bali

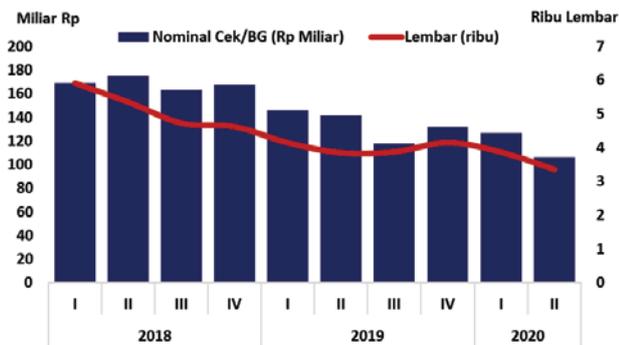
Nilai nominal transaksi penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali pada triwulan II 2020 menunjukkan perlambatan. Kondisi ini tercermin dari melambatnya pertumbuhan nilai nominal transaksi penukaran valuta asing, yaitu dari 2,66% (yoy) pada triwulan I 2020, menjadi -87,50% (yoy) pada triwulan II 2020. Nominal transaksi jual-

beli valas tercatat sebesar Rp1,25 triliun (triwulan II 2020), yang terdiri atas transaksi pembelian sebesar Rp619,68 miliar dan transaksi penjualan sebesar Rp631,77 miliar.

Melambatnya pertumbuhan transaksi penukaran (jual-beli) valuta asing pada KUPVA BB pada triwulan II 2020, sejalan dengan penurunan jumlah kunjungan wisman akibat kebijakan negara-negara yang memberlakukan *travel restriction* dan *lockdown* di tengah pandemi COVID-19²⁵. Kondisi ini sejalan dengan perlambatan kinerja pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan II 2020.

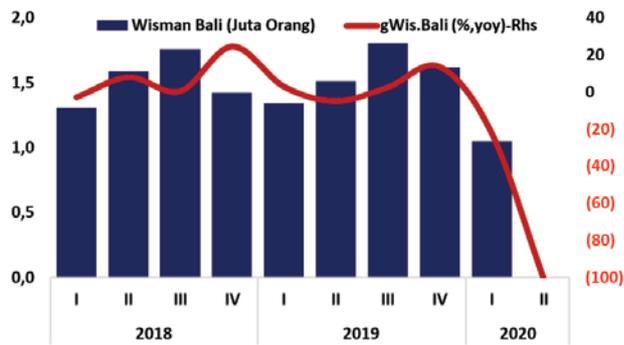
Terkait dengan perkembangan jaringan kantor KUPVA BB, terinformasi bahwa jumlah jaringan kantor KUPVA BB Berizin yang beroperasi di Wilayah Bali pada triwulan II 2020 tercatat sejumlah 617 kantor, yang terdiri atas 123 Kantor Pusat (KP) dan 494 Kantor Cabang (KC). Pada masa pandemi COVID-19 ini, hanya terdapat 14 kantor (pangsa 2%) yang melakukan operasional normal dan sebanyak 148 kantor (pangsa 24%) memilih untuk mengurangi jam operasional. Jumlah kantor yang memilih untuk tutup sementara berjumlah 455 kantor (pangsa 74%), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

25 Jumlah wisman pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 395 orang atau terkontraksi sebesar 99,97% (yoy), jauh melambat dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 21,82% (yoy).



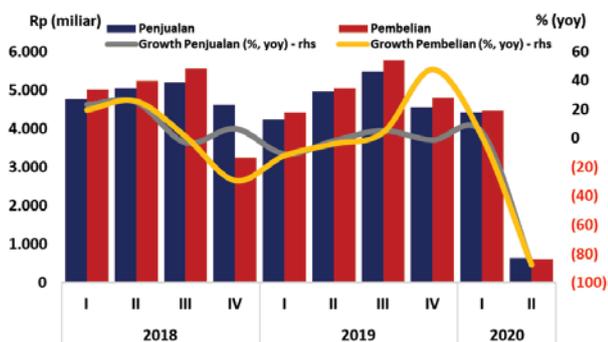
Grafik V.6. Perkembangan Cek dan Bilyet Giro di Bali

Sumber: Bank Indonesia



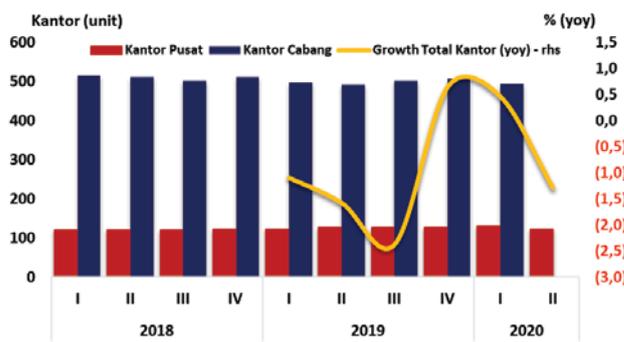
Grafik V.8. Perkembangan Kunjungan Wisman ke Provinsi Bali

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah



Grafik V.7. Perkembangan Transaksi Jual - Beli Valas di Provinsi Bali

Sumber: Bank Indonesia, diolah



Grafik V.9. Jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali

Sumber: Bank Indonesia, diolah

yang hanya berjumlah 248 kantor. Langkah ini diambil sehubungan dengan penurunan jumlah wisman pada triwulan berjalan akibat kebijakan Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia.

Dalam rangka membangun industri KUPVA BB yang sehat dan efisien, Bank Indonesia juga melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan untuk mencegah pemanfaatan KUPVA BB dalam pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya.

5.2.2. Perkembangan Inklusi Keuangan Provinsi Bali

Bank Indonesia memiliki parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat inklusifitas keuangan pada suatu daerah atau wilayah, yaitu Indeks Keuangan Inklusif

(IKI)²⁶. Pengukuran IKI dilakukan Bank Indonesia untuk mengkombinasikan berbagai indikator yang tersedia di sektor perbankan. IKI menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem keuangan inklusif meliputi: akses (*access*), penggunaan (*usage*) dan kualitas (*quality*) dari layanan perbankan.

Dimensi Akses²⁷

Beberapa indikator yang dipergunakan dalam mengukur dimensi akses untuk IKI meliputi:

1. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa²⁸
2. Jumlah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) per 100.000 penduduk dewasa
3. Jumlah kantor bank²⁹ per 1.000 km²
4. Jumlah ATM per 1.000 km²

26 IKI adalah salah satu alternatif cara dalam pengukuran keuangan inklusif yang menggunakan indeks multi-dimensional berdasarkan data makroekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan

27 Dimensi Akses adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank, seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan jasa keuangan (kantor bank, ATM, dan lain-lain)

28 Penduduk dewasa adalah semua penduduk di suatu negara atau provinsi atau kabupaten/kota yang berusia di atas 15 tahun.

29 Kantor Bank adalah sebagai seluruh jaringan/unit kantor bank umum dan BPR yang tercatat dapat memberikan layanan keuangan kepada nasabah secara fisik dengan kantor utamanya, antara lain meliputi: Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas, Unit Usaha Syariah, Kas Mobil, *Payment Point*, *Agency*, dan *Deposit Taking Company* (DTC).

Tabel V.3. Rasio Jumlah Kantor dan ATM per 100.000 Penduduk

Lokasi	Jumlah Layanan Bank	Jumlah ATM	Rasio Jumlah Kantor Layanan	Rasio Jumlah ATM
Provinsi Bali	971	3.022	29	89
Kota Denpasar	295	1.182	40	159
Kab. Badung	248	1.013	47	192
Kab. Bangli	25	31	14	18
Kab. Buleleng	79	141	15	27
Kab. Gianyar	117	316	29	79
Kab. Jembrana	37	69	17	32
Kab. Karangasem	44	79	14	24
Kab. Klungkung	30	47	22	34
Kab. Tabanan	96	144	28	42

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah.

Pada triwulan II 2020, rasio jumlah kantor layanan bank per 100.000 penduduk di Provinsi Bali mencapai 29. Sementara itu, rasio jumlah ATM per 100.000 penduduk di Provinsi Bali pada triwulan I 2020 sebesar 89³⁰. Bila dianalisis lebih lanjut secara spasial, Kabupaten Karangasem dan Bangli menjadi daerah dengan rasio jumlah kantor layanan terendah dengan pangsa jumlah penduduk dewasa masing-masing sebesar 9,6% dan 5,2%. Kabupaten Bangli juga menjadi daerah dengan rasio jumlah ATM terendah dengan pangsa jumlah penduduk dewasa sebesar 5,2%. Di sisi lain, Kabupaten Badung dengan jumlah penduduk dewasa dengan pangsa 15,6% memiliki rasio jumlah kantor layanan tertinggi dan rasio jumlah ATM tertinggi. Hal ini mengingat Kabupaten Badung merupakan salah satu pusat daerah pariwisata Bali.

Ditinjau dari cakupan luas wilayahnya, rasio jumlah ATM per 1000 km² di Provinsi Bali mencapai 536. Sementara rasio jumlah kantor layanan bank per 1000 km² tercatat sebesar 172. Kabupaten Jembrana dan Bangli masih tercatat sebagai wilayah dengan rasio jumlah kantor layanan per 1000 km² terendah. Kabupaten Bangli juga tercatat sebagai wilayah dengan rasio jumlah ATM per 1000 km² terendah pada triwulan laporan. Sementara itu, Kota Denpasar tercatat memiliki rasio jumlah kantor layanan dan ATM per 1000 km² tertinggi seiring dengan luas wilayah yang paling kecil (pangsa 2,3%) namun menjadi pusat pemerintahan dan pusat operasional perbankan di Bali.

Dimensi Penggunaan³¹

Beberapa indikator yang dipergunakan dalam mengukur

dimensi penggunaan meliputi:

1. Jumlah rekening dana pihak ketiga (deposito, giro, tabungan) per 1.000 penduduk dewasa.
2. Jumlah rekening kredit per 1.000 penduduk dewasa.

Berdasarkan data yang dihimpun pada triwulan II 2020, rasio jumlah rekening simpanan (giro, tabungan dan deposito) per 1.000 penduduk dewasa di Provinsi Bali sebesar 1.695, sedikit meningkat dibanding triwulan I 2020 (1.651). Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi jumlah rekening simpanan yang dimiliki penduduk dewasa di bank sepanjang triwulan II 2020 relatif stabil. Nilai rasio lebih dari 1.000 menandakan keberadaan penduduk dewasa yang memiliki lebih dari satu rekening simpanan³². Secara spasial, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan rasio jumlah rekening simpanan dengan peningkatan rasio terbesar terjadi di Kabupaten Denpasar, yaitu dari 8.417 pada triwulan I 2020 menjadi 8.639 pada triwulan II 2020.

Di sisi lain, rasio jumlah rekening kredit mengalami penurunan, dari 199 pada triwulan I 2020 menjadi 194 pada triwulan II 2020. Secara spasial, rasio jumlah rekening kredit di Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar mengalami penurunan, sedangkan rasio jumlah rekening kredit di Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah rekening kredit terbesar terjadi di Kota Klungkung dari 120 pada triwulan I 2020 menjadi 135 pada triwulan II 2020. Sedangkan penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Karangasem dari 333 pada triwulan I 2020 menjadi 293 pada triwulan II 2020 dan Kota Denpasar dari 867 di triwulan I 2020 menjadi 838 di triwulan II 2020.

30 Berarti terdapat 29 kantor layanan bank dan 89 jaringan ATM yang siap untuk melayani 100.000 penduduk dewasa di Bali.

31 Dimensi penggunaan adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, antara lain terkait keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan

32 Contohnya Provinsi Bali memiliki penduduk dewasa berjumlah 3,25 juta dengan jumlah rekening simpanan sebanyak 4,5 juta. Rasio jumlah simpanan=4,5juta / 3,25juta x 1000=1383

Tabel V.4. Rasio Jumlah Kantor dan ATM per 1000 km²

Lokasi	Jumlah Layanan Bank	Jumlah ATM	Rasio Jumlah Kantor Layanan	Rasio Jumlah ATM
Prov. Bali	971	3.022	172	536
Kota Denpasar	295	1.182	2309	9250
Kab. Badung	248	1.013	593	2420
Kab. Bangli	25	31	48	60
Kab. Buleleng	79	141	58	103
Kab. Gianyar	117	316	318	859
Kab. Jembrana	37	69	44	82
Kab. Karangasem	44	79	52	94
Kab. Klungkung	30	47	95	149
Kab. Tabanan	96	144	114	171

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah.

Tabel V.5. Indikator *Banking Penetration*

Lokasi	Rasio Jumlah Rekening Kredit		Rasio Jumlah Rekening Simpanan	
	TW I 2020	TW II 2020	TW I 2020	TW II 2020
Prov. Bali	199	194	1.651	1.695
Kab. Buleleng	93	92	861	905
Kab. Jembrana	85	84	428	438
Kab. Tabanan	330	325	1.624	1.665
Kab. Badung	107	103	1.305	1.306
Kab. Gianyar	124	121	743	759
Kab. Klungkung	120	135	633	695
Kab. Bangli	78	78	423	424
Kab. Karangasem	333	293	2.029	2.064
Kota Denpasar	867	838	8.417	8.639

Sumber: Bank Indonesia

5.2.3. Pengembangan Layanan Keuangan Nontunai dan Elektronifikasi

Hingga akhir Juni 2020, jumlah *merchant* QRIS di Provinsi Bali tercatat sebanyak lebih dari 100 ribu. Berbagai *merchant* QRIS tersebar di kalangan pedagang, tempat ibadah, kantin dan koperasi di lingkungan sekolah ataupun universitas hingga destinasi wisata.

Penggunaan QRIS juga telah diimplementasikan di Samsat Pembantu Ubud Bali. Pembayaran menggunakan QRIS kantor Samsat Pembantu Ubud Bali merupakan yang pertama di Indonesia. Sampai saat ini pemanfaatan QRIS setidaknya telah diimplementasikan di 27 Samsat dan 1 Samsat Keliling dan perkembangan transaksi Pajak Kendaraan Bermotor melalui QRIS tercatat meningkat signifikan. Selain itu, QRIS juga telah diimplementasikan di 2 pasar tradisional, 260 tempat ibadah, 13 lembaga sosial, 5 kantin sekolah, 3 koperasi universitas, 2 destinasi wisata, koperasi, serta berbagai aplikasi belanja.

Pembayaran menggunakan QR Code ini diharapkan akan terus mendorong efisiensi perekonomian, mempercepat

inklusi keuangan, serta memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam menyongsong penerapan Tatanan Kehidupan Bali Era Baru, berkolaborasi dengan Bank Indonesia Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, Bank Indonesia terus melakukan kampanye implementasi QRIS sebagai cara bertransaksi nirsentuh untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Rangkaian Kegiatan Penerapan Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali diadakan sejak tanggal 9 Juli 2020. Rangkaian Kegiatan dilakukan dengan kunjungan kepada seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Bali melalui berbagai acara ke Daerah Tujuan Wisata, rumah sakit, dan desa wisata seperti:

- Digitalisasi Desa Wisata Blimbing Sari berbasis QRIS.
- *Launching* Implementasi QRIS di Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Bali.
- Digitalisasi Wisata *Monkey Forest* Berbasis QRIS.
- Deklarasi Program Kepariwisata Dalam Tatanan Kehidupan Bali Era Baru - Digitalisasi Pariwisata Berbasis QRIS.
- Digitalisasi Sistem Pembayaran Berbasis QRIS BPD

Bali Pada Fasilitas Layanan Kesehatan, UMKM, Dan Kawasan Wisata di Kabupaten Karangasem Dan Klungkung.

- QRIS Gaya Transaksi Pramuka Di Tatanan Era Baru.
- *Launching* Kecak *New Normal* Dan Digitalisasi Sistem Pembayaran Berbasis QRIS.

QRIS sebagai instrumen pembayaran juga menjadi solusi untuk membangkitkan sektor pariwisata dalam tatanan kehidupan era baru yang mendukung penerapan protokol kesehatan CHSE (*Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability*) yang meminimalkan kontak fisik dalam bertransaksi. Hal ini sejalan dengan imbauan WHO (*World Health Organization*) untuk menggunakan *contactless payment* dalam melakukan transaksi. Selain mampu mencegah risiko penularan virus COVID-19, penggunaan QRIS diharapkan mampu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Halaman ini sengaja dikosongkan





BAB VI

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

- Menurunnya kinerja perekonomian Bali terindikasi akan berdampak pada kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat Bali. Kondisi ini terlihat dari indikator-indikator survei yang menunjukkan kondisi penurunan. Indeks realisasi penggunaan tenaga kerja hasil Survei SKDU menunjukkan penurunan pada triwulan II 2020. Indeks ketersediaan lapangan kerja (*job vacancy index*) saat ini juga menunjukkan optimisme yang menurun. *Likert scale* jumlah tenaga kerja hasil liaison juga menunjukkan penurunan jumlah tenaga kerja di Bali. Demikian pula Nilai Tukar Petani (NTP) juga menurun dari 96,67 di triwulan II 2020 menjadi 93,96 pada triwulan II 2020



KONDISI UMUM

Menurunnya kinerja perekonomian Bali terindikasi akan berdampak pada kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat Bali. Kondisi ini terlihat dari indikator-indikator survei yang menunjukkan kondisi penurunan. Indeks realisasi penggunaan tenaga kerja hasil survei SKDU menunjukkan penurunan pada triwulan II 2020. Indeks ketersediaan lapangan kerja (*job vacancy index*) saat ini juga menunjukkan optimisme yang menurun. Likert scale jumlah tenaga kerja hasil liaison juga menunjukkan penurunan jumlah tenaga kerja di Bali. Demikian pula Nilai Tukar Petani (NTP) juga menurun dari 96,67 di triwulan II 2020 menjadi 93,96 pada triwulan II 2020.

6.1. KETENAGAKERJAAN

6.1.1. Kondisi Ketenagakerjaan Di Bali

Pada Februari 2020, jumlah pengangguran di Provinsi Bali meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Jumlah pengangguran dari 30,3 ribu orang pada Februari 2019 menjadi 31,3 ribu orang pada Februari 2020. Peningkatan angka pengangguran disebabkan oleh peningkatan angkatan kerja yang belum mampu diimbangi oleh peningkatan kesempatan kerja. Penduduk usia kerja di Bali pada Februari 2020 tercatat sebesar 3,36 juta orang atau meningkat sebesar 1,50% (yoy), lebih tinggi dibanding dengan peningkatan pada bulan Februari 2019 yang sebesar 1,41% (yoy) atau sejumlah 3,31 juta orang. Sejalan dengan itu, jumlah angkatan kerja di Bali pada Februari 2020 tercatat sebesar 2,59 juta orang atau tumbuh 2,03% (yoy). Kondisi tersebut jauh meningkat dibandingkan dengan capaian pada Februari 2019 yang mengalami kontraksi sebesar 2,60% (yoy).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga sedikit meningkat pada Februari 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Perkembangan TPT di Bali pada periode yang sama tercatat menunjukkan peningkatan dari sebesar 1,19% pada Februari 2019 menjadi 1,21% (yoy) pada Februari 2020. Peningkatan TPT dapat tertahan oleh peningkatan serapan tenaga kerja di Lapangan Usaha (LU) utama lainnya, yaitu konstruksi, transportasi, akommodasi, jasa keuangan dan infokom (tabel VI.5). Peningkatan angka pengangguran ini juga terlihat dari penurunan kesempatan kerja sebagaimana tercermin pada tren penurunan *job vacancy index*. Dampak COVID-19 diperkirakan juga meningkatkan jumlah pengangguran. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pegawai terdampak COVID-19 terus meningkat. Terdapat pegawai yang dirumahkan (*unpaid leave*), diberhentikan (PHK), atau bahkan bangkrut/kehilangan usaha akibat pandemi COVID-19. Sampai dengan akhir Juli 2020, tercatat sebanyak 97 ribu karyawan yang

Tabel VI.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama

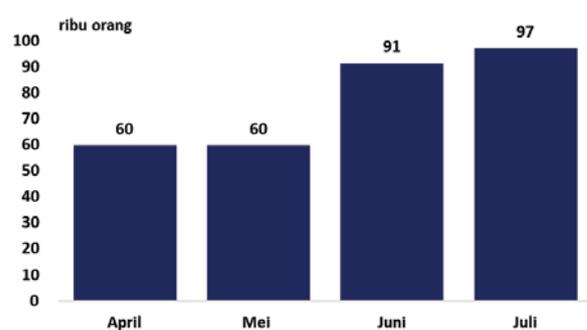
KEGIATAN UTAMA	2017		2018		2019		2020
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb
Penduduk Usia 15+ (Ribu Orang)	3.212	3.236	3.266	3.289	3.312	3.339	3.362
Angkatan Kerja (Ribu Orang)	2.469	2.434	2.607	2.525	2.540	2.466	2.591
Bekerja (Ribu Orang)	2.437	2.398	2.585	2.491	2.509	2.429	2.560
Pengangguran (Ribu Orang)	31,61	36,14	22,35	34,49	30,26	37,55	31,33
Bukan Angkatan Kerja (Ribu Orang)	743,10	801,11	658,77	763,55	772,39	872,54	770,67
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	76,87	75,24	79,83	76,78	76,68	73,87	77,08
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,28	1,48	0,86	1,37	1,19	1,52	1,21

Sumber: BPS Provinsi Bali



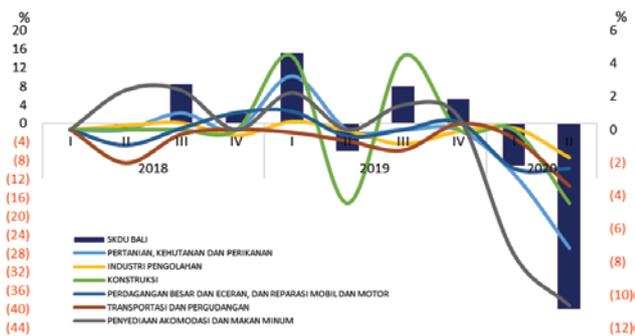
Grafik VI.1. Perkembangan *Job Vacancy Index*

Sumber: Bank Indonesia



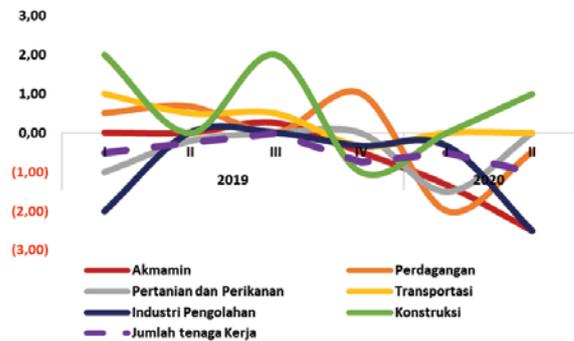
Grafik VI.2. Jumlah Pekerja Terdampak COVID-19

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, diolah



Grafik VI.3. Hasil SKDU Triwulan II 2020

Sumber: SKDU, Bank Indonesia



Grafik VI.4. Hasil Liaison Triwulan II 2020

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Tabel VI.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi Utama yang Ditamatkan

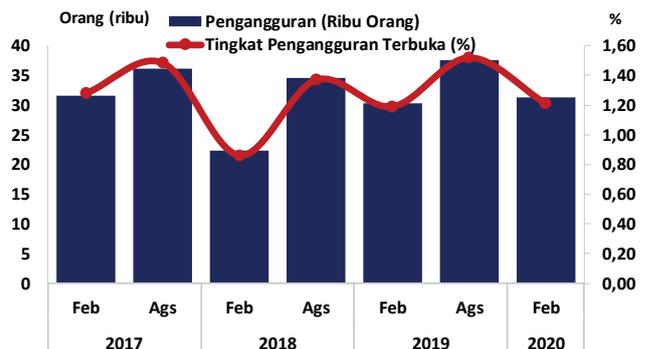
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2017		2018		2019		2020
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
SMP ke bawah (%)	1,06	0,77	0,37	0,52	0,56	0,54	0,37
SMA (%)	1,28	1,78	1,66	1,41	1,55	1,95	1,36
SMK (%)	1,06	2,69	1,19	3,14	2,01	2,89	2,42
Diploma I / II / III (%)	1,34	1,76	0,90	2,58	2,86	4,03	3,77
Universitas (%)	2,78	2,51	1,25	1,67	1,58	2,01	1,76
TOTAL	1,28	1,48	0,86	1,37	1,19	1,52	1,21

Sumber: BPS Provinsi Bali

terdampak, meningkat dari posisi April yang sebanyak 60 ribu karyawan.

Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan hasil liaison KPwBI Provinsi Bali periode triwulan II 2020 menunjukkan penurunan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hasil SKDU, penggunaan tenaga kerja oleh pelaku usaha di Bali secara umum menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan I 2020. Kondisi ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penggunaan tenaga kerja pada triwulan II 2020 yang tercatat -39,82%, menurun dibandingkan dengan triwulan I 2020 yang tercatat sebesar -9,01%. Kondisi ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai SBT penggunaan tenaga kerja di beberapa LU utama, antara lain akamin, pertanian, kehutanan & perikanan, konstruksi serta informasi & komunikasi. Hasil *liaison* juga mengkonfirmasi penurunan penyerapan jumlah tenaga kerja. *Likert Scale* penggunaan tenaga kerja menunjukkan kondisi penurunan pada LU Akamin dan LU Industri Pengolahan.

Berdasarkan jenjang pendidikannya, penduduk yang paling banyak menganggur adalah lulusan setingkat diploma, tercatat sebesar 3,77%. Kemudian disusul oleh penduduk dengan lulusan pendidikan setingkat SMK sebesar 2,42% dan penduduk dengan lulusan level pendidikan universitas sebesar 1,76%. Sementara TPT terendah terjadi pada penduduk yang berpendidikan



Grafik VI.5. Perkembangan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali

Sumber: Bank Indonesia, diolah

SMP ke bawah sebesar 0,37%. Gambaran kondisi TPT ini, menunjukkan sulitnya penduduk bagi lulusan level pendidikan tinggi untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi mereka. Kondisi ini juga menunjukkan keterkaitan (*linkage*) dan sinergi dunia pendidikan dengan dunia usaha (pihak yang akan menyerap lulusan perguruan tinggi tersebut) perlu untuk ditingkatkan. Berdasarkan pola historisnya, TPT di periode Februari relatif lebih rendah dibandingkan dengan periode Agustus setiap tahunnya. Kondisi tersebut terjadi karena pada periode Agustus terdapat periode kelulusan, sehingga banyak penduduk dengan jenjang pendidikan menengah dan tinggi yang baru lulus dan mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK)³³ Provinsi Bali pada Februari 2020 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. TPAK pada Februari 2020 tercatat sebesar 77,08% atau lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2019 yang sebesar 76,68%. Peningkatan ini bersumber dari pekerja dengan jenjang pendidikan lulusan SMA dan Diploma. Lulusan SMA tercatat mengalami peningkatan TPAK dari 3,38% pada Februari 2019 menjadi 12,73% pada Februari 2020. Sedangkan lulusan Diploma tercatat mengalami peningkatan dari -0,91% pada Februari 2019 menjadi 24,48% pada Februari 2020.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, mayoritas

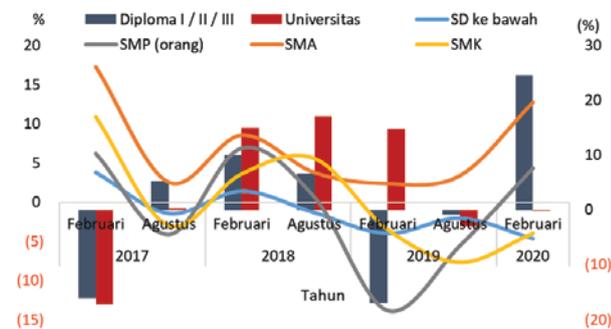
pekerja pada Februari 2020 merupakan pekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah. Pada Februari 2020 pekerja dengan pendidikan tersebut tercatat sebanyak 827 ribu orang (pangsa 32,3%). Pekerja dengan tingkat pendidikan SMA menempati urutan kedua terbanyak sejumlah 589 ribu orang dengan pangsa sebesar 23%. Sementara pekerja dengan tingkat pendidikan Diploma merupakan pekerja dengan jumlah yang paling kecil yakni 123 ribu orang dengan pangsa 4,8%.

LU Pertanian menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali, menggeser dominasi LU Perdagangan. Pada Februari 2020, LU Pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak, 19,60% dari

Tabel VI.3. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

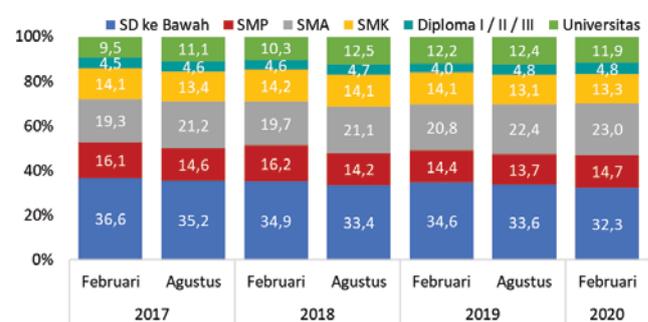
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2017		2018		2019		2020
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
SD ke bawah (orang)	890.927	844.455	903.376	833.132	867.499	816.134	827.309
SMP (orang)	392.097	350.330	419.033	352.504	361.098	332.986	376.730
SMA (orang)	469.762	507.370	509.748	526.395	521.608	544.163	587.987
SMK (orang)	344.514	320.617	367.301	350.877	354.471	317.437	339.423
Diploma I / II / III (orang)	108.491	110.239	119.259	117.516	99.133	116.444	123.404
Universitas (orang)	231.703	265.296	266.226	310.446	305.507	301.515	304.853
TOTAL	2.437.494	2.398.307	2.584.943	2.490.870	2.509.316	2.428.679	2.559.706

Sumber: BPS Provinsi Bali



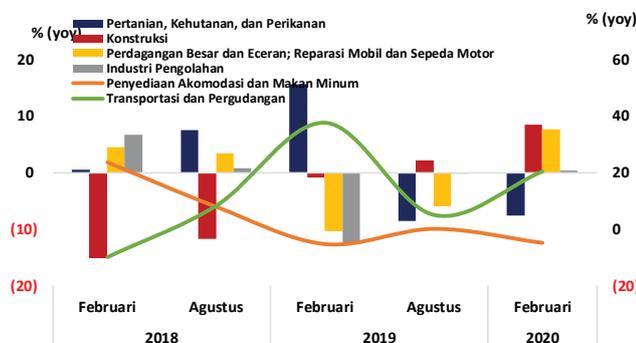
Grafik VI.6. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber: BPS Provinsi Bali



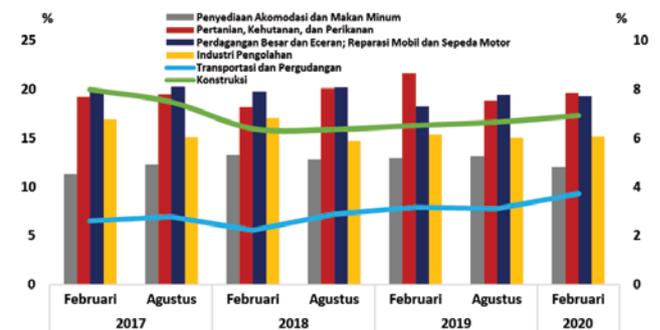
Grafik VI.7. Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber: BPS Provinsi Bali



Grafik VI.8. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Utama

Sumber: BPS Provinsi Bali



Grafik VI.9. Komposisi Tenaga Kerja Sektor Utama

Sumber: BPS Provinsi Bali

Tabel VI.4. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut LU (Ribu Orang)

Lapangan Usaha 17 Sektor	2017		2018		2019		2020
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	468	466	470	501	543	458	502
Pertambangan dan Penggalian	5	7	5	6	14	10	7
Industri Pengolahan	413	362	440	365	386	364	387
Pengadaan Listrik dan Gas	3	5	4	6	4	6	6
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2	6	4	6	5	12	5
Konstruksi	195	179	165	158	163	162	177
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	489	486	510	502	457	472	492
Transportasi dan Pergudangan	64	67	58	72	79	76	95
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	277	295	343	319	324	319	308
Informasi dan Komunikasi	8	10	15	8	11	12	6
Jasa Keuangan dan Asuransi	58	58	65	61	84	70	68
Real Estat	5	4	8	3	0	4	8
Jasa Perusahaan	43	55	42	58	54	57	69
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	128	117	144	138	120	124	120
Jasa Pendidikan	105	104	124	117	95	98	106
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	42	48	56	50	38	54	53
Jasa lainnya	134	129	133	122	131	132	149
Jumlah	2.437	2.398	2.585	2.491	2.509	2.429	2.559

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Tabel VI.5. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (Ribu Orang)

STATUS PEKERJAAN UTAMA	2017		2018		2019		2020
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
Berusaha Sendiri (ribu orang)	379	354	404	349	385	403	404
Berusaha Dibantu Buruh (ribu orang)	408	372	440	407	443	366	417
Pekerja Bebas (ribu orang)	159	168	147	187	136	170	139
Pekerja Tak Dibayar (ribu orang)	331	301	350	293	328	270	301
Pekerja Informal (ribu orang)	1.277	1.194	1.341	1.236	1.292	1.209	1.261
Berusaha Dibantu Buruh (ribu orang)	93	100	103	110	92	91	102
Buruh/karyawan (ribu orang)	1.067	1.104	1.140	1.145	1.125	1.128	1.197
Pekerja Formal (ribu orang)	1.160	1.204	1.244	1.255	1.217	1.219	1.298
TOTAL (ribu orang)	2.437	2.398	2.585	2.491	2.509	2.429	2.560

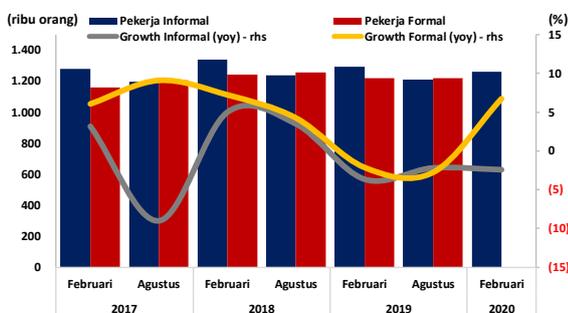
Sumber: BPS Provinsi Bali

total penduduk yang bekerja. LU Perdagangan menempati posisi kedua dalam penyerapan tenaga kerja, dengan pangsa 19,23%. Selanjutnya LU dengan pangsa terbesar ketiga adalah industri pengolahan, dengan jumlah tenaga kerja yang terserap dengan pangsa 15,13%.

Sejalan dengan tertahannya kinerja pariwisata di awal tahun 2020, penyerapan tenaga kerja pada LU yang

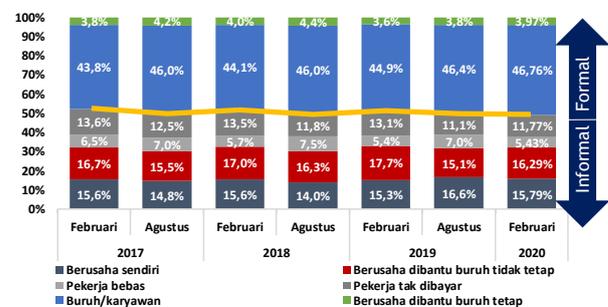
terkait dengan bidang usaha pariwisata mengalami penurunan dibandingkan dengan awal tahun 2019. LU Akmamin tercatat mengalami penurunan pangsa sebesar -0,88%. Penurunan penyerapan tenaga kerja juga terjadi pada LU pertanian sebesar -2,05.

Jenis pekerjaan yang dominan pada Februari 2020 adalah kelompok orang yang bekerja pada



Grafik VI.10. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Formal & Informal

Sumber: BPS Provinsi Bali



Grafik VI.11. Komposisi Tenaga Kerja Formal dan Informal

Sumber: BPS Provinsi Bali

kegiatan formal. Kondisi ini sedikit berbeda dibanding Februari 2019 di mana kelompok pekerja informal lebih mendominasi. Penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,26 juta jiwa atau 49,27% dari total penduduk yang bekerja. Jumlah tersebut turun sebesar 2,41% (yoy) dibandingkan dengan Februari 2019 yang tercatat sebanyak 1,29 juta orang. Sedangkan orang yang bekerja pada kegiatan formal tercatat sebesar 1,29 juta jiwa atau 50,7% dari total penduduk yang bekerja, atau mengalami peningkatan sebesar 6,70% (yoy) dibandingkan dengan Februari 2019 yang tercatat sebesar 1,22 juta orang. Cukup tingginya kelompok orang yang bekerja pada kegiatan informal pada Februari 2020 mengindikasikan bahwa sektor informal cukup memudahkan tenaga kerja di Bali dalam mencari pekerjaan, karena sektor informal pada umumnya tidak mewajibkan persyaratan secara ketat terkait dengan latar belakang pendidikan maupun jenis keterampilan tertentu.

6.2. KESEJAHTERAAN

6.2.1. Perkembangan Angka Kemiskinan Bali

Jumlah penduduk miskin di Bali pada Maret 2020 mengalami peningkatan dibandingkan periode September 2019. Persentase penduduk miskin Bali pada Maret 2020 tercatat sebesar 3,78%, atau sejumlah 165,19

ribu orang, meningkat dibandingkan dengan periode September 2019 yang sebesar 3,61% (156,91 ribu orang).

Jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat, namun menurun di perdesaan. Jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan tercatat sebesar 100,38 ribu orang (3,33%), meningkat dibandingkan dengan Maret 2019 yang sebesar 3,29%. Sementara itu, di wilayah perdesaan, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 64,82 ribu orang (4,78%), menurun dibandingkan dengan Maret 2019 yang sebesar 4,86%.

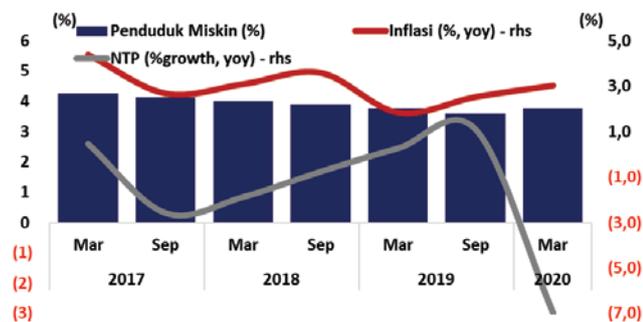
Peningkatan angka kemiskinan secara umum tertahan oleh pelaksanaan program bantuan sosial nontunai, berupa Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). Adanya penambahan cakupan wilayah yang lebih luas sehingga menambah kelompok penerima manfaat yang diikuti peningkatan nilai nominal pada tahun 2020, menjadi salah satu faktor penahan meningkatnya tingkat kemiskinan tersebut.

Hasil Survei Konsumen menunjukkan penurunan penghasilan masyarakat. Indeks pendapatan menunjukkan adanya penurunan penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu. Kondisi ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pada triwulan II 2020 yang tercatat sebesar 27,67, menurun dibandingkan dengan triwulan I 2020 yang tercatat sebesar 112,83.

Tabel VI.6. Perkembangan Indikator Kemiskinan Provinsi Bali 2017 – 2020

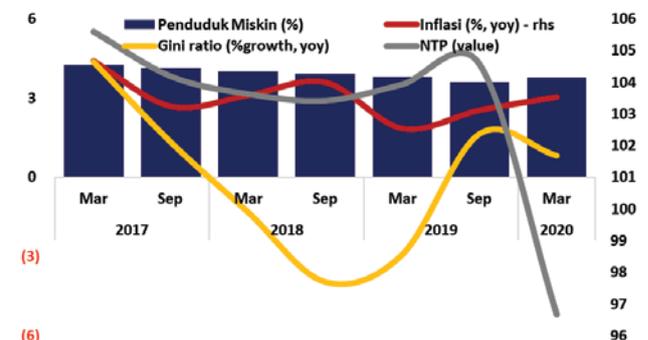
Keterangan	2017		2018		2019		2020
	Maret	September	Maret	September	Maret	September	Maret
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	180,13	176,48	171,76	168,34	163,85	156,91	165,19
Persentase Penduduk Miskin (%)	4,25	4,14	4,01	3,91	3,79	3,61	3,78
- Kota	3,58	3,46	3,32	3,36	3,29	3,04	3,33
- Desa	5,45	5,42	5,38	5,08	4,88	4,86	4,78
Garis Kemiskinan (Rp)	361.387	364.064	382.598	388.451	400.624	412.906	429.834
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,68	0,55	0,69	0,52	0,54	0,50	0,52
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,16	1,12	1,18	0,12	0,11	0,10	0,10

Sumber: BPS Provinsi Bali



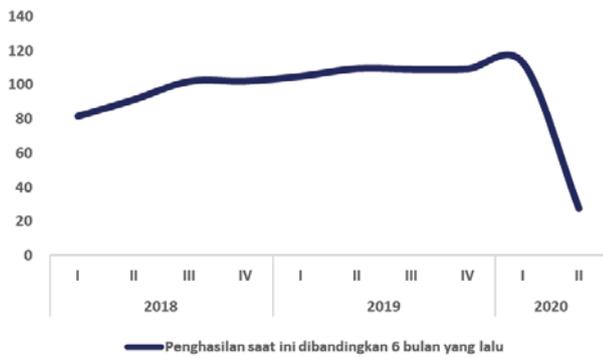
Grafik VI.12. Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Bali

Sumber: BPS Provinsi Bali



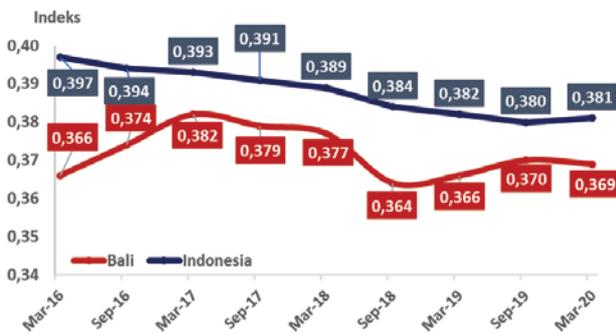
Grafik VI.13. Indikator dan Keterkaitan Kemiskinan di Provinsi Bali

Sumber: BPS Provinsi Bali



Grafik VI.14. Hasil Survei Konsumen
Triwulan II 2020

Sumber: SK, Bank Indonesia



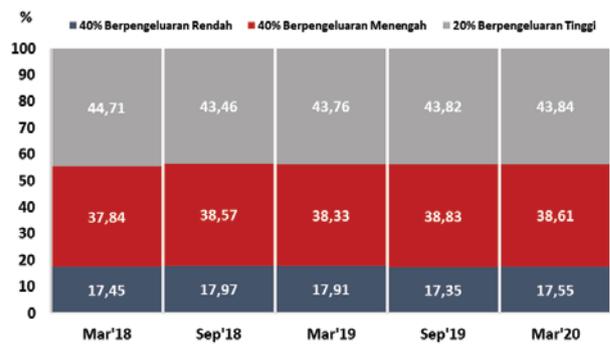
Grafik VI.15. Perkembangan Gini Ratio
Bali dan Nasional

Sumber: BPS

6.2.2. Kedalaman Dan Kearifan Kemiskinan³⁴

Berdasarkan data Maret 2020, indeks P1 Provinsi Bali tercatat sebesar 0,52, meningkat dibanding dengan September 2019 yang sebesar 0,50. Kondisi ini menjelaskan bahwa rata-rata total pengeluaran penduduk di Bali (miskin dan nonmiskin) masih berada 0,52% di bawah garis kemiskinan (Rp429.834 per kapita per bulan). Menurunnya kondisi ini, didukung oleh penurunan pendapatan masyarakat, tercermin antara lain oleh penurunan NTP dan turunnya daya beli masyarakat (inflasi yang sedikit meningkat). Sementara itu, indeks P2 pada Maret 2020 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode September 2019, yaitu 0,10. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Bali relatif tetap.

Bila dianalisis secara spasial, tingkat ketimpangan di kawasan perkotaan tercatat lebih rendah dibandingkan dengan perdesaan. Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) pada Maret 2020 di perkotaan tercatat



Grafik VI.16. Distribusi Pendapatan
Perkapita Penduduk

Sumber: BPS Provinsi Bali

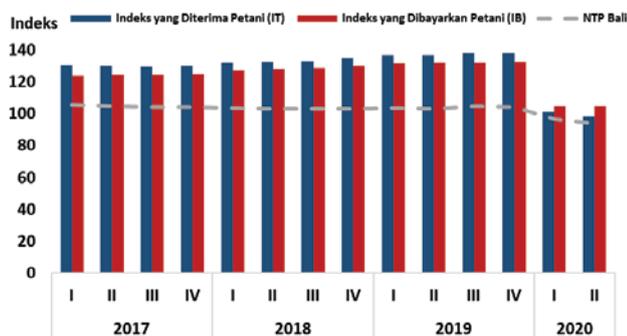
sebesar 0,094 lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Kearifan Kemiskinan di daerah perdesaan yang tercatat sebesar 0,123. Hal tersebut mengindikasikan bahwa di Bali rata-rata pengeluaran penduduk miskin di daerah perkotaan lebih dekat dengan garis kemiskinan dibanding di daerah perdesaan. Nilai P2 sebesar 0,10 menginformasikan bahwa besarnya deviasi total pengeluaran di antara penduduk miskin di Bali terus mengecil. Keadaan ini mengkonfirmasi bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah telah memberikan kontribusi yang nyata dalam penurunan angka kemiskinan.

6.2.3. Ketimpangan Pengeluaran Penduduk

Tingkat kesejahteraan suatu daerah tidak hanya mengacu pada angka kemiskinan, namun juga dari sisi tingkat ketimpangannya, yang tercermin oleh indikator rasio gini. Tingkat ketimpangan di Bali pada Maret 2020 menunjukkan penurunan. Tingkat rasio gini Provinsi Bali tercatat sebesar 0,369 pada Maret 2020, meningkat dibandingkan dengan periode Maret 2019 yang tercatat 0,366. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya kesenjangan ekonomi antar penduduk di Provinsi Bali. Berbagai upaya pemerintah (pusat dan daerah) yang komprehensif dan berkelanjutan serta terintegrasi dalam mengurangi kesenjangan/ketimpangan ekonomi ternyata belum sepenuhnya dapat mengurangi tingkat kesenjangan di Bali. Sementara itu, upaya pemerintah yang terus mendorong pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga belum sepenuhnya dapat memberikan kontribusi terhadap capaian penurunan tingkat ketimpangan.

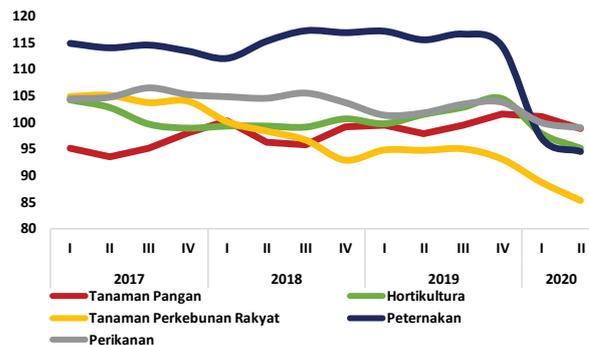
Peningkatan Rasio Gini Provinsi Bali pada September 2019,

34 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur kesenjangan kemiskinan, yaitu sejauh mana individu berada di bawah garis kemiskinan pada suatu daerah/wilayah (dihitung dari jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan). Sementara itu, Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) menggambarkan kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin satu dengan yang lainnya.



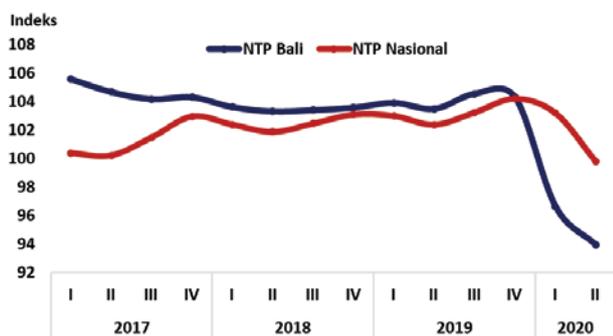
Grafik VI.17. NTP Bali, Indeks yang Diterima (IT), dan Indeks yang Dibayar (IB)

Sumber: BPS Provinsi Bali



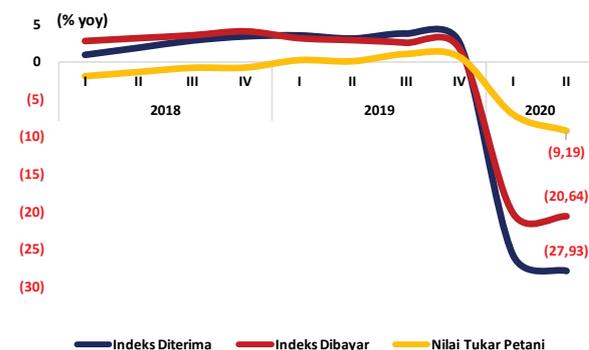
Grafik VI.19. Pertumbuhan NTP Bali

Sumber: BPS Provinsi Bali



Grafik VI.18. Perbandingan NTP Bali dan Nasional

Sumber: BPS Provinsi Bali



Grafik VI.20. Perbandingan IT dan IB Bali

Sumber: BPS Provinsi Bali

didorong oleh peningkatan pengeluaran kelompok 40% berpengeluaran menengah dan tinggi serta terjadinya penurunan pengeluaran kelompok 20% berpengeluaran rendah pada Maret 2020 dibandingkan dengan Maret 2019. Kondisi ini berdampak pada semakin meningkatnya jurang ketimpangan antara masyarakat yang memiliki pengeluaran tinggi dengan rendah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dan disiapkan langkah-langkah nyata untuk mengatasinya.

6.2.4. Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan

Tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah perdesaan, dapat terkonfirmasi oleh perkembangan indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Sejalan dengan mata pencaharian masyarakat perdesaan yang terkonsentrasi pada LU Pertanian. Perkembangan NTP Bali pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 93,96, menurun dibandingkan dengan triwulan I 2020 yang sebesar 96,67. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani menurun pada triwulan berjalan, sejalan dengan melambatnya LU pertanian di Bali³⁵. Indeks

NTP Provinsi Bali pada triwulan II tidak mencapai angka 100. Hal ini juga mengindikasikan bahwa dalam tingkatan tertentu nilai tukar produk yang dihasilkan petani belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga petani, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk biaya produksi pertaniannya.

Menurunnya pertumbuhan NTP Bali pada triwulan II 2020 terjadi pada seluruh subsektor, dengan penurunan terbesar pada subsektor tanaman perkebunan rakyat. Seluruh subsektor berada di bawah 100 yakni subsektor tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, subsektor peternakan maupun subsektor peternakan.

Pada kondisi penurunan NTP Bali ini, indeks yang diterima petani (IT) lebih kecil dibandingkan dengan indeks yang dibayar petani (IB) atau berada dalam kondisi defisit. Pada triwulan II 2020, indeks yang diterima petani sebesar 98,55 atau tumbuh -27,93% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh -25,81% (yoy). Sementara itu, indeks yang

35 Pertumbuhan ekonomi LU Pertanian pada triwulan II 2020 tercatat sebesar -2,26% (yoy), berkontraksi dibanding dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,05% (yoy).

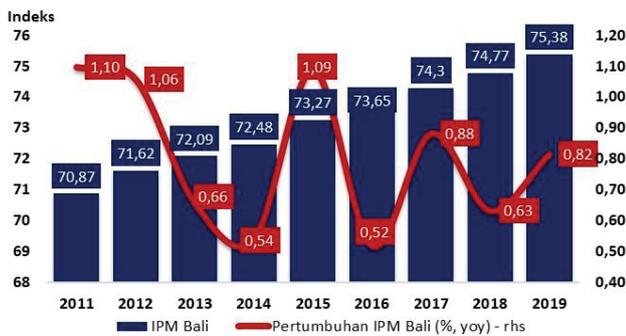
dibayar petani tercatat sebesar 104,88 atau tumbuh -20,64% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh -20,24% (yoy). Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan penerimaan petani yang lebih dalam dibandingkan dengan penurunan pengeluaran petani.

6.3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Perkembangan indikator pembangunan manusia di Bali semakin membaik, tercermin oleh peningkatan nilai IPM Bali pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu nilai IPM Bali yang berada di atas nasional dan tren yang meningkat juga menunjukkan membaiknya kondisi perkembangan kualitas pembangunan manusia di Bali. IPM Provinsi Bali pada tahun 2019 tercatat sebesar 75,38, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar 74,77, dan lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Nasional tahun 2019 yang sebesar 71,92. IPM Bali tersebut menempati urutan ke-5 di antara 34 provinsi di Indonesia.

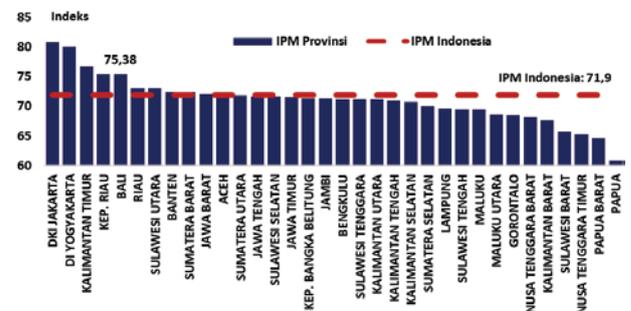
Peningkatan IPM Bali pada tahun 2019, dipengaruhi oleh peningkatan komponen pembentuk IPM yaitu Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah

(HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Per Kapita. Pada tahun 2019, UHH Provinsi Bali mencapai 71,99 tahun, artinya bayi yang lahir pada tahun 2019 memiliki peluang untuk hidup hingga 71,99 tahun. Nilai ini meningkat 0,31 tahun dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 71,68 tahun. Sementara itu, dimensi pengetahuan HLS dan RLS pada tahun 2019 masing-masing mencapai 13,27 tahun dan 8,84 tahun. Keadaan ini mengindikasikan bahwa anak-anak yang pada tahun 2019 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,27 tahun (Diploma I), lebih lama 0,04 tahun dibanding tahun 2018. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,84 tahun (kelas IX), lebih lama 0,19 tahun dibanding tahun sebelumnya. Kedua indikator ini terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Komponen pembentuk IPM lain yang mengalami peningkatan adalah Pengeluaran Per Kapita yang menggambarkan kelayakan standar hidup. Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Bali mencapai Rp14,15 juta per tahun atau meningkat Rp260 ribu dibandingkan dengan tahun 2018. Membaiknya kualitas pembangunan manusia di Bali tersebut juga didorong oleh berbagai program dari pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Wilayah Bali.



Grafik VI.21. Perkembangan IPM Provinsi Bali

Sumber: BPS Provinsi Bali



Grafik VI.22. Perbandingan IPM Bali dan Nasional

Sumber: BPS Provinsi Bali





BAB VII

PROSPEK PEREKONOMIAN

DAERAH

- Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan IV 2020 diperkirakan akan membaik dibanding triwulan III 2020. Dari sisi permintaan, membaiknya perekonomian terutama didorong oleh konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, dan investasi. Sementara pemulihan ekspor luar negeri masih terbatas seiring dengan masih belum dibukanya penerbangan internasional. Dari sisi penawaran, perbaikan ekonomi bersumber dari peningkatan kinerja lapangan usaha utama. Untuk keseluruhan tahun 2020 ekonomi Bali diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,63% (yoy).
- Inflasi Bali tahun 2020 diperkirakan akan melandai dibanding dengan 2019, dan berada dibawah sasaran inflasi nasional $3\% \pm 1\%$ (yoy).



KONDISI UMUM

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan IV 2020 diperkirakan akan membaik dibanding dengan triwulan III 2020. Dari sisi permintaan, membaiknya perekonomian terutama didorong oleh konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, dan investasi. Sementara pemulihan ekspor luar negeri masih terbatas seiring dengan masih belum dibukanya penerbangan internasional. Dari sisi penawaran, perbaikan ekonomi bersumber dari peningkatan kinerja lapangan usaha utama. Untuk keseluruhan tahun 2020 ekonomi Bali diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,63% (yoy).

Sejalan dengan perkiraan membaiknya perekonomian pada triwulan IV 2020, tekanan inflasi diperkirakan sedikit meningkat. Sementara itu, untuk keseluruhan tahun 2020 inflasi Bali diperkirakan akan melandai dibanding 2019, dan mendukung sasaran inflasi nasional $3\pm 1\%$ (yoy). Kecukupan pasokan komoditas pokok dan koordinasi serta langkah-langkah strategis yang dilakukan TPID berkontribusi terhadap terkendalinya risiko inflasi tahun 2020.

7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI BALI

7.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2020

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan IV 2020 diperkirakan akan membaik dibanding dengan triwulan III 2020 seiring dengan implementasi kebijakan tatanan era kehidupan baru. Dari sisi permintaan, membaiknya perekonomian terutama didorong oleh konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, dan investasi. Sementara pemulihan ekspor luar negeri masih terbatas seiring dengan masih belum dibukanya penerbangan internasional. Dari sisi penawaran, perbaikan ekonomi bersumber dari peningkatan kinerja lapangan usaha (LU) utama.

Sisi Permintaan

Konsumsi swasta mengalami perbaikan, sejalan dengan perkiraan pemulihan sektor pariwisata dan pelaksanaan PILKADA serentak. Pendapatan rumah tangga di Bali sangat tergantung pada sektor pariwisata mengingat angkatan kerja di Bali sebagian besar bekerja pada lapangan usaha perdagangan, konstruksi dan akmamin yang sangat erat kaitannya dengan sektor pariwisata. Sejalan dengan perkiraan perbaikan kondisi pariwisata pada triwulan IV 2020, optimisme konsumen terindikasi mengalami perbaikan. Hal ini sebagaimana tercermin pada peningkatan indeks ekspektasi konsumen hasil Survei Konsumen KPw BI Provinsi Bali (Grafik VII.3). Perbaikan konsumsi swasta juga didorong oleh peningkatan konsumsi LNPRT sejalan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (PILKADA) serentak pada 9 Desember 2020.

Ekspor Bali pada triwulan IV 2020 diperkirakan mengalami perbaikan, terutama didorong oleh ekspor barang. Membaiknya ekspor seiring dengan perkiraan pemulihan ekonomi negara tujuan ekspor utama Bali dan mulai dibukanya jalur distribusi barang ke negara tersebut. Disamping itu, berbagai stimulus ekspor³⁶ oleh pemerintah diperkirakan akan berdampak positif pada perkembangan ekspor barang. Namun demikian, ekspor jasa diperkirakan masih kontraksi, seiring dengan perkiraan masih berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk ke Wilayah RI. Berdasarkan *press release* Gubernur Provinsi Bali³⁷, Pemerintah Pusat dan Bali belum akan membuka pariwisata mancanegara sampai dengan akhir tahun 2020. Sejalan dengan itu, negara asal wisman utama juga masih belum mengizinkan warganya berwisata ke luar negeri. Australia yang merupakan negara asal wisman utama Bali berencana



Grafik VII.1. Indeks Ekspektasi Konsumen

Sumber : Survei Konsumen KPw BI Provinsi Bali
*) Juli 2020

36 Kebijakan nasional untuk menstimulus ekspor yaitu (i) penyederhanaan aturan terkait ekspor Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu, *Health certificate*, dan SKA (ii) Pembentukan *National Logistic Ecosystem* (iii) KMK No. 372/KMK.08/2020 dalam rangka stimulus ekspor melalui penugasan khusus kepada lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dalam rangka mendukung sektor usaha kecil dan menengah berorientasi ekspor
Tanggal 20 Agustus 2020

akan mengizinkan warganya untuk melakukan perjalanan luar negeri pada 2021.

Investasi diperkirakan mulai pulih, meski terbatas. Pemulihan investasi diperkirakan bersumber dari sisi pemerintah maupun swasta. Dari sisi pemerintah, sejumlah proyek yang sempat tertunda akan dilanjutkan kembali pada triwulan III 2020. Disamping itu, proyek baru³⁸ yang dimulai pada triwulan III 2020 juga diperkirakan akan berdampak positif terhadap kinerja investasi pada triwulan IV 2020. Dari sisi swasta, peningkatan investasi didorong oleh peningkatan optimisme³⁹ terhadap implementasi kebijakan Tatanan Kehidupan Era Baru.

Sisi Penawaran

Prakiraan membaiknya kinerja ekonomi Bali di triwulan IV 2020 diprediksi disumbangkan oleh perbaikan kinerja sektor utama. LU Akmamin diperkirakan membaik terutama bersumber pada peningkatan jumlah wisatawan domestik seiring dengan pembukaan penerbangan domestik dan liburan akhir tahun. Disamping itu, himbuan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan rapat dan FGD di Bali diperkirakan akan berkontribusi pada perbaikan LU ini. Pelaksanaan protokol kesehatan yang semakin baik dan terkendalinya penyebaran COVID-19 mendukung perbaikan kinerja LU Akmamin di triwulan IV 2020. Namun demikian, perbaikan masih tertahan oleh perkiraan masih belum dibukanya jalur penerbangan internasional sampai dengan Desember 2020.

Lapangan Usaha Pertanian diperkirakan masih dapat tumbuh positif, seiring dengan kondisi cuaca yang lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu dan membaiknya permintaan. Berdasarkan perkiraan BMKG, musim kemarau yang jatuh pada semester II 2020 lebih basah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Hal ini menguntungkan bagi peningkatan produksi tanaman bahan pangan, khususnya tanaman hortikultura. Disamping itu, membaiknya harga komoditas pertanian pada triwulan IV 2020 seiring dengan peningkatan permintaan juga berkontribusi positif bagi pertumbuhan sektor ini.

Lapangan usaha perdagangan membaik seiring dengan perkiraan normalisasi permintaan pada masa tatanan kehidupan era baru. Pada triwulan

IV 2020, permintaan masyarakat diperkirakan akan membaik seiring dengan perbaikan perekonomian secara keseluruhan. Operasionalisasi pusat perbelanjaan dan optimalisasi penjualan dengan *platform e-commerce* mendorong perbaikan lebih lanjut pada sektor ini. Pelaksanaan Pilkada serentak pada triwulan IV 2020 juga berkontribusi positif pada sektor ini.

Lapangan usaha konstruksi diperkirakan membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kondisi ini didorong oleh percepatan realisasi proyek pembangunan pemerintah yang sempat tertunda sebelumnya. Pembangunan proyek konstruksi swasta yang sempat tertahan juga diperkirakan akan mulai dilaksanakan kembali pada triwulan IV 2020.

7.1.2. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi 2020

Dengan mencermati perkembangan ekonomi, prompt indikator, hasil survei dan liaison terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada tahun 2020 diperkirakan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Penurunan kinerja ekonomi Bali terutama disebabkan oleh meluasnya pandemi COVID-19 hingga Pemerintah RI mengumumkan status kedaruratan pada 31 Maret 2020. Berbagai kebijakan penanganan COVID-19 baik secara global, nasional dan domestik berdampak terhadap kontraksi kinerja ekonomi Bali. Dari sisi permintaan kontraksi terutama disebabkan oleh pertumbuhan negatif ekspor luar negeri, investasi, dan konsumsi RT. Sementara itu dari sisi LU, kontraksi kinerja ekonomi Bali disebabkan oleh penurunan kinerja hampir seluruh lapangan usaha. Hanya lapangan usaha jasa kesehatan dan pertanian yang diperkirakan akan mencatat pertumbuhan positif.

Permintaan

Kinerja konsumsi RT diperkirakan menurun sebagai dampak penurunan kinerja sektor pariwisata. Penurunan kinerja sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pendapatan rumah tangga di Provinsi Bali yang mayoritas penduduknya bekerja pada LU terkait sektor pariwisata. Hasil survei⁴⁰ Kantor Perwakilan Bank Indonesia terhadap konsumen di Provinsi Bali menunjukkan mayoritas rumah tangga mengalami penurunan pendapatan (30-60%) akibat COVID-19. Sebagian besar responden (>70%) merespon

- 38 Pembangunan Pelabuhan Nusa Penida dan Nusa Lembongan : Peletakan batu pertama sudah dilakukan pada 3 Agustus 2020. Pembangunan kedua pelabuhan tersebut ditargetkan selesai Juni 2021. Total anggaran untuk pembangunan kedua pelabuhan tersebut mencapai Rp195,6 miliar³⁸ Tanggal 20 Agustus 2020
- 39 Hasil Survei KPw BI Provinsi Bali terhadap pelaku usaha
- 40 Survei dilakukan kepada rumah tangga di Provinsi Bali pada Juli 2020 dengan metode wawancara langsung. Teknik sampling yang digunakan adalah *stratified random sampling* dengan mempertimbangkan keterwakilan karakteristik demografi populasi.

penurunan pendapatan dengan mengurangi pengeluaran, khususnya barang tahan lama. Hal ini juga terkonfirmasi dari indeks keyakinan konsumen serta indeks pembelian barang tahan lama hasil Survei Konsumen KPw BI Provinsi Bali yang berada di bawah 100 semenjak April 2020. Kontraksi konsumsi RT yang lebih dalam tertahan oleh sejumlah bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah. Pada masa pandemi pemerintah memperluas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk pelaksanaan kegiatan bantuan sosial non tunai (Program Keluarga Harapan/ PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT), yang diikuti oleh peningkatan nilai nominal. Pemerintah Provinsi Bali melakukan realokasi anggaran senilai Rp261 miliar untuk Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat yang belum menerima bantuan Pemerintah. Disamping itu, pada 25 Agustus 2020 pemerintah mengeluarkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pegawai swasta berpenghasilan dibawah Rp 5 juta sebesar Rp 600 ribu/ bulan.

Kinerja konsumsi pemerintah pada tahun 2020 juga diperkirakan menurun dibanding tahun sebelumnya.

Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali yang terutama bersumber dari Pajak Hotel dan Restoran. Pagu PAD diperkirakan akan mengalami penurunan 40% pada tahun 2020. Disamping itu, reposturing Transfer Ke Daerah dan Dana Desa juga akan menyebabkan penurunan pagu pendapatan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kondisi ini diperkirakan menyebabkan penurunan pagu belanja anggaran, sehingga berdampak pada melambatnya pertumbuhan konsumsi pemerintah.

Kinerja ekspor luar negeri Bali yang didominasi oleh kinerja ekspor jasa, diperkirakan mengalami kontraksi. Pandemi COVID-19 menyebabkan sejumlah negara mengeluarkan kebijakan pembatasan mobilitas baik di dalam maupun luar negeri (*lockdown*), termasuk di

negara asal wisman utama Bali. Kondisi ini menyebabkan terpukulnya ekspor Provinsi Bali, khususnya ekspor jasa. Kunjungan wisman Bali diperkirakan akan berkontraksi -49% (skenario moderat) s/d -80% (skenario sangat berat). Hal ini sejalan dengan skenario kontraksi wisman global oleh *World Tourism Organization* (UNWTO) yang sebesar -60% s/d -80% pada tahun 2020. Sejalan dengan hal tersebut, ekspor komoditas juga diperkirakan akan mengalami kontraksi, seiring dengan perkiraan penurunan ekonomi global dan mitra dagang utama Provinsi Bali. Terganggunya jalur distribusi komoditas ekspor Bali akibat COVID-19 juga menjadi kontributor atas perkiraan kontraksi komoditas ekspor Provinsi Bali.

Kinerja Investasi pada tahun 2020 diperkirakan menurun.

Kondisi ini disebabkan oleh penundaan sejumlah proyek fisik yang diinisiasi oleh pemerintah seperti bendungan, proyek jalan, serta proyek infrastruktur lainnya. Kebijakan *refocusing/realokasi* anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 dan kebijakan penghematan anggaran menyebabkan tertundanya proyek fisik tersebut. Dari sisi swasta terjadi sejumlah penundaan proyek investasi bangunan, terutama di sektor pariwisata. Disamping itu, investasi nonbangunan juga cenderung melambat. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan optimisme investor pada masa pandemi COVID-19. Investor cenderung bersikap *“wait and see”*, menunggu kepastian berakhirnya pandemi.

Penawaran

Kinerja lapangan usaha akmamin dan transportasi pada tahun 2020 diperkirakan akan mengalami penurunan terdalam dibandingkan dengan LU lainnya.

Kondisi ini terjadi seiring dengan perkiraan terkontraksinya wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik di tahun 2020 akibat dampak COVID-19. Dampak terhadap industri sudah mulai terlihat

Tabel VII.1. Outlook Ekonomi Dunia dan Negara Mitra Dagang Utama Bali 2020-2021

Negara	Pertumbuhan Ekonomi		Proyeksi		Difference from April 2020 WEO Projection	
	2018	2019	2020	2021	2020	2021
United States	2.9	2.3	-8.0	4.5	-2.1	-0.2
Australia	2.8	1.8	-4.5	4.0	2.2	-2.1
China	6.7	6.1	1.0	8.2	-0.2	-1.0
Japan	0.3	0.7	-5.8	2.4	-0.6	-0.6
World Output	3.6	2.9	-4.9	5.4	-0.6	-0.6

Sumber : *World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF)*

Keterangan : *Dalam percent change, update per Juni 2020*

semenjak pertengahan April 2020, dimana sejumlah hotel dan restoran telah mengentikan sementara operasionalnya. Hasil survei persepsi bisnis kepada perusahaan yang bergerak di lapangan usaha makan dan minum mencerminkan bahwa mayoritas perusahaan berpersepsi bahwa kontraksi wisman akan terjadi dalam waktu 6 s/d 9 bulan, dan berangsur pulih mulai triwulan IV 2020.

Kinerja sektor konstruksi pada tahun 2020 juga diperkirakan akan mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan oleh penundaan pengerjaan proyek konstruksi dan infrastruktur pada tahun 2020 termasuk pembangunan bendungan, *shortcut* jalan, pengembangan kawasan pariwisata Bali Utara dan pengembangan Bandara Ngurah Rai. Seiring dengan itu, kondisi ini juga disebabkan oleh penurunan optimisme pelaku usaha. Kontraksi lebih dalam tetahan oleh masih berlanjutnya proyek pengembangan pelabuhan Benoa (PELINDO III).

Kinerja sektor pertanian diperkirakan masih dapat tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LU pertanian diperkirakan masih dapat tumbuh positif karena rendahnya dampak kebijakan pembatasan mobilitas/sosial terhadap sektor ini. Namun demikian, pertumbuhan sektor ini diperkirakan akan sedikit melambat disebabkan oleh kecenderungan penurunan harga komoditas pertanian ditengah melandainya permintaan.

7.1.3. Risiko Pertumbuhan Ekonomi

Ke depan, berbagai risiko pertumbuhan ekonomi tetap perlu menjadi perhatian. Isu kesehatan yang terjadi saat ini berisiko berkepanjangan dan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian global, nasional dan domestik. Jika pandemi COVID-19 tidak di tangani secara tepat, kegiatan ekonomi akan semakin berkontraksi. Di Provinsi Bali, berbagai tantangan penanganan COVID-19 dan pemulihan sektor pariwisata perlu mendapat perhatian.

Dengan adanya pandemi COVID-19, menjadi momentum untuk membenahi sektor pariwisata dan mendorong sumber pertumbuhan selain pariwisata.

Selain dengan memperkuat Pariwisata dengan sertifikasi CHSE, juga dapat dengan memperkuat potensi *quality tourism* berdasarkan konsep Tri Hita Karana, serta memperkuat manajemen krisis kepariwisataan. Sementara untuk *revival strategy* di jangka menengah-panjang, pemerintah daerah Bali dapat terus mendorong sektor pertanian sebagai alternatif sumber pertumbuhan

selain pariwisata. Pemerintah Daerah Bali sudah membuat Peraturan Gubernur No 99 tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, Industri Lokal. Peraturan ini sudah menjadi dasar yang baik untuk mendukung pengembangan sektor pertanian Bali. Namun kedepan, dengan adanya pandemi COVID-19 ini semakin memberikan pelajaran untuk urgensi pentingnya terus mendorong alternatif sumber pertumbuhan ekonomi Bali selain pariwisata yaitu LU Pertanian. Hal itu karena terbukti LU Pertanian menjadi sektor yang paling minim terdampak goncangan eksternal, serta menjadi penyerap tenaga kerja yang cukup besar.

7.2. PROSPEK INFLASI BALI

7.2.1. Perkiraan Inflasi Triwulan IV 2020

Inflasi Bali pada triwulan IV 2020 diperkirakan sedikit meningkat dibanding dengan prakiraan triwulan sebelumnya. Peningkatan tekanan inflasi terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, transportasi serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara itu, tekanan harga pada kelompok lainnya terkendali pada level yang rendah.

Pada triwulan IV 2020, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau diperkirakan meningkat.

Momentum perbaikan daya beli seiring dengan perkiraan membaiknya pariwisata diperkirakan akan meningkatkan permintaan kelompok ini. Implementasi kebijakan tatanan kehidupan era baru dan kembali beroperasinya sejumlah perusahaan di LU Akmamin dan Perdagangan mendorong peningkatan permintaan. Namun demikian, inflasi tertahan oleh ketersediaan pasokan yang cukup dan distribusi yang baik.

Peningkatan inflasi pada triwulan IV 2020 juga terjadi pada kelompok transportasi.

Seiring dengan langkah Kementerian Perhubungan untuk kembali membuka penerbangan komersial untuk rute domestik, permintaan terhadap transportasi udara meningkat. Liburan akhir tahun mendorong tingginya permintaan pada triwulan IV 2020, yang pada tahap selanjutnya akan berdampak pada peningkatan harga.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga turut memberikan tekanan inflasi pada triwulan IV 2020.

Tren peningkatan harga emas diperkirakan masih akan berlanjut pada triwulan IV 2020 seiring dengan ketidakpastian perekonomian global. Tekanan inflasi pada triwulan ini juga diperkirakan bersumber dari tingginya permintaan terhadap peralatan sanitasi.

7.2.2. Perkiraan Inflasi 2020

Secara keseluruhan, inflasi Bali tahun 2020 diperkirakan akan terkendali dan akan mendukung sasaran inflasi nasional. Penurunan tekanan inflasi pada tahun 2020 terjadi seiring dengan melandainya permintaan sebagai dampak menurunnya perekonomian Bali secara keseluruhan. Disamping itu, penurunan tekanan inflasi juga disebabkan oleh menurunnya harga angkutan udara sebagai dampak kebijakan pembatasan mobilitas/ pembatasan sosial dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Terjaganya inflasi pada tahun 2020 tidak lepas dari program, Tim Pengendalian Inflasi Daerah se-Provinsi Bali dalam kerangka 4K⁴¹ diantaranya:

- Peningkatan teknologi produksi pertanian dan optimalisasi program peningkatan produksi melalui pemberian subsidi pupuk organik dan anorganik, bantuan alsintan (olah tanah, tanam, panen), pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pemberian subsidi pajak oleh beberapa Kabupaten, Peraturan Daerah (PERDA) mengenai buah lokal, serta asuransi pertanian.
 - Program kerjasama antar kabupaten/kota yang mengalami surplus di Provinsi Bali untuk pemenuhan komoditas pangan strategis. Sejalan dengan itu, mendorong pemanfaatan Sub Terminal Agribisnis (STA) sebagai salah satu upaya distribusi komoditas pangan. Implementasi peraturan Gubernur Bali No. 99 tahun 2018 mengenai pemanfaatan dan pemasaran produk lokal, merupakan upaya untuk mendorong peningkatan produksi pertanian.
 - Upaya pengendalian inflasi daging ayam ras dan telur ayam: (a) pembinaan usaha agribisnis dan monev kelompok pengolah hasil ternak; (b) pembinaan dan lomba kelompok petani ternak; (c) pelatihan Pemuda Tani; dan (d) pengembangan agribisnis pedesaan.
 - Mendorong intensifikasi agar terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan hasil produksi.
 - Pengembangan model bisnis kerja sama perdagangan antar daerah dan fasilitasi kerja sama antar daerah, antara lain melalui optimalisasi peran swasta dan BUMD.
- Menjaga keseimbangan produksi dan serapan bahan pangan pada masa pandemi melalui pasar gotong royong dan mendorong semakin banyak petani tradisional terhubung kepada *marketplace*
 - Pengembangan dan pelaksanaan kerjasama antar daerah (KAD) antar Bali dengan daerah sumber pasokan khususnya di Wilayah Jawa, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BOKS 3

PROSPEK PARIWISATA BALI DI ERA TATANAN KEHIDUPAN BARU

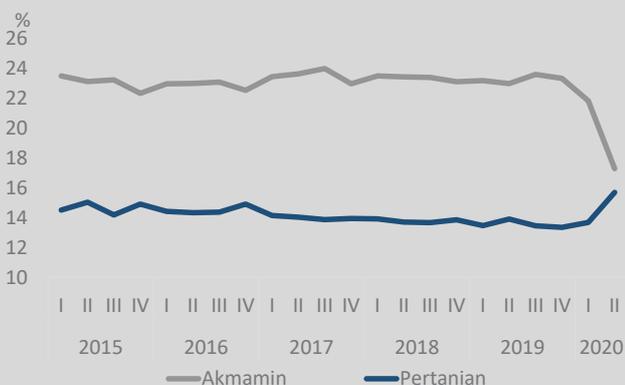


Pariwisata merupakan industri utama dari perekonomian Bali. Hal ini tercermin dari besarnya pangsa Lapangan Usaha terkait terhadap PDRB. *Share* Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tercatat menjadi LU utama dan menunjukkan *share* yang terus meningkat dalam 10 tahun terakhir, diikuti oleh sektor pertanian yang menjadi LU terbesar kedua. Lebih lanjut, jumlah wisatawan di Provinsi Bali juga terus meningkat, meskipun semakin banyak destinasi wisata baru di Indonesia.

Pada tahun 2019, komposisi wisatawan Bali didominasi oleh wisatawan nusantara, dengan pangsa sebesar 62,7%. Adapun pangsa pasar untuk wisatawan mancanegara adalah sebesar 37,%. Negara asal wisatawan mancanegara masih didominasi oleh Australia (19,9%), diikuti oleh Tiongkok (18,9), dan India (5,9%). Pada umumnya,

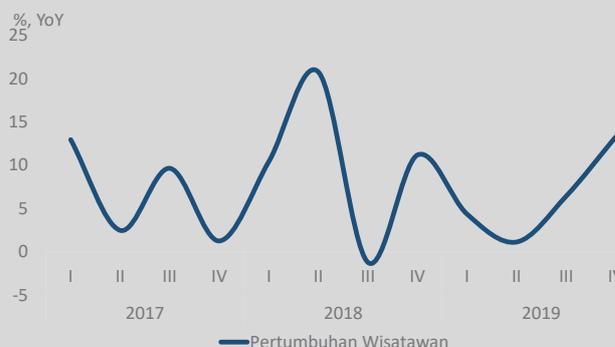
wisatawan yang berkunjung ke Bali masih terpusat di Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Tabanan, dengan *share* ketiga kabupaten tersebut sebesar 73,1%. Tingginya konsentrasi wisatawan pada ketiga wilayah tersebut secara tidak langsung mendorong percepatan kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya mendorong peningkatan pendapat per kapita di wilayah tersebut. Namun demikian, di sisi lain terdapat permasalahan *overcrowding* di *hotspot* turis yang menyebabkan kerusakan pada objek wisata alam, tingginya *conversion rate* lahan pertanian, serta semakin terbatasnya penduduk lokal setempat yang dapat memiliki tanah atau bangunan di daerah tersebut.

Memasuki tahun 2020, meskipun COVID-19 telah menyebar di Tiongkok, namun secara keseluruhan wisatawan mancanegara dan domestik yang mengunjungi



Grafik Boks III.1. Perkembangan Share LU Akamamin dan Pertanian

Sumber: BPS



Grafik Boks III.2. Perkembangan Jumlah Wisatawan Bali

Sumber: BPS

Gambar Boks III.1. Komposisi Wisatawan Bali



Sumber: BPS

Gambar Boks III.2. Perkembangan COVID-19 Negara Asal Wisatawan Asing



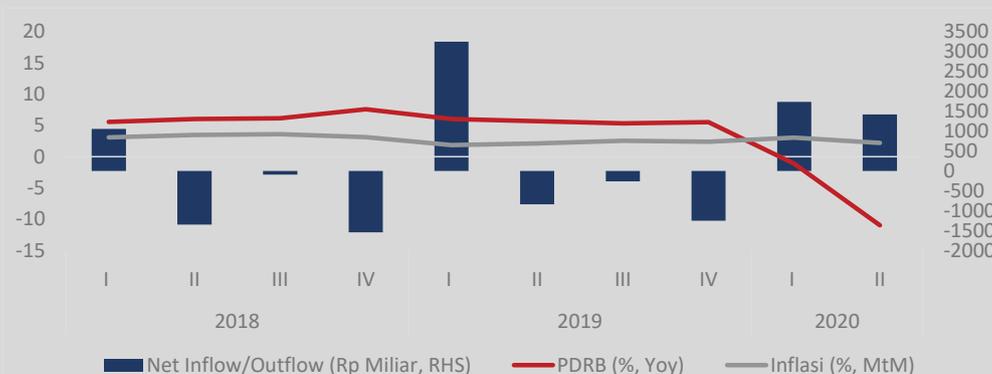
Sumber: Our World in Data

Bali masih berjalan dengan normal. Namun demikian, seiring dengan semakin tingginya penyebaran COVID-19 di Indonesia, penerbangan internasional menuju Bali ditutup. Selain itu, pembatasan pergerakan masyarakat antar wilayah juga dilakukan untuk mencegah penyebaran pandemi dari daerah *hotspot* ke daerah lain.

Terhentinya industri pariwisata Bali berdampak signifikan pada kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. Hal ini tercermin dari PDRB yang mengalami kontraksi dalam, tekanan harga bulanan yang tercatat deflasi, serta peredaran uang yang tercatat *net inflow*. Berdasarkan data tersebut, terlihat jelas pariwisata masih menjadi

tulang punggung perekonomian Bali. Walaupun pemerintah daerah terus mengupayakan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi, namun pariwisata tetap masih dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

Memasuki semester II 2020, dengan pengecualian India dan Amerika Serikat, penyebaran COVID-19 di negara asal utama wisatawan mancanegara mulai menunjukkan perlambatan. Namun demikian, *travel restriction* masih diberlakukan di negara asal utama, sehingga upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah masih belum memiliki dampak. Oleh karena itu, dalam jangka waktu *short-term* industri pariwisata bergantung



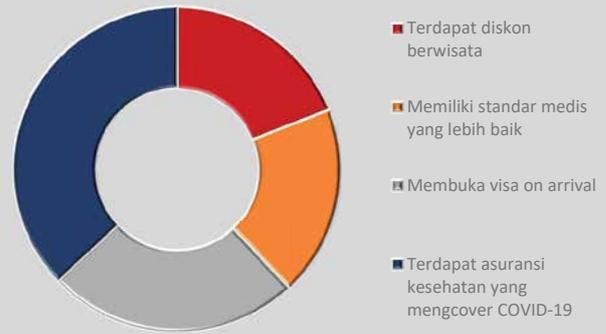
Grafik Boks III.3. Perkembangan Indikator Ekonomi Bali

Sumber: BPS



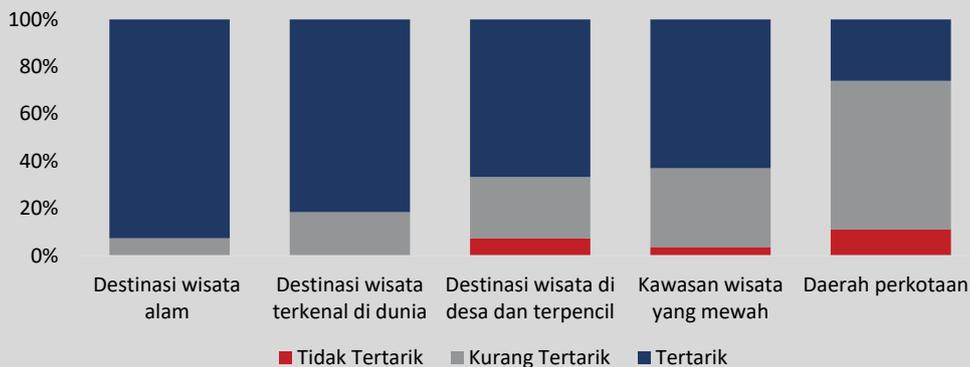
Grafik Boks III.4. Faktor Penentu Responden untuk Bepergian ke Luar Negeri

Sumber: Survey Willingness to Travel Bank Indonesia, diolah



Grafik Boks III.5. Faktor Penentu Responden untuk Bepergian ke Bali

Sumber: Survey Willingness to Travel Bank Indonesia, diolah



Grafik Boks III.6. Destinasi Wisata Utama

Sumber: Google Trends, diolah

kepada wisatawan nusantara. Hal ini juga terjadi pada wilayah di negara lain di mana pariwisata memiliki *share* ekonomi yang signifikan, seperti Thailand dan Filipina.

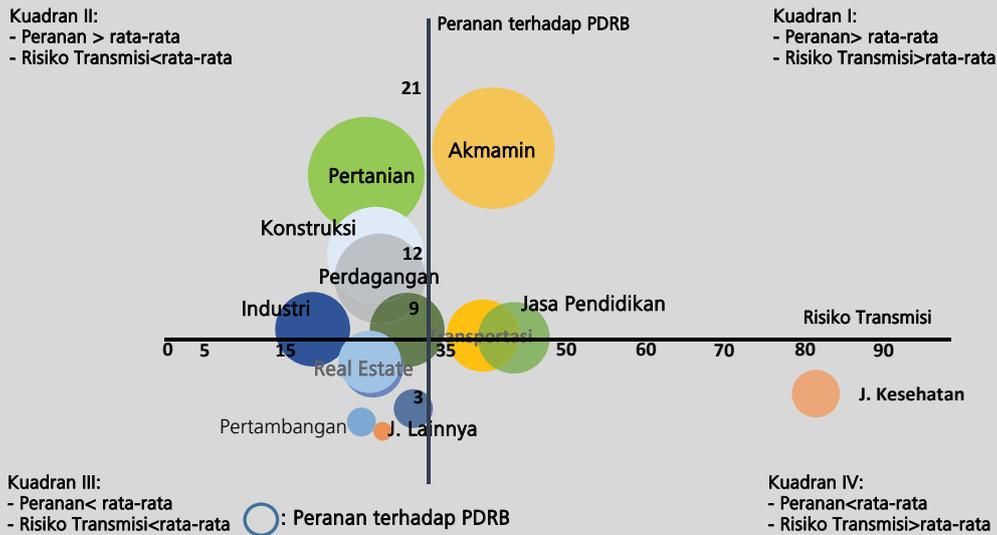
Di balik berbagai dampak negatif kepada perekonomian masyarakat, penutupan sementara industri pariwisata Bali juga memiliki dampak positif. Pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk melakukan revitalisasi objek wisata yang selama ini mengalami kerusakan akibat *overtourism*. Selain itu, Pemda bekerja sama dengan instansi terkait juga dapat melakukan percepatan digitalisasi pada bidang pertanian untuk mengefisienkan rantai tataniaga komoditas pangan. Periode ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menata ulang *roadmap* pariwisata Bali pasca COVID-19.

Business as usual Industri pariwisata pasca COVID-19 akan berbeda dengan *business as usual* pada masa sebelumnya. Wisatawan akan memiliki *concern* yang lebih tinggi terhadap aspek kesehatan, baik dari sisi ketersediaan maupun pembiayaan jika harus mendapatkan pertolongan medis. Berdasarkan survey *willingness to travel* yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, mayoritas responden mancanegara akan mulai kembali bepergian ke Indonesia jika Indonesia

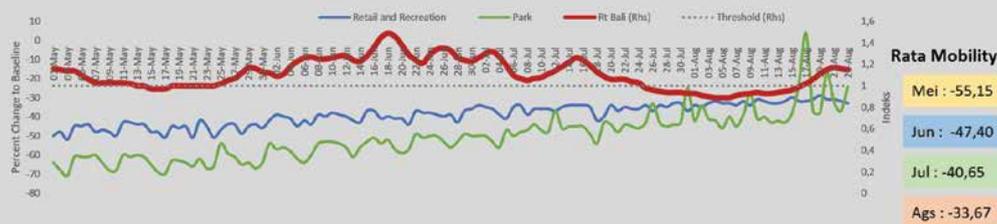
sudah dinyatakan bebas COVID-19, diikuti dengan preferensi WHO menyatakan dunia bebas COVID-19 dan telah ditemukannya vaksin COVID-19. Lebih lanjut, 19% responden survey baru akan kembali berkunjung ke Indonesia atau Bali setelah terdapat peningkatan pada standar medis. Di sisi lain, sebanyak 37% responden menyatakan bahwa ketersediaan asuransi kesehatan yang meng-cover COVID-19 menjadi faktor utama untuk bepergian ke Indonesia atau Bali.

Terkait hal ini, pemerintah daerah telah melakukan pembukaan pariwisata Bali dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dari warga Bali, dilanjutkan dengan wisatawan nusantara pada tanggal 31 Juli 2020 dan pada tahap akhir untuk wisatawan mancanegara. Dalam rangka pembukaan pariwisata Bali, pemerintah daerah telah menyusun protokol tatanan kehidupan era baru serta melakukan sertifikasi pelaku usaha pariwisata. Bank Indonesia Bali juga mendorong transaksi nontunai sebagai bagian dari protokol tatanan kehidupan era baru di Bali. Pemerintah juga sudah mengeluarkan sertifikasi CHSE untuk usaha pariwisata guna mencegah penyebaran COVID-19. Dengan telah dilakukannya berbagai upaya

Gambar Boks III.3. Pemetaan Perekonomian Bali



Sumber: WEO, Visualcapitalist, bps (diolah)



Grafik Boks III.8. Perkembangan Aktivitas Ekonomi dan Tingkat Penyebaran COVID-19 di Provinsi Bali

Sumber : Google Mobility Report & Bonza

untuk mencegah penyebaran pandemi, khususnya di daerah padat turis, kekhawatiran wisatawan terhadap aspek kesehatan telah diantisipasi.

Terkendalnya tingkat penyebaran COVID-19 mendukung upaya pemulihan Pariwisata Bali. Hasil pemantauan terhadap *big data* menunjukkan pembukaan ekonomi di Bali disertai oleh terkendalnya angka penyebaran COVID-19 (grafik boks III.8). Semenjak dibukanya kegiatan ekonomi, mobilitas masyarakat Bali meningkat sebagaimana terlihat pada indeks mobilitas¹ yang mulai mendekati *baseline* (tingkat mobilitas pra COVID-19). Disisi lain, angka replikasi COVID-19 (Rt) menunjukkan kestabilan. Terkendalnya tingkat penyebaran COVID-19 perlu terus dijaga pada level yang rendah untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi.

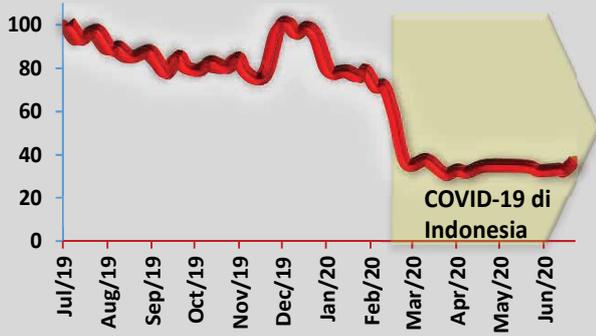
Berdasarkan analisis Google Trend, pencarian “*travel Bali*” secara *worldwide* sempat menurun sejak pandemi COVID-19. Namun demikian, memasuki masa *new normal*, *trend* pencarian “*travel Bali*” mulai meningkat di beberapa negara. Lebih lanjut, Bali memiliki *trend* pencarian

tertinggi dibandingkan dengan destinasi lain di Asia dan domestik. Adapun destinasi wisata yang paling diminati wisatawan mancanegara berdasarkan *survey willingness to travel* masih berupa destinasi wisata alam masih menjadi destinasi favorit dan diikuti dengan destinasi yang saat ini sedang *viral*.

Merespon minat wisatawan tersebut, selama penutupan obyek wisata di Bali, pemerintah daerah melakukan revitalisasi berbagai obyek wisata alam di Bali, baik alam maupun buatan. Selain itu, pemerintah daerah juga telah bekerja sama dengan *influencer* mancanegara untuk mempromosikan destinasi baru di Bali, terutama di daerah selain Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi *overtourism* di ketiga wilayah tersebut dan juga sebagai upaya pemerataan pariwisata di seluruh wilayah Bali.

Berdasarkan langkah-langkah dan strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah, Bali memiliki prospek yang sangat baik pasca pandemi COVID-19. Minat wisatawan untuk mengunjungi Bali masih tinggi, dan dengan tujuan

1 Google Mobility Report.



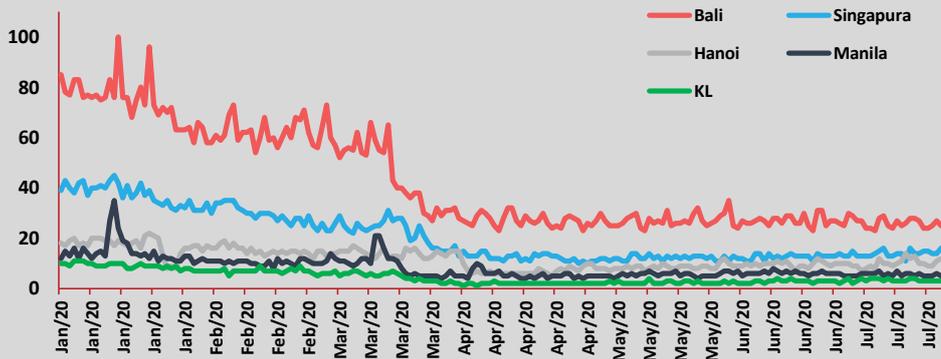
Grafik Boks III.9. Google Trend Pencarian Keyword "Travel Bali"

Sumber: Google Trends, diolah



Grafik Boks III.10. Web Search Trend for Travel in Bali Berdasarkan Negara

Sumber: Google Trends, diolah



Grafik Boks III.11. Perbandingan Bali dan Destinasi lain di Asia

Sumber: Google Trends, diolah

destinasi yang memang merupakan keunggulan Bali. Pemerintah telah meng-*address* kekhawatiran wisatawan terhadap aspek kesehatan melalui sertifikasi CHSE, serta melakukan peremajaan dan promosi lokasi pariwisata. Selain itu, adanya *restart* industri pariwisata di Bali juga dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk *shifting* paradigma pariwisata, dari *quantity based* menjadi *quality based*. Selain memiliki dampak yang lebih positif kepada lingkungan, *quality based tourism* juga akan lebih memberikan efek positif bagi masyarakat dan menghadirkan wisatawan yang memiliki *awareness* serta tanggung jawab yang lebih tinggi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISTILAH

<i>Administered Price (AP)</i>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
<i>Cash Inflows</i>	Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.
<i>Cash Outflows</i>	Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.
Ekspor	Keseluruhan barang dan atau jasa yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.
Faktor Fundamental	Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-penawaran atau <i>output gap</i> , eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat.
Faktor Nonfundamental	Faktor nonfundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (<i>volatile foods</i>), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (<i>administered price</i>).
<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank konvensional.
Impor	Seluruh barang dan atau jasa yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Imported inflation

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari pengaruh perkembangan harga di luar negeri (eksternal).

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.

Indeks Kondisi Ekonomi (IKE)

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.

Inflasi

Ukuran kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli.

Inflasi IHK

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (*persistent*).

Inflasi Inti

Kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Investasi

Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental (merupakan Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen *administered prices* dan *volatile food*).

Kliring

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.

Kualitas Kredit

Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarpeserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Liaison

Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur, dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

Ratio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang disalurkan dengan dana pihak ke tiga yang dihimpun pada suatu waktu tertentu.

mtm (<i>month to month</i>) Net Cashflows	Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya. Selisih bersih antara jumlah <i>cash inflows</i> dan <i>cash outflows</i> pada periode yang sama yang terdiri dari: <i>net cash outflows</i> bila <i>cash outflows</i> lebih tinggi dibandingkan dengan <i>cash inflows</i> , dan <i>net inflows</i> bila terjadi sebaliknya.
Non Performing Loan (NPL)	Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu. 1. PDRB atas dasar harga berlaku Penjumlahan nilai tambah bruto yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian 2. PDRB atas dasar harga konstan Perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Perusahaan	Suatu unit usaha yang diselenggarakan/dikelola secara komersil yang menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya terletak pada suatu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja, dan sebagainya yang digunakan dalam proses produksi.
qtq (<i>quarter to quarter</i>)	Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Saldo Bersih	Selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun" dan mengabaikan jawaban "sama".
Saldo Bersih Tertimbang (SBT)	Nilai yang diperoleh dari hasil perkalian saldo bersih sektor/subsektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/subsektor yang bersangkutan sebagai penimbangannya.
Sektor Ekonomi Dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Sistem Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (BI RTGS)	Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (<i>real time</i>) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerima pembayaran.

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)	Survei triwulanan yang bertujuan untuk mendapatkan indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran secara triwulanan.
Survei Konsumen (SK)	Survei bulanan yang bertujuan untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian pada 6 bulan mendatang.
<i>Volatile food</i>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
<i>yoy (year on year)</i>	Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.
Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan daerah untuk memenuhi pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kontraksi	Pertumbuhan yang negatif.
Akselerasi	Pertumbuhan yang lebih tinggi pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
Melambat	Pertumbuhan yang lebih rendah pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
Kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Trisno Nugroho

Koordinator Penyusun

Rizki Ernadi Wimanda

Editor

M. Setyawan Santoso

Rahmad Hadi Nugroho

Tim Penulis

Christina Irawadi

Riyan Hidayat

Teresa Maria Gabriella Hutabarat

Dea Woro Rinujit

Hastomo Ardy

Kontributor

Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi

Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans

Produksi dan Distribusi

Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi

Jl. Letda Tantular No. 4

Denpasar – Bali, 80234

Tel. (0361) 248982

Fax. (0361) 222988